



BUNGA RAMPAI
**DEDIKASI
PEREMPUAN
UNTUK NEGERI**

Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., M.A., dkk



BUNGA RAMPAI
**DEDIKASI
PEREMPUAN
UNTUK NEGERI**

EDITOR
Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag.

**BUNGA RAMPAI
DEDIKASI PEREMPUAN UNTUK NEGERI**

Penulis : Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., M.A., dkk

Copyright © Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., M.A., dkk 2023
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

x + 416 halaman, 14 x 21 cm
Cetakan Pertama, September 2023

Diterbitkan oleh :

pustaka compass

Yayasan Compass Indonesiatama

Anggota IKAPI

Jl. Kemital E/125 Komp. Ciputat Baru

Sawah Lama Ciputat Tangerang

Telp/ Faks. 021-744 4590

HP. 0813 8447 8968

<https://jaringansantri.com/pustakacompass/>



pustakacompass



@pustakacompass

Tim Penulis :

Amany Lubis, Romlah Abubakar Askar, Nurhayati Djamas,

Sri Mulyati, Ulla Nuchrawaty, Zaitunah Subhan,

Sri Harti, Euis Amalia, Femmy Nurul Akbar, Ida Rosyidah,

Aida Vitayala Sjafri Hubeis, Kustini, Irid Rachman Agoes,

Wahidah R. Bulan, Syifa Fauzia, Nursanita, Retno Lestari,

Hanip Pujiati, R. Yani'ah Wardani, Marlinda Irwanti,

Valina Singka Subekti, Rosdalina Bukido, Helvy Tiana Rosa

Editor : Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag.

Desain Cover & Isi: Aly Hayun

ISBN : 978-623-7473-31-2



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga buku ini dapat tersaji di hadapan para pembaca. Teriring pula, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menerangi jalan hidup hamba Allah dengan *risâlat al-Islâm*-nya.

Dengan berbagai keterbatasan akhirnya buku yang berjudul **“Bunga Rampai Dedikasi Perempuan untuk Negeri”** dapat diselesaikan pada waktunya. Buku ini merupakan kolaborasi para cendekiawan Muslimah Indonesia yang tergabung dalam wadah MAI (*Majelis Alimat Indonesia*), berisi pemikiran perempuan dari berbagai perspektif dan bidang keahlian meliputi agama, budaya, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pendekatan yang dilakukan adalah mengintegrasikan pemikiran berdasarkan keilmuan dengan keislaman dan konteks ke-Indonesiaan. Tulisan ini menjadi sangat menarik karena bukan saja karya ilmiah yang ditulis seluruhnya oleh para cendekiawan perempuan tetapi berisi gagasan yang luar biasa dan sangat kontributif bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan utamanya untuk terus melibatkan peran, partisipasi, dan akses dari kelompok perempuan di berbagai bidang dan program. Pembangunan bangsa ini harus melibatkan semua unsur

termasuk perempuan sehingga program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Terselesaikannya buku ini merupakan kontribusi positif-konstruktif dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak terutama dewan kehormatan, badan pembina, badan pengawas, badan pengurus harian MAI beserta semua anggota MAI. Semoga MAI terus maju, berjaya, dan senantiasa berkontribusi bagi negeri. Kepada mereka semua, kami atas nama Ketua MAI mengucapkan *jazakumullah ahsan al-jazâ'* dan semoga segala kontribusi mereka, sekecil apapun, dicatat menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT. Kami berharap, semoga karya ini mampu menghadirkan ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak. Segala saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Untuk hal tersebut kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 September 2023

ttd

Ketua Umum MAI

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., M.A. v

DAFTAR ISI ix

BAB I

SOSOK PEREMPUAN TANGGUH 1

**1. MENJADI WANITA YANG BERMARTABAT
DAN TANGGUH DI SETIAP WAKTU**

Dr. Romlah Abubakar Askar, M.A. 3

**2. PEREMPUAN, PENDIDIKAN ANAK,
SERTA TANTANGAN KE DEPAN.**

Prof. Dr. Nurhayati Djamal, MA, M.Si. 17

3. ISLAM DAN SPIRITUALISME PEREMPUAN

Prof. Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A. 40

**4. PEREMPUAN SEBAGAI PILAR PERADABAN:
ANTARA DINAMIKA DAN PERJUANGAN**

Hj. Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M. 49

**5. PERAN PEREMPUAN MODERN DALAM
MENCIPTAKAN PERDAMAIAN: PERSPEKTIF
AGAMA DAN KESETARAAN GENDER**

Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., M.A. 57

BAB II

PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

73

1. Mencari Solusi Terbaik

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF: TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

Prof. Zaitunah Subhan 75

2. Tinjauan Peranan Organisasi Wanita Islam dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Hj. Sri Harti, S.Ag., M.M. 87

3. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Pembiayaan Kelompok secara Syariah untuk Kesejahteraan

Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag. 104

4. Peran Perempuan dalam Pendidikan dan Kesehatan pada Masa Pandemi COVID-19

dr. Femmy Nurul Akbar, Sp.PD-KGEH 143

5. Perempuan dan Gerakan Cinta Lingkungan: Upaya Menjaga Lingkungan melalui Pendekatan Kultural di Kepulauan Seribu

Dr. Ida Rosyidah, M.A. 161

6. Perilaku Menyimpang Seksual: Perspektif Gender

Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis 189

7. Cahaya dari Perbatasan Timur Indonesia: Peran Penyuluh Agama Perempuan di Jayapura

Prof. Dr. Kustini, M. Si. 206

BAB III

PEREMPUAN DAN BUDAYA 225

1. **PERDAMAIAAN DAN KAJIAN ANTAR BUDAYA**
Irid Rachman Agoes, Ph.D. 227
2. **GENERASI Z INDONESIA DAN PROBLEM MULTIKULTURALISME**
Dr. Wahidah R. Bulan, M.Si. 239
3. **PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM PENINGKATAN KUALITAS UMAT**
Dr. Syifa Fauzia 254
4. **EFEKTIFITAS BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)**
Dr. Nursanita, SE.,Ak., M.E., CSRA 261
5. **BIODIVERSITAS DALAM EKOSISTEM KEBANGSAAN DAN BUDAYA INDONESIA**
Dr. Retno Lestari, M.Si. 276
6. **PENGUATAN LITERASI DIGITAL WANITA LANSIA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM KEGIATAN DAKWAH, SOSIAL DAN SENI**
Dr. Hanip Pujiati, S.Pd. 292
7. **PEREMPUAN DALAM LINTASAN SEJARAH SASTRA ARAB**
Dr. R. Yani'ah Wardani, M.A. 309

BAB IV

PEREMPUAN DAN POLITIK 335

1. **KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK: STUDI KASUS PEMERINTAHAN RATU-RATU ACEH ABAD KE-17**
Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. 337

2. KONSTITUSI UUD NEGARA RI TAHUN 1945 DAN PARTAI POLITIK	
<i>Prof. Dr. Dra. Valina Singka Subekti, M.si.</i>	357
3. KUALITAS DEMOKRASI: PERAN KUNCI PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN POLITIK	
<i>Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.</i>	369
4. KEUMALAHAYATI, SAFIA DAN PERJUMPAAN MALAM ITU DENGAN KARTINI	
<i>Dr. Helvy Tiana Rosa, S.S.</i>	391
BIODATA PENULIS	399



BAB I
SOSOK PEREMPUAN TANGGUH





MENJADI WANITA YANG BERMARTABAT DAN TANGGUH DI SETIAP WAKTU

Dr. Romlah Abubakar Askar, M.A.

Pendahuluan

Perempuan memang tidak sekuat laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan tidak bisa apa-apa. Meski perempuan dinilai sebagai sosok yang lemah, perempuan bisa menjadi sosok yang tangguh. Tangguh yang dimaksud adalah kuat ketika menghadapi rintangan dan tegar saat mendapatkan masalah. Meski menjadi muslimah tangguh bukan hal yang mudah.

Muslimah yang tangguh mendapatkan porsi penting dalam Islam. Islam sendiri sangat memuliakan kaum perempuan. Bahkan banyak dalil dalam al-Quran yang menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kedudukan sangat istimewa dan mulia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nahl: 97 yang artinya: *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”*.

Rasulullah SAW juga sering mengingatkan agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum perempuan. Sebagai contoh adalah sabda Rasulullah SAW yang terekam dalam

hadits riwayat Muslim, “*Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan*” (H.R. Muslim).¹

Isi dan Analisis

Setidaknya terdapat beberapa kriteria seseorang disebut sebagai muslimah yang tangguh² :

1. Menangis karena Takut dan Ingat kepada Allah SWT

Dari Abu Raihannah, ia berkata, “*Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Kami mendengar beliau bersabda, ‘Neraka diharamkan atas mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Neraka diharamkan atas mata yang tidak tidur di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala.’*” Abu Rahainah berkata, “*Aku lupa yang ketiganya. Tapi setelahnya aku mendengar beliau bersabda, ‘Neraka diharamkan atas mata yang berpaling dari segala yang diharamkan Allah SWT.’*” (HR. Ahmad, Al-Hakim dalam kitab Shahih-nya, disetujui oleh Adz-Dzahabi dan An-Nasai).

Ketika seseorang merasa takut dan menangis karena Allah SWT, dia akan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah SWT. Contohnya, menghindari sikap putus asa dalam menghadapi ujian.

2. Mengharapkan Rahmat Allah SWT dan Tidak Putus Asa dari Rahmat-Nya

Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk selalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Di antara tanda seorang muslim berbaik sangka pada Allah SWT adalah mengharapkan

¹ Ulya Rosyida, 5 Karakter Perempuan Tangguh, diakses dari <https://suaraaisyiyah.id/5-karakter-perempuan-tangguh/> pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 16:29

² Yudi, Tiga Hal Ini Bisa Membuat Muslimah Menjadi ‘Tangguh’, diakses dari <https://www.islampos.com/tiga-hal-ini-bisa-membuat-muslimah-menjadi-tangguh-121353/> pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.00

rahmat, jalan keluar, ampunan dan pertolongan Allah SWT dalam setiap menemui ujian. Allah SWT memuji orang yang mengharapkan perkara-perkara tersebut seperti halnya Allah SWT memberikan pujian bagi orang yang takut pada Allah SWT, *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 218).

Menjadi perempuan dalam Islam adalah suatu kemuliaan yang tidak dapat dicapai oleh laki-laki. Surganya di bawah telapak kaki ibu, berkarya dimulai dengan pendidikan terbaik, bahkan di mana manusia berkembang di masa depan, semua itu adalah tipe-tipe kualitas wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Suatu ketika Ummu Salamah r.a. pernah bertanya kepada Nabi saw. yang lebih penting di kalangan wanita dunia dan para bidadari surga, Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa ketika wanita dunia ada di surga, dia akan lebih utama dari para bidadari surga karena shalat, puasa dan ibadahnya, wanita yang bertakwa kepada Allah, kuat ketaatannya dan dalam islam wanita ini adalah perempuan yang istiqamah, dimana orang-orang memandang rendah wanita tersebut namun terkenal di kalangan orang-orang surgawi. Perbandingan keagungan wanita shaleh dunia dengan para malaikat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 72:

الْحَيَّامِ فِي مَقْصُورَاتٍ حُورٍ yang artinya: *“bidadari yang ada di bawah kemah-kemah”*.

Sementara wanita ahli surga berada di istana, mereka ditempatkan di tempat yang lebih indah. Allah menciptakan bidadari secara langsung sedangkan wanita muslimah diciptakan melalui proses-proses ketaatan yang bertahap dan tidak instan taat layaknya bidadari surga. Maka, keistiqah-

mahan, kesholihan seorang wanita di era seperti saat ini lah sangat diuji, hanya wanita-wanita tangguh yang mampu mendapatkan posisi yang mulia, terkenal dan dicemburui oleh bidadari di surga nantinya, kejarlah mimpi, terus kembangkan bakat-bakat, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan yang terpenting adalah tetap menyesuaikan diri dengan fitrah sebagai seorang muslimah.

3. *Sabar Menghadapi Cobaan dan Ridha terhadap Ketentuan Allah SWT*

Sabar yang sebenarnya adalah ketika kita senantiasa menyuarakan kebenaran dan istiqomah meniti jalan kebenaran. Seorang muslimah yang menetapi kesabaran siap menanggung risiko penderitaan di jalan Allah SWT karena mengatakan dan mengamalkan kebenaran tanpa berpaling, bersikap lemah atau lunak sedikit pun. *“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un’*. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk,” (QS. Al-Baqarah [2]:155-157).

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Perempuan yang tangguh tidak akan larut dalam kesedihan yang menimpa. Ia akan terus bangkit untuk melanjutkan langkah pengabdian dengan terus berharap ridha Allah.

Oleh karena itu, Allah meminta seorang mukmin bersabar dan terus melaksanakan salat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 153 (yang artinya), “wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah

swt) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”.

4. *Perempuan yang tangguh akan menutup auratnya dan menjaga kehormatan dirinya dengan sebaik-baiknya*³

Ia akan patuh pada perintah, salah satunya terkait menutup aurat yang ada dalam Q.S. al-Ahzab: 59 (yang artinya), “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu”.

Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula yang menciptakan seorang wanita lengkap dengan berbagai daya tariknya. Sejatinya, wanita muslimah selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah untuknya. Di antara sekian banyak cara mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah itu adalah dengan selalu menjaga muru’ah/kehormatan diri setiap waktu. Hiduplah seolah-olah engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak pernah akan melihatNya. Nikmat Allah kepada kaum perempuan sangat besar. Allah menjadikan Islam sebagai sebab kebahagiaan, penjagaan, keutamaan, dan kehormatan seorang wanita. Islam juga melindungi wanita dari kerusakan dan kejelekan. Semua itu bertujuan agar jiwa dan raga wanita terjaga dari hal-hal yang membinasakan dan merendharkannya.

Islam telah memuliakan wanita muslimah dengan semulia-mulianya penghormatan. Menjaga muslimah dengan sebaik-baik penjagaan. Yang demikian agar wanita muslimah tetap dalam kehormatannya, menjaga agar wanita terjaga

³ Ulya Rosyeda, 5 Karakter Perempuan Tangguh diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 12.00 dari / <https://suaraaisyiyah.id/5-karakter-perempuan-tangguh/>

dalam akhlak yang mulia, dan istiqomah dalam menjaga perintah Allah dan Rasul-Nya.

Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 27:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).” (QS. an-Nisa: 27).

⁴Wanita muslimah saat ini menghadapi keburukan dan konspirasi untuk menghancurkan kehormatan. Ini merendahkan kehormatan dan mengikis agama dan keimanan wanita muslim. Konspirasi dan kejelekan tersebar di stasiun-stasiun televisi dan majalah-majalah yang menampilkan foto-foto mengumbar aurat dan menyibukkan muslimah dengan *fashion* yang secara tegas memperlihatkan lekuk tubuh wanita. Para wanita pun berusaha memberikan kejutan dan berusaha menyerupai wanita non-Muslim. Wanita hidup di muka bumi tanpa keimanan, tanpa moralitas, dan tanpa akhlak mulia.

Dalil al-Al-Quran menjelaskan bahwa fitnah (ujian) terhadap perempuan dapat menimbulkan kerugian dan bahaya yang besar. Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu 'anhu meriwayatkan sebuah hadits dari Usama bin Zaid radhiyallahu 'anhuma yang mana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: *“Tidak ada fitnah yang saya tinggalkan yang lebih merugikan laki-laki daripada (fitnah) terhadap perempuan.”*

Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan Abu Said al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: *فِي كَانَتْ إِسْرَائِيلَ بَنِي فِتْنَةٍ أَوَّلَ فَإِنَّ الْبِسَاءَ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا اتَّقُوا*

⁴ Bahron Ansori, *Muslimah yang Taat Kepada Allah SWT*, <https://minanews.net/muslimah-yang-taat-kepada-allah/> diakses pada 4 September 2023 pada pukul 21:05

النِّسَاءِ “Waspadalah terhadap dunia dan godaan wanita. Sebab cobaan pertama yang menimpa kaum Israel adalah karena sebab rayuan terhadap wanita”.

Dan beliau Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkata: “Wanita adalah aurat. Apabila ia keluar, syaitan akan menghiasinya dari pandangan laki-laki.” (HR. Tirmidzi).

Dengan kata lain, setan mengubah wanita menjadi alat untuk mencapai tujuannya dengan menyebarkan tindakan kejam dan menjadikan laki-laki tergoda. Apalagi jika seorang wanita keluar dengan berpakaian wangi agar orang lebih memerhatikannya, keadaan ini malah lebih berbahaya.

Islam mewajibkan wanita mengenakan hijab dan melarang mereka dari hal-hal yang telah kami sebutkan semata-mata hanya untuk menjaga wanita itu sendiri agar tidak direndahkan. Hanya untuk menjaga dan membimbing mereka agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang keji. Dan agar mereka tidak terjerembab ke dalam kesalahan dan kerusakan.

5. *Berpengetahuan luas sebagai bekal bersikap untuk berbagai keadaan dan pendampingan generasi peradaban.*

Seorang perempuan yang akan melahirkan anak-anak yang cerdas di masa depan perlu berpengetahuan luas. Kewajiban menuntut ilmu ini wajib untuk dikerjakan para perempuan. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan”. Seorang perempuan tangguh akan disiplin dalam menuntut ilmu. Hal itu dimulai dari diri sendiri dan melakukan perubahan melalui berkarya sesuai peran dan

bidangnya, sehingga membawa perubahan bagi keluarga masyarakat dan lingkungan.

6. *Pintar bersosialisasi.*

Perempuan tangguh harus pandai menempatkan diri, bermurah hati, menjaga lisan, dan berakhlakul karimah. Pintar bersosialisasi ini adalah sarana dakwah yang juga kewajiban seorang perempuan. Berdakwah tidak hanya retorika bahasa yang membius massa, tetapi aktivitas apa saja yang dapat memberikan keteladanan. Berdakwah adalah ber-amar ma'ruf nahi munkar untuk masyarakat sekitarnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. at-Taubah: 71 (yang artinya), "*dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

7. *Berbaik sangka kepada Allah.*

Perempuan tangguh akan selalu mengharapkan jalan rahmat dan ampunan dari Allah. Segala permasalahan yang ada akan ia sikapi dengan baik sangka kepada Allah dan yakin ada hikmah di balik setiap kejadian yang menimpa.

Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda (yang artinya), "*Allah berfirman: Ana 'inda dzanni 'abdi bii...*" (sesungguhnya Aku (Allah) sesuai persangkaan hamba-Ku kepada-Ku). Demikianlah ketujuh karakter perempuan yang tangguh. Semoga kita termasuk perempuan tangguh yang bermartabat dan selalu berkarya memberikan manfaat untuk masyarakat.

Wanita yang tangguh merupakan cerminan dari insan yang bermartabat, hal tersebut tentu dilakukan dengan caranya masing-masing. Situasi dan keadaan yang ada membuat Wanita semakin kuat dan adaptif. Sebut saja situasi pandemic yang beberapa waktu lalu terjadi. *“Semua perempuan tangguh dengan caranya masing-masing, dan di masa pandemi ini kita melihat banyak perempuan bekerja keras dan adaptif dengan situasi yang ada,”* ucap Kepala Pusat Studi Wanita di UGM, Dr. Widya Nayati, M.A.⁵

Dalam artikel yang sama, ia menerangkan, pandemi merubah dinamika di dalam keluarga, di mana perempuan memegang peranan yang besar dalam pengelolaannya. Di masa-masa sulit seperti pandemi sebelumnya, banyak keluarga, baik yang memiliki penghasilan tetap atau tidak, memiliki persoalan ekonomi. Ketika suami atau istri yang menghidupi keluarganya harus berhenti dari pekerjaan atau penghasilannya berkurang, sang istri harus mengelola keuangan dan pengeluaran rumah tangga sedemikian rupa agar kebutuhan setiap anggota keluarga tetap dapat terpenuhi.

Kondisi-kondisi ini, menurutnya, menunjukkan betapa perempuan bisa bersikap tangguh di tengah berbagai kondisi. Ketangguhan perempuan yang ditunjukkan dalam mengatasi persoalan hidup sehari-hari sangat menginspirasi kehidupan.

Kita juga dapat mencontoh dari kisah para sahabat dalam kehidupan sehari-hari yang selalu menarik untuk diulas. Melalui kisah tersebut, umat muslim masa kini dapat mengambil pelajaran yang berguna untuk kehidupan. Tak hanya laki-laki, dalam kisah Nabi Muhammad juga diceritakan beberapa nama tokoh Islam perempuan yang tangguh dan bisa

⁵ Gloria Barus, Perempuan Tangguh di Masa Pandemi, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 dari <https://ugm.ac.id/id/berita/22344-perempuan-tangguh-di-masa-pandemi/>

menjadi suri teladan. Berikut nama-nama wanita tangguh di zaman Rasulullah SAW. Tercatat dalam sejarah beberapa pemimpin wanita dalam Islam yang kisahnya perlu diteladani.⁶ Mereka seluruhnya memiliki kisah, cerita, serta akhlak yang dapat menjadi suri tauladan untuk muslimah masa kini. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut enam wanita tangguh di zaman Rasulullah SAW yang kisahnya menarik untuk disimak.

Khadijah binti Khuwailid

Khadijah dikenal sebagai sosok wanita yang mandiri, berilmu, dan juga dermawan. Ia merupakan istri sekaligus umat pertama Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dikaruni enam orang anak. Mereka ialah Abdullah, Qasim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum.

Sebelum menjadi istri Nabi Muhammad, Khadijah merupakan seorang wanita terpendang dan memiliki kekayaan melimpah. Ia lahir dari keluarga pedagang sukses di suku Quraisy Mekah. Tak hanya itu, Khadijah pun dikenal sebagai pemimpin wanita Quraisy yang cukup tangguh. Ia dikenal disegani oleh masyarakat dan keluarganya.

Sepanjang hidupnya, Khadijah banyak belajar ilmu bisnis dari ayahnya, Khuwailid bin Asad. Lantas, setelah ayahnya meninggal, ia mengambil alih tanggung jawab bisnis tersebut, yang mana umumnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Berkat ilmu yang diwariskan oleh ayahnya, Khadijah menjadi seorang pedagang sukses yang terkenal di Mekah. Namun demikian, ia tetap bijaksana dan selalu bertindak jujur.

⁶ Annisa Hapsari, 6 Wanita Tangguh di Zaman Rasulullah diakses dari <https://www.pinhomel.id/blog/wanita-tangguh-di-zaman-rasulullah/> pada tanggal 25 Agustus 2023 pada pukul 21:00

Ummu Kultsum binti Uqbah

Ummu Kultsum binti Uqbah merupakan putri dari pemuka Quraisy. Ayahnya, Uqbah bin Mu'ayyad terkenal sebagai sosok yang keras dan kejam. Ia bahkan pernah menginjak leher Rasulullah ketika berada di "maqam" Nabi Ibrahim. Namun demikian, kekejaman ayahnya tidak menurun kepada Ummu Kultsum. Ummu Kultsum justru dikenal sebagai pribadi yang memiliki empati tinggi.

Rasa empati yang dimiliki oleh Ummu Kultsum ini membuatnya tak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh umat muslim saat itu. Akhirnya, ia pun mengambil keputusan untuk melakukan hijrah menuju Madinah dari kabilah Hadnah Hudaibiyah secara diam-diam.

Sayangnya aksi tersebut diketahui oleh saudaranya. Mereka pun lantas menyusul Ummu Kultsum dengan mengambil jalur yang berbeda, agar keduanya dapat mendahuluinya. Mengingat saat itu masih diberlakukan perjanjian Hudaibiyah, para saudara Ummu Kultsum pun memanfaatkan hal tersebut untuk menghalangi hijrahnya. Lantas, Ummu Kultsum mengadu kepada Rasulullah.

Ia berkata, *"Wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan. Anda tahu bagaimana kelemahan perempuan itu?"* Kemudian, Rasulullah SAW menjawab, *"Allah membatalkan janji itu untuk perempuan sepertinya. Pergilah dari sini!"* Berkat perkataan Rasulullah, Ummu Kultsum dapat memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Mulai sejak itu, Ummu Kultsum menjadi primadona dan dihormati.

Hafshah binti Umar

Hafshah binti Umar adalah seorang putri dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin al-Khattab. Berkat asuhan ayahnya yang tegas, Hafshah tumbuh menjadi pribadi yang

tangguh, cerdas, dan kuat. Ia pandai membaca, menulis, serta menghafal surah al-Quran maupun hadits. Padahal kala itu kemampuan tersebut jarang dimiliki oleh seorang perempuan.

Berkat kemampuan tersebut, Hafshah lantas melestarikan tulisan asli al-Quran yang terkumpul dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran pelepah kurma. Tak hanya itu, ia pun mengemban tugas mulia untuk menyimpan dan memelihara al-Quran di rumahnya. Hal inilah yang lantas membuat Hafshah diberi gelar sebagai “Penjaga al-Quran”.

Aisyah binti Abu Bakar

Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri termuda Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan salah satu istri yang dicintai oleh Rasulullah. Lebih daripada itu, Aisyah memiliki peran politik pada masanya. Ia diketahui telah meriwayatkan sekitar 2200 hadits dan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu umat Islam. Peran Aisyah tak berhenti di situ saja. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Aisyah mampu menentang konstruksi patriarki yang berkembang saat itu.

Lalu, setelah kematian Utsman bin Affan, menjadi khalifah ketiga, Aisyah memimpin Perang Basra atau dikenal sebagai Perang Jamal. Walau kalah dari perang tapi hal tersebut menjadi ujung tombak perjuangan perempuan dalam menentang patriarki.

Nusaibah binti Kaab

Nusaibah binti Kaab adalah seorang perempuan anggota suku Banu Najjar di Madinah. Nusaibah dikenal sebagai sosok yang berani di medan perang. Bahkan namanya kerap diartikan sebagai pejuang karena telah mengikuti banyak peperangan. Terdapat peperangan yang diikutinya yaitu, Baitul Aqabah II,

Perang Hunain, Perang Yamamah, Perang Uhud, dan Perjanjian Hudaibiyah. Konon, saat perang Uhud, Nusaibah menjadi salah satu tokoh penting di mana ia bertugas menjadi pengawal dan melindungi Rasulullah SAW.

Asiyah

Asiyah terkenal karena kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi suaminya yang kejam, yaitu Fir'aun. Hal ini yang membuatnya menjadi salah satu dari wanita tangguh pada zaman dahulu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *"Sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan, pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu maka para Malaikat menaunginya."* Sepanjang menjadi istri Fir'aun, Asiyah pernah menolak dua permintaan kejam dan mustahil dari suaminya. Permintaan tersebut adalah menganggap Firaun sebagai Tuhan serta perintah untuk membunuh anak laki-laki yang ditemukan dalam keranjang.

Ketabahan dan kesabaran Asiyah termuat dalam al-Quran surah Al-Qashash ayat 9 yang artinya: *"Dan berkatalah istri Firaun: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari."* Kisah-kisah tersebut wajib diteladani dan mampu membuat kisah terinspirasi untuk menjadi seperti mereka.

Penutup

Perempuan yang tangguh merupakan inspirasi bagi kita seluruhnya. Mereka adalah perempuan yang terus bertahan, tidak peduli seberat apapun kehidupan yang dilaluinya. Kehidupan di era yang sangat maju seperti ini, kecantikan bukan satu-satunya pegangan bagi perempuan. Kecantikan bukanlah menjadi modal dasar bagi perempuan untuk

memperoleh kehidupan yang nyaman, namun untuk mengimbangi perkembangan zaman sebagai perempuan, kita harus bisa menjadi perempuan yang tangguh. Mereka adalah perempuan yang selalu berdiri dan tidak lari dari masalah, mereka bersikap mandiri dan teguh. Sosok yang seperti ini membuat perempuan semakin disegani dan membantu perempuan untuk bertahan di tengah kehidupan yang keras. Muslimah yang tangguh dapat diwujudkan dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, lalu meluas ke masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ansori, Bahron, *Muslimah yang Taat Kepada Allah SWT*, <https://minanews.net/muslimah-yang-taat-kepada-allah/> diakses pada 4 September 2023 pada pukul 21:05
- Barus, Gloria, *Perempuan Tangguh di Masa Pandemi*, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 14.00 dari <https://ugm.ac.id/id/berita/22344-perempuan-tangguh-di-masa-pandemi/>
- Hapsari, Annisa, *6 Wanita Tangguh di Zaman Rasulullah* diakses dari <https://www.pinhome.id/blog/wanita-tangguh-di-zaman-rasulullah/> pada tanggal 25 Agustus 2023 pada pukul 21:00
- Rosyeda, Ulya, *5 Karakter Perempuan Tangguh* diakses pada 30 Agustus 2023 pukul 12.00 dari <https://suaraaisyiah.id/5-karakter-perempuan-tangguh/>
- Yudi, Tiga *Hal Ini Bisa Membuat Muslimah Menjadi 'Tangguh'*, diakses dari <https://www.islampos.com/tiga-hal-ini-bisa-membuat-muslimah-menjadi-tangguh-121353/> pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 13.00.



PEREMPUAN, PENDIDIKAN ANAK, SERTA TANTANGAN KE DEPAN

Prof. Dr. Nurhayati Djamas, M.A., M.Si.

Pendahuluan

Perempuan mempunyai peran signifikan dalam proses pendidikan bagi pembentukan perilaku dan karakter anak, baik di lingkungan keluarga, maupun pada unit pendidikan formal dan non formal. Peran pendidikan yang dijalankan perempuan di lingkungan keluarga tidak dapat dilepaskan dari kedekatan perempuan sebagai ibu secara fisik biologis dan psikologis, terutama sejak awal kelahiran dan pada fase awal perkembangan anak di usia dini dan pada usia sekolah. Kedekatan dan kelekatan hubungan ibu dan anak secara fisik biologis dan psikologis dimulai sejak awal kehidupan anak yang dimulai sejak dari rahim si ibu, setelah kelahiran sampai anak memasuki usia sekolah. Interaksi intens antara ibu dan anak terutama berlangsung di lingkungan keluarga. Karena itu masa-masa awal kehidupan anak dan interaksi anak di lingkungan keluarga merupakan masa emas (*golden age*), sebab dari interaksi intens dengan ibu dan anggota keluarga lain, si anak mendapatkan stimulus yang sangat berharga untuk menopang berbagai aspek perkembangan anak secara fisik biologis, perkembangan kognitif, socio emosional dan morak spiritual anak dalam hubungan dengan sesama

manusia dan dengan Tuhan Pencipta. Tumbuh kembang anak pada masa awal kehidupannya sekali gus menjadi basis bagi perkembangan selanjutnya secara utuh pada berbagai aspek perkembangan.

Terdapat 2 (dua) hal utama ketika si ibu berinteraksi dengan anak, yang akan memberikan dampak sangat berarti bagi perkembangan anak. Pertama yaitu kepekaan terhadap isyarat kebutuhan yang ditampilkan anak, seperti ketika anak merengek atau menangis karena mungkin ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Atau ketika si anak merajuk dan menarik diri sebagai isyarat penolakan anak terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan. Kedua, sikap responsif ibu terhadap isyarat kebutuhan anak dengan memberikan respon yang tepat sesuai kebutuhan tersebut. Kepekaan ibu terhadap isyarat yang diperlihatkan anak bahwa ia membutuhkan sesuatu, serta respon positif yang diberikan ibu sesuai kebutuhan anak akan menumbuhkan kepercayaan pada anak terhadap lingkungannya. Sebagai contoh seorang anak usia 18 bulan menangis sambil berusaha melepaskan dari tempat duduknya. Si Ibu yang menyadari kondisi anak yang kedunguan langsung memberikan respon dengan menggendong anak tersebut dan memberinya baju hangat dan kaos kaki sambil mengajak anak kembali dengan mainannya. Si anak yang semula menangis setelah merasa nyaman akan diam dari tangisnya dan bisa bermain kembali dengan ibunya, Interaksi ibu dan anak yang disertai kepekaan serta sikap responsif si ibu terhadap isyarat kebutuhan anak, sehingga membuat anak merasa nyaman akan memberikan dampak tumbuhnya kepercayaan positif anak terhadap lingkungan sosialnya. Kondisi demikian yang berlangsung berulang kali secara konsisten dalam waktu yang lama ikut memberikan kontribusi bagi pembentukan kepribadian anak yang mempercayai orang-orang di lingkungan sosialnya, karena ia merasa aman dan

nyaman di lingkungan sosialnya tersebut. Pembentukan *trust* (kepercayaan) pada lingkungan sosialnya memang diperlukan pada awal perkembangan psiko sosial anak. Kondisi lingkungan yang sarat dengan stimulus dan respon yang positif dan menyenangkan dalam interaksi antara orang tua dan anggota keluarga dengan anak jelas diperlukan dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak di lingkungan keluarga.

Interaksi intens antara ibu dan anak di lingkungan keluarga dewasa ini mengalami hambatan yang cukup berarti, karena makin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah dari waktu ke waktu. Hal itu ikut mengurangi waktu, serta peluang dan kesempatan bagi perempuan sebagai ibu dalam berinteraksi dengan anak dan anggota keluarga lainnya. Dengan sendirinya hal itu ikut mengurangi keterlibatan perempuan dalam menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan pada anak di lingkungan keluarga. Peran tersebut kebanyakan didelegasikan kepada para pengasuh dan asisten rumah tangga untuk menggantikan peran ibu dan isteri di lingkungan rumah tangga. Fenomena yang umum berlangsung dewasa ini yaitu bahwa pengasuhan anak sekaligus pendidikan anak di masa awal kehidupan mereka tidak lagi di tangan pertama sosok ibu kandung, tetapi beralih pada para pengasuh (*care giver*). Mereka sebagai pekerja rumah tangga yang dibayar untuk melakukan peran pengganti bagi peran ibu, yang dengan sendirinya mengurangi tingkat kedekatan dan kelekatan fisik emosional (*attachment*) si ibu dengan anak yang dilahirkannya. Dilihat dari perspektif Islam, pesan dalam al-Quran terkait peran esensial si ibu terhadap anak yang dilahirkannya, seperti tercantum dalam surat Lukman ayat 14. *“Dan Kami perintahkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahan, dan menyapihnya memakan waktu*

dua tahun; (ucapNya) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu. KepadaKulah tempat kembalimu."

Al-Quran dalam beberapa ayat menegaskan anjuran kepada para ibu untuk menyusui anaknya yang baru dilahirkan selama 2 atau 2½ tahun, yang tentu hal ini memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak pada masa awal kelahiran tersebut. Dewasa ini telah mulai dapat dibuktikan manfaat pemberian ASI kepada bayi yang baru lahir, terutama untuk tumbuhnya *imunitas* dan daya tahan tubuh si bayi terhadap berbagai gangguan kesehatan, bahwa *coloustrum* yang dalam ASI yang berwarna kuning kental mengandung *coloustrum* untuk imunitas bayi yang baru lahir. Selanjutnya secara socio emosional bahwa kelekatan fisik emosional dari dekapan si ibu sambil si ibu mengajak si bayi berbicara atau mengungkapkan kata-kata positif akan memberikan stimulus bagi perkembangan socio emosional dan juga perkembangan kognitif si bayi. Hal itulah yang dapat menumbuhkan *trust* (kepercayaan) bayi terhadap orang-orang di lingkungan sosialnya. Namun demikian, pemberian ASI pada ibu-ibu muda yang bekerja telah berganti metode, dari yang langsung diberikan pada bayi melalui dekapan kasih sayang si ibu, berganti dengan ASI perah yang ditaruh di botol susu untuk disimpan di *refrigerator* agar tidak rusak. ASI susu botol yang diawetkan itulah kemudian yang dilahap si bayi ketika ibunya bekerja di luar rumah, tentu tanpa disertai dekapan kasih sayang ibu dengan bisikan kalimat *thayyibah* yang diucapkannya ketika menyusui bayinya.

Perubahan sosial ekonomi dan teknologi yang terus berlangsung dewasa ini memberikan implikasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk terhadap kehidupan keluarga. Disamping itu juga ditandai dengan makin meningkatnya tantangan pendidikan pada anak melalui intervensi teknologi informasi terhadap tata laksana pendidikan, kurikulum, serta

capaian pendidikan pada anak. Tantangan utama dari perubahan tersebut berhubungan dengan upaya dan langkah pendidikan untuk memperkuat fondasi mental spiritual dan moral sebagai *inner power* anak berhadapan dengan ekses sosial budaya seperti meluasnya gaya hidup dalam bentuk hubungan sejenis, beragam tindakan a moral, peredaran obat terlarang, dan lainnya.

Kebutuhan Pendidikan bagi Perkembangan Anak

Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan dan pembekalan perkembangan anak menjadi manusia seutuhnya, pada aspek fisik biologis, kognitif dengan segala atributnya, socio emosional, serta moral spiritual yang dilandasi keyakinan iman kepada Allah Tuhan Pencipta. Pada aspek fisik biologis yang dituju adalah manusia yang sehat dan optimal perkembangan fisik biologisnya. Pada aspek kognitif anak memiliki kemampuan kognitif sesuai tingkat perkembangannya, bisa mengetahui, memahami, mengingat, menganalisis serta memproyeksikan kondisi tertentu, memiliki daya kreativitas, kemampuan berbahasa dengan penguasaan kosa kata dan struktur kalimat dalam berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan socio emosional ditandai oleh kemampuan anak memahami nilai dan norma serta tata aturan perilaku dalam konteks budaya tertentu, dapat mengendalikan diri serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, begitu pula dapat diterima lingkungan sosialnya. Karena itu, anak dipersiapkan melalui pendidikan untuk bisa mengendalikan diri (*self regulation and self control*), dan bisa memahami emosi dirinya dan emosi orang lain dalam interaksi antar sesama.

Hal fundamental dalam proses pendidikan anak yaitu pembekalan bagi pengembangan *inner power*, yaitu kekuatan

internal pada diri manusia berupa aspek spiritual moral sebagai daya pendorong dan pengendali dalam sikap tindakan manusia yaitu bagi orang beragama terkait akidah tauhid kepada Allah Tuhan Pencipta. Penanaman akidah tauhid dimaksudkan agar tertanam keyakinan bahwa Allah Pencipta alam semesta dan manusia tak bisa dipersekutukan dengan apapun dan siapapun (dzat atau makhluk). Juga penanaman keyakinan bahwa Allah yang mengatur skenario kehidupan di alam semesta dan seluruh makhlukNya; dengan menurunkan pedoman hidup kepada manusia melalui RasulNya berupa petunjuk wahyuNya dalam kitab suci, serta yang akan meminta pertanggungjawaban atas sikap dan tindakan perbuatan manusia selama hidupnya di dunia ketika berada di alam akhirat kelak. Semua komponen keyakinan imani berupa keyakinan tentang adanya Allah Tuhan yang Esa, Pencipta dan Pengatur kehidupan di alam semesta dan kehidupan manusia, serta keyakinan pada malaikat yang menjadi agen suruhan Allah dengan ragam tugasnya; keyakinan kepada Rasul dan Kitab Suci yang diturunkan kepada Rasul, serta iman kepada hari akhir sebagai hari pertanggungjawaban atas segala perbuatan manusia, Semuanya itu merupakan unsur esensial bagi manusia sebagai inner power yang penuntun sikap dan tindakan manusia, sekaligus sebagai kendali perilaku bagi manusia dalam mengelola dan menjalankan kehidupan di muka bumi. Bobot pada aspek *inner power* ini dapat dijadikan prioritas pada proses pendidikan di awal perkembangan anak di tingkat pendidikan formal sejak TK, Sekolah Dasar, yang kemudian di jenjang pendidikan selanjutnya setelah penguatan inner power diperlukan dan diperdalam pada penguasaan sains, teknologi dan literasi berbagai bidang kehidupan.

Tujuan pendidikan dari perspektif Islam terkait fitrah yaitu untuk memelihara dan mengembangkan potensi fitrah manusia. Fitrah yaitu potensi asal kejadian manusia yang

kecenderungan kepada kebenaran agama Allah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW bahwa *“Setiap anak itu dilahirkan dengan kondisi fitrah, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi”*. (H.R. Muslim). Hadis ini mempertegas pesan ayat al-Quran dalam surat ar-Rum ayat 30. *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; yaitu fitrah ciptaan Allah yang Ia menciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Tak ada perubahan atas ciptaan Allah, itulah agama yang benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”*. Merujuk pada ayat ini memberikan gambaran bahwa agama Islam merupakan agama yang sesuai kodrat manusia, sebagai fitrah yang diciptakan oleh Allah. Karena itu, tujuan pendidikan selanjutnya menurut perspektif Islam adalah untuk mengembangkan potensi fitrah manusia, sesuai kodrat yang diciptakan Allah sejak lahir dengan kecenderungan pada kebenaran agama Allah serta berorientasi pada kebajikan dan kesejahteraan hidup. Kecenderungan demikian misalnya dapat diamati dari spontanitas anak usia 2-3 tahun, yang masih terjaga fitrahnya dari polusi yang mengotori hati nurani, dalam menyuarakan kata hatinya. Saat ibunya meminta si anak agar mengatakan seseorang yang mencari ibunya untuk menagih utang, agar mengatakan bahwa ibunya sedang tidak ada. Ketika tamu yang mencari si ibu betul-betul datang dan bertanya kepada si adik usia 3 tahun tersebut, apakah ibunya ada, maka amatilah jawabannya, ia akan mengatakan..*“ibu ada sih, tapi tadi dipesan agar mengatakan “ibu tidak ada”*. Disnilah diperlukan kehati-hatian seorang ibu, sebagai teladan bagi anaknya, untuk menjaga ucapan dan tindakannya dengan menjaga integritas diri, agar si anak tidak meniru dan meneladani tindakan yang tidak benar dari ibunya.

Bagaimana pendekatan yang harus dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan potensi fitrah ciptaan (*mukhallaqah*) tersebut? Menurut pemikiran Islam seperti yang

dikemukakan oleh Imam al Ghozali, hati (*al-fuad al-lub*) lah yang berfungsi menangkap kebenaran dari Allah. Karena itu, untuk menjaga dan mengembangkan potensi fitrah manusia dilakukan dengan cara merawat dan mensucikan jiwa dan hati manusia melalui latihan *tazkiyatun nafs* (pensucian jiwa) dari segala kotoran dan penyakit hati (*amradh al qulub*) dan gangguan jiwa dari sifat-sifat tercela (*shifaat al madzmumaat*) yang menimbulkan gangguan psikis pada manusia. Pembersihan hati dari segala ragam penyakit hati seperti musyrik (mensekutukan Allah), riya, sombong dan takabbur, hasad dengki, dendam, dan kikir.

Dengan demikian, unsur internal yang bisa merusak fitrah adalah penyakit hati (*amradh al quluub*) sebagaimana contoh diatas. Hal itu merupakan polusi bagi hati, yang bila menumpuk, dapat menutup kemampuan hati menangkap kebenaran dari Allah. Selanjutnya, gangguan jiwa berupa sifat-sifat tercela (*aqsam al nafs*), seperti khawatir, cemas, depressi, benci, putus asa, dan lainnya. Penyakit hati dan gangguan psikis tersebut merusak potensi fitrah dan dapat menghalangi fungsi hati untuk menangkap isyarat kebenaran Allah SWT, menghalangi hati menghadirkan Allah di hatinya, sebagai hambatan pendekatan diri manusia kepada Allah. Disamping itu, penyakit hati seperti hasad dengki, sombong dan dendam juga dapat merusak hubungan dengan sesama manusia lainnya. Sudah barang tentu pendekatan untuk menjaga dan mengembangkan potensi fitrah tak bisa dilepaskan dari perkembangan kognitif akal dan jiwa manusia, Pendekatan pendidikan untuk menjaga potensi fitrah pada anak sesuai tahapan perkembangan kognitifnya baru bisa dilakukan pada tingkat pengenalan Allah Tuhan Pencipta dan Pengatur alam semesta dengan mengenal dirinya dan alam lingkungannya, serta mengenalkan bagaimana perlakuan baik manusia dalam menjaga dirinya, hubungannya dengan sesama, serta dalam

menjaga lingkungan alam semesta ciptaan Tuhan. Akhlak baik yang dikenalkan pada anak untuk menjaga hubungan dengan makhluk Allah sudah memiliki dimensi pensucian hati dan pembersihan jiwa melalui penanaman akhlak terpuji pada sesama makhlukNya.

Lebih lanjut merujuk pesan al-Quran dalam surat Luqman, ada empat fungsi pendidikan yang perlu mendapat perhatian, seperti kandungan ayat 13 - 19; yaitu:

- Pendidikan iman dan tauhid (ayat 13, 15).
- Pendidikan ketaatan beribadah (ayat 17).
- Pendidikan etika dan moral (ayat 14, 18 dan 19).
- Pendidikan karakter bagi pembentukan kepribadian (ayat 16 dan 17).

1. *Pendidikan penanaman keimanan dan akidah tauhid*

Tujuan pendidikan pada aspek fundamental keagamaan ini yaitu agar anak meyakini bahwa ada Allah, Pencipta manusia dan alam semesta, yang patut disembah dan ditaati, dan Dialah satu-satunya Tuhan yang mengatur kehidupan makhluk di alam semesta. Pendidikan penanaman keimanan dengan segala perangkatnya tentu memerlukan pengetahuan anak tentang Tuhan, apa dan bagaimanakah bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memang ada. Dalam hal ini, pendidik perlu mencari kiat agar anak meyakini bahwa Tuhan itu memang ada. Misalnya guru mengajak anak ke suatu tempat, seperti kebun buah, dan bertanya pada anak siapakah yang membuat pohon itu hidup dan berbuah. Bisa jadi ada anak yang menjawab bahwa petani atau tukang kebunlah yang membuat pohon di kebun itu berbuah, karena tiap hari tukang kebun menyiram tanaman dengan air sambil memberikan pupuk pada pohon. Pendidik bisa melanjutkan pertanyaan dari mana tukang kebun dapat air untuk menyiram pohon buah

agar bisa tumbuh subur, apakah tukang kebun langsung yang menciptakan air tersebut. Mungkin ada yang menjawab tukang kebun mendapatkan air dari telaga di dekat kebun, karena jawaban tersebut belum menjawab pertanyaan pendidik, dialog dapat terus dilanjutkan sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa air yang diambil tukang kebun dari telaga juga diciptakan oleh Allah melalui mata air di sela-sela bukit atau gunung di sekitar telaga itu.

Dari dialog dengan anak mulai tertanam di pikiran anak bahwa Allah yang Maha Kuasa lah yang menciptakan segala makhluk di alam semesta. Pohon-pohon yang berbuah juga diciptakan oleh Allah dan buahnya untuk dimakan dan bermanfaat bagi manusia. Mulai timbul rasa bangga dan kekaguman anak pada Allah Pencipta yang telah menyediakan segala keperluan manusia di alam semesta. Dengan kekaguman dan rasa bangga yang mulai tumbuh pada anak terhadap Allah Pencipta, pendidik dapat menuntun anak dengan kembali mengajukan pertanyaan, karena Allah Maha Baik pada kita manusia, apa yang harus kita lakukan terhadap Allah. Mungkin ada anak yang menjawab yaitu berterima kasih pada Allah, atau membalas kasih sayang Allah, yang bisa terus dikejar guru/pendidik dengan pertanyaan berikutnya bagaimana caranya. Sambil menunggu respon anak, guru/pendidik bisa menuntun anak misalnya dengan membaca kalimat *thayyibah*... *alhamdulillah*... dan dilanjutkan dengan tuntunan mentaati Allah melalui ibadah kepadaNya, seperti mengerjakan shalat berzikir dan seterusnya.

2. *Pendidikan untuk menanamkan ketaatan beribadah*

Shalat merupakan ibadah wajib yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang *mukallaf*. Kewajiban shalat tidak bisa ditinggalkan sama sekali ketika seseorang sudah mencapai usia akil baligh, ditandai dengan mulai haid tiap bulan pada anak

perempuan dan pada anak laki-laki mulai mengalami mimpi basah. Pada saat itulah mereka wajib mengerjakan ankan shalat 5 (lima) waktu, subuh, zhuhur, ashar, maghrib dan shalat isya. Pembiasaan mengerjakan shalat bisa dilakukan sejak anak berusia dini dengan mengenalkan kepada anak cara-cara mengerjakan shalat, sembari melakukan praktek cara shalat dengan mengamati orang tuanya yang mengerjakan shalat. Ketika anak memasuki usia *mumayyiz*, telah bisa membedakan yang benar dan salah, pada waktu itulah anak mulai dilatih untuk berdisiplin menjalankan ibadah shalat. Sementara itu anak bisa diajak oleh orang tuanya mengenal masjid dan mengamati orang-orang yang shalat berjamaah di masjid. Proses pembiasaan (*habituation*) untuk mengerjakan ibadah wajib, seperti shalat dan kemudian berpuasa, dalam proses pendidikan akan melahirkan kebiasaan mentaati perintah agama pada anak sebagai ekspresi keimanan, yang untuk selanjutnya akan membentuk kebiasaan yang melekat sebagai perilaku beribadah pada anak.

3. *Pendidikan etika dan moral pada anak bagi pembentukan akhlak karimah*

Pendidikan etika dan moral berkaitan nilai-nilai kebajikan bagi pembentukan akhlak terpuji anak kepada sesama. Pendidikan akhlak (karakter) dimulai dari penanaman nilai kebajikan kepada kedua orang tua, terutama pada ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dan yang menyusui dengan ASI selama 2 tahun atau lebih. Pada surat Luqman ayat 14, pesan tentang pengorbanan seorang ibu disampaikan dengan jelas dari sejak masa kehamilan yang berat selama 9 bulan dan kemudian diikuti dengan menyusui bayinya sampai disapih. Semua itu merupakan proses awal kehidupan seorang anak manusia dari rahim seorang ibu. Dan Allah memerintahkan agar manusia tidak lupa untuk bersyukur

kepada Allah atas semua karuniaNya dan berterima kasih serta berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah menghamilkan dengan bersusah payah. Pada ayat lain di surat al Israa' ayat 23 dan 24, Allah menegaskan kembali pesan agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika keduanya sudah memasuki usia tua, agar tidak sampai membentak dan menghardik orang tua disertai anjuran berkata-kata yang baik dengan mereka, sambil merendahkan diri dengan penuh kasih sayang disertai doa bagi kebaikan keduanya.

Selanjutnya, pendidikan etika moral juga ditujukan terhadap perilaku dalam hubungan dengan sesama, agar tidak berlaku sombong dan takabur dengan memalingkan muka ketika berjalan dan bertemu dengan orang lain. Disertai anjuran agar tidak berjalan di muka bumi dengan bersorak sorai, karena Allah tidak menyukai setiap orang congkak dan sombong. Pesan lain dalam surat yang sama yaitu agar menyederhanakan langkah dalam perjalanan dan merendahkan suara agar tidak menyerupai suara keledai. Perilaku pro sosial yang dianjurkan didasarkan pada nilai-nilai moral untuk menghormati sesama dan tidak berbuat sombong dan congkak, yang tergambar dari cara berjalan dan berbicara dengan orang lain. Yang sangat dianjurkan adalah menjaga kepatutan dan keseimbangan (*equilibrium*) dalam tingkah laku ketika berhubungan dengan orang lain.

4. *Pendidikan bagi pembentukan kepribadian*

Pendidikan bagi pembentukan kepribadian dapat dilihat dari perspektif Islam yaitu menyangkut nilai-nilai utama yang menjadi dasar tindakan yaitu nilai shalat dalam hubungan dengan Allah Tuhan Pencipta, sabar saat ditimpa kesulitan dan musibah, serta nilai amar makruf dan nahi munkar, disamping nilai kebajikan yang ditebar di muka bumi. Dilihat dari fungsi

masing-masing nilai dalam memperkuat kepribadian. Nilai shalat sebagai ibadah wajib dalam hubungan dengan Allah, bila dilakukan secara benar dan fungsional, nilai shalat jelas akan memberikan kekuatan fundamental bagi pembentukan kepribadian yang tangguh. Shalat yang benar dapat membentuk jiwa yang suci dan teguh untuk dapat menangkap kekuatan spiritual kebenaran dari Allah. Selanjutnya nilai kesabaran dalam menghadapi kesulitan akan membentuk *adversity quotient* yang diperlukan menghadapi beragam tantangan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan bagi kesejahteraan bersama. Begitu pula nilai *amar makruf dan nahi munkar* sekali gus merupakan misi hidup muslim, yaitu mengajak orang lain pada kebajikan dan menghindarkan diri dari keburukan yang merusak. Ketika nilai tersebut diterapkan dengan cara penyampaian yang baik dan inspiratif, maka dapat menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan dalam berbuat kebaikan pada sesama.

Ragam Peran Perempuan dalam Proses Pendidikan Anak

Fungsi pendidikan yang dapat dijalankan oleh para pendidik, termasuk pada perempuan, meliputi beragam peran. Diantaranya yaitu peran sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak, baik dalam posisi sebagai ibu di lingkungan keluarga, maupun sebagai guru/pendidik di lembaga pendidikan formal dan non formal, yang dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Sebagai role model, atau sebagai suri teladan bagi anak

Dalam menjalankan peran sebagai teladan, maka apapun yang dilakukan si ibu ketika berinteraksi dengan anaknya dalam aktivitas sehari-hari akan diamati, dicontoh dan ditiru oleh anak. Oleh karena itu si ibu perlu menyadari bahwa setiap sikap dan gerak perbuatannya dalam merespon stimulus dari lingkungan bisa diamati, dilihat dan ditiru oleh anaknya.

Karena itu, si ibu harus berusaha melakukan tindakan dan perbuatan yang berbasis nilai. Satu antara kata dan perbuatan, supaya anak-anaknya mendapatkan contoh tindakan dan perbuatan yang dilandasi nilai integritas diri.

2. *Peran sebagai pendidik*

Peran pendidik terutama untuk dapat memanfaatkan apa yang disebut sebagai *teachable moment*, yaitu waktu yang tepat untuk menanamkan nilai tertentu sebagai moment pembelajaran pada anak. Sebagai contoh seorang anak umur 4 tahun sedang bermain dengan adiknya yang berusia 2,5 tahun. Tiba-tiba si adik mengambil mainan kakaknya agar dia bisa main sendiri dengan mainan tersebut bersama temannya. Si adik langsung membawa mainan itu dan kemudian mencari perlindungan pada ibunya. Si kakak mengejar si adik untuk mengambil kembali mainannya yang direbut si adik. Kedua anak kecil itu akhirnya bersitegang dan saling berebut, sehingga kemudian si ibu harus turun tangan. Ibu berupaya menenangkan kedua anaknya dan mengambil mainan dari salah seorang anak yang menggenggam erat mainan itu, lalu meminta anak-anak itu untuk duduk bersama sambil mengajak dialog kedua anaknya.

Ibu meminta kepada tiap anak untuk menjelaskan mengapa sampai terjadi rebut-rebutan mainan. Si kakak menjelaskan bahwa pada mulanya mereka bermain berdua, tapi tiba-tiba adiknya mengambil mainan kakaknya, sehingga si kakak berusaha mengambil kembali mainannya itu. Si adik yang berusaha membela diri mengatakan bahwa dia juga ingin bermain dengan mainan kakaknya itu bersama temannya yang lain. Karena ia tidak memiliki mainan, maka ia mengambil mainan kakaknya. Si ibu menyadari bahwa situasi yang dialami anak-anaknya itu merupakan suatu kesempatan untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada mereka tindakan dan

perbuatan yang sepatutnya dilakukan agar tidak sampai tidak terjadi ketegangan dan perkelahian dengan sesama saudara. Ibu menyampaikan kepada sang adik, kalau seandainya ia ingin menggunakan mainan kakaknya, maka ia harus meminjam dulu mainan tersebut pada kakaknya dengan baik-baik. Kalau sudah diizinkan, baru dia bisa menggunakan mainan itu. Ibu juga menyampaikan kepada si kakak agar memberi kesempatan kepada si adik untuk bermain bersama temannya menggunakan mainan si kakak, karena si adik belum memiliki mainan sendiri. Si Ibu juga meminta pada si adik untuk meminta maaf kepada kakaknya karena telah membuat kakaknya kesal dan marah.

3. *Peran sebagai pemegang otoritas di keluarga.*

Sebagai pemegang otoritas di lingkungan keluarga, si ibu dan juga ayah menetapkan aturan dan tertib perilaku tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk dengan menuntun anak tentang mana tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam interaksi di keluarga dan dalam pergaulan dengan sesama teman. Tertib tata laku yang dibangun di lingkungan keluarga yang berbasis nilai-nilai kehidupan yang rukun dan damai berfungsi membentuk budaya tertib dan damai dalam pergaulan di antara sesama dan dapat menginspirasi hidup yang rukun di lingkungan sosialnya.

4. *Peran sebagai mentor dan konselor bagi anak*

Peran sebagai mentor dijalankan ibu dengan membimbing dan menuntun anak ketika menghadapi kesulitan dan masalah dalam pertemanannya. Peran sebagai mentor sangat diperlukan anak, terutama yang belum memahami banyak hal, terutama di lingkungan sosialnya yang baru. Peran

mentor adalah memberitahukan hal-hal yang perlu diketahui anak dalam proses perkembangannya yang menuntut anak harus banyak belajar hal-hal baru di seputar lingkaran kehidupan yang dilewati. Memberikan bimbingan pada anak tidak berarti harus berbuat melakukan apa yang tidak atau belum bisa dilakukan oleh anak. Ibu cukup menjelaskan cara melakukan sesuatu, setelah itu memberikan ruang bagi anak, agar anak terdorong untuk mengerjakan sendiri hal-hal yang terkait keperluannya secara mandiri, dan tidak bergantung pada orang lain.

Hal itu merupakan bagian dari pendidikan untuk mengembangkan *life skill* pada anak, menumbuhkan kemandirian dan tidak semata bergantung pada orang lain. Selanjutnya sebagai konselor yaitu peran membantu anak keluar dari masalah yang bersifat dilematis, dengan melakukan telaah dan diagnosis terhadap permasalahan yang dihadapi anak serta menemukan alternatif solusi yang akan dipilih anak masing-masing dengan menggambarkan implikasi dari setiap pilihan yang akan dipilih anak. Misalnya ketika anak berseteru sampai berkelahi dengan salah seorang siswa dari kelas lain, dan ternyata siswa yang menjadi lawan seterunya adalah putra dari salah seorang guru di sekolah tersebut.

Perseteruan antar teman itu terjadi sebenarnya hanya disebabkan masalah sepele dalam hubungan antar teman di sekolah, yaitu saling mengejek yang kemudian memuncak sampai menyinggung harga diri dan membuat pihak-pihak saling marah dan kemudian saling berkelahi. Mengetahui fakta bahwa teman seterunya adalah anak salah seorang guru fisika di sekolah tersebut, si anak ini merasa begitu bersalah. Sang Ibu berusaha menenangkan anaknya sembari menasehati agar dia datang kepada temannya tersebut untuk menyampaikan permintaan maaf dengan menjelaskan bahwa ungkapan-ungkapan ejekan dalam interaksi mereka semata hanya bersifat

candaan antar teman. Ketika momen ishlah (perdamaian) itu berlangsung di rumah temannya yaitu anak dari sang guru, suasana menjadi cair dan relaks, karena sang guru pun tampil dalam kesempatan tersebut dengan penuh bijak.

5. *Peran sebagai fasilitator*

Sebagai fasilitator peran ibu menyediakan perlengkapan pendidikan guna mendukung proses pendidikan pada anak. Sebagai contoh peran ibu dan orang tua sebagai fasilitator yang memberikan dukungan bagi proses pembelajaran daring pada anak, baik dalam menyediakan perlengkapan bagi proses belajar daring, seperti handphone, laptop dan pulsa internet pada waktu meluasnya pandemi Covid 19 dengan pola belajar daring yang dijalankan di hampir seluruh sekolah dan lembaga pendidikan formal dan non formal.

Tantangan Pendidikan Bagi Pembentukan Karakter Anak ke Depan.

1. *Perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial budaya*

Dewasa ini perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi informasi memberikan dampak terhadap dunia pendidikan. Perkembangan tersebut ditandai oleh munculnya beragam bentuk perubahan akibat Revolusi Industry 4.0, yang dipercepat oleh pandemi Covid 19, dengan karakteristik VUCA (*Volatile, Uncertainty; Complexity, dan Ambiguity*), yaitu perubahan yang goyah, tidak menentu, dengan kompleksitas yang membingungkan. Hal itu antara lain ditandai oleh fenomena IoT (*Internet of Things*), *Big Data*, dan AI (*Artificial Intelligent*). Karena itu, perubahan lingkungan dengan

karakteristik fenomena tersebut di atas menuntut penyesuaian kriteria SDM yang dihasilkan melalui proses pendidikan.

Menghadapi ragam perubahan akibat revolusi Industri 4.0 serta perkembangan teknologi informasi menuntut dunia pendidikan dapat mempersiapkan dan menghasilkan manusia-manusia unggul produk pendidikan yang telah dimulai sejak anak memasuki jenjang pendidikan di usia dini, usia sekolah sampai ke perguruan tinggi. Kriteria manusia unggul dalam konteks Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak terpuji, yang juga harus memenuhi kriteria I4C4 untuk mampu berhadapan dengan fenomena kekinian yang sedang mengalami perubahan. Konsep I4C4 yaitu I4 meliputi *integrity, imaginative, inisiative dan innovative*. Mereka yang mempunyai integritas diri, kemampuan melakukan proyeksi ke depan, dapat merancang langkah yang diperlukan di masa depan, serta mampu menghasilkan gagasan baru yang dapat diwujudkan ke dalam hasil kerja nyata ke depan. Disamping itu juga mempunyai kriteria C4 yang mencakup *creative; collaborative communicative dan competence*. Manusia unggul yang perlu dihasilkan oleh proses pendidikan dengan kriteria C 4 yaitu yang mempunyai daya kreativitas, dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, memiliki keterampilan komunikasi secara manual dan menguasai komunikasi digital, serta memiliki kecakapan pada bidang tertentu dan lintas bidang.

Hal ini tentu menuntut dunia pendidikan agar betul-betul siap menghasilkan kriteria manusia unggul bagi masa depan Indonesia, kesiapan dari aspek substansial fundamental, membangun jiwanya, aspek *inner power*, berupa daya Imani yang menumbuhkan motivasi untuk berbuat bagi kebaikan dari manapun kebaikan bersama dilandasi keyakinan pada sang Pengatur Kehidupan, Allah SWT, kekuatan amal dan akhlak yang sarat kebajikan bagi sesama, serta penguasaan

ilmu pengetahuan dan kemampuan memanfaatkannya bagi pembangunan masyarakat dan bangsa, di satu sisi. Di sisi lain, kriteria I4C4 bagi manusia unggul yang sangat diperlukan agar mampu mengelola perubahan dan tantangan kehidupan nasional ke depan yang ditandai oleh pemanfaatan instrumen yang serba *digitalized* dalam mempermudah dan memperlancar aktivitas yang dijalankan manusia untuk memenuhi beragam keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan sudah harus memulai berbenah diri menyiapkan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan, baik pada aspek kurikulum dan pelaksanaannya dalam tataran operasional di Lembaga-lembaga pendidikan, maupun penyesuaian metode dan pendekatan pendidikan yang sejalan dengan perubahan akibat implementasi teknologi informasi di dunia pendidikan. Selain itu juga dengan melaksanakan langkah program pengembangan kualifikasi guru dan tenaga pendidik agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung; disamping penyiapan berbagai instrumen pendukung dalam proses pendidikan.

Pendidikan di keluarga dimana peran perempuan cukup signifikan dalam mempersiapkan pembekalan bagi anak-anak mereka dapat lebih memfokuskan pada pendidikan dan pembekalan untuk menumbuhkan *inner power* yang kokoh pada anak guna menghadapi tantangan perubahan ke depan. Yang sangat diperlukan bagi pendidikan anak-anak dewasa ini, khususnya pada sisi *inner power* adalah penguatan daya Imani bahwa esensi tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh ridha atau persetujuan, tindakan Allah atas segala sikap dan perbuatan selama menjalankan kehidupan di dunia, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak. Hanya sikap dan perbuatan yang disetujui Allah yang akan mendapat ridhaNya, sedangkan sikap perbuatan yang dimurkaiNya akan tertolak.

Penguatan daya Imani juga berhubungan dengan komitmen moral pada sikap dan tindakan yang benar dan baik, serta menghindari sikap dan tindakan yang salah, keliru, dan merusak bagi sesama manusia dan alam sekitarnya. Disinilah nilai-nilai moral keagamaan perlu difungsikan dalam interaksi di lingkungan keluarga. Dari pembiasaan dan kebiasaan yang terbentuk dalam sikap dan tindakan sehari-hari dengan acuan penguatan daya Imani serta komitmen moral untuk berbuat yang baik dan benar serta sarat dengan kebajikan serta menghindari tindakan yang merusak, proses pembentukan karakter anak yang dilandasi nilai-nilai keagamaan bisa terbentuk.

2. *Perubahan sosial dan budaya*

Perkembangan ekonomi dan teknologi juga membawa dampak perubahan terhadap aspek sosial dan budaya. Salah satu dampaknya tergambar dari perubahan struktur kehidupan keluarga. Secara tradisional laki-laki lah yang mempunyai kewajiban sebagai pencari nafkah, perempuan dengan tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga. Namun pakem tradisional itu tidak lagi berlaku saat ini. Dewasa ini makin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan sendiri, termasuk perempuan yang telah berumah tangga dan mempunyai anak. Mereka yang bekerja di sektor formal dengan jam kerja yang terjadwal dari pagi sampai sore, di pagi hari sudah harus meninggalkan rumah agar bisa memenuhi ketentuan jam kerja di kantor, dan baru kembali ke rumah pada sore hari sesuai jadwal kerja.

Kebanyakan rumah tangga dengan pasangan suami istri bekerja di luar rumah dengan jadwal waktu tetap di siang hari harus mencari jalan keluar merekrut tenaga asisten rumah tangga (ART) untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah

tangga, termasuk urusan mengasuh anak. Bagi keluarga tertentu yang mampu mengeluarkan imbalan untuk merekrut pengasuh anak balita, ada yang merekrut pengasuh anak secara khusus. Akibatnya bagi ibu bekerja di luar rumah yang semula mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk berinteraksi memenuhi kebutuhan anak sehari-hari secara fisik biologis dan mental psikis, mau tidak mau perlu mendelegasikannya kepada pengasuh anak dan atau kepada asisten rumah tangga.

Pendelegasian peran pengasuhan dan pendidikan anak kepada asisten rumah tangga (ART) atau pengasuh anak tidak sepenuhnya sesuai standar yang diharapkan oleh si ibu, tetapi tentu tanpa ada yang dipercaya untuk menitipkan pemenuhan kebutuhan anak selama ditinggalkan oleh ibu, tentu merupakan kesulitan tersendiri bagi ibu yang bekerja di luar rumah. Mau tidak mau si ibu tetap harus memiliki cara tersendiri untuk memantau kondisi anak, serta menggunakan waktu seoptimal mungkin bersama anak memenuhi kebutuhan mereka ketika sudah berada di rumah. Disamping itu, tempat penitipan anak yang mulai banyak tersedia dengan layanan para petugas profesional di lembaga tersebut mulai menjadi pilihan bagi ibu untuk menitipkan anaknya selama ia bekerja.

..

Penutup

Perempuan mempunyai peran signifikan bagi pendidikan anak, terutama di lingkungan keluarga terkait kedudukan sebagai ibu, disamping peran perempuan sebagai guru dan pendidik di lembaga pendidikan formal dan non formal. Pendidikan anak di lingkungan keluarga yang secara inheren terkait dengan posisi perempuan sebagai ibu, terutama dapat difokuskan pada pembentukan *inner power* dan *inner*

strength anak yang berkaitan dengan aspek mental spiritual serta penguatan komitmen moral bagi pembentukan sikap-tindakan yang benar dan sarat kebaikan dan menjauhi sikap tindakan yang merusak dan terlarang. Sementara sekolah dan lembaga pendidikan formal menjalankan fungsi pendidikan bagi penguatan *inner power* tersebut, dengan mengedepankan pendidikan mempersiapkan manusia unggul melalui penguatan knowledge dan *saintific base* guna memenuhi kriteria I4C4, memiliki integritas, inisiatif, inovasi, dan imajinasi dengan proyeksi ke depan, disamping kriteria manusia unggul yang kreatif, kompeten, komunikatif dan kolaboratif, yang sangat diperlukan berhadapan dengan tantangan perubahan pesat akibat perkembangan teknologi informasi dan *digitalized community* ke depan.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahannya*, (2002), Kementerian Agama Republik Indonesia
- Bohlin, Karen E., & Ryan, Kevin., (1999), *Building Character in Schools*, Jossey-Bass a Willey Imprint
- Borba, Michelle., (2001), *Building Moral Intelligence*, Jossey-Bass a Willey Imprint.
- Ibnul Qayyim al Jauziyah, (2018), *Terapi Penyakit Hati* (Terjm.), Qisthi Press, Jakarta
- Imam al Ghazali, (1994) *Ihya Ulumuddin, Jilid IV Terjemahan Edisi Indonesia*, As Syifa Semarang
- Imam Al Ghazali; (1994), *Ihya Ulumuddin, Jilid V, Terjemahan Edisi Indonesia*, Asyifa Semarang
- Lickona, Thomas., (2004), *Character Matters*, A Touchstone Book
- Lickona, Thomas., (1992), *Educating for Character*, Bantam Books
- Morrison, George S., 2009, *Early Childhood Education Today*, 11th Pearson International Edition

- Santrock, John W., (2002), *A Topical Approach to Life Span Development*, Mc Graw Hill
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, (2010), *Prophet Parenting Cara Nabi Mendidik Anak*, Pro U Media, Jogjakarta,
- Ulwan, Abdullah Nasih., (2002), *Pendidikan Anak dalam Islam Jilid I dan II*, Pustaka Amani.



ISLAM DAN SPIRITUALISME PEREMPUAN

Prof. Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A.

Dalam dunia tasawuf, perempuan pada hakikatnya telah memainkan peran positif dan sangat memengaruhi pencapaian spiritual tokoh-tokoh besar seperti Dhū an-Nūn al-Misrī (d. 246/841), Abū Yazīd Al-Bustāmī (804 – 874), Ibn ‘Arabi (1165–1240), Jalaluddin Rumi (1207–1273), dan tokoh sufi lainnya. Namun demikian, karena tidak banyak karya-karya para sufi yang mengulas secara khusus tentang peran sufi perempuan dalam dunia tasawuf, keberadaan mereka seakan dikesampingkan dan tenggelam dalam lintasan sejarah.

Para pemerhati dan peneliti sufisme modern seperti Schimmel (1982) menegaskan bahwa perempuanlah yang memperkenalkan konsep cinta murni ke dalam misti-sisme Islam, dan karena alasan ini ia dihormati selama berabad-abad. Hal ini kemudian dapat ditelusuri selama berabad-abad bahwa terdapat banyak perempuan agung di hampir setiap aliran tasawuf. Misalnya, mereka bertindak sebagai syaikhah (pembimbing spiritual), mereka diterima sebagai orang suci dan mampu mencapai ketinggian derajat dalam sufisme.

Banyak perempuan mulia yang memiliki kecenderungan spiritual dan sangat memengaruhi tokoh-tokoh sufi laki-laki bahkan mereka pada gilirannya mampu menjadi guru sufi

terkemuka. Smith (1927) juga menguatkan bahwa gelar waliullah juga dianugerahkan kepada perempuan sama dengan laki-laki, karena dalam Islam tidak ada kasta imam, tidak ada yang menghalangi perempuan untuk mencapai derajat tertinggi dalam hierarki kekasih Allah. Bahkan di negara yang kondisi sosial-patriarkalnya sangat kuat seperti Senegal, persaudaraan sufi memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan spiritualitasnya di ruang publik (Bop 2005). Di masa depan, Buehler (2016) memperkirakan bahwa perempuan akan terus mendapat peran lebih besar dalam aktivitas tasawuf. Untuk itu, tulisan singkat ini akan menukil beberapa karya penting dalam khazanah literatur tasawuf sebagai inspirasi, refleksi dan kontekstualisasi atas peran perempuan dalam penyemaian dan pengembangan nilai-nilai tasawuf saat ini.

Perempuan dalam Literatur Tasawuf

Salah satu literatur yang sangat berpengaruh di masa awal penulisan kitab-kitab tasawuf adalah kitab *At-ta'arruf li-madhihab ahl at-tasawuf* (Pengantar untuk Metodologi Kaum Sufi) karya Abū Bakr al-Kalābādī dari Bukhara (d.ca. 380/990). Menariknya, seperti yang diulas Rika Elaroui Cornell (1999) dalam pengantar buku *Early Sufi Women*, setelah mengurai secara ekstensif mengenai istilah “sufi” dan daftar panjang hal ihwal istilah dan atribut-atribut kaum sufi, al-Kalābādī menutup babnya dengan gambaran pertemuan antara tokoh sufi terkenal dari Mesir Dhū an-Nūn al-Misrī (d. 246/841) dengan seorang perempuan sufi yang tidak disebutkan namanya di tepian pantai Syria.

*Dhū an-Nūn berkata : Aku melihat seorang wanita di pinggir
pantai Syria dan bertanya kepadanya,
“Dari manakah engkau datang (semoga Tuhan merahmatimu)?”*

Ia menjawab, "Dari kaum yang bangun dari ranjang mereka pada malam hari (memanggil Tuhan mereka dengan penuh ketakutan dan harapan)"¹

*Kemudian aku bertanya, "Dan kemanakah engkau hendak pergi?"
Ia berkata, "Menuju kaum yang tidak usaha untuk dunia dan tidak juga pencarian keuntungan dapat memalingkan mereka dari pengingatan akan Tuhan."²*

*"Gambarlah mereka untukku," kataku. Dan ia mengutip:
"Suatu kaum yang menyerahkan pencarian mereka untuk Tuhan,
Dan yang hasrat mereka tidak menginginkan apapun selainnya.
Tujuan mereka adalah Pemilik dan Penguasa mereka,
Oh, betapa mulianya tujuan mereka, diperuntukkan bagi Dia Yang
Tak Terbandingkan!*

*Mereka tidak bersaing untuk dunia dan kehormatannya,
Baik untuk makanan, kemewahan, ataupun anak-anak.
Tidak juga untuk pakaian-pakaian yang indah dan mahal,
Maupun untuk kenyamanan dan kesenangan yang ada di kota-kota.
Sebaliknya, mereka bersegera menuju janji akan sebuah tingkatan
yang tinggi,
Mengetahui bahwa setiap langkah membawa mereka lebih dekat
kepada horizon terjauh.*

*Mereka adalah tahanan dalam tempat pencucian dan saluran-saluran,
Dan engkau dapat menemukan mereka berkumpul di puncak-puncak
gunung."*

Sajak di atas menjadi penutup salah satu bab kitab al-Kalābādī, hal ini menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap pemahaman tasawuf seperti yang diingatkan oleh tokoh perempuan dalam sajak tersebut. Dari penelusuran Cornell (1999), tokoh perempuan yang berdialog dengan Dhū an-Nūn tersebut adalah Fatima dari Nishapur seperti yang diungkap oleh Abū 'Abd Al Raḥmān Al Sulamī (365/976 – 412/1021), yaitu penulis pertama hagiografi (*sacred biography*) perempuan sufi yang ia kompilasi dalam karyanya *Ẓikr al*

Niswa al Muta'abbidāt al Ṣūfiyāt yang memuat 82 biografi perempuan-perempuan sufi. Fatima dari Nishapur adalah seorang perempuan sufi yang menghabiskan banyak tahun di Mekkah, jauh dari rumahnya di Iran bagian timur, dan mengembara jauh ke Palestina dan Syria. Menurut as-Sulami, pertemuan antara Dhū an-Nūn dengan Fatima bukanlah di tepian pantai Syria, melainkan di Mekkah atau Yerusalem. Fatima bertemu dengan Dhu an-Nun al-Misri dan mengajarkan kepada Dhu an-Nun subyek-subyek seperti doktrin kebenaran (*sidq*) dan exegesis (*ta'wil*) dari al-Quran. Secara signifikan, as-Sulami menggambarkan Fatima dari Nishapur sering mengkoreksi Dhu an-Nun. Berkat kebijaksanaannya, Dhu an-Nun menunjukan bagi Fatima pujian tertinggi yang dapat diberikan seorang master Sufi kepada seorang kolega : "Ia adalah seorang wali (*waliya*) di antara wali-wali (*awliyā*) Allah."

As-Sulami juga menyebutkan bahwa seorang sufi besar lain yaitu Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī (d. 261/875 atau 264/877-78), yang pernah mengatakan bahwa "sama saja bagiku apakah aku berjalan melewati seorang wanita atau sebuah tembok", juga memiliki pendapat yang sama tingginya tentang Fatima dari Nishapur. "Selama seluruh hidupku," kata Abū Yazīd, "Aku hanya melihat satu orang laki-laki sejati dan satu orang wanita sejati. Wanita tersebut adalah Fatima dari Nishapur."

Dalam kisah yang lain, dikisahkan bahwa Dhū Nūn Al-Miṣri bertanya kepada seorang perempuan salihah, ahli ibadah di padang pasir, tentang cinta, perempuan itu menjawab, —*Bahwa cinta tak bermula dan tak berakhir karena sesungguhnya bagi Sang Tercinta atau Sang Terkasih, tiada akhir cinta bagi-Nya, pada awal cinta terdapat rasa ingin memiliki segalanya, di pertengahan cinta ada rasa kepuasan dan akhirnya tak terbatas.*¶ Seketika Dhū Nūn Al-Miṣri terkesima. Perempuan tersebut bangun dan melanjutkan, —*Ketika Allah mencintai suatu kaum, kaum tersebut akan berketetapan hati pada jalan cinta sehingga*

mereka tidak tidur, menghabiskan malam untuk menyembah beribadah kepada-Nya.

Mereka disirami kejernihan jiwa yang disiram dengan cawan cinta. Mereka senantiasa berpuasa dan terbangun dari tidur malam untuk beribadah karena mencintai-Nya. Sebagaimana yang diilhamkan Tuhan kepada Nabi Daud a.s., Allah berfirman bahwa siapa yang meminta-Ku untuk mencabut nyawanya karena rindu yang mendalam hasrat berjumpa dengan-Ku, Siapa yang mencintai-Ku maka niscaya Aku mencintainya sampai ia tak akan sabar untuk bertemu dengan-Ku.

Dalam riwayat lain yang masyhur, Dhū Nūn Al-Miṣri menyatakan bahwa ia menjadi murid Fāṭimah Al-Naisābūriyah. Ungkapan mistiknya yang luhur, Fāṭimah Al-Naisābūriyah berkata, —*Siapa yang tidak atau belum mendekat kepada Allah dalam semua situasinya maka sesungguhnya ia senantiasa akan tergelincir jatuh di arena kehidupannya dan ia hanya akan berkata dengan kesia-siaan. Siapa yang mengupayakan untuk senantiasa dekat dengan Allah maka ia akan dianugerahi ketenangan dalam kebenaran, rasa malu, dan ikhlas.* Fāṭimah Al-Naisābūriyah juga berkata: —*Barang siapa yang beribadah karena musyahadah Allah kepadanya, maka ia termasuk orang yang ikhlas*”. Dhū Nūn Al-Miṣri dan Bāyazid al-Bistāmī memuji kemuliaan perempuan dari Naisabur tersebut bahwa mereka belum pernah berjumpa dengan perempuan seperti yang mampu menguraikan peliknya maqāmat dengan begitu terang dan jernih.

Di dalam karyanya Sultān al-ʿĀrifin, 178 ia menceritakan ibunya adalah inspirasi pertama spiritual Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī. Al-Sahlagī mengomentari hal yang sama dalam kitab *Sultān al-ʿĀrifin* bahwa ibunya adalah seorang perempuan salihah dengan spirit spiritualitas yang tinggi yang langka dan luar biasa. Ia adalah perempuan pelaku asketisme yang taat

dan memiliki karakter tawaduk (*humility*), sangat malu (*hayā'*), sangat takut (*khauf*), dan selalu meletakkan harapannya hanya kepada (*rajā'*) Allah. Ia selalu berzuhud dan sangat tekun menjalani ibadah malam, puasa, dan seorang perempuan yang mulia di mana setiap orang merasa senang berada di dekatnya.

Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī meyakini bahwa ia mendapatkan capaian spiritualnya tak lain karena ridha sang ibu kepada dirinya. Ibunya pula yang membesarkannya dan mengirimnya ke sekolah di luar Bistām untuk belajar tasawuf kepada guru sufi. Ibunya memiliki usia yang cukup panjang. Ia masih hidup ketika Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī kembali ke rumah setelah selama tiga puluh tahun menuntut ilmu dan meninggalkan Bistām.

Atas restu ibunya ini, Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī menekuni panggilan kesufian dengan mengembara ke banyak wilayah Islam. Setelah ia meninggalkan kampung halamannya, ia mengembara dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Ia mendisiplinkan dirinya dan mendedikasikan hidupnya untuk menjalani kehidupan asketik. Di satu riwayat disebutkan bahwa dalam pengembaraannya di negeri yang jauh, dalam perjalanannya Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī pernah berguru dan menimba hikmah spiritual dengan seorang perempuan anonim yang tinggal di gurun. Awalnya Abū Yazīd Al-Buṣṭāmī hanya menganggap perempuan tersebut sebagaimana orang biasa saja. Akan tetapi, ketika ia menemukan bahwa tingkat spiritual tersebut lebih tinggi dari dirinya, ia menjadikan perempuan tersebut sebagai gurunya.

Tokoh sufi besar lainnya yang mengagungkan perempuan adalah Ibn 'Arabī (1165–1240), dalam kitabnya yang berjudul *Tarjumanul Asywaq*, Ibnu Arabi menyatakan bahwa kesempurnaan Tuhan ada dalam diri perempuan. Ibnu Arabi meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini, merupakan cerminan (*tajalli*) Tuhan. Pantulan Tuhan tersebut,

bisa tercermin dalam diri manusia. Akan tetapi dalam hal tersebut, Ibnu Arabi mengatakan bahwa perempuan adalah tempat paling sempurna sebagai tajalli Tuhan. Demikian pula Jalaluddin Rumi (1207-1273), tokoh sufi besar yang namanya tetap harum baik di Timur dan Barat, di dalam salah satu bait *Matsnawi*, *magnum opus*-nya, menyerukan bahwa, “perempuan adalah tipe leluhur dari keindahan di bumi, namun keindahan di bumi ini tak ada artinya kecuali menjadi manifestasi dan pantulan dari sifat-sifat Ilahi.”

Perempuan Sufi di Nusantara

Pekembangan peran perempuan di Nusantara telah memainkan peran sejak awal Islam hingga abad pertengahan. Dalam sejarah tarekat di Indonesia, beberapa sufi perempuan turut berkontribusi dalam perkembangan tasawuf hingga saat ini. Salah satu filolog terkemuka Indonesia, Oman Fathurrahman (2017) yang penelitiannya fokus pada naskah-naskah khusus sejarah tarekat di Indonesia, menyebutkan ada lima perempuan sufi dalam sejarah awal Islam Indonesia. Keterkaitan dan perkembangan tarekat sufi pada abad ke-19 menunjukkan bahwa perempuan diakui menjadi anggota (murid) bahkan pemimpin (*syaikhah*) meskipun berada dalam masyarakat patriarki. Ia mencontohkan beberapa mushaf yang menyebutkan perempuan sufi. Misalnya saja salah satu naskah tarekat sufi Syattariyah yang dikumpulkan di British Library menceritakan tentang seorang wanita Sumatera bernama Hamidah binti Sulaiman sebagai murid Teungku Abdul Wahab Tanoh Abee, Aceh. Contoh lainnya adalah naskah Jawa yang juga menyebutkan ratu Fatimah sebagai murid Kyai Arjain (pemimpin muslim di keraton Cirebon) dalam tarekat sufi Syattariyah.

Tinjauan sejarah terhadap naskah-naskah ini menandakan bahwa terdapat sejumlah perempuan dalam sejarah tarekat pada awal perkembangan tasawuf di Indonesia. Perkembangan sufi perempuan di Nusantara dapat ditelusuri dalam beberapa hasil penelitian terkini. Misalnya Bruinessen (1992) yang menyatakan bahwa Naqsybandiyyah Muzhariyyah di Madura membolehkan perempuan menjadi pemimpin (mursyidah). Dari hasil riset yang dilakukan oleh Mulyadi (2012), ditemukan ada empat pemimpin perempuan pada abad ke-19 ketika tarekat Naqsybandiyyah Muzhariyyah telah menyebar di Madura. Kemudian Birchok (2016), melakukan penelusuran jejak para syaikhah (pemimpin perempuan) dalam tarekat Syattariyah di Seunagan Aceh. Kajian lapangannya fokus pada dua orang wali perempuan yang bertempat tinggal dan dimakamkan di Seunagan terkait dengan keluarga besar sufi yang merupakan tokoh besar dalam tarekat Syattariyah.

Dari ulasan singkat tentang eksistensi dan kontribusi perempuan dalam dunia tasawuf baik yang telah diungkap oleh tokoh-tokoh sufi besar melalui karya-karya awal literatur tasawuf maupun perkembangan tarekat di Nusantara, membuktikan bahwa perempuan mendapat tempat yang mulia dan menjadi inspirasi para tokoh-tokoh besar sufi dan mewarnai penyebaran nilai-nilai tasawuf di Nusantara. Semoga ke depan, peran perempuan akan lebih besar dalam aktivitas dunia tasawuf seperti yang diperkirakan oleh Buehler (2016) di atas.

Daftar Pustaka

Al-Kalābādhi, Abū Bakr Muḥammad bin Ishāq Al-Bukhārī. *Kitāb al-Ta'aruf li Madhhab Ahl al-Ṭaṣawwuf*. Kairo: Maktabah al-Khanji, t.t.

- Al-Miṣri, Dhū Nūn. *Ṣifāh al-Mu'min wa al-Mu'minah*. Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyah, 2002.
- Al-Sulamī, Abū 'Abd Al-Raḥmān. *Dhikr al-Niswah al-Muta'abbidāt al-Ṣūfiyyāt*. Kairo: Maktabah al-Khanjī, 1993.
- Birchok, Daniel Andrew, Women, 'Genealogical Inheritance and Sufi Authority: The Female Saints of Seunagan, Indonesia', *Asian Studies Review* Vol. 40, No. 4, 2016.
- Bop, C. 'Roles and the Position of Women in Sufi Brotherhoods in Senegal'. *Journal of the American Academy of Religion*, 73(4), 1099-1119. 2005
- Bruinessen, V & Howell, J, D, *Sufism and the 'Modern' in Islam*, London, New York: I.B. Tauris. 2008
- Bruinessen, Van Martin. *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1992.
- Buehler AF. *Recognizing Sufism: Contemplation in the Islamic Tradition*. London: I.B. Tauris Publishers. 2016
- Helminski, Camille Adams. *Women of Sufism: A Hidden Treasure, Writings and Stories of Mystic Poets, Scholars and Saints*. Shambhala Publications. 2003.
- Ibn-Al-Arabi. *Tarjuman Al-Ashwaq*, Beirut: Maktaba Dar-al Sadir. 1992.
- Mulyadi, Achmad, 'Budaya Egalitarianisme Perempuan Madura dalam Tarekat Naqsyabandiyah', *Karsa* Vol 23, No 1 (2015).
- Rūmī, Jalāl al-Dīn Muḥammad. *The Mathnawī of Jalālu'ddīn Rūmī*, ed., trans., and comm. R. A. Nicholson (London: Gibb Memorial Trust 1924-1940), IV: 1358-65.
- Schimmel, Annemarie. *My Soul is a Woman*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1987.
- Smith, M. 'The Woman Saint in The Development of Islam'. *Muslim World*, 17(2), 130-138. 1927.



PEREMPUAN SEBAGAI PILAR PERADABAN ANTARA DINAMIKA DAN PERJUANGAN

Hj. Dr. dr. Ulla Nuchrawaty, M.M.

Pendahuluan

Siklus Kehidupan tidak akan pernah lepas dari penguatan peran perempuan di semua sektor, ruang dan jarak. Keberlangsungan dan perkembangan suatu gerakan adalah sebuah keniscayaan, maka adalah patut dan sungguh menjadi fundamental apabila kita tahu dan memahami hakikat keberadaan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan dalam memberi kontribusi aktif dalam bermasyarakat sebagai wujud kepedulian sosialnya.

Perempuan tidak hanya takdir Allah SWT. Tetapi lebih dari itu perempuan juga diciptakan sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang lebih spesifik dan keunggulan tersendiri sebagai sunnatullah, karena perempuan dengan fungsi reproduksinya yang mampu melanjutkan suatu generasi penerus bangsa dan peran perempuan sebagai sosok yang amat penting dalam sebuah keluarga. Betapa suatu peran yang amat strategis dan memiliki serta harus mempunyai kemampuan

yang melebihi kapasitas, bahkan melayani batas batas kompetensi yang ada.

Pada masa lampau, peran dan fungsi perempuan pada umumnya masih berorientasi kepada kebutuhan domestik semata. Bahkan keberadaan perempuan nyaris hanya sebagai pendamping dan kelengkapan dalam keluarga semata.

Namun dalam perjalanan kehidupan, dari masa ke masa, bahkan dari zaman ke zaman, tata nilai sudah mulai bergeser dan ikut dalam perubahan berbagai dimensi kehidupan dan lingkungan strategis yang ada dan tumbuh berkembang dalam status sosial masyarakat.

Perubahan tata nilai inilah yang juga ikut memberi makna peradaban sistem sosial di kalangan kaum perempuan yang juga ternyata tidak hanya terpaksa dan menerima kondisi dan kejadian nyata yang dihadapinya, tetapi justru juga telah memberi warna baru dalam cara pandang dan pola fikir serta sikap dan menghadapi segala macam bentuk masalah tantangan serta hambatan sekaligus dapat melihat peluang yang ada serta solusi pemecahannya.

Perjalanan waktu dan peradaban zaman ini pulalah yang mengantarkan perempuan ikut serta secara aktif untuk berkontribusi dalam membangun dan menentukan peradaban yang hakiki.

Disadari bahwa di zaman itulah hakekat peradaban. Maka hendaknyalah peradaban itu berorientasi dan senantiasa membawa kebaikan, kemajuan dalam sebuah tatanan kehidupan yang mengedepankan nilai-nilai sosial, budaya yang berbasis kepada norma norma agama, yaitu budi pekerti dan akhlak mulia.

Perempuan Sebagai Pilar Peradaban.

Al-Quran dan hadits telah menyatakan posisi perempuan sebagai makhluk mulia. Berbagai ungkapan para alim ulama dalam mengedepankan betapa pentingnya posisi dan peran perempuan dalam kokoh dan kuatnya sebuah kaum atau negara, bangsa

Dikatakannya antara lain;

1. Perempuan sebagai tiang negara yang bermakna. Apabila suatu negara akan kuat, maka perkuatlah perempuannya. Berdayakan perempuan berarti ikut memberdayakan bangsa, dan bila perempuan itu lemah, maka niscaya negara bangsa tersebut lemah dan pada akhirnya akan merontokkan negara tersebut.
2. Perempuan adalah perhiasan terindah, yang bermakna. Perempuan itu harus cantik, lahir dan bathin, cerdas dan cendekiawan serta bukan hanya menjadi perhiasan yang enak dipandang (*good looking*) tetapi maksudnya adalah perhiasan yang terindah adalah sebagai perempuan yang sholehah yang dibalut dengan akhlak yang mulia serta ketaatan pada perintah Allah SWT.
3. Perempuan adalah penentu arah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, bahwa surga ada dibawah telapak kaki ibu yang bermakna, setiap anak harus menghormati, menyayangi dan mengasihi Ibundanya dengan penuh kasih sayang dan memberi cinta yang tulus sebagai pengabdian kepada kedua orang tuanya.

Berdasarkan ketiga tuntunan tersebut, dan banyak lagi kaidah serta hal tadi selalu disampaikan oleh para guru, para alim ulama tentang makna pentingnya perempuan sebagai pilar peradaban, yang berawal dari perbuatan dan perilaku sederhana yang diemban dan dicontohkan oleh kaum ibu didalam diri dan keluarganya.

Beranjak kepada kondisi sosial dan kemajuan zaman saat ini, maka tidak dapat dipungkiri, perempuan menjadi semakin kompleks dan itu memerlukan suatu *effort* yang luar biasa pula.

Perempuan tidak lagi harus menyatakan diri sebagai peran pendamping dan pembantu tetapi saatnya perempuan maju sebagai penggerak utama dan terutama dalam hal berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam peran politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.

Peran perempuan sebagai penentu kebijakan bukan lagi terbatas pada peran teknis dan taktis semata, tetapi juga harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan lebih penting lagi perempuan tidak hanya sebagai pelengkap atau ikutan dalam proses politik semata tetapi sudah saatnya perempuan ikut sebagai kader dalam suatu kelompok/organisasi yang heterogen.

Zaman sudah berubah, maka pola pikir dan pola tindak juga harus ikut dalam arus perubahan sebagai konsekwensi negara maju dan modern, yaitu melibatkan perempuan dalam menentukan arah kebijakan strategis sebagai gender responsif dan *gender equity*, agar kebutuhan primer, dan kebutuhan psikologi perempuan dapat terwakili melalui peran strategis dalam konsep gender sensitif.

Kalau kita masih terpaku pada konsep lama, yang memandang perempuan lebih berorientasi kepada peran domestic semata, berarti kita belum masuk kepada peradaban global tentang konsep *gender main streaming* yang artinya kita masih tertinggal dalam pemikiran memandang peradaban yang konservatif.

Dinamika dan Perjuangan Perempuan

Indonesia sebagai negara yang ikut meratifikasi CEDAW (*Convention on Elimination and Discrimination, all Against Woman*), sejak tahun 1986 hingga saat ini sudah dirasakan gerakan dan dinamikanya dalam penerapan dan sosialisasinya maksud dan tujuan CEDAW tersebut.

Statistik juga sudah menunjukkan pencapaian keunggulan perempuan serta gerak langkah perjuangannya di Indonesia hal ini terbukti dari pertumbuhan kembangnya organisasi perempuan baik di daerah, nasional, dan yang bertaraf internasional antara lain yang dapat dilihat dalam organisasi perempuan terkemuka di Indonesia (KOWANI) yang saat ini sudah beranggotakan lebih dari 100 ormas perempuan, yang berbasis dan berkarakter sesuai dengan visi, misi serta *local content* masing masing ormas tersebut, kemajemukan dan latar belakang organisasi perempuan sudah barang tentu memerlukan suatu manajemen dan sejak kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan dan mengatur irama serta penciptaan suasana yang harmonis, sinergis dan kondusif.

Terlepas dari peran organisasi, maka secara personal juga masing masing perempuan mempunyai *style* dan posisi tersendiri yang justru membuat dinamika yang lebih semarak.

Mengacu kepada kondisi objektif yang ada dewasa ini, bahwa, keberadaan perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik termasuk bidang politik dan ekonomi, sudah semakin mewujudkan geliatnya.

Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya posisi strategis perempuan yang dulunya, pada saat belum adanya perjuangan dan kesetaraan kaum perempuan sedunia, masih kita tahu bahwa menurut statistik pada saat itu (sebelum ratifikasi CEDAW), disebutkan bahwa jumlah perempuan yang duduk

dalam proses menyusun keputusan (*policy*) hanya sebesar 5 persen dari total perempuan yang bekerja di ruang publik, dan hanya 1,5 persen dari jumlah tersebut yang ikut sebagai pengambil keputusan (*decision making*) dan disebutkan juga hanya 0,5 persen perempuan di dunia yang menikmati hasil pembangunan.

Berangkat dari data tersebut, maka dibandingkan dengan saat ini maka sudah patut disyukuri bahwa telah terjadi suatu pergolakan pemikiran dan gerakan perempuan seluruh dunia secara sporadik untuk menjawab tantangan yang dihadapi dan sekaligus menghadapi dan menyiapkan strategi *competitive advantage* dalam berbagai permasalahan dari unsur unsur yang ada dan berkembang di masyarakat.

Perempuan dan gerakan perjuangan yang dihadapi dengan berbagai dimensi itulah yang justru ikut memberi arti dan kontribusi terhadap arah dan makna peradaban itu sendiri.

Gerakan Perempuan dalam Peradaban Modern.

Memperhatikan perjuangan kaum perempuan di Indonesia saat ini sudah patut kita syukuri, karena dengan alam keterbukaan, serta berbagai bentuk penindasan dan ketidak bebasan perempuan sedikit demi sedikit sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Hal ini dapat kita rasakan dengan adanya beberapa hal yang telah membuka iklim yang lebih kondusif bagi kaum perempuan yaitu antara lain, adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang dan ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam politik antara lain, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta banyaknya Lembaga swadaya masyarakat yang mendukung dan menampung aspirasi dan aktivitas perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa.

Lihat saja dalam bidang politik, telah ada undang-undang yang ikut memperkuat dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang politik misalnya, Undang undang Partai Politik pasal 65 tentang keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam segala hal.

Meski ini belum dapat realisasi secara sempurna dan seutuhnya, tetapi setidaknya telah membuat ruang bagi kaum perempuan untuk berperan. Sudah barang tentu segala upaya dan sekap terjang perjuangan perempuan terus digalakkan hingga benar-benar bisa dilihat hasil dari kebijakan tersebut.

Disisi lain secara internasional, kita juga sudah mengetahui betapa negara-negara lain juga terus memicu kemajuan perempuannya dan alhasil berbagai konfrensi atau pertemuan berskala internasional juga terus menyuarakan peranan perempuan dan subjek bidang antara lain konfrensi Beijing Platform dan berbagai negara negara lain.

Peran organisasi perempuan bertaraf internasional juga terus menerus mengadakan pertemuan yang menghasilkan kepurusan keputusan yang dapat menjadi impian dan juga menjadi acuan bagi seluruh perempuan secara global.

Hakekat Perempuan dalam Peradaban.

Saya memaknai peradaban sebagai akumulasi dari olah tatanan kehidupan bermasyarakat yang mengandung nilai nilai sosial, budaya, agama serta adat-istiadat secara fundamental yang juga tidak menutup kemung-kinan adanya intervensi atau perubahan nilai akibat kemajuan teknologi informasi saat ini, secara tidak sadar, akan kegiatan dan tata kelola berkehidupan secara tidak langsung sudah terkooptasi dengan hal hal dan masalah serta dinamika eksternal yang tidak dapat dihindarkan.

Oleh karena itu, peran serta fungsi perempuan juga sepatutnya ikut dalam alam perubahan tersebut, beradaptasi, bersama, dan akhirnya menguasai tata nilai baru tersebut dengan kesiapan yang lebih antisipatif, kreatif dan kecerdasan intelektual dan kulitas.

Kemajuan teknologi, yang telah merasuk ke ruang kehidupan ummat manusia adalah sebuah keniscayaan kesemuanya memasuki dan mengikuti era modernisasi dan kemajuan teknologi, sudah pasti akan memberi pengaruh dan daya cipta peradaban itu sendiri.

Perjalanan sejarah bangsa di seluruh dunia tidak akan pernah terlepas dari pengaruh antar negara bangsa, keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lain adalah suatu keniscayaan yang juga merupakan suatu tata nilai tersendiri yang bertujuan pada karakter dan juga di dalamnya adalah nilai-nilai fundamental setiap bangsa itu sendiri kemajuan teknologi dan komunikasi, serta hubungan antar manusia tidak dapat dipisahkan dalam penentuan peradaban bangsa.

Itulah sebabnya, peran perempuan yang sangat strategis dan menjadi penentu dalam perjalanan peradaban, mutlak harus dikedepankan dan dijadikan sebagai barometer keunggulan dan *legacy* bagi setiap negara bangsa peran kaum intelektual muslimah, khususnya yang tergabung dalam Majelis Alimat Indonesia, perlu terus dimajukan.



PERAN PEREMPUAN MODERN DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN: PERSPEKTIF AGAMA DAN KESETARAAN GENDER

Prof. Dr. Amany Lubis, Lc., M.A.

Pendahuluan

Berbicara tentang perempuan, tentunya kita harus menelisik kembali sejarah pada masa lampau bahwa peran perempuan memiliki kontribusi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Gerakan perempuan di Indonesia dapat dilihat dari masa kolonial (sebelum 1945). Pada masa itu, telah muncul tokoh perempuan daerah yang aktif melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Seperti halnya di Aceh ada Cut Nyak Dien (komandan perang Aceh), dan juga perjuangan Cut Mutia. Contoh lain adalah perjuangan Ratu Sima (618), seorang pemimpin perempuan yang jujur di Jawa Tengah. Selain itu, ada juga RA Kartini yang kita kenal sebagai tokoh emansipasi perempuan Indonesia. (Lubis, 2022)

Kebangkitan gerakan perempuan pada masa kolonial semakin terasa di tahun 1928 dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan 1 (22-25 Desember) di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Perbincangan dan perjuangan

hak-hak perempuan timbul karena adanya kesadaran pergaulan, dan arus informasi yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis dengan apa yang menimpa kaumnya. Perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pergerakan kaum perempuan di dunia. (Lubis, 2022)

Perkembangan gerakan kaum perempuan menunjukkan kemajuannya dengan munculnya wacana gender pada tahun 1977. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sekelompok feminis di London yang tidak lagi menggunakan isu-isu seperti patriarkal. Namun, mereka lebih memilih menggunakan *gender discourse*. Munculnya perkembangan gerakan perempuan di belahan dunia, membawa imbas terhadap gerakan perempuan di Indonesia pada umumnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peperangan adalah suatu aktivitas yang mengerikan. Dampak dari peperangan bisa merugikan berbagai aspek. Kondisi ini sangat merugikan banyak orang dan mengancam perdamaian dunia. (Baskhor, 2021)

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam dunia perang dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja. Contoh kasus pemerkosaan massal di Bosnia yang menunjukkan banyaknya perempuan yang menjadi korban dalam peperangan. Pada Perang Dunia II Jepang menggunakan perempuan sebagai pemegang kekuasaan mereka yakni menyediakan perempuan sebagai budak seksual untuk anggota Tentara Jepang. Hal itu demi memenuhi kebutuhan seksual tentara mereka yang balik dari tempat peperangan yang biasanya disebut sebagai (*jugun ianfu*). Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan nafsu belaka, juga hadir sebagai bentuk kebencian terhadap lawan. (Lubis et al., 1996).

Sejak dua tahun dari Agustus 2021 telah berganti pemerintahan di Afganistan yang diambil alih oleh kelompok Taliban. Afghanistan merupakan negara yang tidak ramah perempuan. Mereka mengalami tekanan seperti susah akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan serta mengalami kekerasan. Pemerintah Afghanistan telah berupaya dengan meratifikasi *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 2003, namun hingga tahun 2013 Komite CEDAW melaporkan bahwa pemerintah Afghanistan gagal dalam menaati komitmen implementasi CEDAW dalam hal perlindungan hak perempuan di negara mereka. Maka dari itu, muncul *Women for Women International* (WFWI) sebagai *Inter-national Non-Governmental Organization* (INGO) yang bertanggung jawab dalam membantu memberdayakan perempuan yang terdiskriminasi dengan langsung terjun pada perempuan level bawah di Afghanistan. WFWI melakukan pemberdayaan perempuan dengan memberikan berbagai macam pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan. (United Nations (UN) Women, 2021).

Dari latar belakang di atas jelas terlihat erat hubungan antara tercapainya kesetaraan gender dengan kesejahteraan dan perdamaian. Dalam dunia peperangan baik itu peperangan antar negara maupun perang saudara, perempuan dan anak sering menjadi korban walaupun mereka tidak bersalah.

Pembahasan

Berbagai masalah yang berkaitan dengan diskriminasi, emansipasi, hingga isu dikotomi terhadap perempuan berimplikasi pada munculnya konsep baru yang sering disebut dengan istilah wanita (perempuan) modern. Eksistensi istilah tersebut mulai bermunculan seiring dengan kebebasan pers

dan kemajuan zaman yang membawa pengaruh positif bagi kiprah kaum wanita. (Lubis, 2014) Secara definitif, perempuan modern dapat dimaknai sebagai perempuan yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya, perempuan yang memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya, dan memiliki prinsip hidup yang kuat. (Mustikawati, 2015)

Perempuan di era saat ini (modern) merupakan stakeholder pembangunan, karena itu pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan. Keterlibatan masyarakat perempuan untuk ikut memberikan masukan dalam perumusan serta pengawasan, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tanpa suatu penindasan dalam bentuk apapun.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan secara tegas bahwa setiap warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam konteks pembahasan ini, bisa diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program pembangunan dan menikmati pembagian peran pembangunan secara proporsional. Menciptakan ruang bagi perempuan dalam pembangunan, perempuan sebagai *agent of change* menitikberatkan pada pola hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, pengalaman dan pemahaman dari perempuan menjadi *entry point* dari proses pembangunan. Saat ini, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Di Kabupaten Klaten salah satunya, seorang perempuan dengan pendidikan dan pengetahuannya dapat menjadi seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mampu berperan serta dalam pembangunan. (Lan, 2015)

Ekspansi pada teori emansipasi yang ditandai dengan semakin banyak perempuan yang bekerja ini sepertinya mendorong *Universal Networks International* untuk melakukan studi. Hasil studi psikografi *Universal Networks International* yang bekerja sama dengan Synovate menghasilkan potret perempuan urban modern yang unik yang disebut *High Heeled Warriors* (Afif, 2019). Perempuan modern Indonesia dikatakan memiliki 10 sifat unik sebagai berikut: (1) Percaya bahwa memiliki karier adalah cara untuk berkontribusi kepada keluarga, dan prioritasnya dalam memberi produk juga untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya; (2) Sahabat adalah bagian terpenting dalam hidupnya; (3) Terpelajar dan selalu mencari informasi terbaru agar bisa merencanakan kehidupan dengan lebih baik; (4) Berorientasi sukses dalam setiap aspek kehidupan, termasuk sukses dalam membina keluarga harmonis dan membesarkan anak-anak; (5) Berorientasi karier dan kepuasan pribadi, memiliki rasa penghormatan atas diri sendiri serta kebanggaan dengan menjadi perempuan dan ibu bekerja yang sukses dan modern; (6) Ingin terlihat cerdas dan modern (intelektual dan melek fashion) dalam berpenampilan dan membawakan diri; (7) Melek keuangan (tidak melihat dirinya sebagai sosok pasif dalam pengambilan keputusan, terutama di keluarga), secara berkala mendiskusikan keluarga dengan suami, dan merencanakan keuangan dengan lebih baik untuk hidup lebih mapan; (8) Melek teknologi. Agar selalu terhubung dengan keluarga dan teman, mereka termotivasi untuk memiliki teknologi terkini, (9) Peduli pada kesehatan. Fitness dan aerobik menjadi pilihan untuk membantunya mencegah penyakit dan meningkatkan nutrisi sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidupnya, dan (10) Ingin aman dan nyaman dengan menghargai relaksasi dan memanjakan diri. Namun, kenyamanan ini tidak hanya untuk dirinya pribadi

melainkan dengan merencanakan masa depan keluarga atau kehidupan aman dan nyaman untuk keluarganya.

Kesetaraan gender menekankan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan dan hasil yang sama. Namun, fakta menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan di antara perempuan sendiri. Seperti telah dikemukakan di atas, antara perempuan desa dan perempuan kota ada perbedaan yang sangat besar. Subha Shree Das mengusulkan *women empowerment* untuk apa yang disebutnya sebagai “*unlocks door for modernization*”. Akan tetapi, walaupun ia mengemukakan bahwa “*addressing women’s issues also requires recognizing that women are a diverse group, in the roles they play as well as in characteristics such as age, social status, urban or rural orientation and educational attainment*” [dalam mengangkat isu perempuan juga memerlukan pengakuan bahwa perempuan adalah kelompok yang beragam, dalam peran yang mereka mainkan ataupun dalam karakteristik dasar mereka seperti usia, status sosial, orientasi urban atau rural dan pencapaian pendidikannya], ia lebih menekankan pada kelebihan yang diterima laki-laki dalam pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, ia menganjurkan *women empowerment* dipromosikan melalui “*democratic governance, decentralization and civil society participation and by developing women’s capacities through training, knowledge-sharing and networking*” [pemerintahan yang demokratis, desentralisasi dan partisipasi masyarakat sipil, serta dengan mengembangkan kapasitas perempuan melalui pelatihan, berbagi pengetahuan dan pembentukan jaringan]. Padahal permasalahannya ada pada apa yang secara sekilas juga dikemukakannya, yaitu: “*although women may have many interests in common, the fabric of their lives and the choices available to them may vary widely*” [meskipun perempuan

mungkin mempunyai banyak kepentingan yang sama, akan tetapi nuansa kehidupan dan pilihan yang tersedia untuk mereka dapat sangat bervariasi]”. (Darwin, 2004)

Paradigma penting yang harus melekat sebagai seorang perempuan yang modern adalah kemampuan mereka dalam melakukan pengaturan perdamaian dan berpartisipasi dalam menciptakan keamanan. Salah satu isu pokok yang kian populer adalah tampilnya perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding (*negotiator*) perdamaian. Keberadaan diplomat muda perempuan Indonesia, Nara Masista Rakhmatia dalam forum Sidang Majelis Umum PBB berdiplomasi menyampaikan argumentasi penolakan, menangkal ancaman dan memukul mundur “serangan” dari enam kepala negara yang menyerukan kemerdekaan bagi Papua. (Sugandi, 2008).

Menjadi suatu bukti otentik dan sejarah baru bagi kaum perempuan dalam mencegah konflik dan melakukan perunding perdamaian berskala internasional. Perempuan mempunyai peranan penting dalam pencegahan konflik, mengurangi tindak kekerasan, dan melakukan perundingan untuk perdamaian. Terutama melalui pendekatan informal di luar meja perundingan perdamaian (*soft power*). Namun, peran eksistensi perempuan kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian, sehingga dalam penyelesaian konflik dan segala persoalan pasca konflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Contoh kaum perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas Muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. Justru kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas Papa Lele lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar. Ada kesadaran, kehidupan harus terus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri. (Abidin, 2015)

Fenomena lain yang menonjol dan perlu diangkat mengenai peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan perunding perdamaian adalah dalam proses resolusi konflik di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah mengenai partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Dalam konteks konflik, secara umum, posisi perempuan dan anak tetap dipandang sebagai bagian dari kelompok yang rentan dan paling sering diposisikan sebagai korban. Potret perempuan menjadi korban lebih sering dimunculkan dalam tulisan yang ada dibandingkan dengan upaya untuk melihat bagaimana perempuan berpenampilan tegar dan mampu membangun konsolidasi untuk solidaritas dalam membantu korban konflik dan inisiasi penyelesaian konflik. Pada masa konflik di Aceh, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan. Pada tahun 2000, seorang tokoh perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzzaman bersama dengan beberapa tokoh lainnya berbicara di beberapa negara di Eropa dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi di Aceh, guna mencari jalan bagi penyelesaian konflik Aceh. Misi diplomasi seperti ini relatif berhasil menggugah perhatian dunia yang kemudian memberikan perhatian dan memediasi persoalan konflik yang terjadi di Aceh. (Avrillia, 2021)

Investasi terhadap perempuan sebagai agen perdamaian dan aktor diplomasi menjadi sebuah keharusan mengingat perempuan tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tapi juga pelaksana. Bila dilihat dari sudut pandang keagamaan, khususnya Islam memandang bahwa perempuan mempunyai hubungan secara vertikal dan horizontal.

Dalam perspektif ini kajian tentang perempuan dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, kedudukannya sebagai manusia ciptaan Tuhan. *Kedua*, kedudukannya dalam keluarga.

Ketiga, kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Perempuan, sebagaimana halnya laki-laki, diciptakan oleh Tuhan berasal dari saripati tanah dan selanjutnya melalui proses tertentu, yaitu dari sperma dan ovum sampai berbentuk (QS. al-Hajj: 5; al-Mukminūn: 12-14). Sebagai makhluk Tuhan, ia berfungsi sebagai khalifatullah (QS. al-Baqarah: 30) dan menjadi hamba Allah. Sebagai khalifatullah ia mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memakmurkan dunia. (Afif, 2019)

Sebagai hamba Allah, ia mempunyai kewajiban yang sama seperti pria, beribadah kepada Allah (QS. al-Mukminūn: 14; al-Dhāriyāt: 56), beriman dan melakukan karya kemanusiaan (QS. Āli-Imrān: 195; al-Nisā': 124). Dia akan memperoleh ganjaran yang sama seperti kaum pria jika melakukan kebajikan (QS. al-Ahzāb: 35), dan memperoleh siksa yang sama dengan pria jika melakukan perbuatan jelek atau jika menjadi munafik dan kafir (QS. al-Tawbah: 66). Wanita juga mempunyai kewajiban yang sama dengan pria dalam melakukan dakwah dan ibadah mahdhah ataupun ghair mahdhah (QS. al-Tawbah: 71), di bidang hukum jinayat seperti dalam hukum qisas (QS. al-Baqarah: 178), hukum pencurian (QS. al-Mā'idah: 38- 39), hukum perzinahan (QS. al-Nūr: 2).

Dengan demikian al-Quran secara umum sebenarnya telah menandakan tesis kesamaan harkat (*equality*) antara, wanita dan pria. Di hadapan Allah satu-satunya yang membedakannya adalah terletak pada kualitas ketaqwaannya (QS. al-Hujurat: 13). Berdasarkan landasan normatif al-Quran tentang kesamaan wanita-pria tersebut bahwa watak kemunusiaan antara wanita-pria hampir dapat dikatakan sama. Allah memberi potensi dan kemampuan kepada kedua jenis kelamin untuk memikul tanggung jawab dan menjadikannya mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat umum dan khusus.

Selanjutnya beliau menegaskan bahwa hukum Islam meletakkan kedua jenis kelamin ini dalam satu kerangka yang sama, tidak dibedakan satu sama lain. (Darwin, 2004)

Membicarakan perempuan dalam era teknologi saat ini tidak akan pernah habis. Karena, peranan perempuan dalam kehidupan, khususnya pertumbuhan ekonomi sangatlah penting. Dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, perempuan harus bisa berkontribusi. Karena, kapitalisme memandang bahwa yang bisa memajukan dan berkontribusi bukan hanya laki-laki saja, bahkan perempuan bisa lebih eksplisit dengan mengeksploitasi perempuan pada bidang tertentu. Oleh sebab itu, wajar saat ini rezim mendorong kaum perempuan untuk bekerja. Negara Barat dalam programnya, sebenarnya ingin menjadikan negeri kaum Muslim berbondong-bondong menjadikan perempuan sebagai pekerja dan ini adalah sebuah rekayasa yang memang sudah dirancang, sehingga dunia Islam tidak mengenalnya. Memang kehidupan ini tidak akan pernah jauh dari permasalahan kemiskinan, perceraian, kekerasan terhadap perempuan bahkan pembunuhan. Paham liberalisme yang tumbuh dalam sistem kapitalisme bukannya menolong dan menyelamatkan kaum perempuan, tetapi malah menjerumuskan kaum perempuan jauh dari makna yang sebenarnya bagi perempuan.

Kapitalisme memandang kedudukan perempuan sama saja dengan peran laki-laki, yang setara bisa bekerja dan mempunyai profesi yang sama dengan laki-laki. Berbeda dengan Islam yang memandang kaum perempuan mempunyai kedudukan khusus yang dimuliakan. Allah memberikan seperangkat aturan bagi manusia tetapi aturan tersebut dibedakan antara laki-laki dan perempuan karena optimasi dari keduanya berbeda. Banyak kaum perempuan atau ibu yang rela meninggalkan anak-anak dan keluarga mereka untuk bekerja bahkan hingga keluar negeri. Dari pagi hingga matahari

terbenam para perempuan bekerja menghabiskan waktunya di luar rumah. Banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari para perempuan yang bekerja *full day*. Seperti, anak-anak terabaikan, sehingga menjadi anak yang tidak berakhlak baik dan terampil, kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

Jika pekerjaan tidak menerima mereka, banyak peluang bisnis kotor yang meraup keuntungan dari kaum perempuan, tentu dengan menambahkan seni indah pada tubuh perempuan untuk menarik konsumen agar mau membeli produk buatan para pemodal serta mendapatkan pelayanan dari perempuan, dan lain-lain. Paradigma seperti itu memang sudah terjadi lama dan tumbuh subur dalam sistem liberalisme kapitalisme.

Aktivitas bukan saja bertujuan ingin memajukan ekonomi, tetapi ingin menjauhkan kaum muslim, terutama perempuan untuk meninggalkan peranannya sebagai ibu bagi peradaban generasi penerus (*ummu warabattul baiti*). Jadi, tidak akan ada generasi yang cemerlang yang membawa kejayaan Islam di muka bumi ini.

Karena itu, banyaknya faktor penyebab terampasnya hak-hak perempuan yang menjadikan ketidakadilan bagi perempuan. Tetap saja mereka tidak mendapatkan perlindungan atau posisi yang lebih baik di hadapan masyarakat. Banyak peristiwa yang membuat kaum perempuan seakan merasakan kehidupan ini kejam, tak sedikit yang mendapat kekerasan, pelecehan seksual, bahkan tindakan yang seharusnya mereka tidak mendapatkan. Dalam berpolitik pun perempuan hanya bisa dijadikan sebagai pemanis di kursi kekuasaan agar mereka bisa lebih dikatakan bijaksana terhadap kaum perempuan dan mempunyai andil dalam membuat undang-undang. Berbeda jauh dengan Islam.

Perempuan dimuliakan dengan derajat yang berbeda dengan kaum laki-laki, tetapi dalam berkontribusi dalam

peradaban Islam generasi penerus, kaum perempuan mempunyai sejuta kiprah, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anaknya. Aisyah al-Qurthubiyah adalah ulama perempuan seorang tokoh sastrawati dari Andalusia, Laila al-Ghifariyah sebagai juru rawat saat ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan Fatima al-Fihriyah adalah pendiri universitas tertua di dunia al-Qarawiyyin di kota Fez, Maroko.

Kesimpulan

Seiring majunya perkembangan zaman yang ditandai dengan munculnya era Globalisasi, industrialisasi, digitalisasi, dan westernisasi berdampak pada eksistensi perempuan dan perluasan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan mulai dari ekonomi sosial kemasyarakatan politik keamanan hingga perdamaian global. Keberadaan perempuan sebagai salah satu stakeholder dalam membentuk peradaban yang tertata menjadi sebuah hal yang sangat wajar mengingat konsep emansipasi dan kesetaraan gender semakin menyebar luas dan diimplementasikan hampir di seluruh sisi kehidupan.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memiliki salah satu poin penting yakni mengedepankan kesetaraan gender dan memberikan peran yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah partisipasi perempuan sebagai aktor global dalam berkolaborasi maupun berkompetisi dengan kaum pria. Salah satu bentuk peran aktif perempuan yang menjadi *output* dari pengimplementasian konsep kesetaraan gender adalah hadirnya perempuan yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas politik dan perdamaian global. Perempuan tidak hanya memiliki peran sebagai pendukung, pembuat kebijakan, maupun analisator, melainkan perempuan juga memiliki andil besar sebagai pelaku utama

dalam misi perdamaian dunia di kawasan konflik salah satunya adalah sebagai tentara, pasukan perdamaian, sampai pemimpin yang memiliki kewenangan dalam melakukan diplomasi. Bentuk kemajuan perempuan dengan peran yang semakin meluas di berbagai aspek kehidupan tersebut tidak lepas dari dukungan Islam yang menjadi landasan utama bagi optimalisasi peran wanita serta menjadi regulator bagi perempuan dalam berkiprah. Selain itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam memberikan paradigma baru dengan menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia, tanpa membedakan status baik sosial maupun individual.

Fleksibilitas Islam sebagai agama yang komprehensif ini mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi intensitas ajaran dan nilai-nilai penting yang terkandung dalam al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, hal itulah yang menjadikan Islam sebagai agama yang pro dengan kesetaraan gender.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2015, Juni). *"Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan"*. Tarbawiyah, 1 (3), 29.
- Afif, M. A. R. (2019, Desember). *"Emansipasi Wanita"*. *Jurnal Emansipasi*, 2 (5), 19. https://www.researchgate.net/publication/329363505_EMANSIPASI_WANITA
- Avrillia. (2021, February). *Representasi Perempuan Indonesia Pada Masa Revolusi Kemerdekaan oleh Tokoh Bangsa (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Representasi Perempuan Indonesia pada Masa Revolusi Kemerdekaan dalam Buku Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik*

- Indonesia). *Jurnal Kommas*, 1(2), 3-9.
 jurnalkommas.com/docs/Jurnal%20D1218005.pdf
- Baskhoro, A. E. (2021). *Women: War and Peacebuilding* (2nd ed., Vol. 1). Khwaab Publication House.
- Darwin, M. (2004, Maret). "Gerakan Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 283-294.
- Indrawati. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT Refika Aditama.
- Lan, T. J. (2015, Juni). Perempuan dan Modernisasi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 17 (1), 1619. <https://media.neliti.com/media/publications/102920-ID-pemahaman-emansipasi-wanita.pdf>
- Lubis, A. (2014). *Bunga Rampai Perempuan Indonesia: Persembahkan 70 Tahun Prof. Dr. Nabilah Lubis* (2nd ed., Vol. 1). Media Alo Indonesia.
- Lubis, A. (2022). *Perempuan Bicara: Dari Dakwah Hingga Sosial-Politik* (1st ed., Vol. 2). Pustaka Compass.
- Lubis, A. (2022). *Perempuan dan Islam Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Pustaka Compass.
- Lubis, A., Taher, T., Madjid, N., Ess, J. V., & Tamara, M. N. (1996). *Agama dan Dialog antar Peradaban* (2nd ed., Vol. 1). Universitas Paramadina Press.
- Mulyana, D. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (3rd ed., Vol. 2). Remaja Rosda Karya.
- Mustikawati, C. (2015, Juni). Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita dalam Pemikiran R. A. Kartini pada Buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*): *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 67-71.
- Pattiasina, P. J. (2018, Mei). Hermeneutik. *Jurnal Universitas Pattimura*, 1(3), 3-8.

- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua* (1st ed., Vol. 2). Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia.
- United Nations (UN) Women. (2021). *Women Rights in Afghanistan: Where Are We Now?* (1st ed., Vol. 1). UN Women.



BAB II
PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN





MENCARI SOLUSI TERBAIK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF: *TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU*

Prof. Zaitunah Subhan

Dalam diskursus keagamaan isu gender selalu menjadi tema kajian yang cukup menarik. Penafsiran baik terhadap nash kitab suci al-Quran maupun Hadits tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan ini ternyata menghasilkan berbagai penafsiran, sehingga membuka peluang bagi siapa saja untuk menghadirkan interpretasi lain.

Fenomena inilah yang telah menggelitik kesadaran intelektual saya untuk ikut berkontribusi berperan serta mencari solusi terbaik pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan menempatkan sumber dan inspirasi. Seperti ini menjadi sebuah tuntutan tatkala menjadi narasumber di berbagai seminar nasional atau internasional. Segenap propinsi, kabupaten di negeri ini rasanya tidak ada yang terlewatkan untuk berbincang tentang pemberdayaan perempuan, menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai ranah kehidupan. Demikian juga dalam berbagai kesempatan misalnya di Bangkok Thailand dalam “*Expert Group of UN of Cedaw Issues*”, di Istanbul Turki “*Conference on Gender Supported*

by OKI “, RRC Cina di Sencen “*Gender Issues in The World*” *Islam Perspective*.

Tulisan ini, sengaja saya ingin mengajak berbagi ke semua kalangan pemerhati gender untuk mencari solusi terbaik, yang lebih adil berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Masyarakat dunia khususnya di negeri kita Indonesia telah berubah. Di berbagai negara dalam kurun waktu akhir-akhir ini, peranan perempuan di dalam masyarakat mengalami kemajuan. Di Indonesia misalnya 10, 20 tahun yang silam pemikiran masyarakat sudah jauh berbeda dalam pemahaman terhadap kiprah dan peran perempuan di masyarakat.

Perjuangan yang cukup mengasyikkan selama 10 tahun di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Sosialisasi, dedikasi apalah namanya untuk berkomunikasi bersama berbagai elemen masyarakat Indonesia eksekutif, yudikatif, legislatif di tingkat pusat atau daerah, para tokoh (agamawan, budayawan, adat dsbnya). Dengan berbagai lika-liku perjalanan yang cukup mengasyikkan.

Berbagai kajian, bahwa para Ulama Fiqh abad Kedua Hijrah, seperti para madzhab al arbaah (imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Ahmad bin Hanbal dan imam Syafii) yang walaupun dikenal moderat, tetapi tetap terikat dengan kondisi sosial budaya tempat di mana mereka hidup.

Fiqh disusun dan berkembang di masyarakat yang dominan laki-laki (*male dominated society*) sebagaimana di Kawasan Timur Tengah ketika itu, sudah barang tentu akan melahirkan fiqh yang bercorak patriarkhi. Sehingga ketika karya mereka dijadikan rujukan untuk masalah terkait perempuan, saat ini, pada kondisi sosial budaya yang berbeda, seperti di Indonesia dewasa ini, ia sangat keberatan.

Di sinilah pentingnya dan perlu bagi para intelektual Islam untuk menggunakan pendekatan *history* (sejarah). Dalam

sejarah Islam Syariah dibedakan dengan Fiqh. Yang pertama (Syariah) merupakan ajaran dasar, bersifat universal dan permanen. Sedangkan yang kedua (Fiqh) adalah merupakan ajaran non dasar, bersifat lokal, elastis dan tidak permanen. Dengan pendekatan ini, kajian tidak terjebak pada pengukuhan tradisi, tetapi mengembangkan Islam, yaitu agama Allah yang hidup untuk manusia yang hidup dan nyata dan bersejarah.

Patut disyukuri, negara kita Indonesia telah memasuki sejarah baru setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*). Sebelumnya, arus gerakan pemberdayaan perempuan belum menjadi isu sentral dan strategis. Hanya menjadi sub atau bagian dari isu pembangunan, bahkan terkesan 'kurang diperhatikan'. Namun, kini telah menjadi tugas lintas sektoral. Tidak hanya kewajiban pemerintah, namun juga menjadi kewajiban masyarakat. Baik secara kelembagaan, institusi, pendidikan, kelompok sosial maupun individu sebagai bagian dari bangsa.

Seringkali dalam memahami kata gender masih rancu di kebanyakan masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin (*sex*) adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek biologis antara laki-laki dan perempuan meliputi reproduksi, anatomi fisik, hormon yang tidak bisa diubah (karunia Allah SWT). Sementara Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dari aspek non biologis/fisik, khususnya dari segi sosial budaya, dapat berubah menurut ruang dan waktu.

KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) adalah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk;

- Mendapatkan kesempatan pada sumber daya pembangunan (Akses)

- Berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan (Partisipasi)
- Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan (Kontrol)
- Mendapatkan manfaat dari pembangunan (Manfaat)

Kesetaraan Gender - Akses adalah: laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan untuk mendapatkan akses sumber daya pembangunan, misalnya:

- Punya kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya di berbagai prodi atau jurusan
- Punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan modal usaha dll
- Punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, swasta dll.

Kesetaraan Gender - Partisipasi: perempuan dan laki-laki dapat ikut dalam berbagai kegiatan terkait proses pembangunan baik tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Misalnya partisipasi perempuan dalam BPD (Badan Permusyawaratan Desa), hingga petugas pemilu. Partisipasi perempuan dalam politik seperti menjadi pengurus partai politik, anggota DPR atau DPP dstnya

Kesetaraan Gender - Kontrol: laki-laki dan perempuan dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan. Misalnya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan atau posisi sebagai pemimpin di pemerintahan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Kesetaraan Gender - Manfaat: laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Misalnya manfaat

pembangunan ekonomi, keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemudahan berusaha, subsidi pembangunan dan lain-lain.

Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak berisikan materi tentang KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender), pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan kekerasan terhadap anak, media internet, pencegahan *stunting*, pencegahan perka-winan dini dan kesehatan reproduksi.

Dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, ada lima prioritas yang harus dilaksanakan oleh segenap masyarakat Indonesia yaitu meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak, mencegah perkawinan anak serta pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Sehingga perempuan berdaya, anak terlindungi dan Indonesia maju.

Pengarusutamaan Gender pada Perguruan Tinggi, misalnya pada pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan inti dan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi. Integrasi perspektif gender dalam pengembangan kurikulum merupakan tujuan strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Kalau boleh dikatakan, hal ini memang merupakan langkah maju, tetapi belum selesai, tetap masih menjadi pekerjaan kita semua. Sebagai perempuan Indonesia, kita harus tetap berjuang untuk memperoleh hak-haknya. Siap menerima berbagai kondisi baik suka maupun duka, seperti dirinya sendiri. Duka tentu saja datang dari para penentang, sedangkan sukanya datang dari mereka yang mendukung. Seperti dari kalangan para tokoh intelektual dan para cendekiawan muslim,

tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan LSM, segenap kalangan untuk bisa tetap eksis.

Upaya pemberdayaan perempuan di negeri ini, memang ‘masih’ perlu diperjuangkan meski ada saja tantangan. Kita bersikap santun dalam melayani diskusi, berdialog dan berkomunikasi secara terbuka. Kepada yang sejalan dengan pemikiran kita, tetap saja kita berkomunikasi dengan berdialog sebagai masukan yang terkadang menjadi kritik yang konstruktif.

Menjadi suatu yang penting untuk memahami Ketidakadilan Gender, adalah pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

Ada beberapa bentuk atau contoh Ketidakadilan Gender, misalnya:

- *Stereotype* (pelabelan) pemberian label negatif, yang menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang tidak seimbang ; Seperti perempuan dianggap cengeng, suka digoda, emosional, pencari nafkah tambahan, kerja yang terkait dengan ‘rumah tangga’
- Marjinalisasi (peminggiran) suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan, contoh anggapan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan ketika bekerja di sektor publik. Sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender
- Beban Ganda artinya pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Contoh fakta menunjukkan, pada umumnya bahwa perempuan mengerjakan hampir 90% pekerjaan

rumah tangga. Bagi mereka yang bekerja, masih juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

- Subordinasi (Penomorduuan)... penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh jenis kelamin lebih rendah atau posisinya dinomorduakan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran segala macam urusan domestik, urusan reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik dan produksi. Perempuan masih sedikit yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan. Contoh perempuan mengurus rumah tangga saja, sehingga perempuan dianggap sebagai “orang rumah”, segala urusan atau permasalahan masih seringkali perempuan dianggap nomor dua, ‘nanti dulu’.
- Kekerasan ; yaitu tindakan kekerasan secara fisik atau non fisik (verbal) yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negeri terhadap jenis kelamin lainnya. Misalnya kekerasan fisik atau non fisik yang dilakukan oleh suami/ isteri kepada pasangannya atau anggota keluarga di dalam rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan tentu saja tidak dibatasi, hanya melalui pendekatan agama, namun dengan beragam perspektif. Antara lain, misalnya pendekatan perspektif sejarah, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, politik dan tentu kebijakan negara.

Pengalaman menarik adalah ketika selama 10 tahun Eselon 1b di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (sekarang ... dan Anak) sebagai Staf Ahli bidang Agama, yang paling terkesan adalah ketika muncul kontroversi tentang ‘boleh tidaknya perempuan menjadi presiden’. Fenomena ini sebenarnya telah mencuat pada masa berakhirnya jabatan presiden (BJ Habibie) 1999. Dari hasil

kongres umat Islam yang diadakan oleh MUI plus fatwa MUI yang menegaskan bahwa haram hukumnya memilih presiden perempuan. Segenap kelompok, organisasi Islam melaksanakan berbagai pertemuan, kajian (bahsul masail, majlis tarjih).

Berbagai hasil kesepakatan berjalan alot dan sulit mencapai kesepakatan. Semisal pengalaman saat itu, (tugas dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya, sebelum tugas di KPPA) menghadiri undangan Ulama se Jawa & Indonesia bagian Barat di Ponpes al Masturiyah Jabar. Mewakili perguruan tinggi bersama direktur Pasca Sarjana (Prof. Dr. Thoha Hamim, Phd). Tidak satupun para kiyai yang hadir sepakat dengan pemikiran saya, padahal tidak ada satupun baik ayat dalam firman Allah SWT maupun sabda Nabi SAW yang melarang.

Pada umumnya kebanyakan bersikukuh terhadap surat an Nisa' 4:34 (*ar rijalu qawwamuna 'alan nisa'...*) & sabda Nabi SAW. (*lan uflaha qaumun wallau amrahum imraah*). Kedua sumber pedoman ini yang sejatinya harus dimaknai secara komprehensif, baik dilihat dari sebab turunnya ayat (*asbab nuzul ayat*), maupun dilihat, apa yang menjadikan Nabi SAW bersabda demikian (*asbab wurud hadits*).

Islam sebagai agama dan ajaran, adalah sangat kaya dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan serta pemuliaan terhadap harkat martabat manusia laki-laki dan perempuan.

Kandungan dalam kitab suci al-Quran, atau hadits Rasul SAW. sangat akomodatif terhadap perkembangan dan kemajuan manusia tanpa adanya dominasi salah satu pihak, sehingga diperlukan adanya relasi antara laki-laki dan perempuan. Bukankah keduanya adalah sama sebagai hamba dan makhlukNya yang dua-duanya mempunyai tanggung jawab bersama sebagai *khalifah fil ardl* untuk memakmurkan dan mendamaikan dunia seisinya?

Islam dan bangsa Indonesia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Latar belakang budaya Indonesia pun sangat kental keIslamannya. Meski Indonesia tidak disebut sebagai negara Islam, namun sangat jelas bahwa negara Indonesia adalah negara muslim. Sehingga mesti kita menyadari betapa pentingnya peranan intelektual muslim bagi kemajuan bangsa dan negara. Pentingnya peranan umat Islam untuk kemajuan bangsa dan negara, bahkan jauh sebelum merdeka, banyak pahlawan-pahlawan muslim yang ikut berjuang mengharumkan nama bangsa ini.

Sebagai penduduk mayoritas harus bangkit tidak boleh malas; apa yang disabdakan Nabi SAW *I'mal lidunyaka kaannaka ta'isyu abadan wa i'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan* (hadits riwayat Imam at Turmudzi) “bekerjalah untuk duniamu seakan kau akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah kau akan mati besok”. Bahkan ditegaskan juga dalam sabda Rasul SAW. bahwasanya; *al mukmin al qawiyy khoirun wa ahabbu ila Allah min al mukmin adl dlaief*”, artinya “orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan dicintai Allah, daripada mukmin yang lemah” (Hadits riwayat imam Muslim)

Mengacu pada dua hadits di atas, bahwa Islam dengan tegas mengajarkan sebuah keseimbangan hidup antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Artinya bekerja untuk dunia dengan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan tidak melupakan akhirat.

Kondisi sebaliknya kita melihat negara-negara non muslim, Singapura, Jepang misalnya, meskipun negara ini memiliki sumber daya alam tidak semelimpah Indonesia, namun mereka memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi, etos kerja yang luar biasa, sehingga wajar menjadi negara maju. Sementara kita bangsa Indonesia ini, mempunyai sumber daya

alam yang melimpah, justru menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Jika negara kita dengan sumber daya melimpah dibarengi dengan semangat etos kerja yang tinggi maka negara kita akan lebih maju dibanding dengan negara-negara maju yang lainnya.

Namun, tetap patut kita syukuri, negara kita Indonesia kini, dengan tumbuh suburnya lembaga-lembaga yang pada saatnya perlu rencana dan upaya untuk mempercepat dalam meningkatkan pembangunan dari berbagai sektor atau aspek. Dalam hal ini terutama pemberdayaan perempuan, yang kini telah memasuki era kedua, yaitu dari era pembebasan menuju era kepemimpinan. Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia dapat memimpin dengan baik. Kriteria pemimpin bangsa tentu yang bisa membawa Indonesia pada era kebangkitan adalah pemimpin yang visioner, cerdas dan berakhlak mulia, harus memiliki *human relation skill* dan seterusnya. Karena pada prinsipnya laki-laki dan perempuan sama, memiliki intelektual dan potensi kecerdasan, cita-cita, keinginan serta impian dan harapan.

Dalam catatan sejarah, banyak perempuan menjadi pemimpin baik dan sukses. Semisal Ratu Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnu Wardana memimpin kerajaan Majapahit, Ratu Sima memimpin kerajaan Kalingga Jawa Timur, Ratu Kalinyamat memimpin Jepara Jawa Tengah, Cut Nyak Dien pemimpin Perang Aceh, Siti We Tenreolle memimpin kerajaan Bugis Sulawesi Selatan dan lain-lain.

Perempuan dengan keilmuan dan intelektualitas yang dimilikinya tidak hanya mampu berperan sebagai ibu, isteri yang biasa berkutat di seputar ruang domestik saja, akan tetapi perempuan juga tidak kalah mampu bersaing dengan mitranya untuk bersama membangun bangsa dan negara.

Di saat ini pun perempuan misalnya yang menjadi kepala keluarga, data menyebutkan bahwa 1 dari 10 kepala keluarga adalah perempuan, dan ini diperkirakan 1,2 sampai 1,5 juta jiwa dan rata-rata berpendidikan rendah bahkan tidak tamat SD. Ini membuktikan, bahwa sebenarnya perempuan Indonesia sukses dalam kiprahnya di tengah keluarga dan masyarakat.

Dalam al-Quran surat an-Nahl 71, *wallahu fadldlala ba'dlakum 'ala ba'dlin* yang artinya "*sebagian kalian (laki-laki atau perempuan) menjadi pemimpin sebagian yang lain..*" ayat ini jelas memberikan jaminan bahwa perempuan bebas berkiprah pada semua aspek kehidupan.

Perempuan Indonesia merupakan bagian kekuatan penggerak yang dapat diandalkan dalam proses pembangunan bangsa. Manakala kekuatan perempuan itu bersatu, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Sebagaimana koperasi di Bangladesh bisa mencuat (Gramen Bank) dapat mempersatukan dan memberdayakan perempuan-perempuan di segenap lini. Jika di negeri ini tetap mengimplementasikan Inpres No 9 Tahun 2000 (masa pemerintahan Presiden Gus Dur), segenap kebijakan tetap dilaksanakan oleh segenap institusi negeri ini, sebagaimana mestinya maka pemberdayaan perempuan jauh lebih berperan, baik di eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Yang menjadi pertanyaan kita sampai saat ini adalah, mengapa justru pada era globalisasi dan era reformasi ini, peran perempuan masih "terabaikan" sulit untuk melaju dan maju dengan alasan agama... sementara Islam sebagai agama yang memiliki ajaran lengkap, menyeluruh dan sempurna karena ajarannya yang mencakup segala dimensi spiritual (tata cara peribadatan hubungan manusia dengan Tuhan), dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan dimensi-dimensi lain. Sebagai

agama yang komprehensif sebagai agama penyempurna, yang selalu terbuka dengan adanya perubahan zaman yang semakin modern, meliputi segenap aspek kehidupan. Bukankah al-Quran (al Ahzab 35) dengan tegas menyatakan, *inna almuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina wash shadiqat was shabirina wash shabirat wal khasyiina wal khasyiat wal mutashaddiqina wal mutashaddiqat wash shaimina wash shaimat wal hafidzina furujjahum wal hafidzat wadz dzakirina Allah wadz dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'adziman*" yang artinya: "bahwasannya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keimanannya laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma (nama Allah), Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".

Oleh karena itu untuk menggapai menjadi suatu negara yang maju (Indonesia Maju), kuat dan diperhitungkan di tingkat internasional, hanya sebagai sebuah wacana dan harapan yang sulit untuk dicapai jika tidak dibarengi dengan upaya dan usaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi segenap warga bangsa negeri ini, yaitu laki-laki dan perempuan sama, bersama dalam pikiran dan gagasan membangun negeri tercinta ini.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.



TINJAUAN PERANAN ORGANISASI WANITA ISLAM DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH

Hj. Sri Harti, S.Ag., M.M.

Pendahuluan

Sejarah berdirinya organisasi wanita Islam atau organisasi perempuan yang berdasarkan agama Islam di Indonesia telah lahir sejak sebelum Negara Republik Indonesia merdeka, masih dalam masa penjajahan Belanda. Ini di antaranya seperti tiga organisasi perempuan Islam yang besar yaitu Aisyiyah dan Muslimat NU serta Wanita Islam/WI.

Aisyiyah berdiri pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917, diresmikan 22 April 1917, merupakan bagian perempuan organisasi Islam Muhammadiyah, oleh KH Ahmad Dahlan dan isterinya, Siti Walidah.¹

Muslimat NU berdiri pada tanggal 29 Maret 1946 yaitu organisasi perempuan Nahdhatul Ulama pada Mukhtamar NU ke 16 di Purwokerto, yang sebetulnya gagasan awal muncul sejak Mukhtamar NU ke 13 tahun 1938 di Menes Banten, dipelopori oleh Nyai R Djuaesih dari Bandung. Atas dasar prestasi dan kiprahnya pada

¹ Aisyiyah – Wikipedia bahasa Indonesia, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aisyiah>, diakses tanggal 17 Agustus 2023

Muktamar NU ke 19 di Palembang tahun 1952 Muslimat NU memperoleh hak otonomi.²

Wanita Islam /WI berdiri pada tanggal 22 Dzulqa'dah /29 April 1962 di Yogyakarta, pada musyawarah besar Badan Kesejahteraan Wanita Islam yang memutuskan merubah nama menjadi Wanita Islam. Sebagai Ketua Umum PP Wanita Islam pertama yaitu Ibu Zaenab Damiri, dengan Penasehat Ibu Hj. Agus Salim, Ibu Sudirman (isteri alm Jendral Sudirman), Ibu Sunaryo, Ibu Samsuridjal dan Ibu AR Baswedan (Isteri alm AR Baswedan Pahlawan Nasional).

Tujuan dan Program Organisasi Wanita Islam

Aisyiyah giat melayani dan memberi pendidikan untuk masyarakat dengan melakukan pembangunan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta menginisiasi program pendidikan Islam bagi perempuan. Sekolah Aisyiyah sendiri merupakan penganut ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yaitu Catur Pusat: pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah.

Pada tahun 1919, Aisyiyah membangun pendidikan dini untuk anak-anak dengan nama FROBEL, yang merupakan Taman Kanak-kanak yang didirikan oleh bangsa Indonesia untuk pertama kalinya.³ Pada tahun 2023 saat ini Aisyiyah mengelola 4.560 satuan pendidikan, 280 fasilitas kesehatan, 459 organisasi sosial, dan 503 industri usaha kecil. Saat ini Aisyiyah memiliki jaringan yang tersebar luas di 34 provinsi, 370 daerah kabupaten atau kota, 2.332 cabang atau kecamatan, dan 6.924 ranting atau desa. Jumlah anggota kurang lebih 20 juta⁴. Setiap ranting Aisyiyah punya program rutin majlis ta'lim

² Sejarah Singkat Muslimat NU, dalam <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat>, diakses tanggal 17 Agustus 2023

³ Aisyiyah: Latar Belakang, Peran dan Program, dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/04/120000279/aisyiyah-latar-belakang-peran-dan-program>, diakses tanggal 17 Agustus 2023

⁴ Sejarah singkat Aisyiyah, dalam <https://aisyiyahstudies.org/aisyiyah-sejarah-singkat/#:text=Aisyiyah>, diakses tanggal 17 Agustus 2023

ibu-ibu juga ta'lim wali murid TK/Raudhatul Athfal untuk membina ibu-ibu dalam menjalankan peranannya di keluarga dengan tujuan terbentuk dan terbinanya Keluarga Sakinah.

Muslimat NU mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Ahlussunah Wal jamaah dalam NKRI yang berkemakmuran, berkeadilan dan diridhoi Allah Swt.

Misi terdiri dari :

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah Swt.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun anggota keluarga.
4. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.

Struktur organisasi dan fokus kegiatan Fatayat:

1. Kepengurusan Pengurus Pusat: Berkedudukan di Jakarta, Pengurus daerah berjumlah: 33. Cabang berjumlah: 495. Pengurus Ranting berjumlah: 26.000.
2. Keanggotaan Jumlah anggota diperkirakan: 4.000.000 orang.
3. Kegiatan Kepribadian sosial, kesehatan, da'wah, ekonomi dan koperasi, litbang, tenaga kerja dan lain-lain.
4. Yayasan yang dikelola yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKMNU), tahun 1963.

Setiap ranting Muslimat punya program rutin majlis ta'lim ibu-ibu untuk membina ibu-ibu dalam menjalankan peranannya di keluarga dengan tujuan terbentuk dan terbinanya Keluarga Sakinah.

Wanita Islam / WI sejak tahun 1975, Pengurus Pusat Wanita Islam (PPWI) pindah ke Jakarta sebagai Ibu Kota Negara RI, sebagai Ketua Umum Ibu RAB. Sjamsuridjal.⁵

Visi: Terwujudnya Wanita Islam sebagai organisasi muslimah yang amanah, independen, profesional dan unggul dalam mengatasi tantangan dan permasalahan muslimah di tingkat nasional dan regional.⁶

Misi terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, keilmuan, keterampilan, kepemimpinan serta kemampuan berorganisasi pengurus dan anggota.
2. Meningkatkan wawasan dan kepekaan serta kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan dan permasalahan di berbagai bidang kehidupan umat, terutama muslimah baik di tingkat nasional maupun regional serta internasional.
3. Mengembangkan kemandirian organisasi yang bebas dari ketergantungan dan keberpihakan terhadap individu maupun lembaga di luar organisasi
4. Mengembangkan jaringan, kerjasama dengan instansi Pemerintah dan non Pemerintah di tingkat nasional, regional, internasional terutama organisasi Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang diridhai Allah SWT.
2. Mewujudkan pribadi-pribadi muslimah yang beriman dan bertaqwa, berakhlak karimah serta mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan secara kaffah.

⁵ Sejarah Organisasi Wanita Islam, Lahir Direngah Nasskom, dalam <https://islamtoday.id/ulas-nusa/20210429235052-30177/sejarah-oganisasi-wanita-islam-lahir-ditegan-nasakom/uas-nusa>, diakses tanggal 17 Agustus 2023

⁶ Profil Wanita Islam, dalam <https://wanitaislam.or.id/profil/#:text=Wanita,> diakses tanggal 17 Agustus 2023

Struktur Organisasi

Pengurus Pusat berkedudukan di Jakarta, terdiri dari Majelis Pertimbangan, Majelis Hikmah dan Pengurus Harian, Pengurus Wilayah di 34 Provinsi, Pengurus Daerah di 260 Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang di 1300 Kecamatan, Pengurus Ranting di 6500 Desa/Kelurahan. Total anggota 1.427.000 orang. Setiap ranting Wanita Islam punya program rutin majlis ta'lim ibu-ibu untuk membina ibu-ibu dalam menjalankan peranannya di keluarga dengan tujuan terbentuk dan terbinanya Keluarga Sakinah.

Keluarga Sakinah

Dasar dari Al-Quran:

QS.30/ Ar-Rum 21:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

QS.4 / An-Nisa 9 dan 34:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

[267]. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

QS.66 / At-Tahrim 6:

6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

QS. 7 / Al-A'raf 189:

189. Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur."

Pengertian Keluarga Sakinah

Prof. Dr. A. Mubarak, M.A., berpendapat keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga (berumah tangga) yang mempunyai unsur-unsur antara lain:⁷

1. Mawaddah wa rahmah: kecenderungan dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang.

QS.30/ Ar-Rum 21:

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hunna libasun lakum waantum libasun lahun: mereka (istri) adalah pakaian bagimu (suami), dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka (istri).

QS. 2/Baqarah 187:

⁷ Mubarak, Ahmad., Prof, Dr, MA., Keluarga Sakinah Menuju Masyarakat Islam, Jakarta: Departemen Agama, 2003

187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf^[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

3. Wa'asyiru hunna bil ma'ruf : Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut.

QS.4/An Nisa 19:

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa [278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.^[279] Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

[278]. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279]. Maksudnya: *berzina atau membangkang perintah.*

Hadits Nabi saw menjelaskan, Pilar Keluarga Sakinah:

- a. Memiliki kecenderungan kepada agama,
- b. Yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda,
- c. Sederhana dalam belanja,
- d. Santun dalam bergaul,
- e. Selalu berinstropeksi diri,

Hadits Nabi saw menerangkan 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan keluarga:

1. Suami istri yang setia/sholeh/sholehah,
2. Anak-anak yang berbakti,
3. Lingkungan sosial yang sehat,
4. Rezekinya yang dekat.

Hadits Nabi Saw: Rumahku adalah surgaku.

Problematika / krisis rumah tangga

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto (Alm): Perkembangan teknologi (Era Globalisasi) tidak saja berdampak positif, namun juga berdampak negatif, yaitu menurunnya tata nilai, norma masyarakat.

Dalam problematika perkawinan pun menunjukkan adanya fenomena baru penyebab perceraian, yaitu pengaruh sms/foto-foto masuk pada ponsel suami/istri yang menyebabkan kecemburuan karena gangguan pihak ke-3.

Prof. Dr. A. Mukti Ali (Alm) dalam pidatonya pada Penutupan Kursus BP4, 8 Oktober 1972, menerangkan, bahwa untuk membangun negara yang kuat, berawal dari rumah tangga-rumah tangga yang kuat yang ada pada negara tersebut. Negara yang adil terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang adil. Negara yang makmur terdiri dari rumah tangga-rumah tangga yang makmur pula. Kalau kita ingin membangun negara dengan sebaik-baiknya, maka rumah tangga harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga, mustahil akan tercapai pembangunan bangsa.

Untuk membangun dan mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, bahagia, aman, makmur dan damai. Usaha pertama dimulai dari rumah tangga (keluarga) sehingga rumah tangga bagi penghuninya benar-benar merupakan tempat istirahat, melepas lelah, tempat bersantai dan bersendau-gurau dengan suami/istri dan anak yang diliputi rasa senang, tentram, bahagia, rukun dan damai, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw.

Krisis Rumah Tangga, menurut Prof. Dr. Sikun Pribadi:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor pendidikan
3. Masalah seksual
4. Campur tangan pihak ketiga
5. Ketidakpuasan bekerja di kantor
6. Masalah umur
7. Kenangan masa lalu
8. Salah paham
9. Penyakit fisik
10. Perbedaan agama
11. Kejiwaan yang tidak stabil atau tidak matang

Faktor-Faktor yang menghambat kebahagiaan Perkawinan

Menurut Prof. Dr.H.R. Daldiri Mangoendiwirja:

1. Faktor Kebodohan
2. Kepribadian Infantil
3. Perbedaan Latar Belakang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kebiasaan
4. Adanya harapan yang tidak realistis, konsep perkawinan yang keliru.
5. Adanya rasa kejenuhan dalam hidup rumah tangga.

Menurut Prof. Zakiah Daradjat :⁸

1. Curiga / cemburu.
2. Keterikatan pada keluarga asal (Ibu, Bapak, saudara).
3. Pengkhianatan keluarga, dalam bentuk antara lain:
4. Sikap dingin suami pada istri
5. Istri yang tergoda
6. Suami-istri yang Neurotik

Istri yang Neurotik ada 4 macam:

1. Istri yang kelaki-lakian
2. Istri yang histeris
3. Istri dari golongan narcisme
4. Istri yang kekanak-kanakan (kepribadian yang tidak matang)

Suami yang Neurotik, antara lain:

1. Mempunyai sifat pria neurotic (misal pencemas, phobia, psikosomatis)
2. Suami yang menderita kompleks keibuan.
3. Suami pencemburu
4. Suami yang tergila-gila pada wanita

Menurut Prof.Dr. A.Mubarak MA:⁹

1. Aqidah yang keliru/sesat.
2. Makanan yang tidak halal.
3. Kemewahan/bermegah-megahan QS.17 / Isra 16:
16. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya

⁸ Daradjat, Zakiah., Prof, Dr., Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1983

⁹ Mubarak, Ahmad., Prof, Dr, MA., Psikologi Keluarga, Jakarta: PT Wahana Aksara Prima, 2009.

berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

4. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya (PIL& WIL)
5. Kebodohan
6. Akhlaq rendah
7. Jauh dari agama (sholat/ibadah-amal soleh)

Rekapitulasi Laporan Faktor-faktor Penyebab Perceraian yang datang di PA Jakarta:¹⁰

No.	Faktor	Tahun					Jumlah	%
		2003	2004	2005	2006	2007		
A.	Moral:							
	1. Poligami tidak sehat	35	21	24	37	24	141	0.65
	2. Krisis Akhlak	170	215	119	34	93	631	2.90
	3. Cemburu	349	362	340	321	296	1668	7.66
B.	Meninggalkan Kewajiban:							
	1. Kawin Paksa	17	3	1	67	1	89	0.41
	2. Ekonomi	786	866	898	720	839	4109	18.88
	3. Tidak ada tanggung jawab	803	961	1079	1340	1409	5592	25.69
C.	Kawin di Bawah Umur	63	-	-	-	-	63	0.29
D.	Pengania	78	115	75	84	133	485	2.23

¹⁰ Munawarah, Raudhotul. Dra., Psikolog, Konsultan BP\$ DKI, 2016, **Peranan Keluarga Sakinah terhadap Pencegahan Kenakalan Remaja**, Kaya Ilmiah , Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lan Taboer, Jakarta.

	yaan							
E.	Dihukum	1	-	3	3	-	7	0.03
F.	Cacat Biologis	2	-	-	8	3	13	0.06
G.	Terus-menerus Berselisih							
	1. Politisi	2	-	-	-	-	2	0.01
	2. Gang-guan Pihak Ketiga	415	473	575	539	552	2554	11.73
	3. Tidak Ada Keharmonisan	1013	1153	1453	1460	1331	6410	29.45
TOTAL		3734	4169	4567	4613	4681	21764	100.00

Kesimpulan Rekapitulasi Laporan, Faktor-faktor Penyebab Perceraian di PA Jakarta:

Jumlah perkawinan yang terjadi di DKI Jakarta:

Tahun 2005 : 57.970 Cerai : 4.567 (7.9%)
 Tahun 2006 : 57.913 Cerai : 4.613 (8%)
 Tahun 2007 : 58.757 Cerai : 4.681 (7.96%) Gugat : 73% = 3.720 pasang
 Talak : 27% = 1.376 pasang
 Tahun 2008: 62.091 Cerai: 5.626 (9.06%) Gugat: 67% = 3.769 pasang
 Talak: 33% = 1.857 pasang
 Tahun 2009: 88.580 Cerai: 8.858 (10,0%) Gugat: 61,1% = 5.422 pasang
 Talak: 30,7% = 2.721 pasang
 Tahun 2010: 82.030 Cerai: 7.303 (11,6%) Gugat: 65 % = 4.747 pasang
 Talak: 32 % = 2.337 pasang

Rangking Penyebab Perceraian:

1. Tidak ada keharmonisan = 29.45 %
2. Tidak ada tanggung jawab = 25.69 %

3. Faktor Ekonomi = 18.88 %
4. Gangguan pihak ke-3 = 11.73 %
5. Cemburu = 7.66 %

Hasil yang dapat didamaikan: Di BP4: 73 % Di PA: 27 %

Angka Gugat – Talak di Kota-kota Besar Indonesia (2007):

Daerah	Gugat (%)	Talak (%)
DKI	3.105 (68%)	1.462 (32%)
Semarang	23.652 (65%)	12.614 (35%)
Makasar	2.091 (66%)	1.093 (34%)
Medan	1.967 (71%)	811 (29%)
Bandung	15.139 (53%)	13.405 (47%)

Data berdasarkan pidato sambutan Ka. Kanwil Kementerian Agama DKI pada acara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah DKI Tahun 2008

Kesimpulan

1. Prosentase gugat dua kali lipat lebih besar dari talak.
2. Berarti peran istri sangat dominan dalam kelestarian perkawinan, baik disebabkan kesalahan dari suami atau pun dari istri sendiri.

Kasus-kasus Gugat – Cerai:

Dari Pihak Suami :

1. Salah memahami status suami sebagai “qowwamuna alanisi”, QS.4/ An-Nisa 34 yang diartikan suami itu “sulthan/penguasa” atas istri, padahal yang benar artinya; suami adalah pemimpin bagi wanita.

34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri^[289] ketika suaminya tidak

ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)^[290]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya^[291], maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya^[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

[289]. Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[290]. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

2. Memaksa istri harus menerima nafkah apa adanya sekalipun tidak mencukupi.
3. Untuk kawin lagi tidak perlu izin istri,
4. Sering melakukan KDRT,
5. Suami tidak amanah,
6. Pengaruh pihak ke-3 (suami).

Dari Pihak Istri:

1. Penghasilan/jabatan istri lebih tinggi dari suami,
2. Istri yang penuntut/materialistis,
3. Pengaruh pihak ke-3 (istri).

Kunci-kunci melestarikan keluarga sakinah

1. Prinsip 3 M:

- (1). Ma'ruf dalam perbuatan
- (2). Ma'ruf dalam ucapan
- (3). Ma'ruf pada makanan dan minumam (halalan thoyyiban)

2. Prinsip 5 T:

- (1). Tafahhum (saling pengertian)
- (2). Ta'awwun (saling kerjasama & tolong menolong)
- (3). Tasammuh (saling berlapang dada)
- (4). Ta'ddud (saling menguatkan)

(5). Tarahum (saling kasih sayang)

3. **Prinsip 5 SH:**

- (1). Serasi & harmonis di meja makan
- (2). Serasi & harmonis di rekreasi
- (3). Serasi & harmonis di hobbi
- (4). Serasi & harmonis di tempat tidur
- (5). Serasi & harmonis dalam ibadah (sholat dll)

4. **Prinsip 5 U:**

- (1). Ucap (perkataan yang baik)
- (2). Ulat (penampilan wajah yang baik)
- (3). Ulah (perbuatan yang baik)
- (4). Upo (penghasilan yang baik)
- (5). Ules (pakaian yang baik)

Aktivitas Organisasi Wanita Islam dalam Membentuk dan Membina Keluarga Sakinah

Mencermati Visi Misi dan Tujuan serta program dan amalan aktivitas dari contoh ketiga organisasi wanita Islam, yaitu Aisyiyah, Muslimat NU dan Wanita Islam menunjukkan sangat besar peranannya dalam membentuk dan membina Keluarga Sakinah bagi anggota khususnya umat Islam pada umumnya.

Majlis Ta'lim ibu-ibu yang dilakukan oleh Pengurus Ranting ketiga ormas wanita tersebut yang diisi oleh para ustaz dan ustazah selain membahas tentang Tauhid/keimanan, ibadah, syariah dan akhlaq, juga selalu tidak lepas temanya membahas tentang hak dan kewajiban suami dan isteri, membina anak-anak soleh, mencegah kenakalan remaja, mempersiapkan anak untuk memasuki usia pernikahan, pemilihan jodoh dan lain lain.¹¹

¹¹ Munawarah, Raudhotul. Dra., Psikolog, Konsultan BP\$ DKI, 2016, Peranan Keluarga Sakinah terhadap Pencegahan Kenakalan Remaja, Kaya Ilmiah , Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lan Taboer, Jakarta.

Demikian pula kegiatan yang bersifat ketrampilan ibu-ibu seperti menjahit, memasak, potong rambut, juga soal kesehatan keluarga, kesehatan kewanitaan usia ibu dan usia remaja dan lain lainnya. Itu semua tujuannya adalah untuk membentuk dan membina keluarga Sakinah bagi anggota organisasi wanita Islam khususnya umat Islam pada umumnya. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bantuan sosial khususnya saat terjadi bencana seperti bencana alam atau kebakaran selalu dilakukan oleh ketiga organisasi wanita Islam tersebut, sehingga eksistensinya bermanfaat untuk kemanusiaan, bangsa dan Negara.

Penutup

Adanya krisis rumah tangga sampai ada yang berujung perceraian karena tidak dapat dimediasi oleh BP4, apakah mereka yang bermasalah itu statusnya anggota ormas wanita Islam atau tidak, aktif atau tidak mengikuti ta'lim ibu-ibu yang dilakukan oleh organisasi wanita Islam. Dalam hal ini belum ada penelitian ilmiah untuk masalah-masalah tersebut.

Sehubungan dengan belum adanya penelitian ilmiah tentang adakah pengaruh organisasi wanita Islam terhadap terbinanya Keluarga Sakinah, maka kiranya penting dijadikan hipotesa penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya, bahwa ada pengaruh keaktifan sebagai anggota organisasi wanita Islam untuk pencegahan terjadinya krisis pernikahan hingga perceraian, sehingga tetap terbinanya Keluarga Sakinah.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahan**, Jakarta: Kementrian Agama RI.
Mubarak, Ahmad., Prof, Dr, MA., **Psikologi Keluarga**, Jakarta: PT Wahana Aksara Prima, 2009.
Mubarak, Ahmad., Prof, Dr, MA., **Keluarga Sakinah Menuju Masyarakat Islam**, Jakarta: Departemen Agama, 2003

- Daradjat, Zakiah., Prof, Dr., **Ilmu Jiwa Agama** , Jakarta : Bulan Bintang, 1983
- Munawarah, Raudhotul. Dra., Psikolog, Konsultan BP\$ DKI, 2016, **Peranan Keluarga Sakinah terhadap Pencegahan Kenakalan Remaja**, Kaya Ilmiah , Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lan Taboer, Jakarta.
- Aisyiyah - Wikipedia bahasa Indonesia, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Aisyhah>, diakses tanggal 17 Agustus 2023
- Sejarah singkat Aisyiyah, dalam <https://aisyiyahstudies.org/aisyiyah-sejarah-singkat/#:text=Aisyiyah>, diakses tanggal 17 Agustus 2023
- Aisyiyah: Latar Belakang, Peran dan Progam, dalam <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/04/120000279/aisyiyah-latar-belakang-peran-dan-program>, diakses tanggal 17 Agustus 2023
- Sejarah Singkat Muslimat NU, dalam <http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat>, diakses tanggal 17 Agustus 2023
- Profil Wanita Islam, dalam <https://wanitaislam.or.id/profil/#:text=Wanita>, diakses tanggal 17 Agustus 2023
- Sejarah Organisasi Wanita Islam, Lahir Direngah Nasskom, dalam <https://islamtoday.id/ulas-nusa/20210429235052-30177/sejarah-oganisasi-wanita-islam-lahir-ditegan-nasakom/uas-nusa>, diakses tanggal 17 Agustus 2023.



MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PEMBIAYAAN KELOMPOK SECARA SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN

Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.

Pendahuluan

Perempuan adalah bagian terpenting dalam konteks peran, partisipasi dan akses dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Laki-laki maupun perempuan secara aktif mesti terlibat dalam proses pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama yaitu akses dalam berusaha dan menjadi tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan. Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (status), peran, kemampuan, kemandirian, ketahanan mental, serta spiritual perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ajaran Islam memberikan justifikasi yang kuat terkait peran dan kedudukan perempuan. Pada masa awal Islam patut dicatat beberapa nama *shahabiyat* yang telah terlibat cukup intens dan memiliki pengaruh yang besar dalam lapangan ekonomi. Khadijah binti Khuwaylid, beliau seorang pengusaha besar dan sukses memimpin banyak karyawan laki-laki yang

membawa barang-barangnya untuk diekspor ke wilayah lain seperti Syiria, Sam dan lain-lain. Mekah saat itu adalah kota yang sangat strategis dan menjadi pusat perdagangan Internasional. Nabi Muhammad sebelum menjadi suami beliau telah terpilih sebagai orang yang sangat dipercaya untuk bermitra dengannya melalui sistem bagi hasil.¹² Selain itu disebut juga dalam musnad Ahmad beberapa nama perempuan yang aktif bekerja antara lain: pada bidang pertanian di Madinah, ada Asma' dari kelompok Anshar, Shifa' bin Abdullah berkiprah dalam hal seni kaligrafi, Aisyah dan Umm Salamah yang sangat baik hafalannya dan pemahamannya dalam periwayatan hadits dan pengajaran al-Quran, Khawalah, Maleekah, Thaqafiyah, dan Binti Fakhriyyah berbisnis parfum ('Itar), Saudah bekerja dalam bidang industri.¹³ Para perempuan pada masa Nabi telah berkiprah dan bekerja di berbagai bidang untuk memberikan kontribusi dalam membangun peradaban dan pertumbuhan negara.

Perempuan Indonesia yang berjumlah lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia tidak berlebihan kalau diakui sebagai kekuatan rakyat. Fakta historis menunjukkan bahwa pengalaman perempuan Indonesia sejak zaman sebelum penjajahan hingga masa penjajahan Belanda dan Jepang merupakan kekayaan luar biasa. Perempuan melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan hidup demi memelihara kehidupan keluarga dan lingkungan hidupnya mulai dari cara yang paling tradisional, yaitu pertukaran *in natura*, pertukaran pasar tradisional sampai pengalaman pahit harus menanggung hutang luar negeri. Sampai saat ini Indonesia beruntung memiliki perempuan-perempuan yang berada pada garda

¹²Mahmood Ahmad Ghadanfar, *Great Women of Islam: Who were Given the Good News of Paradise*, (Riyadh: Darussalam Publisher, 2001), h.23

¹³ibid. 15-16

terdepan dalam perekonomian. Sejumlah perempuan yang menjadi pilar dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Sejalan dengan semangat di atas, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi telah meningkat saat ini, setidaknya hal ini ditandai oleh dua proses. *Pertama*, peningkatan dalam “jumlah perempuan” yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah tangga. *Kedua*, peningkatan dalam “jumlah bidang pekerjaan” yang dapat dimasuki oleh perempuan. Kedua bentuk peningkatan tersebut menandakan perkembangan kuantitatif yang penting dalam kehidupan perempuan. Hal ini bukan hanya karena menunjukkan kesempatan-kesempatan yang semakin terbuka bagi perempuan tetapi juga penting bagi analisis tentang makna perkembangan tersebut baik bagi perempuan, laki-laki, maupun masyarakat secara umum.

Masalahnya kemudian adalah situasi dan kondisi saat ini di Indonesia telah menempatkan sejumlah perempuan kelas atas yang sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi tetapi pada kelompok bawah dan akar rumput perempuan menjadi kelompok yang terpinggirkan dan berada dalam kemiskinan sehingga tidak memiliki akses, peran, kontrol dan manfaat yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi. Sementara itu kelompok pada level bawah ini merupakan jumlah terbesar dari penduduk negeri ini jika tidak dilibatkan tentu sangat merugikan dan menjadi beban ketergantungan. Untuk itu diperlukan berbagai model pendekatan pembangunan yang sensitif gender dan upaya penguatan peran perempuan sehingga potensi mereka mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi perempuan dengan model pembiayaan berbasis kelompok replika Grameen Bank pola syariah untuk tujuan

kesejahteraan perempuan. Model ini dipandang efektif dan paling tepat untuk memberikan permodalan bagi kelompok usaha mikro yang dikelola perempuan karena tanpa jaminan, kelompok perempuan itu sendiri dan dengan pola tanggung renteng menjadi jaminannya. Model ini dipercaya mampu memberdayakan perempuan sehingga memperkuat ekonomi keluarga. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan perspektif bagi para akademisi, praktisi, komunitas terkait model pemberdayaan ekonomi perempuan, juga dapat menjadi benchmarking bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan untuk penguatan ekonomi perempuan khususnya kelompok usaha mikro yang dikelola perempuan Indonesia.

Pengertian Pemberdayaan

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran, partisipasi, dan akses semua lapisan masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Hal ini berarti menempatkan masyarakat berada pada posisi utama dan strategis sehingga demokratisasi ekonomi sebagaimana yang diamanahkan undang-undang ini dapat terwujud. Upaya untuk memberikan hak akses dan partisipasi kepada seluruh elemen masyarakat baik secara individu maupun komunitas sering dikaitkan dengan konsep pemberdayaan. Secara etimologis, kata pemberdayaan adalah terjemahan dari "*empowerment*" (bahasa Inggris). Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan,

pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Istilah pemberdayaan diartikan juga sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat, memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih, menentukan dirinya dan mempunyai kesempatan dan akses untuk mendapatkan berbagai pilihan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa¹⁴ :

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.

Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996)¹⁵ mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan.” Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif

¹⁴ Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.

¹⁵ Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.¹⁶ Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995).¹⁸ Konsep ini lebih luas dari

¹⁶ Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity. Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA

¹⁷ Gunawan Sumodiningrat (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia

¹⁸ Chambers, R. (1985). *Rural Development: Putting The Last First*. London; New York: Longman.

hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Pemberdayaan juga mengandung makna adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Menurut Rappaport (1985), praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang-orang lain yang kita anggap penting, serta masyarakat di sekitar kita. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu cara sedemikian rupa sehingga rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses sedemikian rupa sehingga orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi, pengontrolan atas, dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).

Beberapa definisi pemberdayaan di atas menegaskan bahwa pemberdayaan adalah *proses* dan *tujuan*. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan Ekonomi

Elaborasi dari pemikiran tersebut secara keseluruhan akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan sehingga akan membawa dampak yang sangat luas baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.¹⁹ *Kecenderungan primer* merupakan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley dan Marsden, 1984). *Kecenderungan sekunder* menekankan pada proses penstimulasian, dorongan atau pemotivasian agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog sesungguhnya di antara kedua proses tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada hakikatnya suatu proses yang dinamis. Pemberdayaan ekonomi bukan hanya sekedar kegiatan atau program pemberian hal-hal

¹⁹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, Cet. Kedua), h. 43.

yang bersifat ekonomis kepada masyarakat, namun ia adalah gerak (aktivitas) yang menggerakkan; suatu proses penyadaran dan menemukan akan potensi masyarakat itu sendiri sehingga potensi yang ada menjadi aktual dan pada akhirnya memberikan nilai tambah kepada masyarakat itu sendiri secara terus-menerus (*continue*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses untuk mengubah sumber daya masyarakat itu sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan semakin relevan untuk direformulasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang senantiasa berubah. Saat ini dunia sangat berubah dengan memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dimana peran teknologi informasi telah banyak mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Era saat ini sering dihadapkan pada situasi dan kondisi yang disebut VUCA yaitu *volatility* (perubahan), *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (rumit permasalahan yang muncul), *ambiguity* (ketidakjelasan). Istilah pemberdayaan itu sendiri merupakan upaya untuk membangun daya dengan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya.

Maka, pemberdayaan ekonomi tidak hanya terkait permodalan. Bermula dengan menemukan potensi yang ada pada diri dan lingkungan, permodalan lebih sebagai faktor penguat. Pemberdayaan berasumsi bahwa proses pemberdayaan harus diawali dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berubah, selanjutnya pengelolaan potensi atau sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan dampak pada pengembangan sosial, ekonomi dan kultural. Dengan kata lain, akhir dari proses pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat dalam mengelola dan mengem-

bangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memberi manfaat serta nilai tambah, baik bagi diri maupun lingkungannya.

Berkembangnya semangat dan kesadaran pemberdayaan masyarakat sekarang ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pergeseran paradigma pembangunan yang terjadi pada berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pergeseran paradigma tersebut sejalan dengan munculnya dampak-dampak pembangunan yang ternyata tidak membawa kepada kemakmuran masyarakat secara umum; sebaliknya, pembangunan masa lalu yang sentralistik hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bersamaan dengan itu, potensi dan sumber daya di masyarakat juga banyak yang terbuang dan tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, terjadi paradoks; Indonesia yang merupakan wilayah subur dan kaya akan sumber daya alam namun, masyarakat di sekitarnya justru banyak yang miskin. Menyadari fenomena itulah, tumbuh semangat untuk melakukan pemberdayaan yang terus meluas, khususnya di Indonesia, yang diiringi dengan pergeseran paradigma pembangunan. Departemen Sosial RI menyebutkan, perbedaan paradigma pembangunan masa lalu dan masa kini antara lain:²⁰ Paradigma baru pembangunan menempatkan rakyat (baca: masyarakat miskin) bukan sebagai obyek yang bersifat pasif atau obyek penderita yang harus menerima apa yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah atau lembaga luar. Sebaliknya, mereka adalah subyek yang memiliki hak untuk menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang sesuai dengan kondisi mereka dan lingkungannya. Berkaitan dengan ini Korten Carner (1993) menyatakan: “konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif, kreativitas dari

²⁰Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin* (Departemen Sosial RI, 2005), h. 34-36.

rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan”.²¹

Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.²² Definisi di atas banyak dipakai oleh kalangan penyelenggara pemerintah. Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.²³ Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).

²¹Erik Syehabudin, “Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan”, Artikel diakses pada 29 Oktober 2008 dari <http://www.radarbanten.com>

²² Mardi Yatmo Hutomo. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi.” Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta.

²³ ibid

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian Islam memberikan motivasi pada pemeluknya untuk bekerja keras dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena Islam pada hakekatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan zakat dan ibadah haji memerlukan kecukupan material itu, lantas mencari materi menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan umatnya untuk berkecukupan secara material. Nabi SAW sendiri juga menegaskan bahwa: *“alyad al’ulya khairun min al yad as sufla”*, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”, atau memberi lebih baik daripada meminta”. Al-Quran juga yang menjelaskan untuk bekerja keras dan mengajarkan pentingnya umat Islam untuk bekerja dan memikirkan ekonominya. Di antaranya QS. al-Qashash [28]: 77: *“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu [kebahagiaan] negeri akhirat; dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari [kenikmatan] duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”*.

Dalam tafsir al-Jalalayn, ayat tersebut ditafsirkan; *“Perolehlah [untuk] kepentingan akhirat [harta kekayaan] yang*

telah Allah berikan kepadamu, dengan cara menginfakkan [sebagian] harta tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dan jangan kamu lupakan bagian kamu yang berkaitan dengan keduniaan untuk menjadi amal akhirat” Juga dalam QS. Al Jumu’ah [62]: 10: *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah karunia Allah (yakni rizqi/harta) dan ingatlah kepada Allah banyak banyak agar kamu beruntung”*. Islam mendorong orang untuk bekerja. Hadits yang berbunyi: *“Asyaddu an nas ‘adzabun yauma alqiyamah al maghfiy al bathil* (siksaan paling berat pada hari kiamat, adalah bagi orang yang hanya mau dicukupi orang lain dan hidup menganggur)”.

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam tidak menginginkan umatnya berada dalam kemiskinan. Karena akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial bisa menyebabkan munculnya penyimpangan akidah. Pendapat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: *“Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran”* (HR. Abu Na’im dari Anas). Kemiskinan juga bisa menyebabkan orang tergelincir dalam akhlak dan moralitas yang tercela. Karena suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama. Manusia sebagai subyek ekonomi, yang dalam kelompok besar disebut umat, oleh Islam dibebani (*mukallaf*) untuk berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Taklif (pembebanan) ini berimplikasi pada banyak hal. Dalam disiplin fiqih meskipun ekonomi sendiri bukan merupakan komponen fiqih ikhtiar dalam arti luas disinggung karena erat kaitannya dengan usaha ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Masalah kemiskinan memang bisa dialami dan dihadapi oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik individu maupun keluarga, dan lain-lain. Akan tetapi di tengah masyarakat yang sebagian masih berlaku budaya patriarkal, adalah penting untuk mencermati fenomena kemiskinan yang ada pada kaum perempuan. Mengapa demikian? Karena dalam budaya patriarkal, masalah gender masih menjadi persoalan besar. Dalam hal ini, posisi perempuan umumnya berada pada pihak yang lemah; sementara lelaki mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin struktural yang berlangsung dalam hubungan ordinat (laki-laki) dan subordinat (perempuan). Oleh karena itulah, ketika membahas kemiskinan di tengah kondisi budaya tersebut, perempuan adalah pihak yang paling rentan dalam menerima dampak atas kondisi yang berkembang, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.

Bahwa kemiskinan perempuan seperti halnya kemiskinan umumnya dapat disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks. Namun secara umum, ia dapat ditelaah dalam dua perspektif:

- a. *Perspektif Ekonomi*; secara jelas kemiskinan dan pemiskinan perempuan ini terlihat dalam sektor ekonomi. Seorang perempuan yang ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dari laki-laki dari kategori yang sama. Perempuan yang tidak berpenghasilan, jauh lebih buruk situasinya dibandingkan perempuan yang berpenghasilan dalam keluarga dengan tingkat ekonomi subsisten.²⁴ Ketika perempuan ikut mencari penghasilan

²⁴Imam Cahyono, "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (*Poverty has a Women Face*)", *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 11.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian penghasilannya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dan lebih meningkatkan kebutuhan dasar keluarganya dibanding laki-laki.²⁵

- b. *Perspektif Politik*; dalam perspektif ini, perempuan tidak terwakili secara proporsional di antara kelompok miskin dan tidak punya kekuasaan. Bentuk kemiskinan perempuan dalam perspektif ini antara lain berupa kerentanan hidup (*vulnerability*), ketiadaan kesempatan dan suara (*voicelessness and powerlessness*), serta didukung pemerintah yang sangat bias gender (*male-biased governance system*). Bentuk kemiskinan gender berupa bias gender mudah ditemui dalam kebijakan struktural, perbedaan efek kebijakan dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum perempuan. Jadi, diskriminasi terhadap perempuan sangat kentat.²⁶

Muhammad Yunus dalam bukunya “Bank Kaum Miskin” menyatakan bahwa kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin. Kemiskinan diciptakan oleh struktur masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh masyarakat. Pengalaman *Grameen* menunjukkan bahwa sekecil apapun dukungan modal keuangan yang diberikan, kaum miskin sepenuhnya mampu meningkatkan kehidupan mereka.²⁷ Oleh karena itu, menurut Marguiret Robinson, pinjaman dalam bentuk *micro kredit* merupakan salah satu upaya ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi

²⁵Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (*Poverty has a Women Face*)”, *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 12.

²⁶Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (*Poverty has a Women Face*)”, *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 13.

²⁷Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), h. 198.

di antara mereka, yang mencakup: *Pertama*, masyarakat sangat miskin (*the extreme poor*), yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. *Kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*). *Ketiga*, masyarakat berpenghasilan rendah (*lower income*), yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut. Kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi, atau penciptaan lapangan kerja sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha menengah maupun besar.²⁸ Salah satu bentuk kelembagaan keuangan yang tepat untuk melayani kelompok usaha perempuan yang berada dalam kategori miskin namun masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk produktif adalah lembaga keuangan mikro. Lembaga ini dapat memenuhi kebutuhan mereka karena prosesnya yang mudah dengan jaminan minimal dan sistem jempot bola secara langsung kepada mitra perempuan.²⁹ Tujuan Lembaga Keuangan Mikro antara lain : Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama

²⁸Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 53.

²⁹Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 68-69

masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.³⁰ Prinsip Umum Lembaga Keuangan Mikro adalah: Modal LKM harus bersumber dari anggotanya sendiri, yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu LKM dapat membuka berbagai jenis tabungan. Layanan kredit/ pinjaman/ pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM saja, tidak boleh kepada bukan anggota. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/ karakter pinjaman sendiri.

Perempuan menghadapi berbagai persoalan mendasar akibat gendernya, kontruksi sosial yang melekat pada peran, tanggung jawab dan perilakunya sebagai perempuan dan juga karena relasinya yang tidak setara dengan laki-laki sehingga menimbulkan ketidakadilan gender.³¹ Menurut Hafidz seperti yang dikutip oleh Ratih Dewayanti dan Erna Ermawati Chotim dalam *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di pedesaan Jawa*, pemberdayaan dikenal sebagai satu pendekatan untuk memperbesar akses dan kontrol kelompok-kelompok marginal atas sumber daya ekonomi, politik dan budaya.³² Sedangkan Menurut Euis Amalia dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* menyebutkan bahwa “*Reaching and Empowering Women*” yaitu perempuan merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, mereka harus menjadi fokus utama. Di samping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013, “*Lembaga Keuangan Mikro Bab.3*”

³¹Edriana noerdin, Dkk, *Potret Kemiskinan Perempuan* (Jakarta: Women Research Institute. 2006), h. 26

³² Ratih Dewayanti dan Erna Ermawati chotim, *Marjnalisasi dan Eksploitasi Perempuan usaha Mikro di Pedesaan Jawa*(Bandung: Yayasan AKATIGA, 2004), h. 22

perempuan merupakan peminjam, pemakai, dan pengembali kredit yang baik.³³

Melihat pentingnya peran perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungannya dan dengan berbagai kondisi yang dialaminya, maka pemberdayaan perempuan menduduki posisi yang sangat strategis. Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperbesar akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya ekonomi, politik (pengambilan keputusan) dan budaya (perumusan nilai, simbol dan ideologi). Pemberdayaan perempuan pengusaha mikro terkait tidak hanya dengan persoalan mempertahankan kelangsungan usaha demi pemenuhan kebutuhan keluarganya dan dengan persoalan gender tetapi juga terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan.³⁴ Dilihat lebih jauh lagi, pemberdayaan perempuan mempunyai tingkatan (level) yang terdiri dari lima tingkatan yaitu:³⁵ Tingkat pertama kesejahteraan; Tingkat kedua akses; Tingkat ketiga konsistensi/kesadaran moral; Tingkat ke empat partisipasi; Tingkat kelima control.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Pembiayaan Berbasis Kelompok Replika Grameen bank

Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin

³³Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers.2009), h. 73

³⁴Ratih Dewayanti dan Erna Ermaawati, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*(Bandung: Yayasan AKATIGA.2004) h. 22-2

³⁵ Zarida,dkk, *Pemberdayaan Terhadap Wanita Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Bandung* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.2000), h.7-8

memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Bank ini terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel (bersama dengan Muhammad Yunus) pada tahun 2006. Menurut Muhammad Yunus kemiskinan adalah penyangkalan seluruh hak asasi manusia. Dimana kemiskinan adalah absennya seluruh hak asasi manusia. Frustasi, permusuhan, dan kemarahan yang disebabkan oleh kemiskinan akut tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun. Untuk membangun perdamaian yang stabil kita harus mencari cara-cara menyediakan peluang bagi rakyat untuk bisa hidup secara layak.³⁶

Muhammad Yunus, pendiri bank ini, mendapatkan gelar doktor dalam ekonomi dari Universitas Vanderbilt. Dia terinspirasi pada bencana kelaparan Bangladesh untuk membuat pinjaman kecil kepada sebuah kelompok keluarga agar mereka dapat membuat barang kecil untuk dijual. Yunus percaya dengan memberikan pinjaman kecil tersebut kepada masyarakat luas dapat menghilangkan kemiskinan yang parah di pedesaan di Bangladesh.

Karakteristik *Grameen Bank* sebagai berikut:

- a. *Grameen Bank* memberikan kredit kecil tanpa agunan yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi maupun yang berkaitan dengan perumahan.
- b. Sasaran nasabah *Grameen Bank* adalah masyarakat miskin dengan pemberian pinjaman tanpa agunan, sebagian besar dari masyarakat miskin tersebut adalah perempuan.
- c. *Grameen Bank* hanya mengenal tiga jenis kredit, yaitu kredit untuk kegiatan produktif, kredit untuk

³⁶Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin. Penerjemah Ifan Nasution* (Jakarta: Marjin Kiri, 2008), h. 263

membangun rumah, dan kredit musiman untuk menanam tanaman musiman.

- d. Pembentukan kelompok, satu kelompok terdiri dari lima orang peminjam sehingga terjadi tanggung renteng.
- e. Imbal jasa yang wajar yaitu 20% per tahun.
- f. *Grameen Bank* tidak melakukan ekspansi besar-besaran, meskipun memiliki cabang di mana-mana, akan tetapi *Grameen Bank* tetap menjaga plafon kredit bagi setiap peminjam.³⁷

Pola perkreditan *Grameen Bank* tidak sama dengan prinsip-prinsip Bank Komersial. Transaksi dibuat sesederhana mungkin. Penetapan imbal jasa atas pinjaman sebesar 20% per tahun didasarkan pada pertimbangan keperluan operasional Bank. Untuk pemupukan modal diberlakukan ketentuan simpanan wajib kelompok sebesar 5% dari pinjaman anggota yang dipotong di muka. Di samping ada konsep simpanan untuk pembelian saham, *Grameen Bank* juga mewajibkan anggota untuk membayar simpanan asuransi sebesar 1% dari pinjaman yang diterima. Dengan adanya simpanan ini anggota yang mengalami musibah atau meninggal dunia tidak perlu melunasi hutangnya lagi karena sudah ditanggulangi oleh dana asuransi tersebut. Simpanan jaminan ini tidak boleh diambil sebelum 3 tahun pertama.³⁸

Dalam proses perekrutan anggota, *Grameen Bank* mengutamakan orang yang termiskin di antara kelompok orang miskin, maka sistem pemberian pinjaman dimulai dengan memilih dua orang yang termiskin dari kelompok. Apabila

³⁷---, "Grameen Bank yang manusiawi dan Demokratis" *Wacana* No. 14(November-Desember 1998), h. 11-12. Dalam [www. Elsppat.or.id/download/file/w14 a4.pdf](http://www.Elsppat.or.id/download/file/w14%20a4.pdf) diunduh pada 14 Januari 2013

³⁸ Executive Summary; *Grameen Bank* di Bangladesh (Lembaga keuangan formal yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan, usaha mikro dan usaha kecil di Bangladesh).

setelah 10 minggu, 2 orang pertama tersebut cicilannya lancar, maka 2 orang berikutnya akan mendapatkan pinjaman. Ketentuan ini menyebabkan semua anggota kelompok mengawasi dan bertanggung jawab atas penggunaan pinjaman. Apabila setelah 10 minggu kemudian pengembaliannya lancar, satu orang terakhir, yaitu ketua kelompok baru mendapatkan pinjaman. Jika pembayaran pinjamannya berjalan lancar sampai dengan selesai maka, plafon pinjaman akan dinaikkan sebesar plafon pokok ditambah dengan jumlah simpanan dan cicilan saham (bertambah 10 s/d 4,30%). Semakin lancar pengembalian-nya akan semakin besar jumlah simpanan anggota dan semakin besar pula plafon pinjaman yang disediakan.³⁹

Filosofi Grameen Bank⁴⁰

Kegiatan yang dilakukan oleh *Grameen Bank* selama ini didasarkan pada filosofi sebagai berikut:

- a. Kaum miskin memiliki keahlian yang tidak digunakan atau hanya sedikit digunakan.
- b. Kemiskinan tidak diciptakan oleh kaum miskin, tetapi oleh kebijakan dan lembaga yang mengecualikan mereka dari kesempatan.
- c. Kegiatan amal bukanlah solusi masalah kemiskinan, justru akan menciptakan ketergantungan daripada kemandirian.

³⁹ Teuku Syarif, “Grameen Bank Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Punya Potensi untuk Diberdayakan”, Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.

⁴⁰M. Nurul Alam dan Mike Getubig, *Program Pendirian dan Pelaksanaan Program Kredit Mikro dengan Metode Grameen. Berdasarkan Praktek Grameen Bank dan Pengalaman Grameen Trust dan Para Mitra Grameen Foundation*, h. 9, 10.

- d. Menjadi wirausaha adalah cara tercepat dan termudah untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum miskin.
- e. Kaum perempuan memiliki kecenderungan tinggi untuk jatuh ke dalam kemiskinan dan yang paling menderita karenanya, tetapi mereka memiliki dampak langsung bagi keluarga mereka.

Sejalan dengan kondisi kemiskinan yang umumnya lebih banyak berdampak kepada kaum perempuan maka, pemberdayaan kepada kaum perempuan merupakan hal yang urgen; dan inilah yang menjadi dasar model pemberdayaan *Grameen Bank*. Program pendampingan yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan yang dilakukan *Grameen Bank* mengutamakan kelompok kaum perempuan (dalam keluarga) miskin sebagai “kelompok sasaran” (target grup). Hal ini didasarkan atas beberapa hal, antara lain:⁴¹

a. *Dari segi ketenagakerjaan*

Umumnya kaum perempuan dipandang bukan sebagai kaum produktif. Mereka lebih banyak diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Padahal jika disadari mereka sebenarnya dapat menjadi salah satu pilar ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dengan membuka akses kredit kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan usaha produktif di sela-sela kegiatan mengurus rumah tangga sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pada saat yang sama, kaum ibu juga perlu didampingi untuk terus mengatur keuangannya melalui manajemen tabungan.

⁴¹M. Amin Azis, Ibnu Supanta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma & BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), h. 12-13.

b. *Secara kultural*

Pentingnya pemberdayaan bagi kaum perempuan juga terkait dengan hubungan perempuan dengan keluarga. Secara kultural, kaum perempuan telah terbiasa mengurus rumah tangga, karena merekalah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap konsumsi keluarga. Oleh karena itulah, berbicara tentang pemberdayaan kaum miskin erat kaitannya dengan pemberdayaan kaum perempuan yang langsung membidik penyangga keluarga.

c. *Secara emosional*

Dalam praktek kehidupan, kaum perempuan (ibu) lebih dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu, perempuan menjadi kunci penentu terhadap pembentukan kualitas sumber daya anak-anak bangsa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan, baik dalam hal perbaikan nutrisi, kesehatan maupun pendidikan. Maka tidak berlebihan jika perempuan perlu diberdayakan, dengan demikian perbaikan kualitas anak-anaknya pun secara langsung dapat ditingkatkan.

d. Akses kredit untuk kaum perempuan merupakan jembatan emas menuju kesetaraan hak-hak (*perbaikan ketimpangan gender*).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka, menempatkan kaum perempuan sebagai prioritas program pemberdayaan merupakan hal yang strategis. Mereka adalah golongan masyarakat terkena dan paling merasakan dampak kemiskinan, terutama ketika terjadi kerawanan ekonomi dalam keluarga. Terlebih terdapat banyak kasus di berbagai tempat, kemiskinan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga seringkali menjadi salah satu cara laki-laki melepaskan tanggung-jawab atas keluarganya dan menceraikan istrinya.

Dalam berbagai kasus perceraian, perempuan cenderung mengambil beban terbesar untuk membesarkan anak-anak, dengan atau tanpa sumbangan mantan suami.⁴² Dalam keadaan ini seorang ibu akan berjuang hingga detik terakhir untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan demi mempertahankan hidup anak-anaknya.

Muhammad Yunus dalam bukunya “Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan” mengatakan bahwa meminjamkan uang kepada perempuan bermanfaat lebih banyak kepada keluarga daripada kepada laki-laki. Bila uang dipinjamkan kepada laki-laki, mereka cenderung menggunakan untuk diri sendiri. Namun, bila dipinjamkan kepada perempuan, uang itu diinvestasikan untuk membuat usaha yang bermanfaat bagi seluruh keluarga. Dengan begitu, meminjamkan uang kepada perempuan akan menciptakan efek air terjun (*cascading effect*) yang bermanfaat bagi seluruh keluarga dan akhirnya kepada seluruh komunitas.⁴³

Uraian di atas menegaskan bahwa pemberdayaan kaum perempuan di bidang ekonomi mutlak dilakukan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan melaksanakan program yang menekankan pada 5 aspek, yaitu:⁴⁴

⁴²Imam Cahyono, “Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (Poverty has a Women Face)”, *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005): h. 13.

⁴³Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 60-61.

⁴⁴Rommy Haryanto, “Pemberdayaan Wanita untuk Perkembangan Ekonomi” diakses pada tanggal 2 Juni 2010 dari <http://www.wrp-diet.com/pemberdayaan-wanita-untuk-perkembangan-ekonomi/>

a. Pengembangan Kapasitas dan Karakter

Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk perempuan.

b. Konsultasi dan Pendampingan

Setelah pelatihan, kelompok perempuan kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa menguatkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas usahanya di masa depan.

c. Organisasi

Sebagai individu ataupun kelompok usaha, perempuan sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Pada tahap ini diharapkan para perempuan yang berwirausaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.

d. Pasar

Para perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki.

e. Jejaring

Diharapkan para perempuan dan kelompok usahanya mampu menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.

Selain 5 aspek penguatan tersebut diatas, suatu hal yang juga perlu dibangun agar pemberdayaan ekonomi perempuan

bisa berhasil, yaitu mental positif. Perlu dibangun terus-menerus mental positif perempuan sehingga mereka mau dan mampu berwirausaha, bahwa mereka bisa dan mampu memainkan peran-peran ekonomi, serta berkontribusi bagi keluarga dan pembangunan sekitarnya.

Pemberdayaan perempuan pada dasarnya dapat dibagi dalam dua tahap: *pertama*, pemberdayaan personal dengan memberikan informasi akan hak-hak, kesetaraan dan sebagainya, bertujuan untuk menanamkan nilai internal terhadap diri masing-masing individu. *Kedua*, pemberian daya kuasa berupa sistem nilai dan organisasi sehingga perempuan memiliki otoritas, kekuasaan dan peluang dalam mengelola organisasi atau kelompoknya.⁴⁵

Sebagai makhluk sosial, seseorang mustahil dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudaya jika hidup sendiri. Sejak lahir, seseorang disayangi, dididik dan dikembangkan dalam (kelompok) keluarga. Kemudian dilanjutkan dalam (kelompok) sekolah, (kelompok) pergaulan dan (kelompok) pekerjaan. Sepanjang hidupnya seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan hubungan antar manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan atau organisasi.

Pengertian kelompok

Tidak semua kumpulan orang disebut kelompok. Sekumpulan orang dapat disebut kelompok, jika:⁴⁶

- 1) Saling kenal dan memiliki ikatan batin satu sama lain;

⁴⁵GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia), "Perempuan Sangat Rentan Terhadap Kemiskinan", diakses pada tanggal 2 Juni 2010 dari http://www.gapri.org/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=124

⁴⁶Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro, Program Pengembangan Kecamatan (Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro), *Kredit Mikro Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin*, (T.tp.,t.t.: 2002), h.15.

- 2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama;
- 3) Keanggotaannya relatif stabil untuk jangka waktu yang lama;
- 4) Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan anggota;
- 5) Ada struktur, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas di antara anggotanya;
- 6) Ada aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggota;
- 7) Ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk tujuan kelompok.
 - a. Manfaat kelompok bagi pemberdayaan ekonomi perempuan

Kelompok yang sudah ada maupun yang dibentuk baru dan memenuhi sebagian besar persyaratan sebagai kelompok, memberikan banyak manfaat dalam rangka perluasan pasar usaha maupun efisiensi pelayanan kepada peminjam kaum perempuan.

Adapun manfaat berkelompok bagi pemberdayaan ekonomi perempuan di antaranya:⁴⁷

- 1) Kelompok adalah wahana belajar bagi anggotanya;
- 2) Sebagai dasar untuk tindakan ke arah perubahan;
- 3) Sebagai dasar bagi organisasi yang besar;
- 4) Kelompok mengendalikan sikap dan perilaku anggotanya;
- 5) Kelompok mengefisienkan pekerjaan;
- 6) Kelompok mempromosikan dan membangun citra.

⁴⁷Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro, Program Pengembangan Kecamatan (Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro), *Kredit Mikro Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin*, (T.tp.,t.t.,: 2002), h. 16-17

Pola *Grameen Bank* ini mengutamakan kekuatan kelompok perempuan sebagai basis utamanya. Kekuatan kelompok ini juga merupakan jaminan atas kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha mikro perempuan. Meskipun permodalan bukan yang utama namun dengan adanya bantuan permodalan dengan skema yang tepat dan rekat dengan persoalan usaha perempuan maka mampu meningkatkan produktivitas usaha perempuan hingga gilirannya mampu meningkatkan pendapatannya dan semakin mampu menyejahterakan keluarga dan membantu proses pembangunan ekonomi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.⁴⁸

Saat ini pola replika *Grameen Bank* ini telah banyak dikembangkan di berbagai wilayah oleh berbagai lembaga keuangan baik secara konvensional maupun secara syariah. Kebutuhan pengembangan syariah ini sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan sejalan dengan kelembagaan bank maupun lembaga keuangan non bank yang beroperasi secara syariah. Diharapkan terdapat linkage program antara bank dan lembaga keuangan komersial dengan lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan tidak semata-mata profit namun juga untuk kepentingan sosial.

Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Replika *Grameen Bank* dengan Pola Pembiayaan Syariah.

Secara umum prinsip pemberdayaan perempuan pola *Grameen Bank* ini sama yaitu menggunakan kelompok sebagai basis utamanya. Hanya saja pada saat pengguliran dana modal kerja yang diberikan digunakan akad transaksi secara syariah.

⁴⁸ Teuku Syarif, "Grameen Bank: Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Punya Potensi untuk Diberdayakan", Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006.

Di sini akan dijelaskan beberapa akad yang digunakan pada replika *Grameen Bank* syariah yaitu :

a. *Akad wadiah*

Digunakan pada saat awal di mana mitra yang diberikan permodalan wajib menyimpan dananya dalam bentuk tabungan yang merupakan titipan sebagai jaminan komitmen atas pembiayaan yang diberikan. Tabungan sebesar 10% dari besarnya pembiayaan yang diberikan sebagai tabungan wadiah karena bersifat titipan, tidak akan diambil hingga pembiayaannya lunas hingga periode yang disepakati.

b. *Akad Mudharabah*

Digunakan untuk transaksi pembiayaan dari lembaga keuangan mikro kepada mitra secara bagi hasil. Akad yang digunakan adalah *mudharabah* yaitu kerjasama bagi hasil dengan ketentuan nisbah diawal rata-rata 20% untuk lembaga keuangan mikro sebagai *shahibul mal* (pemberi permodalan) dan *mudharib* (pelaku usaha) yang mendapat bagian sebesar 80%. Porsi bagi hasil ini dinamakan nisbah yang harus disepakati di awal akad. Pembagian dilakukan dari pendapatan atau revenue. Sebagai contoh seorang mitra membutuhkan modal kerja sebesar Rp. 1.000.000 untuk berjualan barang sembako sederhana, pendapatan yang diperoleh rata-rata adalah sebesar Rp. 500.000 maka porsi bagi hasil untuk lembaga keuangan mikro adalah sebesar Rp. 100.000 dan untuk mitra sebesar Rp. 400.000. Pokok dan bagi hasil dicicil dalam jangka waktu 50 minggu dan disetorkan setiap minggu pada saat kumpulan kelompok bertemu secara berkala setiap minggunya. Pembiayaan yang diberikan individu namun berada dalam tanggung jawab suatu kelompok dan para anggota kelompok tersebut bersepakat untuk saling menanggung satu sama lain. Pembentukan kelompok oleh para anggota dan

dipastikan mereka megenal satu sama lain dan memiliki kesepakatan bahwa mereka aling menjamin sehingga manakala ada yang tidak bisa membayar karena satu dan lain hal maka anggota kelompok lain ikut menanggung untuk menalangi setoran pokok dan bagi hasilnya.

c. *Kafalah*

Prinsip kelompok perempuan yang tidak mampu namun memiliki usaha produktif ini dengan pola saling menanggung satu sama lain maka mereka bersepakat untuk saling menanggung (*takaful*) dan *ta'awun* untuk saling membantu satu sama lain. Maka ada akad *kafalah bil mal* dalam hal ini masing-masing pihak saling menanggung satu dengan yang lainnya dengan dana mereka untuk membantu kawannya yang lain. Prinsipnya saling menjamin satu sama lain. Pada titik ini kelompok adalah sebagai jaminan (*collateral*) sehingga pembiayaan yang digulirkan dapat selesai pada waktunya untuk semua anggota pada satu kelompok.

Tahapan pelaksanaan pembiayaan pola kumpulan (replika *Grameen Bank*): studi di PT MBK Ventura Unit Syariah.

1. **Persiapan Awal**

Tahap persiapan awal kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan pada PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK Ventura) dimulai dengan mencari wilayah yang sesuai dengan sasaran nasabah yang akan diberikan pemberdayaan. Setelah ditemukan wilayah yang sesuai dan karakteristik wilayah tersebut dipelajari, kemudian petugas MBK Ventura dikirim ke lapangan untuk menemui tokoh masyarakat setempat, seperti pengurus RT, RW, dan kelurahan setempat untuk menjelaskan mengenai MBK Ventura serta menanyakan apakah sudah ada program lain yang sejenis. Apabila tidak ada program sejenis di wilayah sasaran, selanjutnya para calon nasabah MBK Ventura

dikumpulkan untuk diberi penjelasan tentang profil, program, serta aturan-aturan yang ada. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses uji kelayakan bagi para calon nasabah yang berminat ikut serta dalam program MBK Ventura.⁴⁹

2. Uji Kelayakan Nasabah

Dalam proses uji kelayakan nasabah, MBK Ventura menggunakan tiga ukuran penilaian yang dilakukan secara berurutan, yaitu:⁵⁰

b. Indeks Rumah dengan Metode CASHPOR

Indeks rumah dengan metode CASHPOR adalah sebuah cara pengukuran kemiskinan yang dilakukan dengan mengidentifikasi rumah tinggal para calon nasabah. Metode ini terdiri dari satu halaman kartu, yang memberi nilai pada tiap komponen dari sebuah rumah, misalnya ukuran rumah, bahan atap, tinggi rumah, konstruksi dinding dan sebagainya. Amanah Ikhtiar Malaysia sebagai program replikasi Grameen yang pertama menyusun indeks perumahan ini sebagai sebuah metode tahap pertama berbiaya rendah, yang berfungsi mengidentifikasi nasabah-nasabah potensial.⁵¹

Indeks ini menjadi alat yang efektif dalam mengukur tingkat kemiskinan dan memberikan hasil seketika karena komponen-komponen utama sebuah rumah dengan mudah dinilai tanpa perlu mewawancarai pemilik rumah. Rumah

⁴⁹Wawancara dengan Peti Herawati, (Staf Operasional) PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Tangerang, 19 April 2011.

⁵⁰Tanpa nama, "Targeting", Artikel ini dikases pada 18 April 2011 dari <http://mbkventura.com/id/en/our-systems/targeting/target>

⁵¹M. Nurul Alam dan Mike Getubig, *Pedoman Pendirian dan Pelaksanaan Program Kredit Mikro dengan Metode Grameen* (T.tp., Grameen Trust dan Grameen Foundation, t.th), h. 26.

dipilih sebagai bukti paling kuat karena adanya kecenderungan kaum Melayu untuk memperbaiki rumah ketika mereka memiliki tambahan pendapatan.

Dalam penilaian indeks rumah dengan metode CASHPOR, yang menjadi syarat utama bagi calon nasabah adalah rumah tersebut harus milik sendiri. MBK Ventura tidak memperbolehkan pemberian pembiayaan bagi nasabah yang masih mengontrak atau belum memiliki rumah. Apabila rumah yang ditempati calon nasabah adalah rumah orang tuanya maka, orang tua harus mengetahui dan menerima pro-gram yang ada di MBK Ventura.

c. *Estimasi Pendapatan Sektor Informal dengan Metode Ganesha*

Pada tahun 2003, Yayasan Ganesha menciptakan tabel yang berfungsi untuk mengukur pendapatan rata-rata keluarga yang memiliki usaha berdagang kecil-kecilan atau menjadi pekerja musiman.⁵²

d. *Kebutuhan Modal Kerja*

Saat ini MBK Ventura hanya memiliki satu jenis produk yaitu modal kerja dasar bagi anggota. Pada putaran pertama, disediakan modal kerja sebesar Rp. 3000.000 s/d Rp. 10.000.000 per anggota yang harus diangsur selama 50 minggu pada setiap pertemuan mingguan kelompok. Dalam satu kelompok, modal kerja yang diberikan kepada anggota tidak harus sama, disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja dan kemampuan bayar anggota. Modal kerja hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha, dan harus disetujui oleh anggota-anggota lain di kumpulan. Modal kerja ini tidak memerlukan jaminan dan

⁵² Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2007.

penjamin, tetapi bersifat tanggung renteng. Jadi setiap anggota dalam satu kelompok bertanggung jawab atas kewajiban setoran anggota lainnya.

3. Latihan Wajib Kelompok

Latihan wajib kelompok bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada para calon nasabah. Dengan adanya pelatihan ini, harus dipastikan bahwa nasabah telah memahami sepenuhnya dan menerima dengan sukarela serta mematuhi berbagai ketentuan dan peraturan terkait program. Latihan wajib kelompok dilakukan selama lima hari. Seluruh calon nasabah diwajibkan mengikuti semua sesi pelatihan yang diberikan dari awal hingga akhir. Materi dalam latihan wajib kelompok ini meliputi visi, misi, tujuan program, pentingnya pembentukan kelompok dan kumpulan, kewajiban menghadiri pertemuan kelompok, setoran pembiayaan, produk pembiayaan dan persyaratannya, penggunaan untuk usaha produktif, serta tanggung renteng.⁵³

4. Pembentukan Kelompok

MBK Ventura membagi anggotanya ke dalam kelompok-kelompok. Gabungan kelompok-kelompok pada MBK Ventura disebut dengan kumpulan. Satu kelompok beranggotakan lima orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan sisanya menjadi anggota kelompok. Dalam satu kelompok tidak diperbolehkan adanya hubungan saudara.⁵⁴ Berbeda dengan kelompok yang tidak boleh memiliki

⁵³Wawancara dengan Peti Herawati, (Staf Operasional) PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Tangerang, 19 April 2011.

⁵⁴Wawancara dengan Peti Herawati (Staf Operasional) PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Tangerang, 19 April 2011.

hubungan saudara, dalam satu kumpulan boleh memiliki hubungan saudara tetapi tidak boleh lebih dari dua orang.

5. Kebijakan Kumpulan/Majelis

Semua transaksi dilakukan pada pertemuan kumpulan. Beberapa kebijakan yang ada pada pertemuan kumpulan adalah:⁵⁵

- a. Mitra adalah anggota kelompok yang keanggotaannya dipilih sendiri dan merupakan anggota kumpulan. Satu kelompok terdiri dari lima orang yang digabung menjadi satu kumpulan. Secara umum satu kumpulan terdiri dari empat sampai lima kelompok. Satu kumpulan terdiri dari 20-25 nasabah.
- b. Pinjaman/Pembiayaan tanpa jaminan, tetapi bersifat tanggung renteng atau bertanggung jawab bersama.
- c. Mitra berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman modal kerjanya secara penuh dan tepat waktu.
- d. Mitra wajib menghadiri pertemuan mingguan dimana pembayaran angsuran mingguan akan dilakukan.
- e. Modal kerja hanya untuk usaha tidak boleh untuk kepentingan konsumtif, dan harus disetujui oleh anggota-anggota lain di kumpulan. Hasil usaha digunakan untuk kesejahteraan keluarga.
- f. Staf lapangan yang mendatangi kumpulan mitra, bukan mitra yang mendatangi MBK Ventura.
- g. Petugas maupun mitra menciptakan dan memelihara disiplin yang ketat, termasuk pemilihan dan pelatihan yang baik. Kehadiran wajib dan membayar setoran tepat

⁵⁵PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, *Sinopsis: Kesempatan Usaha Produktif bagi Wanita dari Keluarga Kurang Mampu* (Tangerang: PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, 2011), h. 2.

waktu di rapat mingguan, tanggung jawab bersama dan memeriksa usaha.

6. Pencairan dan Pembayaran Pembiayaan

Sistem pencairan pembiayaan pada MBK Ventura terbagi menjadi dua tahapan dengan pola 3-2. Pada pencairan pembiayaan tahap pertama, yang mendapatkan pembiayaan adalah tiga orang anggota kelompok terlebih dahulu. Pada minggu selanjutnya pencairan pembiayaan untuk ketua dan wakil kelompok. Pembayaran cicilan pembiayaan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan kumpulan sesuai dengan jumlah cicilan yang telah disepakati. Cicilan tersebut harus diangsur oleh nasabah setiap minggunya selama 50 minggu berapapun jumlah pembiayaannya

Ini salah satu laporan yang dapat dilihat dari PT MBK Ventura untuk periode 2023 hingga Juni.

		Dec-22	Jun-23
	<u>Conventional & Sharia Business Units</u>		
1	Total number of clients (100% women)	1,489,226	1,439,634
2	Number of active borrowers (100% women)	1,473,615	1,427,416
3a	Gross portfolio (Rp billion)	4,920	4,916
3b	Gross portfolio (US\$ million)	315.5	327.7
4a	Average outstanding size/client Rp million	3.339	3.444
4b	Average outstanding size/client US\$	214	230
5a	Non performing finance >30 days	1.76%	3.39%
5b	Non performing finance >90 days	0.86%	2.28%
6a	Total number of employees (99% women)	6,616	7,277
6b	of whom, account officers (100% women)	4,866	5,466
7	Total number of branches (incl. satellites)	846	869
8a	Total assets Rp billion	6,291	6,072
8b	Total assets US\$ million	403.5	404.8
	<u>Sharia Business Unit</u>		
1	Total sharia loans (100% women)	668,309	644,148
2	Outstanding financing Rp billion	2,236	2,261
3	% Sharia financing/total financing	45%	46%
4	Branches	361	390
5	Employees	2,748	3,418
	<u>Macroeconomic Indicators</u>		
2	Inflation rate	5.51%	3.52%
3	Exchange rate: US\$ 1 = Rupiah (Bi rate)	15,592	15,000

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah mitra 100% adalah perempuan meskipun saat ini terjadi penurunan

jumlah mitra (-1%) karena menurunnya permintaan mitra untuk permodalan usaha disebabkan banyak usaha mereka yang tutup akibat daya beli masyarakat turun akibat krisis ekonomi dan adanya Covid 19. Pembiayaan yang telah digulirkan kepada kelompok perempuan tersebut hingga Juni 2023 adalah sebesar 4.9 trilyun rupiah dengan pembiayaan kurang lancar (*Non Performing Finance*) yang lebih dari 90 hari sebesar 2.28%, artinya 98% mitra perempuan ini dalam kondisi lancar dan baik dalam pengembalian pembiayaan. Jumlah SDM yang merupakan karyawan yang melakukan pelayanan bagi pembiayaan perempuan adalah 7277 sd 7444 orang yang semuanya adalah perempuan yang bekerja di 869 cabang di seluruh Indonesia dan 388 cabangnya adalah unit usaha syariah dengan total mitranya 637 orang.

Pola semacam *Grameen Bank* saat ini di Indonesia khususnya seiring dengan pertumbuhan bank syari'ah tengah dikembangkan penguatan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*baitulmal wattamwil*) yang saat ini berjumlah lebih dari 3000. *Grameen Bank* masih berpatokan pada bunga meski sangat kecil sedangkan LKMS/BMT sistemnya yang berpola syariah yaitu tanpa bunga dan mengembangkan skim-skim syariah yang lebih variatif antara lain, musyarakah, mudharabah, murabahah atau qardhul hasan untuk kelompok dhu'afa. Untuk dapat berperan besar seperti halnya *Grameen Bank* perlu ada upaya LKMS dalam hal pendampingan dan advokasi terhadap penguatan usaha kecil kelompok perempuan. Di samping itu LKMS ini dapat bermitra dengan Bank Syariah maupun dengan berbagai perusahaan dan BUMN yang berkewajiban menyisihkan sekitar 5 persen dari laba perusahaan untuk biaya sosial yang dikenal dengan program **CSR** (*Corporate Sosial Responsibility*) yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan pada kelompok bawah namun memiliki kapasitas untuk berusaha. Pola

pembiayaan syariah secara berkelompok ini sangat tepat digunakan untuk permodalan bagi kelompok perempuan pada segmen tersebut.

Daftar Pustaka

- Chambers, R. (1985). *Rural Development: Putting The Last First*. London ; New York: Longman.
- Departemen Sosial RI, *Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin* (Departemen Sosial RI, 2005), h. 34-36.
- Edriana noerdin, Dkk, *Potret Kemiskinan Perempuan*, (Jakarta: Women Research Institute. 2006), h. 26
- Erik Syehabudin, "Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan", Artikel diakses pada 29 Oktober 2008 dari <http://www.radarbanten.com>
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers.2009), h. 73.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2009), h. 53.
- Executive Summary; Grameen Bank di Bangladesh (Lembaga keuangan formal yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan kewirausahaan, usaha mikro dan usaha kecil di Bangladesh).
- Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA
- GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia), "Perempuan Sangat Rentan Terhadap Kemiskinan", diakses pada tanggal 2 Juni 2010 dari http://www.gapri.org/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=124

- Gunawan Sumodiningrat (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, Cet. Kedua), h. 43.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Imam Cahyono, "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (Poverty has a Women Face)", *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005): h. 13.
- Imam Cahyono, "Wajah Kemiskinan, Wajah Perempuan (Poverty has a Women Face)", *Jurnal Perempuan*, No. 42 (Juli 2005), h. 11-13
- Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al Mahaalli, dan Jalaluddin Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar, *Tafsir Al Jalalain*, Semarang, Usaha Keluarga, tth
- M. Amin Azis, Ibnu Supanta, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma & BMT* (Jakarta: Pinbuk Press, 2004), h. 12-13.
- M. Nurul Alam dan Mike Getubig, *Pedoman Pendirian dan Pelaksanaan Program Kredit Mikro dengan Metode Grameen* (T.tp., Grameen Trust dan Grameen Foundation, t.th), h. 26.
- Mardi Yatmo Hutomo. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi." *Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas*, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta.
- Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2007), h. 198.
- Muhammad Yunus dan Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin. Penerjemah Ifan Nasution* (Jakarta: Marjin Kiri, 2008), h. 263

- Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 60-61.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, *Sinopsis: Kesempatan Usaha Produktif bagi Wanita dari Keluarga Kurang Mampu* (Tangerang: PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, 2011), h. 2.
- Ratih Dewayanti dan Erna Ermawati chotim, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan usaha Mikro di Pedesaan Jawa*(Bandung: Yayasan AKATIGA, 2004), h. 22.
- Rommy Haryanto, "Pemberdayaan Wanita untuk Perkembangan Ekonomi" diakses pada tanggal 2 Juni 2010 dari <http://www.wrp-diet.com/pemberdayaan-wanita-untuk-perkembangan-ekonomi/>
- Soetanto Hadinoto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2007.
- Teuku Syarif, "Grameen Bank Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Punya Potensi untuk Diberdayakan", *Infokop Nomor 29 Tahun XXII*, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013, *"Lembaga Keuangan Mikro Bab.3"* University of Michigan, Ann Arbor, 1970.
- Zarida,dkk, *Pemberdayaan Terhadap Wanita Pedagang Kecil di Pasar Tradisional*Bandung (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.2000), h.7-8.



PERAN PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

dr. Femmy Nurul Akbar, SpPD-KGEH

Pendahuluan

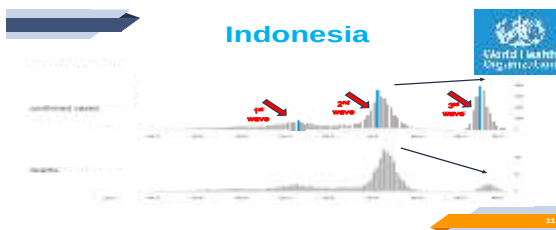
Coronavirus Disease 2019 atau dikenal dengan nama COVID-19 pertama kali dilaporkan terjadi di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan Sindrom Penyakit Saluran Napas Akut Berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pada bulan April 2021, pandemi telah menyebar dengan sangat cepat di berbagai negara dan menginfeksi lebih dari 200 juta manusia di seluruh dunia dengan tingkat kematian 2-3 %.

Beberapa strategi pencegahan penularan dilakukan, dengan menekan penyebaran lebih luas dari infeksi virus Covid-19 adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (*sosial distancing*), menghindari kerumunan dan makan bersama serta membatasi bepergian atau mobilisasi yang tidak perlu, serta menerapkan kebijakan *lockdown* yang sebenarnya telah diterapkan sejak awal di Indonesia, sesuai keputusan pemerintah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan penyebaran pandemi ini. Pada kondisi ini peran perempuan menjadi sangat

penting baik perannya sebagai ibu, di keluarga maupun di pekerjaan dan profesinya seperti tenaga kesehatan atau tenaga pendidik.

Namun pembatasan dan mematuhi protokol kesehatan ini tetap belum berhasil untuk mengatasi virus ini, yang ditandai dengan tetap meningkatnya jumlah kasus Covid-19 akibat kepatuhan dan disiplin dari masyarakat yang masih kurang serta pembatasan aktifitas masyarakat sehari-hari di pihak lain justru menimbulkan imbas meningkatnya beban ekonomi masyarakat sehingga tidak bisa menjadi solusi jangka panjang^{1,2}. Hal ini pula yang melibatkan peran perempuan sesuai ranahnya.

Indonesia menghadapi infeksi gelombang 1 atau varian Alfa pada bulan Januari 2021 mencapai 89.000 kasus perhari. Dengan mematuhi protokol kesehatan, maka pada bulan Mei 2021 jumlah kasus menurun menjadi 26000 kasus per hari. Namun pada bulan Juli 2021, Indonesia masuk gelombang kedua dari Covid-19 yaitu infeksi dari varian Delta. Penyebab gelombang keduanya diakibatkan adanya kelonggaran dalam mobilisasi dan menjaga jarak di antara nya tempat kerja, pasar dan mall dibuka lagi, transportasi dengan kapasitas penuh, penyelenggaraan resepsi pernikahan, festival, dan pemilihan umum sudah mulai dilaksanakan dengan puncaknya adalah perayaan Idul Fitri yang mengakibatkan varian delta ini mengalami krisis peningkatan jumlah infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 250.000 kasus baru perhari dengan jumlah pasien kritis sangat meningkat dan angka kematian menjadi terus bertambah. Berbagai keadaan dan kondisi atas juga sangat berkaitan dengan perempuan sehingga peran perempuan sangat diperlukan dalam membantu mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan menahan diri dan mengurangi mobilisasi.



Sumber Data :
WHO



Indonesia akhirnya dapat mengatasi gelombang ke 2 dengan angka infeksi mencapai 200 kasus per hari pada bulan Desember 2021. Namun pada bulan Januari 2022 kasus meningkat lagi dengan dilaporkan transmisi lokal varian Omicron. Pada bulan April 2022, penduduk di Indonesia yang terinfeksi telah mencapai 6 juta dengan 155 ribu penduduk mengalami kematian. Namun angka kematian menurun saat munculnya transmisi varian Omicron, meskipun yang terinfeksi justru meningkat mencapai 400 ribu per hari pada bulan Maret 2022. Angka kematian lebih banyak pada laki-laki, hal ini juga membuktikan bahwa perempuan sesungguhnya tahan terhadap berbagai macam penyakit terutama pada masa pandemi ini.

Varian Omicron memiliki gejala yang ringan atau tanpa gejala, penderita lalu melakukan isolasi mandiri dan menggunakan pelayanan *telemedicine* atau virtual untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.

Pada bulan Maret 2022 angka terinfeksi menurun sampai 83%, begitu pula pasien yang dirawat menurun 85% dengan angka kematian menurun sampai 88%. Dengan kondisi ini Indonesia sudah memasuki batasan protokol kesehatan yang lebih longgar meskipun tetap harus waspada.

Peran Perempuan dalam Penanganan dan Penyebaran Covid -19 di bidang Pendidikan dan Kesehatan

Berbagai peran perempuan dalam percepatan penanganan penyebaran Covid-19 dengan melakukan berbagai aktivitas termasuk di bidang Pendidikan dan Kesehatan khususnya para dosen perempuan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kegiatan di bidang Pendidikan terdiri dari:

1. Bagi para dosen menyiapkan pemberlakuan *Work From Home* (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau *e-learning* dengan memberikan tugas sesuai dengan kondisi yang ada jangan seperti kondisi normal.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dan membantu tugas dan unit lain baik dalam tim maupun koordinasi di luar unit lain dalam penanganan pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya di kampus misalnya dalam pengaturan makan dosen.
3. Membentuk website atau berbagai media edukasi, tanya jawab dan meluruskan berita negatif/ *hoax*. Laman tanya jawab dibuat agar sivitas akademika dan masyarakat dapat berkonsultasi dan dapat menanyakan terkait Covid-19 oleh tim relawan pendukung. Tim juga dapat memantau dan memberikan informasi jika ada sivitas akademik maupun masyarakat sekitar yang sakit atau dikarantina.

Sedangkan untuk program Kesehatan melakukan berbagai macam kegiatan khususnya oleh dosen-dosen perempuan yang berada di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan, namun juga didukung oleh keterlibatan dosen-dosen perempuan di luar rumpun Ilmu Kesehatan.

1. Memproduksi *hand sanitizer* yang dapat dibagikan secara gratis ke seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar kampus juga bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan saat pertama diumumkan adanya pandemi.
2. Menyediakan konsumsi harian bagi mahasiswa yang masih berada di sekitar kampus, yang mudah diakses oleh mahasiswa yang masih tinggal di asrama mahasiswa UIN.
3. Membantu mahasiswa yang ingin kembali ke kampung halamannya di daerah, agar disiapkan segala sesuatunya juga kondisi fisiknya agar aman dan terjaga selama di perjalanan sampai tiba di tempat tujuan.



5

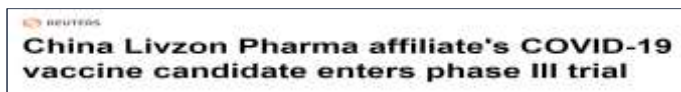
4. Bekerja sama dengan Rumah Sakit (RS) terdekat, contohnya UIN Jakarta dengan RS UIN Jakarta dengan memfasilitasi klinik pratama sebagai layanan triase di luar RS UIN untuk melayani khusus mahasiswa dan keluarga besar UIN. Layanan kesehatan bagi mahasiswa, dosen dan karyawan UIN Jakarta yang berhubungan antisipasi Covid -19.
5. Membantu pemerintah dalam penyelenggaraan program vaksinasi awal untuk 1 juta vaksin bekerja sama dengan dinas Kesehatan Tangerang Banten dengan mengirimkan 60 vaksinator sukarelawan kepada 35.000 warga di 9 wilayah di kabupaten Tangerang, Banten.



6. Membantu pemerintah mengadakan vaksinasi massal kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dan seluruh pegawai untuk mendapatkan vaksinasi 1, 2 dan booster masyarakat segera setelah program vaksinasi Covid-19 diselenggarakan oleh pemerintah. Vaksinasi massal bekerja sama dengan berbagai wadah, organisasi dan insitusi seperti Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Markas Besar Kepolisian RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Intelijen Nasional (BIN), sampai ke kepolisian resort (POLRES) Tangerang Selatan dan lain dengan tentunya berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.



7. Sebagian dosen-dosen perempuan di Fakultas Kedokteran (FK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terlibat pada penelitian kolaborasi internasional vaksin Covid-19 bekerja sama dengan China's Livzon Pharmaceutical Group. Penelitian uji klinik fase III yang dilakukan pada manusia akan menilai efikasi, keamanan dan kekebalan dari vaksin rekombinan fusi protein atau dinamakan V-01. Penelitian ini diadakan lebih dari 10 negara dan melibatkan 4 universitas besar di Indonesia selain UIN Jakarta yaitu, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas Andalas Padang.



A Global, Multi-center, Randomized, Placebo-Controlled:
Phase III Clinical Study to Evaluate
The Efficacy, Safety and Immunogenicity of
Recombinant SARS-CoV-2 Fusion Protein Vaccine (V-01)

8. Melakukan beberapa proyek penelitian tentang Covid-19 dilakukan dosen-dosen perempuan di lingkungan Fakultas Kedokteran di antara nya adalah penelitian tentang efek samping vaksin Sinovac pada kategori umum dewasa maupun lansia dan juga khususnya pada mahasiswa klinik sebagai bagian dari usia remaja atau dewasa muda, serta penelitian efek samping vaksin booster Moderna kepada mahasiswa klinik. Penelitian lainnya adalah tentang metode jenis pemeriksaan PCR Covid-19 , serta penelitian mengenai evaluasi dan keberhasilan pembelajaran jarak jauh atau *e-learning dan hybrid*, baik di tingkat preklinik/akademik dan tingkat klinik/profesi dokter selama pandemi yang sudah dipublikasikan di Jurnal Internasional bereputasi.
9. Membantu pemerintah untuk melayani masyarakat dengan membuka pelayanan pemeriksaan laboratorium molekuler terintegrasi berupa pemeriksaan PCR Covid-19 Pelayanan ini

bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan memiliki jaringan keseluruh Provinsi Banten.

Peran Perempuan dalam Penelitian Tentang Vaksin Covid-19 di Indonesia

Vaksin adalah produk biologi yang di antaranya dapat berupa antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan membentuk kekebalan spesifik dalam menghadapi penyakit. Penemuan vaksin Covid-19 di Cina yang disusul oleh negara lainya telah membuat harapan baru bagi masyarakat. Kurang lebih 170 vaksin telah dikembangkan dan beberapa sudah melalui tahapan uji klinis tahap 3 serta sudah digunakan. Vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi *Sinovac* yang berbasis di kota Beijing menggunakan virus SARS-CoV-2 yang tidak aktif sebagai bahan utama untuk pembuatan vaksinnya. Vaksin *Sinovac* telah menerima persetujuan penggunaan darurat di Brasil, Chile, Turki dan Indonesia. Laporan menunjukkan bahwa vaksin Sinovac dapat ditoleransi dengan baik dan mampu memicu terbentuknya respons humoral terhadap SARS-CoV-2, dengan efikasi pada uji klinis fase 3 sebesar 50,4% di Brasil, 67 % di Cile, 83.5% di Turki dan 65.3 % di Indonesia. Uji fase 3 ini merupakan uji klinis tahap terakhir sebelum suatu jenis vaksin dapat didistribusikan dan diberikan kepada masyarakat luas. Dengan adanya laporan uji klinis di berbagai negara termasuk di Indonesia, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Used Authorization (EUA) dari untuk penggunaan vaksin Sinovac pada tanggal 13 Januari 2021 dan juga mendapat fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tersedianya vaksin dibutuhkan untuk tercapainya tujuan imunisasi di antaranya menurunkan kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*), memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh serta menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial-ekonomi. *Herd Immunity* yaitu kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu salah satunya melalui imunisasi. Dengan demikian untuk Indonesia maka harus dipenuhinya target 181,5 juta dari 250

juta penduduk Indonesia yang divaksin, Kondisi ini tentunya perlu melibatkan peran perempuan terutama dosen atau pendidik untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya vaksin dari lini yang paling dekat yaitu keluarga sampai masyarakat luas.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah memulai kegiatan imunisasi Covid-19 dengan memesan produk vaksin sebanyak 400 juta unit melalui beberapa produsen vaksin. Sejak bulan Januari sampai Februari 2021, pemerintah telah menyelenggarakan program vaksin *Sinovac* bagi tenaga Kesehatan termasuk dokter muda atau koasisten dan pemberi layanan publik kemudian dilanjutkan ke masyarakat umum sampai akhirnya tercapai target vaksinasi Covid-19 lebih dari 70% untuk vaksin 1 dan 2

Salah satu kunci keberhasilan program vaksinasi adalah pandangan masyarakat tentang manfaat dan risiko vaksin serta kepercayaan terhadap vaksin itu sendiri. Penolakan atau penundaan vaksinasi umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang vaksin, manfaat serta risiko vaksinasi. Analisis terhadap pandangan masyarakat dunia terhadap penggunaan vaksin untuk melawan Covid-19 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di dunia memiliki opini netral. Penelitian serupa di Indonesia juga mendapatkan hasil yang sama. Dimana sebagian besar masyarakat tidak mendukung namun juga tidak menolak anjuran vaksinasi Covid-19. Hal ini menunjukkan pada awalnya antusias masyarakat dalam anjuran untuk melakukan vaksinasi belum menjadi prioritas utama sebagai salah satu senjata dalam menghadapi pandemi ini. Padahal penerimaan vaksinasi oleh masyarakat luas merupakan faktor penting dalam keberhasilan program vaksinasi massal karena Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa target cakupan imunisasi minimal 70% atau *herd immunity* agar perlindungan bagi seluruh populasi dapat efektif.

Pandemi menyebabkan program vaksinasi dapat dilakukan secepat mungkin tanpa mengesampingkan keamanan dan efektivitas vaksin. Pembuatan vaksin dilakukan dengan bioteknologi yang modern sehingga diharapkan dapat menghasilkan mutu vaksin yang baik walaupun tidak ada yang sempurna atau setiap produk vaksin

tersebut benar bebas dari efek samping. Penggunaan vaksin memerlukan suatu pengawasan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau biasa disebut *Adverse Event Following Immunization* (AEFI). Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO), istilah AEFI adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi setelah setelah imunisasi, akibat reaksi vaksin atau bukan (koinsidens) serta tidak selalu memiliki hubungan sebab akibat. Sementara Peraturan Menteri Kesehatan No 12/2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, juga menyebutkan. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Dengan demikian KIPI harus ditangani dengan cepat dan efektif, agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap kegunaan vaksin yang akan mempengaruhi untuk cakupan imunisasi secara massal dan insiden penyakit tersebut.

Selama pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, harus dilakukan proses pemantauan dan pelaporan keamanan yang ketat terhadap vaksin tersebut serta mencatat semua reaksi yang timbul setelah pemberian vaksinasi dari petugas pelaksana vaksinasi di lapangan guna menentukan tatalaksana jika terjadi KIPI. Tidak semua kejadian yang diduga sebagai KIPI itu benar oleh karena KIPI, sehingga diperlukan informasi tentang frekuensi, jenis dan derajat berat KIPI sampai suatu kesimpulan bahwa KIPI yang terjadi berhubungan dengan vaksin, kesalahan produksi atau kesalahan pemberian.

Di Indonesia, data tentang keamanan vaksin Covid-19 relatif masih sedikit, sehingga kriteria KIPI yang standar juga masih terbatas. Di lain pihak media sosial banyak menyebarkan berita mengenai bahaya maupun efek samping vaksinasi yang tidak jelas sumbernya. Akibatnya sebagian masyarakat yang percaya menjadi ragu untuk menjalani vaksinasi Covid-19 karena khawatir dengan kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut. Melalui sistim surveilans yang baik maka profil keamanan penggunaan vaksin Covid-19 di lapangan dapat dipantau dan hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengatasi KIPI. Pada keadaan KIPI yang menimbulkan perhatian masyarakat

harus dilacak, dicatat, dan ditanggapi oleh pelaksana imunisasi dan dapat dilakukan langsung secara mandiri melalui *website* keamanan vaksin kepada Kementerian Kesehatan.

Klasifikasi KIPI terbagi atas reaksi KIPI yang terkait dengan komponen vaksin maupun cacat mutu vaksin, kesalahan prosedur, kecemasan karena takut disuntik maupun keinsidien. Berdasarkan gejala, KIPI terbagi atas gejala ringan dan berat. Gejala ringan sering terjadi sekitar 10% sedangkan KIPI berat amat sangat jarang terjadi yaitu kurang 0,01% kejadiannya. Tujuan utama pemantauan KIPI adalah untuk mendeteksi dini, merespon KIPI dengan cepat dan tepat, mengurangi dampak negatif imunisasi terhadap kesehatan individu dan terhadap imunisasi. Produsen vaksin dalam penelitian uji klinis melaporkan efek samping lokal seperti nyeri, bengkak, merah, gatal pada daerah suntikan dan beberapa juga mengalami efek sistemik seperti lelah, diare, nyeri otot, mual, muntah, demam, nyeri kepala maupun perubahan nafsu makan.

Dari review artikel yang dilakukan oleh dosen perempuan di UIN Jakarta didapatkan dari penelitian sebelumnya kejadian KIPI ringan seperti pegal, nyeri di tempat suntikan, kemerahan, demam, mual sampai perubahan nafsu makan. Dari dua hasil penelitian dampak efek samping atau KIPI 2 dosis vaksin Sinovac terhadap dosen dan tenaga kependidikan di UIN Jakarta dan juga kepada mahasiswa klinik atau dokter muda yang sudah dipublikasi di 2 jurnal internasional bereputasi yang diteliti oleh di antaranya dosen-dosen perempuan di FK UIN Jakarta menunjukkan bahwa efek samping atau KIPI vaksin Sinovac baik efek lokal dan sistemik bersifat ringan dan tidak ada pasien yang timbul efek samping membahayakan atau sampai menyebabkan kematian. Subyek penelitian juga sebagian besar perempuan.

Berada di garis depan dalam memerangi amukan Covid-19, tenaga kesehatan menghadapi risiko infeksi yang paling besar. Mutasi Covid-19 saat ini adalah tantangan berat. Apalagi setelah varian Delta asal India masuk dan mendominasi kasus infeksi sejak akhir Mei 2021. Varian Delta ini terbukti sangat menular, dibuktikan dengan kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi naik berlipat ganda.

Vaksinasi booster adalah model yang paling baik untuk meningkatkan imun dan memperkuat respons antibodi terhadap varian baru para tenaga kesehatan.⁴

Dua dosis vaksin Sinovac yang disuntikkan kepada tenaga kesehatan sejak Februari 2021 ternyata tak sepenuhnya bisa melindungi karena banyak yang terinfeksi akibat paparan virus dosis tinggi di tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Sebagian mereka bahkan meninggal. Kematian para tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia dari Maret 2020 hingga Juli 2021 mencapai 1.141 jiwa. Dari data yang ada sekitar 35% dokter yang gugur ternyata sudah mendapatkan vaksinasi sebelumnya. Hal tersebut tidak berarti bahwa program vaksinasi yang pernah dijalankan tidak ada manfaatnya, karena data penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi Sinovac cukup mengurangi angka kematian di mana sekitar 90 persen yang meninggal belum divaksin.

Karena tingginya persentase tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, maka Kementerian Kesehatan mulai menjalankan program vaksinasi dosis ketiga (booster) menggunakan vaksin Moderna mRNA-1273 sejak 16 Juli 2021 bagi seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. *Centers of Disease Control and Prevention* (CDC) merekomendasikan dosis ketiga (Pfizer dan Moderna) untuk melindungi tenaga kesehatan dari kematian akibat COVID-19 yang dilakukan 6 bulan setelah vaksinasi kedua dilakukan.

Sebagaimana vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua, sebagian orang mungkin akan mengalami KIPI setelah vaksinasi booster. Vaksin Moderna adalah salah satu dari enam vaksin yang termasuk ke dalam Emergency Use Listing (EUL) WHO dan lolos dalam uji klinis dengan level efikasi sebesar 92%. Vaksin Moderna ini dapat diberikan pada usia 12 tahun keatas. Studi lain juga menunjukkan efikasi 94.1% dalam follow up selama 2 bulan yang diberikan pada usia 18 tahun keatas Efek samping pada vaksin mRNA yang paling sering dilaporkan adalah nyeri pada tempat injeksi, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, nyeri sendi, sampai pembengkakan kelenjar getah bening pada tempat yang disuntik, juga

mual dan muntah serta demam. Adapun efek samping yang sering terjadi seperti “*Moderna Arm*” yang dapat muncul sebagai ruam kemerahan lokal dalam beberapa hari setelah dosis pertama vaksin Moderna Covid-19.

Pada bulan Agustus 2021 telah dilakukan vaksinasi booster terhadap mahasiswa klinik atau dokter muda serta dilakukan penelitian tentang gambaran KIPi setelah vaksinasi booster Moderna bagi mahasiswwa klinik atau dokter muda yang masuk dalam kategori remaja atau dewasa muda. Subjek dari penelitian ini juga sebagian besar perempuan (74.8%). Dari hasil penelitian ini menunjukkan efek samping lokal yang dirasakan setelah dilakukan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) pada dokter muda adalah nyeri pada tempat suntikan. Secara keseluruhan, onset rata-rata reaksi lokal antara 24 jam pertama sampai 3 hari setelah vaksinasi. Adapun efek samping sistemik yang paling sering dirasakan yaitu pusing/sakit kepala, mengantuk, lemas, demam dan insomnia. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan laporan CDC dan penelitian di Jerman bahwa gejala sistemik yang paling sering dirasakan yaitu sakit kepala, lemas, demam, menggigil dan nyeri otot. Pada penelitian ini tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara KIPi dengan jenis kelamin, riwayat alergi, komorbid dan riwayat Covid-19. Dengan demikian dari hasil penelitian tentang pemberian dosis ketiga vaksin ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang jauh lebih baik terhadap infeksi Covid-19 karena keamanan dan efek sampingnya yang minimal.

Penutup

Dalam masa pandemi Covid-19, peran perempuan sangat penting terutama di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perempuan merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan Covid-19. Perannya sebagai ibu adalah memonitor setiap aktivitas, memastikan kondisi kesehatan, mengatur asupan gizi dan suplementasi seluruh anggota keluarga agar aman dari terkena virus, juga mengingatkan penerapan protokol kesehatan sehingga anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat menerapkan protokol kesehatan. Para ibu turut berperan menjadi guru

dan pendamping anak dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Selain itu para ibu juga berperan sebagai manajer keluarga dan dapat berkontribusi dalam mempertahankan ekonomi keluarga saat terutama yang mengalami krisis finansial.

Dengan demikian peran ibu dalam keluarga memastikan seluruh kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi, baik dari segi fisik maupun mental serta membawa perubahan sosial terkait peningkatan pengetahuan dan kedisiplinan di lingkungan sekitar yang akan mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19 yang dimulai dari tingkat keluarga.

Dukungan dari setiap pilar keluarga menjadi kunci kesuksesan peran perempuan dalam memutus rantai penularan Covid-19 dalam keluarga, karena berbagai kegiatan terpusat di rumah selama masa pandemi, juga mematuhi protokol kesehatan sampai kemauan untuk melakukan vaksinasi, sehingga pemberdayaan perempuan sebagai agen keluarga akan sangat efektif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bila perempuan terlindungi dan sehat, maka seluruh anggota keluarga juga akan sehat.

Begitu banyak peran perempuan dalam berbagai bidang terutama kesehatan, yaitu ikut berperan serta dalam penanggulangan Covid-19 di garda terdepan, sebagai dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang telah menyumbangkan jasa pelayanan kepada masyarakat dan mengabdikan serta berkorban untuk menyelamatkan nyawa pasien. Hal ini ditandai dengan jumlah dokter laki-laki dan perempuan yang menangani pandemi sama banyaknya.

Peran perempuan lainnya adalah dalam bidang pendidikan terutama dosen dan guru melalui berbagai macam kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Peran perempuan dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk dapat lepas dari pandemi Covid-19 dan pada akhirnya terus berkontribusi untuk pembangunan sejak dari keluarga, masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- WHO. WHO coronavirus disease (Covid-19) 2020. <https://covid19.who.int/>.
- Velavan, T. P., & Meyer, C. G. (2020). The Covid-19 epidemic. *Tropical Medicine International Health*.2020.; 25(3): 278–280.
- WHO. Covid-19 Vaccine Development. 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update45-vaccines-developement.pdf?sfvrsn=13098bfc_5
- WHO. The different types of Covid-19 Vaccines. 2021. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-race-for-a-Covid-19-vaccine-explained>.(accessed March 18, 2022).
- Gavi. There are four types of Covid-19 vaccines: here's how they work.2020. <https://www.gavi.org/vaccineswork/there-are-four-types-Covid-19-vaccines-heres-how-they-work>
- Baraniuk, C. What do we know about China's Covid-19 vaccines? *British Medical Journal*. 2021; 373: n912. <https://doi.org/10.1136/bmj.n912>.
- Prüß, BM. Current State of the First COVID-19 Vaccines. *Vaccines*. 2021; 9 (30):1-12. <https://doi.org/10.3390/vaccines9010030>.
- Krause, P.R., Fleming, T.R., Longini, I.M., Peto, R.F., Briand, S., Heymann, D.L., Beral, V., Snape, M.D., Rees, H., Roper, AM., Balicer, R.D., Cramer, J.P., et al. SARS-CoV-2 Variants and Vaccines. *New England Journal of Medicine*. 2021; 385: 179-186. <https://doi.org/10.1056/NEJMSr2105280>.
- Jara, A., Undurraga, E.A., González, C., Paredes, F., Fontecilla, T., Jara, G., Pizarro, A., Acevedo, J., Leo, K., Leon, F., Sans, C., Leighton, P., Suárez, P., García-Escorza, Araos, R. Effectiveness of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Chile. *New England Journal of Medicine* 2021; 385 (10): 875-884.<https://doi.org/10.1056/NEJMoa2107715>.

- Tanrioover, M.D., Doğanay, H.L., Akova, M., et al. Efficacy and safety of an inactivated whole-virion SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac): interim results of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial in Turkey. *Lancet*. 2021; 398: 213–22. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01429-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01429-X).
- El-Shitany, N. A., Harakeh, S., Badr-Eldin, S. M., Bagher, A. M., Eid, B., Almukadi, H., Alghamdi, B. S., Alahmadi, A. A., Hassan, N. A., Sindi, N., Alghamdi, S. A., Almohaimeed, H. M., Mohammedsaleh, Z. M., Al-Shaikh, T. M., Almuhayawi, M. S., Ali, S. S., El-Hamamsy, M. Minor to Moderate Side Effects of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Among Saudi Residents: A Retrospective Cross-Sectional Study. *International Journal of General Medicine*. 2021; 14: 1389–1401. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S310497>.
- Ernikawati, D. The Trend of Publik Response to Sinovac Vaccine Based on Lexicon Based Sentiment Analysis. *Jurnal IPTEK-KOM*. 2021; 23(1): 21 -31.
- Ophinni, Y., Hasibuan, A.S., Widhani, A., Maria, S., Koesnoe, S., Yuniastuti, E., Karjadi, HT., Rengganis. I., Djauzi, S. COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia. *Acta Medica Indonesiana - Indones J Intern Med*. 2020; 52 (4): 388-412.
- Soeriaatmadja, W. Indonesia grants emergency use approval to Sinovac's vaccine, local trials show 65% efficacy. *Straits Times*. 12 January 2021. www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesiagrants-emergency-approval-for-sinovac-vaccine.
- Sharique, A., Shivani, S., Saeeda, W., Silky, R. Adverse Event following Immunization (AEFI) and Covid-19 Vaccination: A Review. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*. 2021; 10: 555-565. <https://doi.org/10.20546/ijemas.2021.1006.061>.
- Sallam, M. Covid-19 Vaccine Hesitancy Worldwide: A Concise Systematic Review of Vaccine Acceptance Rates. *Vaccines (Basel)*. 2021;9(2): 160. doi: 10.3390/vaccines9020160.

- Bralianti PD, Akbar FN. Covid-19 Vaccines and its Adverse Events Following Immunization (AEFI). *The Avicenna Medical Journal*. 2021; 2 (1): 19-27.
- Hendarto H, Akbar FN, Risahmawati, Fitriyah NN. The Adverse Events Following Immunization (AEFI) of Sinovac Vaccine among Lecturer and Teaching Staff at Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta Indonesia. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*. 2022; 13(4): 1615-1619.
- Akbar FN, Risahmawati, Fitriyah NN, Hendarto H. Adverse Events Following Immunization (AEFI) with CoronaVac COVID-19 Vaccine among Clinical Clerkship Students at the Faculty of Medicine, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia. *Bangladesh Journal of Medical Science*. 2023, 22(3): 545–552.
- Adhiyanto C, Suwarsono EA, Hendarmin LA, Harriyati Z, Sari FR, Ekayanti F, Wulandari E, Kunarisasi S, Farisi MA, Nareshwari DR, Suryani, Rochmawati DF, Latifah A, Freisleben HJ. Detection of the SARS-CoV-2 Omicron Variant in COVID-19 Patients from South Tangerang Using SNP-Probes S371L and K417N. *Journal Pure and Applied Microbiology*. 2022;16(4): 2712-2723.
- Fauzi E, Tjakradidjaja FA, Self-Adjustment of Pre-Clinical Medical Students During Offline Hybrid Learning. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*. 2022; 18 (Supp.16); 1-5.
- Tyastuti D, Risahmawati, Fadillah M, Ekayanti F, Habibi AA. Community Medicine Clerkship amidst Covid-19 Pandemic; Redesigning, Implementation and Evaluation. *International Journal of Practice-based Learning and Sosial Care*. 2023; 11(1):47-61.
- Baden LR, El Sahly, HM, Essink B, et al; COVE Study Group. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine. *New England Journal of Medicine*. 2021;384(5):403-416.
- Turner PJ, Ansotegui IJ, Campbell DE, Cardona V, Ebisawa M, El-Gamal Y, Fineman S, Geller M, Gonzalez-Estrada A,

- Greenberger PA, et al. COVID-19 vaccine-associated anaphylaxis: A statement of the World Allergy Organization Anaphylaxis Committee. *World Allergy Organization Journal*. 2021;14(2):100517.
- Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2021
- Lisa Maragakis, M.D., M.P.H., Gabor David Kelen, M.D. Booster Shots and Third Doses for COVID-19 Vaccines: What You Need to Know. <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/booster-shots-and-third-doses-for-covid19-vaccines-what-you-need-to-know> (
- Schaffer DeRoo S, Pudalov NJ, Fu LY. Planning for a COVID-19 vaccination program. *JAMA*. 2020;323(24):2458-9.
- Chou WS, Budenz A. Considering emotion in COVID-19 vaccine communication: addressing vaccine hesitancy and fostering vaccine confidence. *Health Communication*. 2020;35(14):1718-2.
- Dror AA, Eisenbach N, Taiber S, Morozov NG, Mizrahi M, Zigran A, Srouji S, Sela E. Vaccine hesitancy: the next challenge in the fight against COVID-19. *European Journal of Epidemiology*. 2020;35(8):775-9.
- Jackson LA, Anderson EJ, Roupheal NG, Roberts PC, Makhene M, Coler RN, McCullough MP, Chappell JD, Denison MR, Stevens LJ, et al. An mRNA vaccine against SARS-CoV-2 - preliminary report. *New England Journal of Medicine*. 2020; 383 (20):1920-31.
- Xu S, Yang K, Li R, Zhang L. mRNA vaccine era-mechanisms, drug platform and clinical prospection. *International Journal Molecular Sciences*. 2020;21(18):6582.
- Miloslav Klugar et al. Side Effects of mRNA-Based and Viral Vector-Based Covid-19 Vaccines among German Healthcare Workers. *Biology* 2021, 10, 752.



PEREMPUAN DAN GERAKAN CINTA LINGKUNGAN: UPAYA MENJAGA LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN KULTURAL DI KEPULAUAN SERIBU

Dr. Ida Rosyidah, M.A.

Latar belakang

Penelitian terdahulu tentang lingkungan hidup di wilayah maritim, termasuk di Kepulauan Seribu, pada umumnya fokus pada kerentanan pulau,⁵⁶ hancurnya biota laut seperti terumbu karang yang mengalami kerentanan dari yang rendah (16,7%) sampai tinggi (64%),⁵⁷ model penanganan terumbu karang,⁵⁸ dan faktor-faktor penyebab insiden dan kecelakaan di wilayah maritim,⁵⁹ dan analisis daya dukung

⁵⁶ Mujiyani, et. all., *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 2002.

⁵⁷ Yonvitner, et.all., Vulnerability Status of the Coral Ecosystem in Kepulauan Seribu, *Marine National Park, Indonesia, Coastal Management*, Vol. 50(3), (2022): 251-261,

⁵⁸ Samadi, Model Penanganan Kerusakan Terumbu Karang, *SPATIAL: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, (2015): 33-40.

⁵⁹ N.G. Willoughby, Man-Made Litter On The Shores Of The Thousand Island Archipelago, Java, *Marine Pollution Bulletin*, Vol. 17, Issue 5, (1986): 224-228.

lingkungan untuk kawasan ekowisata Pulau Pramuka. Selaitu, riset jenis-jenis sampah di daerah mangrove dan tantangannya,⁶⁰ serta perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada degradasi atau kehancuran lingkungan juga sudah pernah dilakukan.⁶¹ Sementara itu, penelitian tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh komunitas dalam memelihara dan menyelamatkan lingkungan kurang mendapatkan perhatian. Tulisan ini fokus pada upaya yang dilakukan aktivis perempuan di tingkat *grassroots*, khususnya di Pulau Pramuka, yang menjadi ibu kota Administratif Kepulauan Seribu, untuk menyelamatkan lingkungan dari bencana yang akan dihadapi generasi yang akan datang.

Kepulauan Seribu terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil, yang jumlahnya mencapai 101 pulau. Secara teritorial, Kepulauan Seribu merupakan bagian dari DKI Jakarta, tetapi faktanya kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pilihan pembangunan mereka fokus pada *land development*. Hal ini diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Seribu hanya 72, jauh lebih rendah dibanding Kota-Kota lainnya di Jakarta, yang berkisar antara 80-85. Selain itu, rata-rata pengeluaran perkapita penduduknya masih sangat rendah (Rp 12.999), jauh di bawah rata-rata perkapita DKI (Rp 18.927). Jumlah penduduk miskin 14.11% dibandingkan rata-rata DKI, 4.69%.⁶²

⁶⁰ Dini Feti Anggraini dan Djati Mardiatno, Analisis Daya Dukung Lingkungan Untuk Kawasan Ekowisata Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Tesis S2 Geografi*, Universitas Gajah Mada, 2013.

⁶¹ A.R. Farhan dan S. Lim, Vulnerability assessment of ecological conditions in Seribu Islands, Indonesia, *Ocean & Coastal Management*, Vol 65 (2012): 1-14

⁶² Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, 2022.

Salah satu problem utama yang dihadapi oleh pulau-pulau kecil, sebagaimana yang dialami Pulau Pramuka, adalah keterbatasan sumberdaya air. Beberapa faktor penyebabnya antara lain tangkapan curah hujan yang terbatas akibat dari sempitnya lahan dan rendahnya jumlah simpanan dalam bentuk lensa air tanah. Selain itu, pulau-pulau kecil memiliki potensi kerusakan sumberdaya air tanah akibat intrusi air laut dan dampak dari perubahan iklim. Intrusi yaitu proses penyusupan air asin dari air laut ke dalam air tanah di daratan sehingga air yang semula tawar menjadi payau. Kondisi ini ditemukan juga di Pulau Pramuka.⁶³

Kebutuhan air tawar yang bersih dan sehat semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan kaum migran yang menetap di Pulau Pramuka. Sejak tahun 2000an, Pulau Pramuka menjadi magnet bagi kaum migran dan wisatawan. Tahun 2019, jumlah wisatawan dalam dan luar negeri mencapai 650.000 orang.⁶⁴ Tidak ada data yang pasti terkait jumlah wisatawan yang datang ke Pramuka, namun pada masa Covid pemerintah membatasi jumlah wisatawan ke Pulau Pramuka, karena pada masa liburan wisatawan yang datang bisa mencapai 630 orang perhari.⁶⁵ Sayangnya, meningkatnya jumlah wisatawan dan pendatang ke

⁶³ Ahmad Cahyadi, et.all., *Menyelamatkan Masa Depan Pulau-Pulau Kecil Indonesia: Sebuah Pembelajaran dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu*, Makalah dalam Sarasehan Nasional Tanggal 31 Agustus 2013, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.

⁶⁴Kunjungi Pulau Pramuka Sandiaga Uno Berharap Pariwisata Kepulauan Seribu, <https://money.kompas.com/read/2021/08/13/172152026/kunjungi-pulau-pramuka-sandiaga-uno-berharap-pariwisata-kepulauan-seribu>, diakses 20 Agustus 2023.

⁶⁵Wisata Jakarta Kunjungan Wisatawan Ke Pulau Pramuka Naik 100 Persen Selama Libur-Lebaran, <https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/30/wisata-jakarta-kunjungan-wisatawan-ke-pulau-pramuka-naik-100-persen-selama-libur-lebaran> diakses 21 Agustus 2023

Pulau Pramuka tidak diimbangi dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai.

Problem lainnya yang dihadapi masyarakat Pulau Pramuka yaitu meningkatnya tumpukan sampah akibat minimnya tempat pembuangan sampah (TPS) dan perilaku masyarakat dan wisatawan yang tidak sadar lingkungan. Mahariah, ketua Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) Samo-Samo menyebutkan volume sampah sangat tinggi di Pulau Pramuka, kira-kira 3 ton perminggu sehingga “bila dibiarkan dalam 25 tahun ke depan pulau ini akan tertimbun oleh sampah”, ujarnya.⁶⁶ Sampah plastik yang dibuang ke laut ini berdampak negatif bagi kesehatan Masyarakat dan sumber daya laut seperti meningkatnya jumlah penyu dan elang bonding yang mati karena memakan sampah, tercemarnya sampah ke dalam ikan yang kita konsumsi.

Kondisi Pulau Pramuka yang rawan terhadap bencana banjir, sampah, dan keterbatasan air bersih menginspirasi sebagian perempuan penggiat lingkungan yang tergabung dalam SPKP.

Samo-Samo untuk melakukan beragam aktivitas dengan tujuan menyelamatkan lingkungan sehingga generasi mendatang dapat terhindar dari bencana lingkungan hidup. Kegiatan mereka sudah dimulai sejak pendirian SPKP di tahun 2008 hingga sekarang ini mereka sudah mampu melakukan beragam program penguatan kesadaran lingkungan bekerja sama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun NGO di tingkat lokal, nasional dan internasional. Kegiatan tersebut antara lain yaitu Bank Sampah, Rumah Bibit dan Kebun Sayuran (Hidroponik), Layanan Edukasi Sampah, Sedekah untuk Bumi (Penanaman Mangrove, Terumbu Karang, Pohon Pantai Endemik, dan Lubang Resapan Biopori), Rumah

⁶⁶ Wawancara dengan Maharia, 15 Februari 2016

Produksi Pasca Panen dan Lab Plastik (Pirolisis dan Daur Ulang). Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan pertanyaan dari penelitian ini yaitu bagaimana peran perempuan dalam gerakan SPKP Samo-Samo dapat mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat sehingga mereka memiliki kesadaran lingkungan?

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif karena mencoba menelusuri secara lebih dalam gagasan, pandangan dan praktek-praktek sosial yang dilakukan para perempuan di Pulau Pramuka untuk memelihara lingkungan yang selama ini mengalami degradasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yaitu wawancara mendalam, observasi dan Fokus Group Discussion (FGD) di tahun 2016 dan untuk mengupdate informasi wawancara dilakukan kembali di tahun 2017. Sementara itu, data terbaru untuk tahun 2022-2023 diperoleh melalui bahan-bahan yang tersedia di media sosial. Informan yang diwawancarai meliputi pengurus dan anggota SPKP Samo-Samo, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, serta masyarakat lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan melalui proses reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.⁶⁷

Lingkungan Hidup dan Pariwisata di Kepulauan Seribu dalam Riset Terdahulu

Penelitian tentang lingkungan hidup di Kepulauan Seribu sudah banyak dilakukan, antara lain mengkaji tentang

⁶⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

peran pemerintah khususnya Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemusnahan sampah organik melalui insinerator L-Box, Kompos tanaman dan perkebunan urban, pengolahan *ecobrick*, penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan *E-waste*, pengangkutan sampah residu, bank sampah, konversi maggot, dan komposting.⁶⁸ Program pemerintah tersebut telah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan, namun belum dibarengi dengan partisipasi mereka yang tinggi dalam melakukan konservasi ekosistem sebagaimana riset yang dilakukan di masyarakat di Pulau Pari.⁶⁹ Sebaliknya, riset lainnya menemukan kondisi lingkungan hidup Kepulauan Seribu makin rentan karena hancurnya terumbu karang sehingga jenis ikan karang lebih banyak pada kedalaman 10 meter dibandingkan dengan 3 meter.⁷⁰ Dan ini berdampak pada kesulitan nelayan dalam mencari ikan. Selain itu, indeks kerentanan pulau-pulau di Kepulauan Seribu juga menunjukkan status yang mengkhawatirkan, dari status kerentanan sedang hingga tinggi. Kerentanan Pulau Pramuka mencapai 15 dan untuk Pulau Belanda indeks kerentanannya adalah 6.39. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena dapat menyebabkan bencana lingkungan hidup di masa depan.⁷¹

⁶⁸ Handy Chandra et.all., *Realita dan Rekomendasi Pengelolaan Sampah di Kepulauan*, Bogor: IPB Press, 2020.

⁶⁹ Samadi Samadi, Hubungan antara Pengetahuan tentang Lingkungan Hidup dengan Partisipasi Masyarakat terhadap Konservasi Ekosistem Pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, *Jurnal Parameter*, Vol 31 No 2, 2019.

⁷⁰Linda Noviana, Hadi Susilo Arifin, Luky Adrianto, dan Kholild, Studi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Nasional Kepulauan Seribu, *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2), (2018): 352-65, 2018.

⁷¹ Noveldesra Suhery, Ario Damar dan Hefni Effendi, Indeks Kerentanan Ekosistem Terumbu Karang Terhadap Tumpahan Minyak: Kasus Pulau Pramuka Dan Pulau Belanda Di Kepulauan Seribu, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 9, No. 1, (2017), 67-90.

Sementara itu, kajian tentang pariwisata di Kepulauan Seribu sangat beragam di antaranya mengkaji kualitas destinasi pariwisata di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan yang meliputi daya tarik, fasilitas, dan aksesibilitas pariwisata. Temuan ini menunjukkan responden memberikan nilai 3,25 (baik) dari nilai tertinggi 4.⁷² Namun, banyak kajian yang fokus pada menggali dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata seperti meningkatnya volume sampah, perubahan kualitas air dan rusaknya terumbu karang.⁷³ Selain itu, beragam riset juga menemukan dampak positif dari pariwisata di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Tidung yaitu meningkatnya lapangan pekerjaan, menguatnya gotong royong, meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap kehancuran terumbu karang, serta peningkatan kebersihan lingkungan dan ketersediaan air bersih yang lebih baik.⁷⁴ Namun riset terkait peran perempuan dalam upaya memelihara lingkungan untuk meminimalisir bencana belum banyak dilakukan karena itu artikel ini berupaya meminimalisir gap tersebut.

Gerakan Sosial: Gagasan Hensmans dan Bommel

Ada banyak definisi tentang gerakan sosial yang ditulis beragam sosiolog. Misalnya, Giddens memaknai gerakan sosial sebagai upaya untuk mengejar kepentingan atau tujuan bersama melalui gerakan kolektif (*collective action*) di luar

⁷² Miswan, Miswan Analisis Destinasi Pariwisata Pulau Kelapa Dan Pulau Harapan Di Kepulauan Seribu Jakarta, Jurnal Industri Pariwisata, 2(1) (2019):10-20.

⁷³ Khrisnamurti Khrisnamurti, Heryanti Utami, Rahmat Darmawan, Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, *Kajian: Menjembatani Teori dan Persolan Masyarakat*, 21, no 3 (2016).

⁷⁴ Khrisnamurti Khrisnamurti, et.all. Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Di Pulau Tidung, 2016

lembaga-lembaga yang mapan.⁷⁵ Sementara itu, Mario Diani mendefinisikan gerakan sosial sebagai jaringan interaksi informal antara sejumlah individu, kelompok dan/atau organisasi, yang terlibat dalam konflik politik atau budaya, berdasarkan identitas kolektif.⁷⁶ Gerakan sosial yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu aktivitas kolektif yang muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pariwisata yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga mereka berupaya melakukan sejumlah kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran cinta lingkungan yang akan berdampak pada perubahan sosial di masa depan.

Tidak semua aktivitas kolektif dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Ada beberapa kriteria agar tindakan kolektif dapat diklasifikasikan sebagai gerakan sosial yaitu (a) Adanya aktivitas kolektif. (b) Memiliki tujuan bersama, khususnya pada upaya perubahan dalam aspek sosial tertentu. (c) Kolektivitasnya relatif menyebar namun dengan tingkat derajat yang lebih rendah dibandingkan organisasi formal. (d) Tindakan mereka cenderung bersifat spontan, kurang terlembaga dan dalam bentuk yang tidak konvensional.⁷⁷ SKKP Samo-Samo dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial karena memenuhi kriteria tersebut.

Manuel Hensmans dan Koen van Bommel menjelaskan bagaimana gerakan sosial bekerja untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu mobilisasi sumber daya, memanfaatkan peluang politik, membingkai permasalahan dengan cara-cara yang menguntungkan dan dengan terlibat dalam perjuangan

⁷⁵ Anthony Giddens, *Sociology*, Oxford: Polity press, 1993.

⁷⁶ Mario Diani, The Concept of Social Movement, *The Sociological Review*, 40, Issue 1 (1992):1-25

⁷⁷ Prior Sztompka, *The Sociology of Social Change*, Oxford: Blackwell Publisher, 1994.

hegemonik diskursif.⁷⁸ Terkait sumber daya, Naila Kabeer mengidentifikasi ada 3 macam sumber daya yaitu (a) sumber daya ekonomi seperti tanah, uang, modal, dan barang berharga lainnya; (b) sumber daya manusia seperti pengetahuan, keterampilan, imajinasi, kreativitas, dan prakarsa; dan (c) sumber daya sosial adalah kemampuan mengajukan keberatan, kewajiban, dan hubungan.⁷⁹

SPKP Samo-Samo Berjuang untuk Pelestarian Lingkungan

1. Mobilisasi Sumberdaya: Upaya Meningkatkan Kesadaran Lingkungan

Setiap gerakan sosial membutuhkan sumber daya. Bila dilihat dari sisi sumber daya material pengurus SPKP Samo-Samo tidak segan-segan mengorbankan harta yang dimilikinya untuk tercapainya misi gerakan yaitu tumbuhnya kesadaran lingkungan di masyarakat Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Mahariah rela memberikan tanah dan rumah petak yang semula diperuntukkan sebagai warung makan untuk menambah income keluarganya diubahnya menjadi toko untuk penjualan barang-barang kerajinan tangan hasil *recycle* sampah. Selain itu, Mahariah juga menyisihkan sebagian gajinya sebagai guru di Madarasah Ibtidaiyah 17 untuk beragam aktivitas gerakan. Mahariah juga membiarkan rumahnya menjadi tempat tumpukan sampah plastik ketika SPKP memulai program tabungan sampah. Saat itu, SPKP belum memiliki tempat

⁷⁸ Manuel Hensmans dan Koen van Bomm, "Social Movements," *iCite Working Papers* - International Centre for Innovation, Technology and Education Studies Université Libre de Bruxelles, 2017-2024.

⁷⁹ Naila Kabeer, Naila, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, *Development and Change*, 30, (1999): 435- 464

sebagai pusat aktivitas SPKP Samo-Samo. Mahariah mengaku tidak masalah meskipun rumahnya nampak kumuh karena tumpukan sampah.

SPKP Samo-Samo juga memobilisasi sumber daya manusia yang bersifat non-material, seperti pengetahuan, kerjasama, kemampuan, persahabatan, komitmen moral, kemandirian, wewenang, dan kepercayaan, tenaga kerja, dan media. Sejak tahun 2008, pengurus SPKP Samo-Samo sudah mulai mengembangkan pengetahuan tentang cinta lingkungan dan pelestarian lingkungan di masyarakat melalui beragam program seperti pengolahan limbah plastik menjadi barang kerajinan, pemeliharaan terumbu karang, penanaman mangrove untuk meminimalisir abrasi, penanaman pohon kelapa, dan lain-lain. Satu hal yang menarik yaitu sebagian pengurusnya melakukan peningkatan pengetahuan lingkungan secara autodidak. Mereka belajar melalui internet untuk memperluas pengetahuan tentang lingkungan.

Pada tahun-tahun awal mereka melakukan mobilisasi sumber daya, banyak hambatan yang dialami pengurus gerakan Samo-Samo, antara lain yaitu (a) aktifitas mereka dipandang sebelah mata karena kegiatan mereka dianggap *wasting time* dan tidak berdampak ekonomis. (b) Adanya anggapan bahwa gerakan lingkungan hanya akan memperkaya pengurus inti karena "manipulasi" dan "korupsi" yang dilakukan pengurusnya terhadap bantuan finansial dari beragam pihak. Mahariah sebagai pendiri SPKP Samo-Samo pernah difitnah menggelapkan uang untuk penanaman 200.000 pohon mangrove senilai 100.000.000 (seratus juta rupiah). Padahal, dana itu tidak terbayarkan karena pemesannya raib, namun Mahariah berhasil mengganti uang tersebut dari uang tabungannya sendiri.

(c) Gerakan ini pada awalnya kurang didukung karena calon pemimpin yang sudah disiapkan (*by design*) gagal meraih suara. Pemimpin terpilih, Mahariah, di luar ekspektasi pejabat kelurahan. Selain itu, ada stereotype bahwa perempuan dianggap tidak cakap memimpin. Alhasil dukungan dari struktural sangat rendah. (d) Minimnya dukungan dari Negara tidak membuat aktivis SPKP Samo-Samo patah arang. Mereka terus mengembangkan kapasitas diri belajar secara autodidak dari berbagai pihak termasuk dari medsos terkait pengembangan lingkungan hidup. Perlahan mereka berhasil membangun kerjasama dengan beragam pihak baik di tingkat lokal, Nasional maupun Internasional seperti dengan TNKpS Taman Nasional Kepulauan Seribu, Dompok Dhuafa, Kelompok Wanita Tani dan *Jakarta Animal Aids Network* (JAAN), dan lain-lain.

Beragam kerjasama tersebut menjadi wadah bagi upaya meningkatkan sumber daya pengurus dan anggota. Salah satunya adalah kerjasama SPKP Samo-Samo dengan JAAN, sebuah NGO Internasional yang bergerak dalam pemeliharaan lingkungan hidup terutama Elang Bondol yang makin punah. Kerjasama dengan JAAN menyangkut banyak hal seperti peningkatan kapasitas perempuan dalam pengolahan sampah menjadi barang kerajinan, peningkatan pemahaman siswa Sekolah Dasar dan Menengah tentang cinta lingkungan, pembuatan video tentang pencemaran lingkungan dan peningkatan pengetahuan terkait pola hidup bersih dan sehat. Tahun 2009, SPKP Samo-Samo membangun pondokan sederhana sebagai *base camp* pusat aktivitas SPKP Samo-Samo. Pondokan tersebut dibangun di tanah milik pengusaha Jakarta dan diberi nama Hutan Eduwisata. Belakangan, sejak tahun 2014, ada dua program utama di Hutan Eduwisata yaitu Rumah Daur Ulang (RDU) dan Rumah Hijau (RH). RDU berorientasi pada pengolahan sampah menjadi barang kerajinan

tangan, tabungan sampah, dan lain-lain, sementara Rumah Hijau fokus pada kegiatan penghijauan, seperti hidroponik, penanaman mangrove, dan lain-lain.

Khusus untuk program peningkatan kapasitas perempuan dalam pengolahan sampah menjadi barang kerajinan, JAAN membantu mendatangkan ekspert untuk melatih dan melakukan transfer pengetahuan sehingga anggota SPKP Samo-Samo trampil dalam mengolah beragam plastik bekas menjadi barang kerajinan yang bermutu dan bernilai ekonomis. Kerajinan dari plastik bekas itu antara lain berupa sajadah, sandal, baju, tas, tempat pinsil dan lain-lain. Selain itu, JAAN juga membantu memasarkan hasil produksi *recycle* sampah tersebut ke Belanda dan Negara-Negara Eropa lainnya. Skil pengolahan *recycle* sampah ini berdampak positif bagi kemandirian ekonomi perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga di Kelurahan Panggang. Sebagian anggota SPKP Samo-Samo yang aktif dalam *recycle* sampah plastik mengaku mendapat tambahan income, sehingga dapat meringankan ekonomi keluarga. Dalam sebuah FGD ditemukan, salah seorang informan mengaku pendapatannya perbulan mencapai Rp 1.500.000 perbulan.⁸⁰

Selain itu, kegiatan hidroponik juga sudah mendatangkan finansial bagi aktivis SPKP Samo-Samo karena dari hasil kebun yang mereka kelola, mereka sudah mendapatkan tambahan pendapatan. Mereka menjual beragam tanaman sayuran kepada pengelola restoran terapung dengan harga yang relatif tinggi. Uang hasil penjualannya digunakan untuk kemajuan lembaga.

⁸⁰ FGD dengan anggota dan aktivis SPKP Samo-Samo di Pulau Pramuka, 17 Februari 2016

2. *Gerakan Lingkungan: Merespon Dampak Kebijakan Pariwisata yang Terabaikan*

Pariwisata di Kepulauan Seribu sudah mulai sebelum tahun 2000an, khususnya di Pulau Untung Jawa, yang diinisiasi oleh penduduk setempat. Pemerintah Daerah baru memulai program pariwisata setelah adanya kebijakan perubahan status Kepulauan Seribu dari Kecamatan menjadi Kabupaten Administratif sesuai dengan Undang Undang No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia. Setelah perubahan status tersebut, Pemda mulai menggerakkan pariwisata di tahun 2002.⁸¹ Namun, pariwisata di Pulau Pramuka sebagai lokasi *base camp* SPKP baru dimulai tahun 2004.

Kebijakan pemerintah dalam pariwisata berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang makin pesat dan berdampak positif bagi masyarakat seperti bertambahnya peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, meningkatnya jumlah perempuan yang bisa menikmati sekolah tinggi, dan meluasnya jaringan. Namun pada sisi lain, ditemukan peningkatan jumlah wisatawan juga membawa dampak buruk antara lain melemahnya nilai-nilai moralitas remaja, keterbatasan air bersih, hancurnya karang yang terinjak oleh wisatawan, timbunan sampah, dan lain-lain. Pemerintah hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan dan kurang fokus pada penanganan dampak negatif tersebut.⁸²

Kebijakan pariwisata juga tidak dibarengi dengan penyiapan sarana dan prasarana untuk tempat pembuangan sampah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah

⁸¹ Wawancara Neneng dengan pejabat Dinas Pariwisata, di Kantor Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu, 18 Februari 2016

⁸² FGD dengan pengurus dan anggota SPKP Samo-Samo, 17 Februari 2016

juga belum berhasil dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk memelihara lingkungan dengan meminimalisir penggunaan sampah plastik. Alhasil, sampah umumnya dibuang oleh penduduk dan pemilik penginapan ke laut. Padahal sampah yang dibuang ke laut menyebabkan banyak fauna yang mati termasuk elang bondol dan binatang laut karena mengkonsumsi sampah di lautan.⁸³ Realitas ini mendorong aktivis SPKP Samo-Samo untuk melakukan beragam kegiatan pemeliharaan dan penyelamatan lingkungan.

Pada awal terbentuknya SPKP Samo-Samo di tahun 2008, isu pelestarian lingkungan hidup belum banyak diminati oleh birokrat di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Padahal saat itu, problem lingkungan hidup sudah meningkat karena ulah manusia. Salah satu problem lingkungan yang cukup serius adalah hancurnya karang karena ulah wisatawan yang menginjak-injak karang saat *diving* dan nelayan yang menggunakan *potassium* saat penangkapan ikan. Dampak dari kehancuran karang adalah menurunnya kuantitas ikan di wilayah Kepulauan Seribu sehingga menyebabkan peningkatan jumlah keluarga miskin. khususnya di kalangan nelayan.

Selain itu, rendahnya *political will* pejabat baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kabupaten untuk mendukung dan membina SPKP Samo-Samo dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup. Padahal, sejak pendiriannya oleh Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), sebuah institusi di bidang kelautan milik Negara, SPKP Samo-Samo telah diserahkan pembinaannya pada pejabat kelurahan agar lebih sistimatis. Faktanya, pejabat kelurahan mengabaikan kehadiran SPKP Samo-Samo sehingga para aktivis gerakan lingkungan ini melakukan beragam aktivitas secara independen.

⁸³ Wawancara dengan Mahariah di Pulau Pramuka, 15 Februari 2016

Pengabaian terhadap lingkungan pada awal pendirian dan perkembangan SPKP Samo-Samo bisa jadi disebabkan adanya stereotip bahwa problem lingkungan adalah masalah perempuan sehingga masih banyak pejabat di level atas dan bawah kurang tergerak untuk mengimplementasikan program-program pelestarian lingkungan. Lebih dari itu, aktivitas SPKP Samo-Samo kurang diapresiasi oleh pejabat di Pemda Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu karena program-program yang dilakukan dianggap cenderung bernuansa perempuan. Padahal sejak awal kehadirannya, SPKP Samo-Samo sudah melakukan beragam aktivitas yang selama ini kurang tersentuh oleh pihak Kelurahan maupun Kabupaten seperti program penanaman terumbu karang dan mangrove yang mulai dilakukan oleh SPKP Samo-Samo sejak awal pendiriannya. Kuatnya dikotomi stereotipe kerja laki-laki dan perempuan itu juga dapat diamati dari respon anggota terhadap kegiatan mereka seperti recycle sampah menjadi barang soevenir umumnya dilakukan perempuan, penanaman terumbu karang lebih diminati laki-laki. Namun, pengurus mencoba melibatkan laki-laki dan perempuan dalam semua kegiatan, namun stereotype dikotomi pekerjaan maskulin dan feminin masih sangat kuat sehingga anggota laki-laki lebih cenderung terlibat dalam kerja-kerja maskulin seperti penanaman mangrup dibandingkan dalam ketrampilan membuat recycle sampah menjadi suvenir.

3. *Framing Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Formal dan Non-Formal*

Framing atau pemingkaian merupakan salah satu perspektif yang digunakan dalam gerakan sosial. Perspektif ini berakar dari prinsip konstruksionisme dan interaksionisme simbolik, yang menjelaskan bahwa “makna” tidak melekat

pada objek, peristiwa, atau pengalaman tetapi terjadi melalui proses “interpretasi” dalam interaksi sosial. Makna itu sendiri dikonstruksi, dinegosiasikan, diartikulasikan, direartikulasikan dan diperebutkan dalam masyarakat.⁸⁴

Strategi framing yang pertama kali dilakukan oleh SPKP Samo-Samo untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan adalah melalui program *one day one botol* di tahun 2009. Sasaran program ini adalah pada anak-anak pengajian yang duduk di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah. Semula, pemimpin SPKP Samo-Samo merekrut kalangan perempuan ibu rumah tangga, namun gagal karena itu mereka merubah sasarannya pada anak-anak. Kegagalan tersebut disebabkan rendahnya respon ibu rumah tangga terhadap kegiatan Samo-Samo yang tidak berdampak secara ekonomi. Alhasil, Mahariah, sebagai guru ngaji, mengharuskan anak-anak yang mengaji di rumahnya untuk membawa satu botol plastik bekas yang sudah terlebih dibersihkan setiap hari ke tempat pengajian. Sebagai reward, anak-anak tersebut diberikan beragam hasil kerajinan tangan baik berupa tas, tempat pinsil dan lain-lain yang terbuat dari plastik. Mereka diminta untuk membawanya setiap kali mengaji.

*Mereka membawa tas plastik yang saya buat itu dari rumah ke pengajian. Saya sih berharap orang tua lihat, [dan] masyarakat juga bisa melihat. Jadi, sampah plastik itu bisa berguna juga. Jadi [plastik itu] jangan dibuang sembarangan. Ya anggaplah ini promosi untuk mengajarkan cinta lingkungan.*⁸⁵

⁸⁴ Robert D. Benford, An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective, *Sociological Inquiry*, 67, No. 4, (1997): 409-430

⁸⁵ Wawancara Mahariah, di Pulau Pramuka, 16 Februari 2016

Strategi framing berikutnya yaitu membangun komunitas Laut Bukan Tempat Sampah (LBTS), yang targetnya adalah anak-anak MI atau SD dan sederajat. Programnya meliputi (a) membersihkan pantai dari sampah sebagai bagian dari cinta lingkungan. (b) melakukan kunjungan dan studi tour untuk mengamati proses reservasi binatang-binatang laut langka, seperti elang bondol, penyu, dan. (c) melakukan pariwisata bahari yang tidak merusak alam. (d) membuat film dokumenter tentang sampah dan kemiskinan di kampung nelayan yang ada di Pulau Panggang. Film ini pernah diajukan untuk mengikuti festival film di wilayah daratan Jakarta dan meraih juara.

Pada saat yang bersamaan SPKP Samo-Samo juga mulai merekrut kalangan perempuan untuk terlibat dalam beragam program yang dikenal dengan program Rumah Daur Ulang (RDU), dan program LBTS dan Rumah Hijau (RH). Rumah Daur Ulang menekankan pada peningkatan kapasitas anggota dalam pengolahan sampah menjadi barang kerajinan tangan. Sementara, program Rumah Hijau fokus pada peningkatan kapasitas dalam penanaman sayuran dan buah-buahan secara hidroponik.

Strategi berikutnya yaitu melibatkan anak SD, SMP, dan SMA sederajat dalam aktivitas ekstra kulikuler seperti kelas iklim, kampung iklim, dan peternakan kelinci. Selain itu, anak-anak tersebut juga diperkenalkan dan dilibatkan dalam drama tentang lingkungan. Drama tersebut ditampilkan pada saat peringatan hari-hari besar nasional, seperti pada acara Hari Bumi, peringatan tujuh belas Agustus dan acara-acara penting lainnya.

Strategi framing yang paling kuat yaitu ditampilkan melalui beragam media baik youtube, website, maupun pamflet-pamflet. SPKP Samo-Samo bekerja sama dengan lembaga Variabel Bebas, sebuah organisasi kaum muda yang

bergerak dalam isu lingkungan untuk mengimplementasikan program-program yang telah dicanangkan terutama terkait program-program pemberdayaan terhadap *grassroots*. Mahariah dan pengurus SPKP Samo-Samo lainnya mengaku memperoleh banyak bantuan moril dan tenaga dari lembaga tersebut dalam sosialisasi kesadaran lingkungan di Pulau Pramuka.

4. *Perjuangan Melawan Hegemoni Kultural dan Struktural*

Selain pendekatan kultural sebagaimana di atas, SPKP Samo-Samo juga menerapkan pendekatan struktural. Beragam upaya dilakukan untuk melibatkan kelompok-kelompok elit Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Meskipun di awal pendiriannya, mereka kurang didukung oleh pihak elit kelurahan yang seharusnya membina mereka sesuai dengan tupoksi yang dimandatkan oleh TNKpS, namun mereka tidak putus asa. Kerjasama dengan pihak pemerintah terus dilakukan, terutama dengan Suku Dinas (Sudin) Pariwisata dan Kebudayaan, Sudin Kementerian Pertanian, dan Sudin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan kegiatan dan pelibatan menjadi peserta atau narasumber di kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Pemda. Meskipun demikian, mereka merasa sering kali hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politis pihak-pihak struktural tertentu dan bukan untuk kepentingan pembinaan yang sesungguhnya. “*Jadi begitu bu. Kalau ada acara kita dipanggil diperkenalkan seolah-olah bagian dari program mereka*”.⁸⁶

Para aktivis SPKP Samo-Samo terus berusaha melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah lokal agar mereka mendapatkan dukungan moril dan finansial dalam upaya

⁸⁶ Wawancara dengan Mahariah, di Pulau Pramuka, 16 Februari 2016

melakukan perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan. Namun usaha tersebut mengalami hambatan karena sikap kritis yang dialami pengurus SPKP Samo-Samo justru dimaknai sebagai pihak yang mengganggu kepentingan masyarakat. Hal ini nampak dalam keterlibatan SPKP Samo-Samo pada acara musrenbang dimana saat itu salah seorang pengurus yang hadir dalam ruang demokratis di tingkat kelurahan tersebut mengusulkan agar dana desa yang diberikan oleh Pemda Provinsi DKI digunakan untuk kepentingan investasi sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk kemajuan bersama. Sebaliknya, mayoritas partisipan saat itu menuntut dana itu dibagikan saja kepada warga untuk membeli ala-alat kebersihan di rumah tangga. Saat itu, aktivis SPKP Samo-Samo mencoba mengubah cara berpikir peserta musrenbang dengan mengajukan argumentasi pentingnya dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan. Namun, Mahariah dituduh sebagai “pengacau” karena usulannya tidak ada dalam nomenklatur penggunaan dana hibah desa. Sejak saat itu, aktivis SPKP Samo-Samo tidak pernah lagi diundang dalam musrenbang tersebut.

Para aktivis SPKP Samo-Samo memandang bahwa latar belakang pendidikan yang rendah telah membentuk kultur berpikir pragmatis dan ketergantungan pada kebanyakan masyarakat Kepulauan Seribu. Implikasinya, mereka kurang memiliki cara pandang strategis. Hal ini diindikasikan dengan mayoritas masyarakat yang lebih suka memanfaatkan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan praktis dibandingkan kebutuhan strategis. Kondisi ini diperkuat lagi oleh kebijakan pemerintah yang dalam beberapa tahun belakangan ini lebih mengutamakan pada pemberian bantuan praktis dibandingkan strategis, seperti bantuan sembako murah.

Belakangan terjadi perubahan dalam cara pandang pejabat pemerintah, khususnya pihak kelurahan terhadap

eksistensi SPKP Samo-Samo. Pada tahun 2017, pihak Kelurahan mulai tertarik untuk turut serta mempercepat program Model Desa Konservasi yang sudah diinisiasi dan diimplementasikan oleh SPKP Samo-Samo sejak tahun 2015. Salah satu program utama dari Model Desa Konservasi adalah *green mapping* (peta hijau) yang basisnya dimulai dari rumah tangga, kemudian baru ke tingkat RT dan RW, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.⁸⁷ Setiap rumah tangga percontohan diharapkan memiliki tiga kegiatan yaitu memilah sampah, memiliki lubang biopori dan tanaman hidroponik. Pada tahun 2016, jumlah RT sebagai peroyek percontohan model desa konservasi hanya 3 RT saja, namun setelah adanya keterlibatan pihak kelurahan jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Aktivitas pengurus SPKP Samo-Samo, Mahariah, dalam menggawangi SPKP Samo-Samo untuk menebar kecintaan terhadap lingkungan menghantarkannya memperoleh prestasi sebagai penerima Kalpataru tingkat Nasional Tahun 2017 untuk kategori Pengabdi Lingkungan.

SPKP Samo-Samo: Analisis dan Diskusi

Secara umum, temuan penelitian ini mendukung teori Hensmans dan Bommel tentang gerakan sosial yang fokus pada empat elemen utama yaitu mobilisasi sumber daya, mengambil keuntungan dari peluang politik yang tersedia, membingkai masalah dengan cara yang menguntungkan, dan keterlibatan dalam perjuangan hegemonik.⁸⁸ Terkait mobilisasi sumber daya, SPKP Samo-Samo menggerakkan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk mencapai misi penyelamatan lingkungan dengan program-program yang ada

⁸⁷ Wawancara dengan salah seorang Ketua RT di Pulau Pramuka, 2 Agustus 2017

⁸⁸ Hensmans dan Koen van Bommel, "Social Movements, 2017-2024.

di Rumah Hijau dan Rumah Daur Ulang yang di tahun 2020 berubah namanya menjadi Rumah Literasi Hijau setelah komunitas ini ditetapkan menjadi Yayasan. Dalam konteks ini, SPKP Samo-Samo telah berhasil meningkatkan sumber daya manusia masyarakat di Pulau Panggang dan Pulau Seribu yang disebut Kabeer sebagai upaya ke arah pemberdayaan manusia untuk pengembangan dirinya dalam bidang pengetahuan, keterampilan, imajinasi, kreativitas, dan inisiatif.⁸⁹

Penguatan sumber daya ini tidak hanya pada sumberdaya material tetapi juga non-material. Sumber daya material meliputi yaitu adanya peluang pekerjaan bagi anggota seperti menanam mangrove, menanam hidroponik, dan pembuatan cinderamata yang berdampak pada peningkatan ekonomi. Selain itu, peningkatan sumber daya non-material yaitu pengembangan terkait wewenang, komitmen moral, kepercayaan, persahabatan, kemampuan, dan sebagainya. Pengembangan wewenang misalnya ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan diri perempuan anggota SPKP Samo-Samo sehingga ada di antara mereka yang bersaing dan memperoleh posisi menjadi Ketua RT yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Poin kedua, sebagaimana SPKP Samo-Samo dapat berkembang karena gerakan ini mampu mengambil keuntungan dari peluang politik yang tersedia yaitu belum adanya kebijakan pejabat desa untuk melakukan program-program lingkungan hidup, sementara pemerintah di tingkat kabupaten cenderung fokus pada program pengembangan sarana dan prasarana fisik untuk menarik wisatawan sehingga

⁸⁹ Kabeer, Naila, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, *Development and Change*, 30, (1999): 435-464

program untuk meminimalisir dampak negatif pariwisata kurang mendapatkan perhatian.

Ketiga, Aktivis SPKP Samo-Samo memiliki beragam strategi untuk memframing masalah dengan cara yang menguntungkan baik untuk anggota maupun masyarakat setempat. Konsep framing pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam karyanya yaitu *Frame Analysis* (1974). Goffman mendefinisikan framing sebagai “*Schemata of interpretation that enable individuals to locate, perceive, identify and label, occurrences within their live space and the world at large* (skema interpretasi yang memungkinkan individu untuk menemukan, merasakan, mengidentifikasi, dan memberi label terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam ruang kehidupan mereka dan di dunia pada level yang lebih luas).⁹⁰ Framing dalam gerakan sosial didefinisikan sebagai kerja penandaan atau pembentukan makna yang dilakukan oleh aktivis gerakan sosial untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Dengan demikian, gerakan sosial tidak hanya dilihat sebagai penyebar gagasan atau keyakinan, tetapi juga terlibat aktif dalam memproduksi dan memelihara makna. Framing yang dilakukan secara terus menerus oleh Mahariah dan SPKP Samo-Samo pada akhirnya dapat mengubah cara pandang masyarakat terkait lingkungan hidup. Saat observasi, penulis mendatangi rumah-rumah yang sudah menanam banyak pohon hidroponik pada umumnya berupa sayuran dan tanaman obat. Banyak di antara masyarakat yang ikut serta menanam hidroponik. Ada pola relasi yang berubah karena proses pembibitan dan penanamannya dilakukan bersama suami-istri. Suatu bentuk kerjasama yang baik dan mendekonstruksi stereotip bahwa kerja bercocok tanam hanya milik laki-laki.

⁹⁰ Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Harvard: Harvard University Press, 1974.

Pada konteks ini, SPKP Samo-Samo telah berhasil melakukan framing sehingga bisa mempengaruhi realitas kultural dan struktural di Kepulauan Seribu. Pada sisi struktural, terjadi adanya perubahan cara pandang pejabat Kelurahan yang menawarkan kerjasama untuk pengembangan Model Desa Konservasi, dan pihak-pihak terkait lainnya yang semula tidak tertarik untuk melakukan gerakan lingkungan hidup. Kerjasama ini membuahkan hasil dengan ditetapkannya Pulau Pramuka sebagai Kampung Iklim tingkat Nasional di tahun 2018.

Bila dianalisis dari teori Hensmans dan Bommel, SPKP Samo-Samo juga memiliki perjuangan hegemonik.⁹¹ Pada banyak literatur, terutama dari padangan Antonio Gramsci, hegemoni didefinisikan sebagai dominasi satu kelompok kepada kelompok lain yang ditundukkan baik dengan atau tanpa senjata. Tentu saja kelompok yang mendominasi harus sudah memiliki 'kepemimpinan' sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan.⁹²

Secara sederhana, hegemoni dalam konteks ini dipahami sebagai upaya satu kelompok untuk meraih power atau kekuasaan dalam wacana lingkungan hidup tanpa kekerasan sehingga ide-ide kelompok tersebut dapat diterima secara wajar oleh kelompok lain. SPKP Samo-Samo sejak pendiriannya di tahun 2009 hingga saat ini terus berusaha mempengaruhi cara pandang dan tindakan masyarakat di Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungan melalui kerja-kerja nyata. Pada tahun 2020, Mahariah mengganti komunitas SPKP

⁹¹ Hensmans dan Koen van Bommel, "Social Movements", 2017-2024.

⁹² Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*; New York: International Publishers, New York, 1971.

Samo-Samo dengan Yayasan Literasi Hijau untuk memperluas jaringan dan memantapkan status organisasinya.

Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menemukan SPKP Samo-Samo dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial yang dimotori oleh perempuan-perempuan yang cinta lingkungan. Mereka melakukan gerakan kultural untuk mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran pemeliharaan lingkungan agar anak dan cucu mereka dapat hidup nyaman dan terhindar dari bencana lingkungan. Temuan ini mendukung teori Hensmans dan Bommel yang menjelaskan bahwa gerakan sosial itu mampu memobilisasi sumber daya untuk mencapai misi yang sudah dicanangkan, mengambil keuntungan dari peluang politik yang tersedia, membingkai masalah dengan cara yang menguntungkan, dan pelibatan dalam perjuangan hegemonik. Namun, upaya memperkuat kesadaran masyarakat terkait lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan gerakan kultural saja, tetapi perlu upaya dari jajaran struktural. Apalagi pemerintah sudah menetapkan Kebijakan Nasional untuk mengurangi 70% sampah plastik laut di Indonesia pada tahun 2025. Kebijakan ini, di tingkat implementasinya, bisa lebih efektif dan efisien bila ada peran aktif pemerintah daerah baik melalui penguatan skill, penyebaran informasi, pengawasan dan pendampingannya.

Daftar Pustaka

Anggraini, Dini Feti dan Djati Mardiatno. Analisis Daya Dukung Lingkungan Untuk Kawasan Ekowisata Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Daerah Khusus

- Ibukota Jakarta, *Tesis S2 Geografi*, Universitas Gajah Mada, 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, 2022.
- Benford, Robert D., An Insider's Critique of the Sosial Movement Framing Perspective, *Sociological Inquiry*, 67, No. 4, (1997): 409-430
- Cahyadi, Ahmad, et.all., Menyelamatkan Masa Depan Pulau-Pulau Kecil Indonesia: Sebuah Pembelajaran dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Makalah dalam *Sarasehan Nasional* Tanggal 31 Agustus 2013, Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.
- Chandra, Handy, et.all. *Realita dan Rekomendasi Pengelolaan Sampah di Kepulauan*, Bogor: IPB Press, 2020.
- Damar, Ario dan Hefni Effendi. Indeks Kerentanan Ekosistem Terumbu Karang Terhadap Tumpahan Minyak: Kasus Pulau Pramuka Dan Pulau Belanda Di Kepulauan Seribu, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, Vol. 9, No. 1, (2017): 67-90.
- Diani, Mario. The Concept of Sosial Movement, *The Sociological Review*, 40, Issue 1, (1992): 1-25
- Farhan, A.R. dan S. Lim, Vulnerability assessment of ecological conditions in Seribu Islands, Indonesia, *Ocean & Coastal Management*, Vol 65, (2012): 1-14.
- Giddens, Anthony. *Sociology*, Oxford: Polity press, 1993.
- Goffman, Erving. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, (1974) Harvard University Press, 1974.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*; New York: International Publishers, New York, 1971.
- Hensmans, Manuel dan Koen van Bommel, "Sosial Movements," *iCite Working Papers* - International Centre for Innovation, Technology and Education Studies Université Libre de Bruxelles, 2017-2024.

- Kabeer, Naila. Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, *Development and Change*, Vol. 30, (1999), 435-464
- Khrisnamurti, Khrisnamurti, Heryanti Utami, Rahmat Darmawan, Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan Di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, *Kajian: Menjembatani Teori dan Persolan Masyarakat*, Vol. 21, no 3, 2016.
- Miswan, Miswan Analisis Destinasi Pariwisata Pulau Kelapa Dan Pulau Harapan Di Kepulauan Seribu Jakarta, *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1):10-20, July 2019.
- Miswan, Miswan Analisis Destinasi Pariwisata Pulau Kelapa Dan Pulau Harapan Di Kepulauan Seribu Jakarta, *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1) (2019):10-20.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mujiyani, et. all., *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: The Indonesian Institute of Sciences (LIPI), 2002.
- Noviana, Linda, Hadi Susilo Arifin, Luky Adrianto, dan Kholild, Studi Ekosistem Terumbu Karang di Taman Nasional Kepulauan Seribu, *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2): 352-65, 2018.
- Samadi, Model Penanganan Kerusakan Terumbu Karang, *SPATIAL: Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, (2015): 33-40.
- Samadi, Samadi, Hubungan antara Pengetahuan tentang Lingkungan Hidup dengan Partisipasi Masyarakat terhadap Konservasi Ekosistem Pesisir di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, *Jurnal Parameter*, 31, No 2, (2019).
- Suhery, Noveldesra, Ario Damar dan Hefni Effendi, Indeks Kerentanan Ekosistem Terumbu Karang Terhadap

- Tumpahan Minyak: Kasus Pulau Pramuka Dan Pulau Belanda Di Kepulauan Seribu, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 9, No. 1, (2017): 67-90.
- Sztompka, Prior. *The Sociology of Sosial Change*, Oxford: Blackwell Publisher, 1994.
- Willoughby, N.G. Man-Made Litter On The Shores Of The Thousand Island Archipelago, Java, *Marine Pollution Bulletin*, 17, Issue 5,(1986): 224-228.
- Yonvitner, et.all., Vulnerability Status of the Coral Ecosystem in Kepulauan Seribu, *Marine National Park, Indonesia, Coastal Management*, Vol. 50 (3), (2022): 251-261.

Internet

Benford, 1997

Kunjungi Pulau Pramuka Sandiaga Uno Berharap Pariwisata Kepulauan Seribu, <https://money.kompas.com/read/2021/08/13/172152026/kunjungi-pulau-pramuka-sandiaga-uno-berharap-pariwisata-kepulauan-seribu>, diakses 20 Agustus 2023

Wisata Jakarta Kunjungan Wisatawan Ke Pulau Pramuka Naik 100 Persen Selama Libur-Lebaran, <https://wartakota.tribunnews.com/2023/04/30/wisata-jakarta-kunjungan-wisatawan-ke-pulau-pramuka-naik-100-persen-selama-libur-lebaran> diakses 21 Agustus 2023

Wawancara dan FGD

Wawancara dengan Neneng, pejabat Dinas Pariwisata, di Kantor Dinas Pariwisata Kepulauan Seribu, 18 Februari 2016.

Wawancara dengan salah seorang Ketua RT di Pulau Pramuka,
2 Agustus 2017

Wawancara dengan Mahariah di Pulau Pramuka 16 Oktober
2016.

Focus Group Discussion (FGD), 17 Februari 2016.



PERILAKU MENYIMPANG SEKSUAL: PERSPEKTIF GENDER

Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis

Pendahuluan

Fenomena sosial kekinian yang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan persoalan seksual dan atau seksualitas manusia memiliki banyak istilah-istilah atau pelabelan yang sejalan dengan perilaku seksualitas yang terbentuk dan terjadi di masyarakat dan bersifat sangat kompleks; Sebagai contoh; isu tentang kejahatan seksual, pelecehan seksual, perkosaan, incest, kekerasan seksual, dan isu tentang perilaku menyimpang seksual.

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat mulia dan dikaruniai tiga komponen utama, yaitu fisik (yang sempurna), akal, dan hati (ruh). Tiga komponen tersebut menjadi unsur pembeda dibanding dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, hewan dan tanaman. Sebagai bangsa Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Permasalahan yang dihadapi di lingkungan masyarakat luas, termasuk di beberapa lingkungan kampus telah ada indikasi penyebaran perilaku seksual menyimpang, baik di kalangan sivitas akademika atau pun tenaga kependidikan. Lingkungan kampus sebagai kawah candradimuka calon-calon intelektual yang senantiasa mengembangkan budaya akademik dan menanamkan serta memelihara nilai-nilai luhur, karena itu kampus sekaligus akan menjadi kekuatan moral. Dengan demikian, semestinya perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut di atas melekat sebagai sebuah sistem nilai dalam norma-norma yang berlaku di kampus, yang harus terus menjadi acuan, yang kemudian lazim disebut sebagai etika. Dalam melakukan aktivitasnya, komunitas akademik juga bergaul dengan masyarakat luas. Untuk itu etika menjadi bagian pergaulan yang sangat penting.

Perspektif Gender

Perspektif gender semakin mempertajam cara seseorang memandang seksualitas, dan bahkan turut memainkan peran penting dalam perilaku seksualnya. Misalnya saja, karena stereotipi budaya dianggap wajar jika dalam aktivitas berpacaran pihak lelaki yang lebih agresif secara seksual dan

sebaliknya submisif bagi perempuan. Selain itu, perempuan dan laki-laki juga memiliki kerentanan yang berbeda, perempuan cenderung lebih rentan karena adanya budaya “silence” dalam hal seksualitas dan perilaku seksual. Stereotipi perempuan yang baik adalah perempuan yang bersikap diam, menerima dan pasif dalam perilaku seksualnya. Persepsi keliru tentang makna gender (relasi antara perempuan dan lelaki) dibentuk oleh persepsi masyarakat (antar-generasi) yang menyiratkan bahwa: (1) gender dianggap sebagai intervensi budaya asing, sehingga dipersepsikan akan mengubah relasi harmonis dalam pembagian peran antara lelaki dan perempuan; (2) gender dipersepsikan sebagai urusan domestik perempuan; dan (3) relasi kesetaraan gender dipersepsikan akan menyaingi kaum lelaki dalam urusan publik (kerja nafkah).

Manusia dalam konteks antropologi dapat dilihat dari sudut pandang biologis. Klasifikasi manusia secara biologis biasa disebut dengan istilah *Homo Sapiens* (artinya manusia) karena memiliki otak yang berkemampuan tinggi dibanding makhluk lainnya. Ciri-Ciri fisik manusia berbeda pada setiap ras. Perbedaan ciri-ciri fisik terkait dengan tinggi badan, warna kulit, warna rambut, mata hingga bentuk hidung. Ukuran tubuh biologis banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan dan kebudayaan, misalnya struktur gizi pada makanan yang dikonsumsi. Pertanyaannya adalah ciri biologis tubuh manusia manakah yang dapat dan tidak dapat diubah? Secara empiris, ciri fisik atau biologis manusia dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu:

(1) Ciri biologis primer (kodrat) = tidak dapat diubah. Perbedaan biologis primer terkait dengan fungsi reproduksi dan “tidak dapat dipertukarkan”, bersifat *nature* atau alami dan merupakan ciptaan Tuhan, alat reproduksi pada lelaki adalah penis, kantung zakar/*scotrum*, buah zakar (testis), sperma

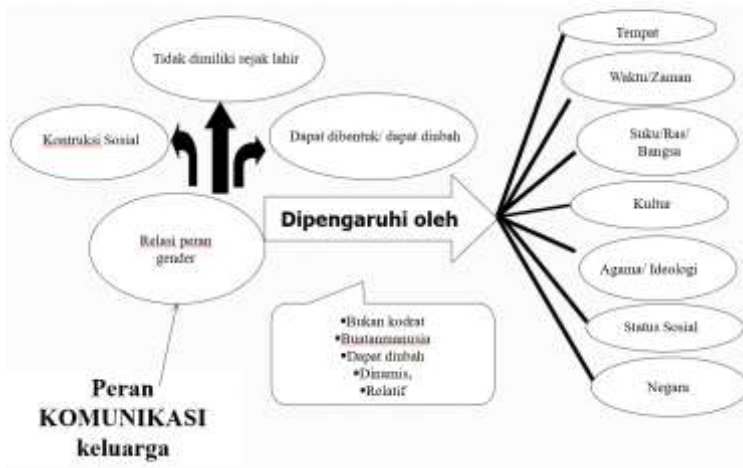
(mani), prostat (kelenjar). Sedangkan alat reproduksi pada perempuan adalah vagina, indung telur/ovarium, sel telur (ovum), uterus, haid, bisa hamil, melahirkan dan menyusui.

(2) Ciri biologis sekunder = alternatif; Perbedaan biologis sekunder dapat dipertukarkan karena bersifat *nurture* (luaran pengasuhan atau pengaruh lingkungan), contohnya sifat feminin dan maskulin dapat ditemukan baik pada lelaki dan atau pada perempuan. Begitu juga sifat biologis sekunder lainnya; lelaki memiliki bulu dada/tangan, suara berat, berkumis, sedangkan perempuan memiliki kulit halus, dada besar, suara tinggi, dan rambut terurai. Secara fakta empiris, kulit halus, terawat yang umumnya dikaitkan dengan ciri fisik perempuan juga ternyata dengan kemajuan zaman tidak hanya menjadi patokan utama untuk kaum perempuan. Kaum lelaki juga ada yang wajahnya halus dan terawat bahkan ada salon-salon khusus pria, yang pada awalnya lebih difokuskan untuk konsumen perempuan. Kumis yang merupakan identitas kaum lelaki, ternyata juga ada perempuan yang secara alami berkumis (walaupun tidak terlihat atau dipelihara secara khusus).

(3) Ciri biologis tertier= gender (dapat diubah); sesuai komitmen norma sosial budaya setempat

Perbedaan biologis tertier (gender) atau yang disebut relasi gender akan sangat bervariasi dalam realitasnya, tapi tidak ada hubungannya dengan perbedaan ciri biologis primer. Faktor-faktor yang memengaruhinya adalah faktor lokasi/tempat tinggal, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, agama/ideologi, status sosial, dan negara. (Aida, VSH 2012).

CIRI BIOLOGIS TERTIER
APLIKASI RELASI PERAN GENDER (LELAKI – PEREMPUAN)



Pada generasi Baby Boomers dan generasi X pembagian peran antara lelaki-perempuan masih sangat jelas dan kaku, perempuan berperan di ranah domestik dan lelaki di ranah publik; Peran perempuan di ranah domestik diframing dalam peran dan fungsi **3-I** (sebagai Istri, Ibu rumah tangga, dan ibu). Namun, dengan adanya perkembangan zaman peran perempuan kini sudah bertambah dengan peran **3-I plus K** (Karyawan) atau **3-I plus B** (Bos) atau **3-I plus P** (Pejabat) atau **3-I plus Po** (Politisi). Kemudian Peran lelaki dalam ranah publik yang diframing dalam fungsi 2-M (mencari nafkah, dan melindungi keluarga) juga mulai berbagi dengan perempuan yang sudah mulai mencari nafkah untuk keluarga; baik karena kebutuhan maupun karena pengejawantahan karier dan aplikasi kesetaraan. Bentuknya sangat variatif, seperti berbagi peran domestik dalam hal mengasuh anak, memasak dan urusan domestik lainnya yang dahulu kala hanya urusan dan tugas perempuan. Hal ini utamanya mulai terlihat pada relasi gender di generasi Y dan generasi Z awal. Dengan kata lain ciri

biologis lelaki dan perempuan yang tidak dapat diubah dan dipertukarkan **hanyalah ciri biologis primer**, sedangkan ciri biologis tertier tergantung pada kesepakatan antara kaum lelaki – perempuan disetiap komunitas. Jika dalam keluarga maka akan tergantung sepenuhnya pada kesepakatan antara suami-isteri sebagai pasangan hidup.

Pada ERA atau Generasi apa pun (Boomers, X, Y, Z, Alpha), keluarga sebagai unit terkecil dari suatu sistem sosial masyarakat berfungsi sebagai lembaga sosialisasi pertama dan utama dalam mewariskan nilai-nilai bertindak berdasar norma dan kepatutan terhadap sesama anggota keluarga (lelaki-perempuan), dalam konteks relasi harmonis dalam perwujudan ketahanan keluarga. Secara definitif, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materi dan psikis-mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (UU No.10 tahun 1992). Pada intinya; keluarga yang tangguh, masyarakat yang tangguh, dan negara yang tangguh akan membentuk Tiang negara yang juga tangguh.

Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 “Tentang Perkawinan”, menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bab 1 Pasal 1)”. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Bab 1 Pasal 2). Perkawinan adalah hubungan seksual yang sah secara hukum negara dan agama. Kejelasan tanggung jawab suami ke istri dan sebaliknya, serta pada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

Fenomena LGBT (sebagai singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan isu kekinian (*current issues*) yang muncul dan populer di tahun 90'an. Perilaku seksual yang di luar kebiasaan normal ini merupakan tindak hubungan seksual pada abad XIX; di Inggris dikenal dengan istilah "orientasi seksual" (disebut Gay). Pada awal mulanya, istilah orientasi seksual atau *Gay Orientation* digunakan hanya sebagai ekspresi kebahagiaan (perasaan senang, bebas dan tidak terikat) dimana kata tersebut berkonotasi homoseksual dan berlaku untuk semua jenis kelamin (identitas biologis seksual), lelaki-perempuan yang melakukan hubungan "sesama jenis". Pada abad ke XX, istilah Gay mulai digunakan untuk sebutan homoseksualitas, selain heteroseksualitas. Dalam bahasa Inggris modern, istilah gay digunakan sebagai kata sifat dan kata benda, merujuk pada orang terutama "Lelaki Gay" dengan segala aktivitasnya dan lingkungan budaya yang terasosiasi dengan ciri-ciri homoseksualitas. Pada perkembangan lebih lanjut, para perempuan yang mengidentifikasi diri mereka sebagai *Gay* lebih suka menggunakan kata "Lesbian". Istilah Lesbian diambil dari nama sebuah Pulau di Yunani (Lesbos), tempat kelahiran penyair perempuan yang memuja perempuan, bernama Sappho (630-612 SM). Pulau Lesbos, kini banyak dikunjungi turis dari komunitas Lesbian. Dengan demikian, Gay dan Lesbian merupakan bentuk orientasi seksual atau hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki jenis kelamin yang sama (sesama jenis). dalam hal ini, istilah *same-sex attraction* sering digunakan oleh lembaga yang menyediakan layanan konsultasi untuk menormalkan orientasi seksual yang menyimpang atau merupakan *treatment* psikis untuk penyembuhan.

Perilaku seksual seorang *Gay* diwujudkan dalam bentuk lelaki berhubungan seksual dengan sesama lelaki (LSL), dan Lesbian ditujukan pada perempuan yang berhubungan seksual dengan sesama perempuan (PSP). Fenomena keberadaan penyimpangan perilaku seksual secara tidak langsung menyebabkan tergerusnya pedoman luhur tentang hubungan seksual yang sah, bersih dan sehat dan sekaligus merupakan bentuk perlawanan terhadap fitrah hubungan seksual yang telah Allah ciptakan.

Tindakan seksual tidak lazim yang dilakukan oleh para pelaku seksual menyimpang direalisasikan dengan berlindung pada prinsip kebebasan berekspresi diri dan dengan dalih hak asasi manusia sebagai acuan kebenarannya. Dengan semakin meningkatnya perilaku hubungan seksual sesama jenis (*same-sex attraction*), yaitu “baik yang LSL (lelaki melakukan seks dengan lelaki) atau PSP (perempuan melakukan seks dengan perempuan)” menimbulkan kerusakan moral yang parah, tidak hanya merusak moral diri pelaku tetapi juga moral masyarakat secara menyeluruh. Dampak pada diri pelaku akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang belum atau tidak ada obat penyembuhannya. Sedangkan dampak ke masyarakat dari penyimpangan perilaku seksual LSL dan PSP tentunya tidak akan pernah bisa mengembangbiakkan manusia, yang merupakan Sunatullah dan tanggung jawab manusia yang memang diciptakan oleh Allah untuk berkembang biak di muka bumi ini.

Menurut teori struktural-fungsional, peran setiap anggota keluarga sangat ditentukan oleh “struktur kuasa”. Bentuk “relasi gender” acap menempatkan anggota keluarga yang lelaki seolah-olah memiliki kuasa, kapabilitas, dan kekuatan lebih besar dibanding anggota keluarga yang perempuan;

- (1) Kepala keluarga (Lelaki/Suami) secara hierarki memiliki kewenangan paling tinggi dalam menentukan keputusan keluarga.
- (2) Perbedaan usia anggota keluarga secara hierarki menempatkan anak tertua dominan dalam perolehan hak perolehan (*main privilege*).
- (3) Perbedaan jenis kelamin anggota keluarga menempatkan anggota keluarga berjenis kelamin lelaki (bapak, anak lelaki) menempati struktur kuasa lebih tinggi dibanding anggota keluarga berjenis kelamin perempuan (ibu, anak perempuan).

Peran dan Relasi Gender dalam perspektif struktural fungsional secara tradisi dan budaya menempatkan perempuan untuk berperan di ranah domestik dan sebaliknya laki-laki di ranah publik. Fakta empiris juga menunjukkan bahwa pembagian peran seperti ini (domestik-publik) tidak sekaku yang ditetapkan karena akan tergantung pada komitmen di tiap keluarga dan atau di tiap komunitas. Komitmen ini akan tergantung juga pada kepentingan suatu keluarga di dalam mempertahankan hidup dan kehidupan keluarganya dan berbagai alasan lainnya. Hal ini akan menimbulkan variasi keterlibatan lelaki-perempuan dalam pembagian peran tradisi menurut norma dan kebiasaan yang disepakati di tiap keluarga dan tiap komunitas.

Pada ERA atau pada Generasi apa pun, keluarga sebagai unit terkecil dari suatu sistem sosial masyarakat masih tetap berfungsi dan difungsikan sebagai lembaga sosialisasi pertama dan utama di dalam mewariskan norma dan nilai-nilai bertindak berdasar norma dan kepatutan bertindak terhadap sesama anggota keluarga, dalam konteks relasi harmonis antara anggota keluarga, lelaki dan perempuan. Dalam hal ini, fungsi keluarga memberi rasa saling memiliki, rasa aman, kasih

sayang dan sekaligus mengembangkan hubungan baik antara anggota keluarga. Cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas pada perasaan, tetapi juga menyangkut pemeliharaan, tanggung jawab, perhatian, pemahaman, saling menghargai dan keinginan kuat (amanah) untuk menumbuhkembangkan anak yang dilahirkan.

Fungsi keluarga merupakan salah satu komponen paling penting dalam konsep teori struktural fungsional. Dalam hal ini, fungsi keluarga berkaitan dengan proses kegiatan, tugas dan fungsi anggota keluarga dalam cara berinteraksi/berkomunikasi yang saling melengkapi segala upaya untuk menjaga keutuhan keluarga dalam realisasi pengambilan keputusan dan pensolusian masalah keluarga secara bersama. Salah satu dari delapan fungsi keluarga adalah fungsi reproduksi. Realisasi fungsi reproduksi dalam keluarga, menurut keyakinan semua agama dan nilai-nilai luhur masyarakat menyepakati bahwa ikatan perkawinan (lelaki-perempuan) merupakan “satu-satunya cara untuk memperbanyak keturunan”. Menurut Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan... “makna Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bab 1 Pasal 1); dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Bab 1 Pasal 2).

TREND kekinian atau fenomena sosial terkait **fungsi reproduksi** adalah tumbuhkembangnya perilaku seksual menyimpang (hubungan sesama jenis) yang secara tidak langsung meggerus pedoman luhur hubungan seksual yang sah, bersih dan sehat dan sekaligus merupakan bentuk perlawanan terhadap fitrah hubungan seksual yang telah Allah

ciptakan. Hal tersebut tidak benar dan juga tidak sejalan dengan 1) Amanat UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa... “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria (lelaki) dan seorang wanita (perempuan) sebagai suami-istri”. 2) Sila Pertama Pancasila tidak akan pernah toleran pada perkawinan sesama jenis (LSL atau PSP)/*One Love* karena secara nilai-nilai agama harkat reproduksi manusia memperoleh keturunan adalah melalui perkawinan sah antara lelaki dan perempuan.

Penyimpangan perilaku seksual yang sudah semakin menggilai dan bahkan menjadi *life style* memiliki kecenderungan menjadi “komunitas khusus” yang terorganisir dan menyebar di berbagai daerah. Fenomena ini bersifat a-sosial dan tidak lazim serta dapat memicu penyebab terjadinya kehancuran dan kepunahan umat manusia. Karena itu, fenomena ini sudah dianggap dan dirasakan sebagai “suatu kondisi” yang sangat meresahkan bagi keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia karena tidak sesuai dengan adat masyarakat dan agama. Karena itu, segenap kekuatan masyarakat pun bersinergi antara lain, LKAAM, Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Kampus Perguruan Tinggi.

Perilaku LGBT tumbuh subur seiring gencarnya kampanye kesetaraan gender. Menurut teori kesetaraan gender, jenis kelamin berdasarkan beda biologis disebut Sex. Sedangkan gender adalah perbedaan peran antara lelaki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial atau relasi sosial antara orang yang berjenis kelamin perempuan dan lelaki yang di pengaruhi oleh berbagai faktor. Kesetaraan gender (*Gender equality*) adalah situasi dimana perempuan dan lelaki menikmati status yang sama (akses, partisipasi) serta memiliki kondisi dan potensi yang seimbang di dalam merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi pada pembangunan nasional, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Karena itu, kesetaraan gender adalah kesetaraan penilaian dari masyarakat terhadap ketidaksamaan dan perbedaan antara lelaki dan perempuan, dan beragam peranan yang dapat mereka perankan. Keadilan gender (*Gender Equity*) adalah proses untuk berlaku adil pada perempuan. Untuk memastikan adanya keadilan, penilaian harus selalu tersedia untuk mengkompensasi kultur dan sejarah yang tidak menguntungkan dan menghambat lelaki dan perempuan untuk berperan selain dari peran yang menghasilkan suatu keadilan gender. Pada proses selanjutnya, proses keadilan melalui keadilan diharapkan dapat menuntun ke arah kondisi kesetaraan antara lelaki dan perempuan.

Gerakan LGBT seiring dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang melegalkan hubungan sesama jenis di seluruh wilayah AS, berdampak pada seluruh belahan dunia. Di Indonesia, gerakan ini mewabah di hampir seluruh provinsi;

- (1) Tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu, yang berlingkup di balik ratusan Ormas yang mendukung hubungan seks sesama jenis.
- (2) Data Kemenkes 2012: sebanyak 1.095.970 Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay tersebar di semua daerah (Republika.co.id Jakarta) dan lebih dari 5% mengidap HIV.
- (3) Jawa Barat adalah provinsi dengan LSL terbanyak: 300.198 orang terindikasi gay dan 4.895 orang di antaranya terpapar HIV/AIDS.
- (4) Jawa Tengah memiliki Gay sebanyak 218.227 orang dan 11.951 orang terindikasi HIV/AIDS.
- (5) DKI Jakarta ada sebanyak 27.706 Gay, dan sebanyak 5.550 orang diduga menderita HIV/AIDS.

Selain itu, terindikasi adanya pelaku dan gerakan yang menambah istilah LGBT menjadi LGBTQI+: Istilah QI+I artinya Queer, Intersex, dan tanda + mewakili orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai L atau P atau identitas tertentu dan lainnya; pelaku dan gerakan ini mulai ada di lingkungan masyarakat dan termasuk pada pendidikan tinggi di Indonesia. Organisasi yang memberi support/mendampingi LGBT, antara lain adalah;

- (1) Tahun 2014: Support Group and Research Center On Sexuality Studies (SGRC) salah satu aktivitasnya adalah mendampingi kaum LGBT;
- (2) Sampai akhir 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi;
- (3) Jaringan Gay, Waria dan LSL (GWLINA) didirikan pada Februari 2007 yang didukung oleh organisasi internasional;
- (4) Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada 2008, yang bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender.

MenRistekDikti menegaskan bahwa Organisasi kelompok/ komunitas lesbian, *gay*, biseksual dan transgender (LGBT) tidak boleh masuk kampus. Organisasi kelompok/ Komunitas ini tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Perbuatan Asusila/ Perilaku Seks menyimpang adalah suatu pelanggaran berat. Kekeliruan menjalankan peran gender selanjutnya dianggap sebagai suatu ketidakpatutan dan salah/ keliru serta menimbulkan konflik pemahaman terhadap konsep PUG (Pengarusutamaan gender) dan KKG (Keadilan dan kesetaraan gender). Dengan demikian, perbedaan arti Gender dan Jenis

Kelamin (Seks), harus disosialisasikan di keluarga dan di masyarakat. Seks atau jenis kelamin merupakan penyipatan atau pembagian jenis kelamin manusia (lelaki-perempuan) secara biologis yang ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomi, bersifat permanen (tidak dapat dipertukarkan), dibawa sejak lahir dan merupakan kodrat-karunia Allah Subhanahu Wa'taala. Dengan dimasukkannya asas agama dalam draft terakhir RUU KKG yang selama ini ditentang para aktivis gender, bisa jadi perjuangan kaum LGBT di Indonesia akan lebih keras lagi. Mereka bukan saja tetap memperjuangkan RUU KKG dengan agenda LGBT terselubung, tapi dalam bentuk gerakan yang lebih nyata sebagai bagian dari SOGI Project. SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) Project adalah sebuah proyek International yang dilaksanakan secara sistematis dalam mendukung hak-hak kelompok LGBT. Dengan mengerahkan semua dukungan baik dalam bentuk pendanaan melalui lembaga dunia seperti World Bank (Dokumen PDF Gender and Sogi Safeguard, Spring Meeting 2014 IMF World Bank.).

Mendorong hadirnya berbagai resolusi PBB seperti Resolusi Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity, (HRC/RES/17/19) di Afrika Selatan pada Juni 2011. Atau pun melahirkan resolusi regional namun strategis seperti lahirnya Jogja Principles pada tahun 2009 (www.arc-international.net). SOGI Project juga didukung dengan berbagai riset di berbagai bidang seperti Psikologi, Sosiologi dan Biologi. Dukungan bidang Psikologi terhadap SOGI project telah memberikan sumbangan berarti bagi gerakan Normalisasi kelompok LGBT. Bahkan perubahan mendasar di bidang Psikologi melalui pemakaian berbagai istilah gender menggantikan istilah sex adalah upaya tidak terpisahkan dari gerakan ini. Sex Identity atau identitas seksual yang menggambarkan jenis kelamin apa yang dimiliki seseorang

apakah laki-laki atau perempuan adalah terminologi yang jarang dipakai di dunia Psikologi. Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) adalah dua terminologi yang menggambarkan kepada siapa orientasi seksual seseorang diberikan serta identitas yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan gendernya apakah feminin atau maskulin. Menurut Bohan ... "The Psychological of Sexual Orientations is a study of the process of coming to terms with life as a heterosexual, bisexual, lesbian or gay person. (Psychology and Sexual Orientation: Coming to Terms, Janis S. Bohan, Psychological Press, 1996). Faktanya, perjuangan legalisasi LGBT di Indonesia – baik melalui agenda meloloskan RUU KKG atau pun menjadi bagian dari SOGI Project – dilakukan dengan kerja keras, sungguh-sungguh, dan sistematis. Maka, tidak ada pilihan, bagi bangsa Indonesia, dan kaum Muslim khususnya, harus berjuang keras memberikan pemahaman dan penyadaran tentang hakikat perilaku seksual menyimpang telah terbukti membawa kerusakan bagi umat manusia. Apalagi, kaum beriman, pasti paham dan yakin benar, Allah SWT telah melaknat dan mengazab perilaku biadab dari kaum Luth, masyarakat penyuka sesama jenis (Gay);

Perlawanan terhadap perilaku seksual menyimpang ini sudah mulai timbul di berbagai negara yang mengeluarkan UU yang melarang perilaku LGBT dengan sanksi hukum. Contoh konkritnya adalah "keputusan pengadilan hak asasi manusia tertinggi di dunia di strasborgh-Perancis (mencakup 47 Hakim dari 47 Negara) dengan suara bulat telah menetapkan secara tegas bahwa...tidak ada hak untuk pernikahan sesama jenis". Hal ini didasarkan pada pertimbangan filosofis dan antropologi yang juga didasarkan pada tatanan alam, akal sehat, laporan ilmiah dan tentu saja hukum positif yang sejalan dengan Pasal 12 konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Untuk Indonesia, penolakan yang sama terhadap LGBT juga sangat keras, mulai

dari penolakan kunjungan duta LGBT atau kegiatan berbau LGBT/warna pelangi; penolakan ini timbul dari berbagai kalangan (tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan, kampus, dan pemerintah daerah; sebagai contoh, sikap yang ditunjukkan oleh seorang kepala daerah/Wakikota Medan (Bapak Bobby Nasution) yang menolak adanya perilaku LGBT di wilayahnya merupakan kondisi yang sungguh menggembirakan dalam upaya mencegah dan memberantas meluasnya perilaku seksual menyimpang (Tribun Medan, Januari 2023). Semoga para pejabat di berbagai daerah lainnya dan pemerintah Indonesia yang dilandasi pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi lebih peduli lagi terhadap bahaya perilaku seksual menyimpang yang mengancam masyarakat dan negara Indonesia secara utuh.

Kesimpulan

Fungsi biologis primer yang tidak dapat dipertukarkan harus dikomunikasikan sejak dini dalam setiap keluarga maupun masyarakat. Setiap keluarga harus siap mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma bertindak yang berkeseesuaian dengan **fitrah fungsi biologis seksual perempuan-laki** yang tidak dapat dipertukarkan dan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan fungsi seksual dalam keluarga. Dengan demikian komunikasi tentang bahaya seksual menyimpang harus dikomunikasikan sejak dini dalam keluarga dan masyarakat melalui media-media strategis. Secara definitif, upaya gerakan komunikasi ini di dalam keluarga/ masyarakat luas dapat dibaratkan sebagai darah dalam tubuh, jika berhenti mengalir maka matilah keluarga/masyarakat. Dengan demikian, komunikasi/sosialisasi tentang identitas biologis tiap anggota Keluarga dan fungsinya yang tidak dapat dipertukarkan merupakan suatu keniscayaan. Kegagalan mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya akan berdam-

pak pada kelanjutan generasi penerus dan tentunya juga komitmen menempatkan dan menetapkan kelanggengan pasangan suami-isteri (lelaki-perempuan); semua ini adalah tanggung jawab kita bersama di dunia dan di akhirat kelak.



CAHAYA DARI PERBATASAN TIMUR INDONESIA: PERAN PENYULUH AGAMA PEREMPUAN DI JAYAPURA

Prof. Dr. Kustini, M. Si.

Mengenal Penyuluh Agama

Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia memiliki banyak tokoh agama yang menjadi panutan umatnya untuk memberikan bimbingan kepada umatnya. Salah satu pembimbing kehidupan keagamaan adalah Pejabat fungsional Penyuluh Agama. Mereka adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama, pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan.⁹³ Meski mereka memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat di tingkat akar rumput, namun keberadaan mereka seringkali kurang dikenal di masyarakat.⁹⁴ Penyuluh agama kalah tenar dengan ustadz di tingkat lokal atau penceramah agama yang muncul di media

⁹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, n.d.

⁹⁴ Koeswinarno Kustini, "Penyuluh Agama: Menuju Kinerja Profesional," *Analisa* 22, no. 2 (2015): 173–186.

sosial meski pengalaman dan pengetahuan agama para penceramah tersebut untuk beberapa kasus terhitung sangat terbatas. Kurang populernya keberadaan penyuluh agama terjadi antara lain karena dalam melaksanakan tugas para penyuluh agama masih menghadapi berbagai kendala sehingga bimbingan yang diberikan pun kurang maksimal.⁹⁵

Agar penyuluh agama tetap dekat dengan Masyarakat binaannya, Kementerian Agama telah mengangkat penyuluh agama dari berbagai kelompok agama yaitu penyuluh agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Penyuluh Agama Khonghucu. Dilihat dari status kepegawaian, penyuluh agama, ada yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyuluh Agama. Jumlah penyuluh PNS ini sangat terbatas. Karena itu Kementerian Agama membuat kebijakan untuk mengangkat penyuluh agama Non PNS. Mereka diangkat melalui Surat Keputusan kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota setempat untuk masa jabatan 3 tahun, dan dapat diangkat kembali atau diberhentikan setelah 3 tahun setelah melalui proses tertentu. Data tentang jumlah penyuluh agama di setiap kelompok agama adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Daya Penyuluh Agama Berdasarkan Status Kepegawaian

Nomor	Agama	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	NON PNS	
1	Islam	5.117	45.000	50.117
2	Kristen	396	9.250	9.646
3	Katolik	179	4.042	4.221
4	Hindu	140	1.694	1.834
5	Buddha	52	1.182	1.234
6	Khonghucu	1	167	168

⁹⁵ Abdul Jamil, *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS Dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas* (Jakarta: LD Press, 2020).

Jumlah	5.885	61.335	67.220

Sumber: Data Statistik Kementerian Agama Tahun 2020

Pembinaan penyuluh agama di atas dilakukan melalui Direktorat Jenderal masing-masing, kecuali penyuluh Khonghucu yang pembinaannya dilakukan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yaitu melalui Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Khonghucu. Untuk penyuluh agama Islam pembinaan dilakukan melalui Direktorat Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam. Dalam kaitannya dengan keberadaan penyuluh agama Islam, telah banyak dilakukan kajian dan penelitian, baik terkait kebijakan, peranan, maupun hambatan dan peluang penyuluh agama dalam melakukan pembinaan terhadap umatnya, (Wahidah dan Kosasih⁹⁶; Kibtiyah⁹⁷; Rohman 2018b⁹⁸; 2018a⁹⁹). Penelitian lain menunjukkan strategi (Fauzi 2018)¹⁰⁰ serta inovasi penyuluh agama dalam menghadapi keterbatasan dan kesulitan di lapangan (W. Bulan and Kustini Kosasih 2021)¹⁰¹. Untuk

⁹⁶ Kustini Kosasih, Bulan, Wahidah R., *The Role of Non-Civil Servant Religious Instructors to Improve Community Religiosity: Case Study in Cianjur District West Java Indonesia*, In Proceedings of the 2rd International Conference on Social Sciences (Jakarta., 2019).

⁹⁷ Muhimatul Kibtiyah, “Kemampuan Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Sumba Tengah Dalam Menerapkan Teknik Komunikasi,” ” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*. (2020).

⁹⁸ Dudung Abdul Rahman, “Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Menyusun Naskah Materi Hak Asasi Manusia (HAM),” *Penamas Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 31 (n.d.).

⁹⁹ Dudung Abdul Rohman, “Implementasi Kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Dalam Menyatukan Mekanisme Kerja Dan Pelaporan Kinerjanya,” *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 12, no. 33 (2018): 138–51.

¹⁰⁰ Muhamad Umar. Fauzi, “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme Di Kabupaten Nganjuk,” *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*. 6, no. 1 (2018): 17–49.

¹⁰¹ Kustini Kosasih. Bulan Wahidah, “Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracondong Dan KUA Cipeundeuy Di Jawa Barat,” *SMaRT* 7, no. 2 (2021): 143–154.

menghasilkan inovasi tersebut, para penyuluh memanfaatkan media sosial untuk menjalankan perannya sebagai pembimbing masyarakat.

Keberadaan penyuluh di wilayah perkotaan khususnya di wilayah Jawa, tentu memiliki banyak fasilitas untuk menjalankan perannya. Misalnya meskipun penyuluh tidak memiliki kendaraan dinas, tapi bisa dengan mudah menggunakan transportasi umum. Penyuluh agama di perkotaan relatif mudah mengakses informasi melalui jaringan internet. Demikian juga suasana di lokasi tempat ia bertugas dirasakan relatif aman dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan penyuluh yang ada di pelosok perbatasan? Tentu ia memiliki banyak tantangan dan keterbatasan dalam menjalankan perannya. Meski demikian, beberapa penyuluh tidak berputus asa menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan. Ia tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya. Di bawah ini salah satu gambaran perjalanan seorang perempuan yang diberi amanah untuk menjadi seorang penyuluh agama Islam di daerah timur.

Kedatangan yang Selalu Dinanti:

“Horeee.. Ibu Penyuluh kita sudah datang, Ayo kumpul semua, masuk.. masuk....” Itulah teriakan gembira anak-anak di Taman Bacaan al-Quran (TPQ) dimana Nurlinda sebagai salah satu pembinanya. TPQ adalah lembaga pendidikan pra sekolah dengan kekhususan belajar membaca al-Quran dan materi keislaman dasar lainnya. TPQ tersebut bernama al-Mahabbah terletak di jalan Kelapa Kampung Asyaman Distrik Arso Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sebelum berdiri menjadi kabupaten merupakan bagian dari

Kabupaten Jayapura. Melalui UU RI No. 26 Tahun 2002, Keerom resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri.

Di Kabupaten Keerom itulah Nurlinda mengabdikan sebagai PNS di Kantor Kementerian Agama. Jabatan diembannya Penyuluh Agama Islam, sebuah jabatan fungsional yang ada di Kementerian Agama. Tugas utama Penyuluh agama adalah memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat di wilayah akar rumput. Mereka melakukan tugasnya sebagai pemberi informasi, edukasi, konsultasi dan advokasi terkait kehidupan keagamaan. Karena itu dapat dikatakan bahwa penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang langsung memberikan bimbingan dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

Dra. Nurlinda Loga, demikian nama lengkapnya, adalah satu-satunya penyuluh agama Islam yang berstatus PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom. Ia lahir di Sossok, sebuah desa di Enrekang, Sulawesi Selatan, pada tahun 1969 dan menyelesaikan pendidikannya di IAIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Golongan jabatan yang diembannya saat ini adalah Penyuluh Madya dengan posisi pangkat dan golongan IV/b. Meski ia berstatus PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom, tetapi dalam menjalankan tugasnya ia lebih banyak di luar kantor. Memberikan bimbingan keagamaan di Majelis Taklim, menjadi fasilitator pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, menjadi konsultan masalah perkawinan, guru pada beberapa TPQ serta berkoordinasi dengan mitra kerja menjadi bagian dari tugasnya yang mengharuskan Nurlinda untuk berpindah-pindah tempat. Pagi hari ia datang ke kantor Kementerian Agama untuk melakukan presensi online. Setelah itu dengan lincah ia mengendarai motor Yamaha mio soul kesayangannya menuju tempat tugas berikutnya.



Nurlinda menjelang acara on air di RRI Jayapura dalam acara Renungan Pagi

Wilayah Perbatasan, Zona Merah, Penuh Tantangan

Wilayah perbatasan Indonesia masih merupakan wilayah yang penuh tantangan dari berbagai aspek, baik aspek keamanan, kesejahteraan, pendidikan, minimnya penyediaan infrastruktur, maupun problem sosial keagamaan lainnya (Humaedi 2013; W. R. Bulan 2021¹⁰²; Syuhudi 2020¹⁰³; Jamil

¹⁰² Alie Humaedi, "Dilema Peran Kelompok Haji Dalam Penguatan Tradisi Budaya Dan Sosial Keagamaan: Studi Kasus Masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 15, no. 1 (2013): 131–156.

¹⁰³ Muh. Irfan Syuhudi, "Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Di Muara Tami Jayapura," *Al-Qalam* 26 (2020): 281–294.

2014¹⁰⁴; Rahman et al. 2021¹⁰⁵). Karena itu wilayah perbatasan seperti Keerom menjadi wilayah yang rawan untuk terjadinya konflik baik konflik bersifat vertikal maupun horizontal (Kaisupy and Maing 2021). Meski Kabupaten Keerom tidak terlalu jauh dari Kota Jaya Pura, hanya sekitar 42 km, tetapi memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 9.365 km². (bandingkan dengan kabupaten terluas di Jawa Barat yaitu Sukabumi dengan luas 4.245,70 km²). Wilayah yang berbatasan dengan negara Papua Nugini (PNG), sebagian masih berupa hutan belantara. Sebagian jalan kabupaten sudah diaspal hotmik, selebihnya merupakan jalan setapak yang hanya bisa dilalui motor dengan kondisi licin ketika hujan dan berdebu ketika kemarau. Karena itu motor merupakan alat transportasi yang sangat menunjang Nurlinda untuk bergerak lincah dari satu tempat menuju tempat lainnya. Begitulah gambaran wilayah Kerja Nurlinda sebagai satu-satunya Penyuluh Agama berstatus PNS di Kabupaten Keerom. Kondisi jalan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Nurlinda. Ketika akan melewati satu jembatan yang cukup rawan, atau jalan yang berlubang, ia terpaksa menuntun motor kesayangannya karena khawatir jatuh dan terpeleset ke sungai. Bahkan untuk melalui jembatan tertentu, Nurlinda harus menunggu orang yang lewat untuk sekedar menemani atau memastikan bahwa ia dapat melintasi jembatan dengan aman. Jika tidak ada orang lain, Nurlinda khawatir ketika jatuh tidak ada yang menolong.

Tidak sedikit pengalaman kurang menyenangkan dialami Nurlinda karena kondisi jalan yang kurang

¹⁰⁴ Abdul Jamil, "Masalah, Kebutuhan, Dan Pelayanan Keagamaan Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun," *Harmoni* (2014): 176–196.

¹⁰⁵ Ulfiani Rahman dkk, "Religious Education Border Area (Case of Sungai Limau Village, Central Sebatik District, Nunukan North Kalimantan)," *Ilkogretim Online-Elementary Education Online* 19, no. 2 (2020): 1–10.

mendukung tugasnya. Suatu sore hampir menunjukkan pukul 17, matahari mulai redup. Nurlinda bergegas untuk menuju Taman Pendidikan al-Quran al-Mahabbah. Sore itu jadwal mendampingi anak-anak membaca al-Quran. Jalan setapak yang beralaskan tanah liat serta rumput, masih terlihat becek bekas hujan dua hari lalu. Nurlinda menjalankan motornya dengan kecepatan melebihi dari biasanya. Ia tidak tega membiarkan anak-anak TPQ menunggu lebih lama. Karena kondisi jalan licin serta kecepatan motor yang relatif tinggi, motor Nurlinda tidak bisa melewati jalan becek. Motornya tergelincir dan Nurlinda terlempar ke kebun. Entah bagaimana kejadian persisnya, yang jelas Nurlinda merasakan cairan hangat di mulutnya. Ternyata tetesan darah karena ia jatuh tersungkur ke tanah yang mengeras. Akibatnya, dua gigi depannya tanggal. Beruntung ada orang lewat yang segera menolong dan mengantar sampai ke rumahnya. Karena peristiwa itu Nurlinda harus beristirahat di rumah selama hampir 20 hari, ia hanya meminum obat penahan sakit serta vitamin. Enggan untuk ke dokter karena dalam kondisi pandemic, pergi ke RS atau Puskesmas akan menambah kekhawatiran. Bagi Nurlinda, semua kesulitan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan tidak menyurutkan semangatnya untuk terus membimbing jamaahnya.

Selain tantangan karena kondisi alam, tantangan lain adalah kondisi sosial demografi masyarakat setempat. Kondisi masyarakat yang sebagian masih tergolong kelompok kurang mampu (miskin) menjadi salah satu kendala untuk memperoleh akses pendidikan. Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Keerom dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Keerom adalah 57.100 jiwa, dan 9.550 di antara nya berada pada kategori miskin. Tingginya jumlah masyarakat miskin berpengaruh kepada tingkat

pendidikan dan penyerapan lapangan kerja. Pengangguran menjadi salah satu dampak dari kurangnya kondisi tersebut.

Salah satu tradisi dari masyarakat Papua adalah mengonsumsi minuman keras. “Tidak punya uang tidur di rumah, punya uang tidur di pinggir jalan”. Itulah salah satu kalimat yang sering digunakan untuk menggambarkan kebiasaan sebagian penduduk Keerom, khususnya laki-laki. Jika punya uang ia akan membeli minuman sampai mabuk, tidak bisa pulang ke rumah karena semnpoyongan dan akhirnya tertidur di pinggir jalan. Tapi jika tidak punya uang untuk membeli minuman. Ia tetap tidur di rumah. Ungkapan itu menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Papua, termasuk masyarakat Keerom, masih terjebak pada kehidupan yang terlarang yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Tidak jarang Nurlinda menemukan laki-laki tidur tergelatak di tengah jalan dan di sampingnya ada beberapa botol kosong bekas minuman keras. Jika menemukan hal itu, Nurlinda mempercepat laju motornya khawatir di antara mereka bangun dan mengganggunya.

Tingkat kejahatan dan penggunaan narkoba tidak hanya terjadi pada laki-laki tapi juga pada perempuan. Sebagian dari mereka sudah tertangkap dan dimasukkan di rumah LAPAS Kelas III di Kabupaten Keerom. Di LAPAS ini sekarang terdapat 7 perempuan muslim yang dibina, termasuk salah satunya adalah anak-anak. Secara rutin seminggu sekali Nurlinda datang untuk memberikan siraman rohani. Karena kedekatan Nurlinda dengan perempuan binaannya, maka hubungan mereka tidak hanya sekedar sebagai ustadzah dan jamaah. Nurlinda telah dianggap sebagai pengganti orang tua yang selalu mendampingi para perempuan di LAPAS itu agar segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Salah seorang perempuan binaan, sebh saja namanya Maryam, akan segera bebas dengan sarat Nurlinda menjami jaminan bahwa Maryam

tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagai pecandu dan pengedar narkoba. Nurlinda telah menandatangani surat jaminan dirinya dan bulan Agustus 2021 Maryam akan segera bebas. Nurlinda dengan sabar selalu mengingatkan Maryam serta tahanan perempuan muslim lainnya agar selalu menyadari bahwa kehidupan di dunia hanya sementara menuju keabadian. Bekal menuju keabadian tersebut harus dikumpulkan dengan menjadi orang yang benar.



Nurlinda sedang memberikan ceramah pengajian dengan menerapkan prootokol kesehatan yang ketat: menjaga jarak, memakai masker, dan kegiatan di alam terbuka.

Zona merah, demikian istilah yang dilekatkan ke sebagian besar wilayah Papua termasuk Keerom.¹⁰⁶ Istilah ini

¹⁰⁶ Vita Mayastinasari. Patiran, Gunarld, Chairul Muriman Setyabudi, "To Win the Heart and Mind the Peopel of Papua: Fungsi Dan Peran BRIMOB," *Operasi Damai Cartenz* 7, no. 2 (2022): 211–223, <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22481>.

mengidentikkan Keerom sebagai wilayah yang harus diwaspadai dari segi keamanan. Perselisihan antar suku serta ungkapan ketidakpuasan terhadap pemerintah melalui demo dan kekerasan fisik lainnya menjadi tantangan lain bagi Nurlinda. Perasaan was-was dan khawatir seringkali menghantui Nurlinda terutama jika ia pulang bertugas dan suasana sudah temaram menjelang malam. Berdoa sepanjang jalan sambil melajukan motornya merupakan salah satu cara Nurlinda menenangkan dirinya. Saat ini ketika wabah Covid-19 melanda negeri, maka Keerom juga termasuk zona yang harus diwaspadai. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagaimana tergambar pada kelompok anak muda di atas, menjadi tantangan lain agar Nurlinda menjadi corong pemerintah untuk sosialisasi protokol kesehatan.

Agen Moderasi Beragama

Moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019¹⁰⁷; Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama 2020).¹⁰⁸ Di bidang pendidikan, nilai-nilai moderasi beragama telah diimplemen-

¹⁰⁷ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁰⁸ Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2020).

tasikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (Al Bana 2023)¹⁰⁹ sampai jenjang perguruan tinggi (Nasir and Rijal 2021).¹¹⁰ Sebagai penggagas dan leading sektor program moderasi beragama, maka seluruh komponen di Kementerian Agama, termasuk penyuluh agama, memiliki tugas untuk ikut menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Untuk itu Dirjen Bimas Islam telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 504 Tahun 2022 yang isinya antara lain menyebutkan salah satu bidang spesialisasi tugas penyuluhan agama Non PNS adalah bidang moderasi beragama. Dengan demikian penyuluh bertugas dan berperan memersuasi masyarakat akan pentingnya hidup beragama dengan sikap yang moderat sesuai dengan pesan-pesan agama.

Dengan bekal pengetahuan tentang moderasi beragama yang diperoleh Nurlinda dalam sebuah Diklat yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Jayapura, sebagai ASN Kementerian Agama Nurlinda dituntut untuk selalu bersikap moderat, antara lain dengan cara mengayomi kepentingan berbagai kelompok termasuk mereka yang berbeda agama. Sebagaimana data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2020, dari seluruh penduduk Kabupaten Keerom yang berjumlah 66.629 jiwa, sebagian adalah pemeluk Islam 27.050 (40,58%), kemudian Kristen 21.306 (31,98%), Katolik 17.661 (17,66%), Hindu 588 (0,88%), dan Buddha 24 jiwa (0,04%). Menyikapi keberagaman dalam soal identitas pemeluk agama, dan biasanya beririsan dengan identitas

¹⁰⁹ Hasan Albana, "Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Smart* 09, no. 1 (2023): 49–64.

¹¹⁰ Muhammad Nasir and Muhammad Khairul Rijal, "Keeping the Middle Path : Mainstreaming Religious Moderation through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 213–241.

etnis, maka memiliki sikap moderat adalah sebuah keniscayaan agar Nurlinda dapat diterima di berbagai kelompok masyarakat.

Toleransi sebagai sebuah indikator moderasi beragama telah diterapkan Nurlinda dalam menunjang tugas-tugas kepenghuluhan. Sebagai contoh adalah dalam pelaksanaan ibadah bersama. Hari minggu adalah waktu untuk melaksanakan ibadah di gereja. Sementara di samping gereja itu terdapat masjid Al Amin yang kebetulan juga setiap hari minggu melaksanakan pengajian. Sempat terjadi sedikit ketegangan karena pengurus gereja keberatan dengan suaru speaker dari masjid tersebut. Setelah melalui proses dialog yang melibatkan pengurus masjid dan tokoh adat, maka disepakati agar tidak saling mengganggu, *speaker* dari masjid yang biasanya diarahkan suaranya ke luar, kemudian disetting agar hanya bisa didengar oleh jamaah di masjid saja. Nurlinda sebagai salah satu ustadzha di masjid tersebut menjadi salah satu unsur penting untuk tercapainya kesepakatan tersebut.

Moderasi beragama juga mengedepankan kepentingan untuk semua kelompok masyarakat termasuk yang selama ini kurang diperhitungkan yaitu kelompok pemuda. Bagi Nurlinda, anak muda adalah penerus kepemimpinan di masa depan yang harus dipersiapkan secara fisik maupun psikis menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Karena itu, Nurlinda tidak segan untuk mendekati anak-anak muda, mengajak berbincang dan memotivasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan selama pandemi serta pentingnya meraih pendidikan agar kelak menjadi pemimpin di daerahnya sendiri.

Suatu pagi ketika Nurlinda akan berangkat menuju Kantor Kementerian Agama, ia melihat 6 orang remaja laki-laki seusia SD dan SMP sedang duduk-duduk sambil mengobrol

dan merokok di depan warung yang masih tutup. Padahal saat itu wabah Corona sedang berkembang yang mengharuskan siapapun yang ada di luar rumah harus memakai masker. Naluri kepenyuluhan Nurlinda tersentuh. Ia kemudian mendekati anak-anak tersebut dan memulai mengajak berbicara:

Ini kan musim corona? Tahu ga apa itu corona? .. itu adalah virus yang cepat menular melalui pernafasan. Salah satu cara untuk menghindari virus adalah dengan memakai masker. Karena itu kalian harus selalu pakai masker kalau keluar rumah. Kalian kan masih muda, harus sehat, harus kuat karena kalian nanti akan menjadi pemimpin. Kalian juga harus belajar. Kalian sekolah tidak? .. (seketika Nurlinda terhenyak, ada rasa sedih ketika di antara mereka ada yang menyebut tidak sekolah). Harus sekolah. Bagaimana bisa jadi pemimpin kalau kalian tidak sekolah. Harus sekolah ya supaya bisa jadi anggota dewan, jadi bupati, atau jadi pengusaha.

Dengan pendekatan dan dialog seperti itu, Nurlinda berharap bahwa anak-anak muda di Keerom ini menyadari bahwa mereka adalah penerus kepemimpinan di masa depan, karenanya memperoleh pennisikan yang memadai serta menjalani kehidupan sesuai aturan pemerintah merupakan suatu keharusan.

Tantangan yang dihadapi Nurlinda tidak hanya karena kondisi geografis dan minimnya infrastruktur. Tantangan sosial dari kelompok masyarakat yang masih berpikiran parsial, juga menjadi hal yang tidak kalah sulitnya. Kebersamaan dan kedekatan dengan kelompok agama lain, terkadang bagi beberapa kelompok masyarakat dianggap sebagai hal yang kurang etis. Misalnya, sebagai bagian dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maka Nurlinda dituntut untuk menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan tokoh agama lain. Nurlinda juga bekerja sama dengan penyuluh

agama Kristen dan penyuluh agama Katolik. Suatu saat dari pihak gereja Katolik mengundang Nurlinda untuk memberikan pencerahan terkait masalah sosial keagamaan kepada para generasi muda. Kebetulan acara itu dilaksanakan di gereja dan Nurlinda berbicara dari podium atau altar yang biasa digunakan pastur ketika kebaktian. Setelah acara itu, Nurlinda memperoleh peringatan dari beberapa tokoh agama agar tidak menyebarkan foto kegiatan di gereja tersebut, khawatir menimbulkan salah faham. Nurlinda memahami kekhawatiran itu dan ia sama sekali tidak menyebarkan foto kegiatan itu.

Meningkatkan Pengetahuan: Harapan Yang Tak Pernah Pupus

Mengikuti diklat untuk menambah pengetahuan, berjejaring dengan sesama penyuluh di wilayah lain yang sudah lebih maju, menemukan inovasi dalam pembimbingan keagamaan. Itulah beberapa harapan yang selalu diidamkan oleh Nurlinda. Bagi masyarakat, penyuluh agama dianggap mengetahui berbagai permasalahan keagamaan. Ketika memberikan pengajian, atau berbincang ringan dengan para jamaah ketika acara arisan, jamaah mengajukan banyak pertanyaan terkait permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. “Saya ingin sekali mengikuti pendidikan atau bimbingan teknis, atau apapun untuk menambah pengetahuan saya. Ingin sekali diikutsertakan dalam pertemuan yang melibatkan para penyuluh agama. Apalagi jika kegiatannya di Jakarta, pasti sangat menyenangkan karena saya belum pernah ke Jakarta”. Demikian ungkapan Nurlinda ketika berbincang dengan penulis melalui telepon.

Kebahagiaaan anak-anak bimbingannya karena mencapai prestasi tertentu, adalah kebahagiaan Nurlinda juga. Ia sangat bangga ketika anak-anak tampil di acara-acara tertentu.

Demikian juga ketika anak-anak binaannya memenangkan perlombaan tilawah dan hafalan Al Quran, meski di tingkat distrik, Nurlinda ikut tersenyum dan mengucapkan rasa syukur. Pupus sudah rasa lelah dan penat yang selama ini dirasakan ketika membimbing anak-anak. *“Alhamdulillah, semoga anak-anakku kelak menjadi anak yang soleh solehah, anak yang membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat di Keerom”*. Demikian sepotong doa yang diungkapkan dalam hati setelah melihat anak-anak tampil di lomba tersebut.

Berusaha dan berdo'a adalah prinsip yang selalu diterapkan Nurlinda ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebagai seorang pembimbing agama, Nurlinda sangat memimpikan dapat berkunjung ke Tanah Suci mengunjungi makam Rasulullah SAW. Nasib baik sedang berpihak ke Nurlinda. Pada penyelenggaraan haji tahun 2023 yang baru saja berlalu, Nurlinda dipanggil untuk mengunjungi Tanah Suci sebagai petugas haji. Sujud syukur ia lakukan ketika memperoleh informasi bahwa ia termasuk salah satu yang mendapat amanah untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Nurlinda ditugaskan untuk menjadi pembimbing ibadah. Tetapi ia tidak membatasi perannya hanya pada pembimbingan ibadah. Siapapun yang membutuhkan bantuannya, ia dengan sigap mengambil peran sebagai pendamping lansia misalnya, ketika melihat ada jamaah lansia memerlukan bantuan. Bagi Nurlinda, apapun yang bisa dilakukan untuk membantu jamaah haji Indonesia, ia akan lakukan sebagai ungkapan rasa syukur dapat mengunjungi tanah suci. Dengan membantu jamaah haji pula Nurlinda merasakan bahwa ia telah memberikan sesuatu yang bermanfaat dan dapat meringankan beban orang lain.

Jakarta, 16 September 2023

Daftar Pustaka

- Bulan, Wahidah, and Kustini Kosasih. 2021. "Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Penurunan Angka Perceraian Oleh KUA Kiaracandong Dan KUA Cipeundeuy Di Jawa Barat." *SMaRT* 07, no. 02 (December): 143–54.
- Bulan, Wahidah R. 2021. "Transformation of Undocumented Marriages in the Frontier Territory, from Generation One to Generation Three" 13: 159–70.
- Bulan, Wahidah R., and Kustini Kosasih. 2019. "The Role of Non-Civil Servant Religious Instructors to Improve Community Religiosity: Case Study in Cianjur District West Java Indonesia." In *Proceedings of the 2rd International Conference on Sosial Sciences*. Jakarta. <https://doi.org/10.4108/eai.5-11-2019.2292528>.
- Fauzi, Muhamad Umar. 2018. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme Di Kabupaten Nganjuk." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*.
- Humaedi, Alie. 2013. "Dilema Peran Kelompok Haji Dalam Penguatan Tradisi Budaya Dan Sosial Keagamaan: Studi Kasus Masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik SEBATIK." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 15, no. 1.
- Jamil, Abdul. 2014. "Masalah, Kebutuhan, Dan Pelayanan Keagamaan Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Karimun." *Harmoni*, May (May), 176–96.
- — —. 2020. *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS Dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas*. Jakarta: LD Press.
- Kaisupy, Delvia Ananda, and Skolastika Genapang Maing. 2021. "Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 1 (April): 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>.

- Kibtiyah, Muhimatul. 2020. "Kemampuan Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kabupaten Sumba Tengah Dalam Menerapkan Teknik Komunikasi." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i1.24482>.
- Nasir, Muhammad, and Muhammad Khairul Rijal. 2021. "Keeping the Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2: 213–41. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2>.
- Patiran, Gunarld, Chairul Muriman Setyabudi, and Vita Mayastinasari. 2022. "To Win the Heart and Mind the Peopel of Papua: Fungsi Dan Peran BRIMOB Dalam Operasi Damai Cartenz 2022" 7, no. 2 (November): 211–23. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22481>.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. n.d.
- Rahman, Ulfiani, Idham, Mujizatullah, Abu Muslim, and Muh Subai. 2021. "A Portrait of Religious Education in the Indonesia_Malaysia Border Area (Case of Sungai Limau Village, Central Sebatik District Nunukan Regency, North Kalimantan)." *Ilkogretim Online- Elementary Education Online*, 1–10.
- Rohman, Dudung Abdul. 2018a. "Implementasi Kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Dalam Menyatukan Mekanisme Kerja Dan Pelaporan Kinerjanya." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 12, no. 33: 138–51.
- — —. 2018b. "Kompetensi Penyuluh Agama Dalam Menyusun Naskah Materi Hak Asasi Manusia

- (HAM)." *Penamas Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 31, Nomor: 347-60.
- Syuhudi, Muh. Irfan. 2020. "Dinamika Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Di Muara Tami Jayapura." *Al-Qalam* 26, no. November (November): 281-94.
- Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama. 2020. *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.



BAB III

PEREMPUAN DAN BUDAYA





PERDAMAIAAN DAN KAJIAN ANTAR BUDAYA

Irid Rachman Agoes, Ph.D

Majelis Pendidikan, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek telah lama melakukan serangkaian proses diskusi kelompok yang panjang, untuk melakukan identifikasi dan analisis akar permasalahan bangsa yang sangat mendasar dan diperlukan untuk mengokohkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Proses diskusi panjang Majelis Pendidikan tersebut di atas melibatkan berbagai narasumber yang kompeten dan *resourceful* yang mencakup representasi ilmuwan dan budayawan penting keenam rumpun ilmu Indonesia itu.

Selain itu, proses diskusi kelompok juga diselenggarakan dengan berbagai narasumber dari perwakilan pemerintah (kementerian yang terkait), dunia usaha, dunia industri, serta tokoh-tokoh pendidikan dan masyarakat lainnya. Proses diskusi juga ditargetkan untuk mengidentifikasi ulang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang unggul dan khas, yaitu Pancasila, yang dapat mencirikan secara spesifik capaian pendidikan lulusan perguruan tinggi Indonesia, sekaligus yang dapat dijadikan *selling point* maupun *branding* baru insan seutuhnya sesuai tuntutan UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, dan UU No. 12 Tahun 2012, yang tidak hanya unik dan

berbeda, namun juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan konsep-konsep capaian pendidikan bangsa lain. Nilai-nilai luhur itu, akan ditonjolkan sebagai keunikan kompetensi berupa aksentuasi karakter yang unik di dalam capaian pendidikan perguruan tinggi Indonesia. Cita-cita ini bahkan ingin selanjutnya memperkenalkan kemasan karakter dalam rumusan kompetensi yang khas dengan tema “*Value-based Mindset in Higher Education*”.

Diskusi yang melibatkan ilmuwan Pendidikan Karakter kelas dunia dan akan digunakan sebagai media awal pengenalan citra baru bagaimana pendidikan karakter di Indonesia memiliki penonjolan sisi-sisi keunggulan (*competitive edges*), dan menjadi ciri spesifik keunggulan capaian pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi Indonesia.

Capaian pendidikan baru yang akan dicitrakan, memiliki ciri dan warna khas, yang tidak hanya terefleksi dalam bentuk kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan sikap (*knowledge, skills dan attitudes*), namun ditambah dengan spiritualitas dan nilai-nilai kehidupan yang mudah dikenali (*distinctive*). Sehingga, rumusan konsep inti dasar capaian pendidikan tinggi di Indonesia akan mencakup elemen-elemen kompetensi: *knowledges, skills, attitudes + spirituality dan life values* (spiritualitas dan nilai-nilai kehidupan). Dua konsep karakter terakhir itu, spiritualitas dan nilai-nilai kehidupan, akan menjadi penciri capaian pendidikan tinggi Indonesia yang *distinct* dibandingkan dengan capaian pendidikan tinggi negara lain. Searah dengan cita-cita pembangunan SDM Unggul Indonesia, dua elemen karakter yang akan ditonjolkan, yaitu spiritualitas (*spirituality*) dan nilai-nilai kehidupan (*life values*), akan diinfusikan pada enam rumpun Ilmu sesuai UU Nomor 12 tahun 2012, yaitu pada Rumpun Ilmu: Agama, sosial, Humaniora, Alam, Formal, dan Terapan. Kelima elemen

kompetensi (*knowledges, skills, attitudes + spirituality dan life values*) secara komprehensif.

Empat puluh karakter penciri dan elemen dicoba diinsiniasi atau diintimasiakan. Bentuk yang lebih rinci dapat ditera terdiri atas: Inisiatif, Mandiri, Rasa ingin tahu, Gotong royong, Musyawarah, Menghargai, Harmonis, Pikiran Terbuka, Spiritual, Bermartabat(*dignity*), Kehormatan (*honorable*), Menghormati orang lain (*respect to others*), Mentalitas berlimpah (*abundance mentality*), Saintifik, Percaya dan dapat dipercaya (*Trust & trustworthiness*), Lembut/perduli/ berbagi (*kindness, caring, sharing*), Komunikatif, Aktif-kreatif, Empati/simpati, Integritas, Toleransi aktif, Etis, Berdaya-saing (*competitiveness*), Patriotisme, Mengambil risiko (*risk taking*), Rajin/Tekun (*diligent*), Jujur, Adil (*just*), Rendah hati, Kerja keras, Tangguh, Komitmen, Gairah/Welas-asih (*passionate/ compassionate*), Bersyukur (*grateful*), Adil (*fairness*), Tegas (*assertiveness*), Amanah, Tahan (*resilience*), Daya tahan (*endurance*), dan Tekun/Tabah (*Persistence/perseverance*). Jika akan ditambah dengan karakteristik kepemimpinan masa depan, jumlah karakter bisa bertambah lebih banyak lagi.

Contoh permasalahan buruk Indonesia, pada tahun 2016 Kompas memaparkan keprihatinan terjadinya pungli di banyak tempat penyelenggara anggaran dan tertera bahwa ada 360 dari total 624 Kepala Daerah yang korupsi, dan Kemenkumham mencatat sekitar 70 persen Kepala Daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi.. Ternyata, saat ini, tahun 2023, masalah korupsi di Indonesia justru bertambah parah.

“... kejujuran dan integritas menjadi barang langka dan tidak melekat pada banyak pejabat dan pemimpin bangsa ini. Semakin terasa bahwa bangsa ini masih harus menemukan jati diri, berjuang untuk menunjukkan dirinya sebagai warga

negara yang jujur dan berintegritas tinggi, beriman, berakhlak mulia serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Kalau kita cari di internet (Wikipedia) jelas dikatakan pula bahwa:

“Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antarnegara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.”

Selanjutnya dikatakan bahwa “Ada lima alasan mengapa korupsi di Indonesia sulit dibrantas, yaitu: (1) Korupsi Sudah Mengakar dan menjadi Budaya, (2) Tidak ada hukuman yang mematikan, (3) Korupsi bukan perkara individu tapi sistem yang kuat, (4) Tidak ada upaya kuat dari Pemerintah untuk memberantas korupsi, dan (5) Korupsi bukanlah akhir dari segalanya. Hidup masih berjalan (apalagi beberapa koruptor masih bisa hidup enak dan nyaman di penjara). Ini tidak dapat dibiarkan dan harus dicari dengan tindakan yang membuat Jera.

Sedih sekali bahwa bangsa Indonesia yang memerdekakan diri dari penjajah melalui perjuangan berdarah-darah, setelah 78 tahun merdeka, justru tetap dijajah oleh kelemahan bangsa sendiri. Negara yang sebenarnya dikaruniai berbagai berkah keindahan dan kekayaan, tetap terpuruk di negara yang belum sejahtera. Jarak kaya miskin yang jauh dan mayoritas rakyatnya hidup sangat terbatas.

Akar permasalahan yang menhunjam kuat ke bawah adalah kurangnya pemahaman sejak dini tentang apa artinya memiliki karakter dan sifat mulia, dan kurang sadar atas pentingnya pengelolaan bangsa dan negara yang bersih dan

tertata. Berbagai tulisan dan upaya pendidikan karakter gagal membawa pencerahan. Daftar nilai-nilai baik Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas 2010 dan Penguatan Pendidikan Karakter Kemendikbud 2016 sudah lengkap, yakni :

• Religius	• Nasionalis
• Jujur	• Menghargai
• Toleran	• Ramah
• Disiplin	• Komunikatif
• Kerja keras	• Cinta damai
• Kreatif	• Suka memberi
• Mandiri	• Peduli lingkungan
• Demokratis	• Bertanggung jawab
• Ingin Tahu	• Punya empati sosial
• Bersemangat	

Namun semua tetap merupakan daftar hafalan yang tidak dihayati, dan tidak merupakan karakter yang *internalized*.

Dengan 40 sifat baik yang diajarkan melalui mata kuliah, diharapkan dapat deretan karakter yang terinternalisasi dengan lebih baik.

• Inisiatif	• Saintifik	• Jujur
• Mandiri	• Percaya dan dapat dipercaya	• Adil (<i>just</i>)
• Rasa ingin tahu	• Lembut/perduli/ murah hati	• Rendah hati
• Gotong royong	• Komunikatif	• Kerja keras
• Musyawarah	• Aktif-kreatif	• Tangguh
• Menghargai	• Empati/ simpati	• Gairah/Welas-asih
• Harmonis	• Integritas	• Komitmen
• Pikiran terbuka	• Toleransi aktif	• Bersyukur
• Spiritual	• Etis	• Adil (<i>fairness</i>)

- Bermartabat/
dignified
dignity
- Kehormatan
(*honorable*)
- Menghormati
orang lain
- Mentalitas
berlimpah
- Berdaya-saing
- Patriotisme
- Mengambil
risiko
- Rajin/Tekun
- Tega
- Amanah
- Tahan
- Daya tahan
- Tekun/Tabah

Aspek yang sangat berbeda adalah lingkup spiritualitas seperti tampak dalam gambar di bawah ini, yang menyertai internalisasi semua karakter ini. Untuk Kajian Antarbudaya, spiritualitas itulah yang membuat mata kuliah menjadi spesifik Indonesia. Penting untuk membentengi kehidupan pribadi, antarpribadi, antar budaya dan global dengan ruh spiritualisme dan *life values* berdasarkan kepercayaan pada Ilahi. Terutama di dunia global yang cenderung *Godless*.

Inti karakter adalah kemampuan mengelola diri. Definisi lugas karakter sebenarnya sederhana. Menurut J.C. Watts (2004), karakter adalah “... *is doing the right thing when nobody's looking.*” Sedangkan pendidikan karakter menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D (2004) adalah:

“..... is the deliberate effort to help people understand, care about and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.”

Pendidikan Antarbudaya maupun pelatihan di perusahaan multinasional diarahkan pada proses internalisasi, melalui *experiential learning, home stay, exchanges* dan *internship*

baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan telah diajarkan di dalam dan di luar negeri selama lebih dari 30 tahun untuk memahami beragam kepemimpinan dan perbedaan budaya antara Indonesia dan budaya asal mereka.

Di Universitas, mata kuliah 'Kajian Antarbudaya' diberikan di berbagai program studi 'Kajian Asing' maupun program studi 'Kepemimpinan'. Mata kuliah ini dianggap sangat *relevant* dan membantu mahasiswa memahami perbedaan budaya antara Indonesia dan budaya yang dipelajari dan mengingat kembali nilai-nilai luhur dalam budaya Indonesia yang telah mulai luntur.

Dalam dunia pendidikan, permasalahan umum siswa dan mahasiswa Indonesia adalah:

- Kurang mandiri, kurang percaya diri, kurang kritis, kurang motivasi dan bahasa Inggris lemah walaupun belajar minimal 6 tahun di SMP dan SMA.
- Hubungan antar kelompok, antarbudaya dan antarbangsa yang lemah dan mudah memicu konflik.

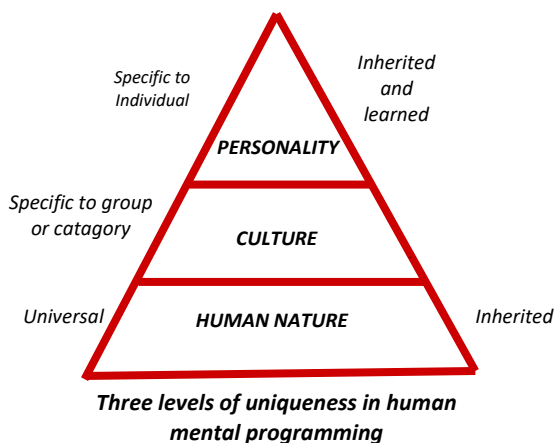
Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, perbedaan budaya antar masyarakat tersebut dapat menjadi **kekuatan** sekaligus **kelemahan**. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan mempelajari 'Kajian Antarbudaya' (*Intercultural Studies*).

Tahapan pribadi dimulai dengan memahami apa budaya itu dan bagaimana seorang individu sangat dipengaruhi budayanya.



Tahapan Pribadi

- Pemahaman atas konsep diri. Kenal pribadinya, kenal yang disukainya dan kenal apa yang diinginkan.
- Berpikir kritis.
- Percaya diri dan mempunyai motivasi yang kuat.
- Hidup dihayati melalui nilai-nilai (*values*) sehingga dapat menahan godaan buruk dari luar maupun dari dalam dirinya.



Geert Hofstede

Keunikan pribadi yang dipengaruhi motivasi dan pilihannya (*Vision* dan *mission*-nya, membuatnya mudah memilih pekerjaan yang sesuai baginya). *What you love, what you are good at, what you can be paid for and what the world needs* diketahuinya dengan jelas, sehingga dia tidak lagi bergantung pada apa yang hanya dikehendaki orang tuanya atau lingkungannya. Banyak sarjana Indonesia di usia 40 tahun masih belum sadar apa yang diinginkannya. Penyebabnya adalah budaya hirarkis.



Tahapan Antar pribadi

- Berempati dan bersimpati
- Fleksibel dan terampil sosial
- Terampil komunikasi
- Memiliki komitmen pada masyarakat dengan sikap kooperatif dan saling menghargai

INDIVIDUALSM INDEX VALUES (IDV) FOR 50 COUNTRIES AND 3 REGIONS

Country or Region	IDV Score	Country or Region	IDV Score	Country or Region	IDV Score
USA	91	Sweden	71	Israel	54

¹ Dreamstime: Toronto Star Graphic.

Australia	90	France	71	Spain	51
Great Britain	89	Ireland (Rep.of)	70	India	48
Canada	80	Norway	69	Japan	46
Netherlands	80	Switzerland	68	Argentina	46
New Zealand	79	Germany	67	Iran	41
Italy	76	South Africa	65	Jamaica	39
Belgium	75	Finland	63	Brazil	38
Denmark	74	Austria	55	Arab Countries	38
Turkey	37	Hong Kong	25	Costa Rica	15
Uruguay	37	Chile	23	Pakistan	14
Greece	35	West Africa	20	Indonesia	14
Philippines	32	Singapore	20	Columbia	13
Mexico	30	Thailand	20	Venezuela	12
East Africa	27	Salvador	19	Panama	11
Yugoslavia	27	South Korea	18	Equador	8
Portugal	27	Taiwan	17	Guatemala	6
Malaysia	26	Peru	16		

Note: The study was conducted in the 1980s to all IBM Employees worldwide. However, the study was revisited in 2010 and still reflected similar results.

Geert Hofstede²

Individualism Index orang Indonesia 14, jadi termasuk orang yang kolektif dimana kebahagiaan dirinya sangat dipengaruhi oleh kelompoknya. Karena itu, untuk menggapai apa yang diinginkannya dia harus belajar mengenal betul apa yang diinginkannya, sehingga tidak mengambil keputusan yang salah dan merugikan dirinya sendiri. Kepercayaan dirinya

² Hofstede, Geert. (1991). *Cultures and organizations. Software of the mind*. London : Mc Graw-Hill

harus terus menerus dipupuk dan dia tidak harus menjadi seorang individualis. Dengan komunikasi dan toleransi yang baik, dia tetap akan dapat mempertahankan keinginannya dengan cara yang bermartabat dan disetujui orang sekitar.

Tahapan Antar budaya

- Berteman dengan orang lain yang berbeda suku, ras, agama dan golongan.
- Mengenal dan mempelajari budaya lain.
- *Multicultural languages* (pandai mengolah bahasa komunikasi di kalangan *internal* maupun kalangan di luar kelompok).

Karena kolektivismenya tinggi, sering sekali orang Indonesia senang bergaul dengan kelompoknya sendiri. Sangat tersinggung kalau ada yang menyakitkan hati kelompoknya, mudah sekali seseorang membela kelompok tanpa mendengar argumentasi kelompok yang berbeda.

Kita juga mudah sekali berseteru, bahkan berseteru secara berkelompok (tawuran). Kesalahan satu orang menjadi kesalahan kelompok.

Segi positifnya, kita sangat senang berkumpul, ber-reuni dengan teman teman dari masa kecil, masa remaja, maupun masa sekarang, jauh melebihi bangsa-bangsa lain.

Pilihan politik seseorang bisa menjadi awal permusuhan. Secara kolektif pula, permusuhannya berjangka waktu panjang dan sulit dimaafkan. Dengan memahami segi ini, kita dapat menjadi seorang kolektivis, tetapi masih dapat berteman dengan orang yang berbeda. Kita bisa adil (*fair*) dan adil (*just*).

Kajian Antarbudaya dapat menjadi jawaban yang mudah dalam menghadapi masalah antarbudaya yang rumit.

Indonesia akan berubah menjadi tempat yang ramah terhadap kesulitan yang dihadapi banyak orang.

Tahapan Global

- Tertarik terhadap persoalan dunia dan perdamaian global.
- Memahami perjuangan kesejahteraan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan dunia.
- Sadar akan pentingnya kontribusi pribadi maupun bangsa terhadap permasalahan dunia.³

Dengan keberhasilan pemahaman antarbudaya yang diajarkan melalui mata kuliah atau pelatihan di manapun, Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar, bermartabat dan dipercaya untuk memimpin perjuangan demi perdamaian dunia. In syaa Allah.

Al Hujurat ayat 13

Yā ayyuhan-nāsu innā khalaqnākum min zakariw wa unṣā wa ja'alnākum syu'ubaw wa qabā'ila lita'ārafu, inna akramakum 'indallāhi atqākum, innallāha 'alīmun khabīr.

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.

³ Intercultural Link. (2014). What Every AFSer should know about intercultural learning.



GENERASI Z INDONESIA DAN PROBLEM MULTIKULTURALISME

Dr. Wahidah R. Bulan, M.Si.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia dengan tidak kurang dari 1.340 kelompok etnis (BPS, 2010). Kondisi tersebut bukan hal mudah terlebih karena terdapat sejumlah etnis dominan yang memberi pengaruh kuat. Etnis dimaksud yang pertama adalah suku Jawa (40,22 %) yang tidak hanya tinggal di pulau Jawa saja tetapi juga di seluruh wilayah di Indonesia, Suku Sunda (15,5%), Suku Batak (3,58%), Suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi (3,22%) yang berjumlah sekitar 15 suku, Suku Betawi (2,88%) yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Minangkabau (2,73%), Bugis (2,69), Madura (3,03%), Melayu (2,27%) dan suku yang tinggal di Sumatera Selatan (2,16%). Etnis lain diluar etnis tersebut prosentasenya jauh lebih kecil, meski jumlah etnisnya jauh lebih banyak.

Secara matematis hal tersebut rentan menimbulkan friksi. Misalnya saja bahwa kelompok etnis dominan akan mendominasi karena sangat *powerful*, sementara kelompok etnis lainnya rentan untuk tereksklusi atau tersub-ordinasi karena posisinya yang lebih *powerless*. Akibatnya konflik dapat

muncul karena kelompok yang lebih rentan mencoba mempertahankan statusnya agar tidak tersubordinasi oleh kelompok dominan sebagaimana disebutkan dalam teori subordinasi maupun teori konflik secara umum, yang menyebutkan bahwa ketimpangan atau ketidaksetaraan menjadi penyebab terjadinya konflik (Zuldin, 2019; Ritzer, 2008).

Meski berbagai konflik berlatar belakang etnis terjadi di Indonesia (yang cukup tajam terjadi pada pemilu tahun 2015 dan lebih tajam lagi pada pemilu 2019 yang mengakibatkan masyarakat Indonesia seolah terbelah dua menjadi kelompok cebong dan kampret), akan tetapi hal tersebut relatif masih terkontrol dan dapat diperbaiki serta tidak menunjukkan adanya indikasi rusak atau hancurnya persatuan di Indonesia pada saat ini. Selain itu konflik tersebut dinilai tidak disebabkan faktor etnis akan tetapi lebih karena kepentingan politik yang menjadikan etnis dan agama sebagai alat provokasi. Karena hal itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meski terdapat keragaman etnis yang luar biasa dan dengan proporsi yang tidak setara, pemerintah Indonesia relatif dapat menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat yang kondisi etnisnya sangat beragam.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang secara de jure di sebutkan di dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika), tampaknya cukup efektif menjaga relasi antar etnik di Indonesia yang sangat beragam. Hal itu diperkuat dengan sila ke tiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga spirit persatuan di atas realitas keragaman yang ada. Bhinneka Tunggal Ika dapat dikatakan menjadi cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan

unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan (Rizal Mustansyir, 1995).

Persoalannya kemudian bahwa Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan Sila-sila di dalam Pancasila (termasuk sila Persatuan Indonesia), apakah masih cukup efektif bekerja pada Generasi Millennial dan secara lebih spesifik pada generasi Z yang rentang waktu usianya dengan masa awal kemerdekaan sudah sedemikian jauh (lebih dari 50 tahun)? Terlebih lagi karena pengaruh globalisasi dan modernisasi yang sangat kuat pada generasi tersebut serta adanya karakter tertentu pada Gen Z seperti bereaksi dengan cepat terhadap nilai-nilai baru, cenderung memikirkan hidup untuk jangka waktu sekarang serta tidak terlalu berpikir panjang, berorientasi hidup untuk mendapatkan kesenangan, memiliki perhatian yang mudah terbagi, kurang memiliki keinginan untuk memahami sesuatu serta kurang memahami konsekuensi.

Ditemukannya berbagai fenomena yang menunjukkan lemahnya toleransi Gen Z seperti studi yang dilakukan oleh KOMNAS HAM yang menyebutkan bahwa terjadi penguatan intoleransi pada generasi muda terpelajar di Indonesia yang berusia antara 15-35 tahun (masuk kategori Gen Z) dari 20% menjadi lebih dari 50% (KOMNAS HAM Indonesia, 2012-2018) serta kecenderungan Gen Z untuk mudah terprovokasi melakukan tindakan yang tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga keluarga bahkan masyarakat dan bangsa; semakin menguatkan kekhawatiran tentang hal tersebut.

Dalam konteks itulah tulisan ini disajikan, yaitu memaparkan problem multikulturalisme di Indonesia terutama pada Gen Z dan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Problem Multikulturalisme di Indonesia Khususnya pada Generasi Z

Bagaimana problem multikulturalisme di Indonesia terjadi khususnya pada Gen Z? Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan konflik etnis muncul ke permukaan menjadi konflik terbuka di Indonesia. Pertama karena terjadinya perubahan konstelasi politik. Karena hal itu mengapa paska reformasi konflik etnis cenderung meningkat. Adanya iklim kebebasan yang berkembang luas dan menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi, menjadi ladang subur bagi sejumlah pihak yang selama ini dibungkam untuk mengungkapkan keresahan mereka, termasuk pada kelompok etnis. Tidak meratanya pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, disadari atau tidak, mengakibatkan terpolarisasi masyarakat berdasarkan kelompok etnik. Terlebih karena di Indonesia kondisi etnik yang ada tidaklah sama dan setara (dalam radius persebaran dan jumlah orang, pen). Hal lain, karena bagi masyarakat Indonesia, identitas etnik masih menjadi faktor penting dalam kehidupan masyarakat, yang terutama terjadi pada masyarakat perdesaan. (Wirutomo, 2012).

Terkait hal tersebut, Wirutomo menyebut ada empat faktor penyebab konflik antar etnis di Indonesia. *Pertama*, karena dilema keamanan kelompok etnik, yaitu karena adanya segala usaha untuk meningkatkan keamanan oleh suatu kelompok yang menimbulkan reaksi balik dari kelompok lain yang merasa menjadi kurang aman akibat tindakan tersebut. *Kedua*, karena perlindungan status. Pada kasus ini konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok mencoba mempertahankan status karena munculnya ketakutan bahwa nilai-nilai dan cara hidup serta institusi kelompok etnis tersebut bisa menjadi sub-ordinat kelompok etnis lain. *Ketiga*, karena ambisi hegemoni; yaitu suatu kelompok yang berkuasa tidak cukup puas dengan bertahannya nilai-nilai budaya dan

institusi mereka. Ada keinginan untuk menjadi kelompok dominan sehingga mereka menuntut adanya perlakuan tertentu dari pemerintah. *Keempat*, karena adanya aspirasi kaum elit tertentu untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan isu-isu ketakutan, kebencian, dan ambisi kelompok etnik. Konflik tersebut dapat terjadi antara etnis lokal dengan etnis pendatang, seperti terjadi di Sambas Kalimantan Barat, yaitu konflik antar etnik Dayak dan Madura; konflik etnis di Ambon Maluku (diawali dengan pertikaian antara dua individu berbeda etnis kemudian meluas menjadi konflik antar pendatang dan penduduk lokal) bahkan kemudian bergeser menjadi konflik bernuansa agama, yaitu antara meraka yang beragama Islam (Salam) dengan Protestan dan Katolik (Sarani).

Selain itu menurut Usman Pelly (1999) konflik antar etnis juga banyak terjadi akibat kondisi sosial ekonomi yang senjang atau karena problem politik. Faktor tersebut bahkan lebih mendominasi dibanding karena perbedaan keyakinan; adapun agama, etnik, ras, dan suku lebih sering diperalat oleh aktor sebagai alat legitimasi untuk menyulut dan memperlebar konflik. Kerusuhan etnik karena kesenjangan sosial dan ekonomi ini menurutnya merupakan protes budaya, yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar. Terkait konflik antara kelompok etnis berbeda agama, umumnya mengakibatkan dampak yang lebih buruk dibanding konflik etnis semata, karena lebih cepat meluas. Sebut saja misalnya kasus yang terjadi di Ambon, Maluku pada 1998-2000; di Poso, Sulawesi Tengah mulai tahun 1998 hingga 2001; di Tolikara, Papua pada 2015; dan di Singkil, Aceh pada pertengahan Oktober 2015. (Harahap, 2018).

Lalu bagaimana dengan Generasi Z, apa problem multikulturalisme yang terjadi pada generasi yang berusia

antara 11 sampai dengan 26 tahun tersebut? Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya problem multikultural pada generasi Z yang di Indonesia jumlahnya cukup mendominasi, yaitu mencapai 27,94% atau tak kurang dari 60 juta orang dari total penduduk Indonesia (BPS, Februari 2023)? Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270,20 juta jiwa.

Problem multikulturalisme pada Generasi Z di Indonesia umumnya dipicu oleh tingkat penggunaan internet yang cukup tinggi. Hal itu dapat dimengerti karena Generasi Z Indonesia merupakan *Digital Native*, yaitu mereka yang sudah berinteraksi dengan dunia digital sejak usia yang sangat dini, dengan jumlah konsumsi internet cukup tinggi yaitu lebih dari 6 jam internet per hari atau sudah masuk pada kategori kecanduan (Laporan Survei Status Literasi Digital di Indonesia 2022). Selain itu, meski kecakapan teknis menggunakan internet (keterampilan digital), relatif baik pada Gen Z, akan tetapi tidak pada aspek lain dari empat pilar literasi digital (etika, budaya, dan keamanan). Akibatnya mereka cenderung mudah diperdaya bahkan terjebak dalam *cybercrime*, sebagaimana dilansir pada suatu hasil survei yang dilakukan perusahaan keamanan internet, *Symantec* di 24 negara pada awal tahun 2011. Dari 20.000 responden yang diteliti, mereka yang berusia antara 18-32 tahun (sebagian besar diantaranya adalah generasi Z) sebagai yang paling rentan menjadi korban *cybercrime*.

Selain menjadi korban *cybercrime*, mereka juga bertendensi mudah mempercayai berita bohong/hoax maupun informasi-informasi provokatif dan bahkan dengan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan keluarga bahkan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara seperti melakukan tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sebagai contoh pasangan muda suami istri yang melakukan aksi bom bunuh

diri di pintu masuk Gereja Katedral, Makassar (Maret 2021); merupakan generasi Z yang direkrut untuk bergabung dengan Jama'ah Anshorud Daulah (JAD), kelompok yang sering melakukan aksi bom bunuh diri. Keduanya kemudian berhasil diyakinkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri dengan dalih jihad membela agama. Kasus penembakan di Mabes Polri, pelaku yang berinisial ZA yang kemudian tewas dilumpuhkan polisi, juga merupakan Gen Z (berusia 25 tahun pada saat kejadian, Maret 2021). Selain itu pelaku juga teridentifikasi berafiliasi ke ISIS. Kasus sebelumnya, bom bunuh diri ditiga tempat di Surabaya juga melibatkan Gen Z (2 orang anak) dan orang tua mereka juga masuk usia Gen Z.

Seorang peneliti terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar, dalam wawancara dengan BBC sesaat setelah peristiwa pemboman di depan Gereja Katedral Makasar bahwa beberapa tahun belakangan ini kelompok terorisme semisal Jama'ah Anshorud Daulah (JAD) kerap mengincar anak-anak muda (Gen Z). Uniknya, anak muda yang mereka incar bukan dari pesantren, akan tetapi lebih kepada pemuda/remaja pengguna internet. Ia mengatakan, "...yang direkrut kebanyakan anak muda, milenial baru (Gen Z, pen), yang dianggap masih bersih tanpa ada pengaruh NU atau Muhammadiyah. Mereka-mereka yang cenderung kosong secara keagamaan, kering secara spiritual. Lebih lanjut ia mengatakan, "Kebanyakan mereka (pihak yang merekrut, pen) menggunakan media sosial. Mereka membahas tentang jihad dan makna mati syahid supaya bisa masuk surga. Mereka tawarkan *shortcut to heaven*, jalan pintas ke surga,"

Mengapa Generasi Z mudah diprovokasi oleh para radikalisme untuk bergabung? Di antaranya karena kecenderungan Generasi Z yang minim batasan (*boundary-less generation*) sebagaimana diungkap Ryan Jenkins (2017) dalam artikelnya berjudul *Four Reasons Generation Z will be the Most Different*

Generation. Generasi Z cenderung memiliki preferensi yang bersifat global. Meski di satu sisi ini merupakan hal yang positif, disisi lain mereka cenderung untuk tidak terlalu peduli soal pentingnya batasan-batasan teritorial dalam berbagai aspek (sosial, politik, budaya). Mereka rentan untuk mudah menerima isu global dan bergabung dengan institusi global sehingga sangat mudah untuk disusupi oleh gerakan-gerakan politik global yang bermuara pada isu-isu radikalisme dan terorisme. Generasi Z Indonesia saat ini, suka atau tidak suka, menjadi sasaran tembak kelompok-kelompok radikal dan para jihadis. Dalam bentuk yang agak *soft*, mereka rentan untuk terjebak pada isu-isu intoleransi, tangga pertama sebelum akhirnya mereka terjebak menjadi radikal bahkan teroris. Intoleransi tersebut dapat terjadi dalam aspek peribadatan, pergaulan, maupun dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi.

Upaya Kemendikbudristek Mengatasi Problem Multikulturalisme Pada Generasi Z dari Segmen Pelajar di Indonesia

Apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai problem multikulturalisme yang muncul pada generasi muda, khususnya pelajar (termasuk pada Generasi Z) di Indonesia? Hal pertama adalah dengan mensosialisasikannya secara masif Tiga Dosa Besar Pendidikan. Nadiem Makariem (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) mendefinisikan tiga dosa besar tersebut adalah *bullying*, intoleransi, dan pelecehan seksual. Ketiga perbuatan tersebut (termasuk intoleransi), cukup lama dibiarkan hingga mengeras dan berkembang luas. Sosialisasi dilakukan guna menyamakan persepsi tentang mengapa sikap intoleransi dapat berkembang luas di Indonesia (terutama di lingkungan

pendidikan). Dimulai dengan sosialisasi kepada para pendidik, kegiatan kemudian berlanjut kepada *multi stakeholder* dan pada tahap berikutnya kepada para pelajar Indonesia mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (Generasi Z). Dengan cara tersebut tiga persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan dapat dipahami sebagai masalah serius oleh semua pihak mulai dari penyelenggara pendidikan hingga ke peserta didik.

Langkah selanjutnya dilakukan dengan mengembangkan Program Profil Pelajar Pancasila. Program ini merupakan perwujudan salah satu program Presiden Jokowi (Nawacita, sembilan keinginan/cita-cita Jokowi untuk menjadikan Indonesia lebih baik); yaitu program yang disampaikan Jokowi pada saat kampanye periode kedua kepemimpinannya. Karena itu mengapa program Profil Pelajar Pancasila dijadikan sebagai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Program Profil Pelajar Pancasila didisain sebagai program pendidikan karakter, merupakan pengembangan lebih lanjut Program Pendidikan Karakter yang sebelumnya pernah ada (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, yang lebih menekankan pada filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, yakni olah hati (etika), olah pikir (literasi), olah karsa (estetika), dan olah raga (kinestetik). Sedangkan program Profil Pelajar Pancasila menggunakan metode pengajaran *project learning*, yaitu siswa dipersiapkan untuk mampu mengembangkan suatu program/proyek sebagai bentuk kontribusi mereka dalam memecahkan permasalahan yang ada (di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga).

Terdapat sembilan isu dalam pelaksanaan program Profil Pelajar Pancasila yang secara umum merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Program dimaksud didefinisikan sebagai perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama; yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif. Salah satu ciri yang paling dekat dengan isu multikulturalisme adalah berkebinekaan global, yang diterjemahkan sebagai berikut: Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

Adapun terjemahan untuk ciri-ciri lainnya adalah sebagai berikut:

- a. **Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia:** Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak

kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

- b. **Bergotong royong:** Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.
- c. **Mandiri:** Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.
- d. **Bernalar kritis:** Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil Keputusan.
- e. **Kreatif:** Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.



Gambar 1: *Profil Pelajar Pancasila*

Upaya berikut yang dilakukan oleh Kemendikbudristek sebagaimana diungkap Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam acara Peluncuran Aksi Moderasi Beragama, yaitu dengan menyiapkan Kurikulum Moderasi Beragama yang sudah dimulai sejak tahun 2021 disusun bersama Kementerian Agama. Terakait hal itu Nadiem mengatakan, moderasi beragama sangat penting diajarkan guna mengatasi berkembangnya intoleransi beragama yang merupakan salah satu dari tiga dosa besar pendidikan di Indonesia.

Kurikulum dimaksud pada tahap awal disisipkan dalam kurikulum Program Sekolah Penggerak, yaitu program Kemendikbud untuk mengakselerasi sekolah negeri/swasta agar dapat bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju. Program sekolah penggerak sendiri tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai jenjang. Program sekolah penggerak di tingkat PAUD terdapat 343 sekolah, SD 1.116 sekolah, SMP 574, SLB 85 sekolah dan jenjang SMA sebanyak 382 sekolah; yang

pendampingannya dilakukan selama 3 tahun ajaran. Setelah itu, sekolah baru benar-benar melanjutkan transformasi secara mandiri. Materi moderasi beragama rencananya akan diuji cobakan kepada 2.500 sekolah penggerak, yang setiap tahunnya akan terus berkembang. Konten moderasi beragama juga akan diberikan kepada para calon guru penggerak pada Program Guru Penggerak Kemendikbud Ristek, yang diharapkan dapat mencetak kader kepala sekolah serta pengawas sekolah yang lebih berkualitas.

Penutup

Permasalahan intoleransi dan rendahnya nasionalisme menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada generasi Z. Terkait hal tersebut pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan permasalahan dengan melaksanakan program Profil Pelajar Pancasila, program pendidikan karakter yang ditempatkan sebagai program prioritas nasional. Dalam upaya mewujudkan hasil yang baik, ditetapkan metode pengajaran yang tidak biasa, yaitu melalui pengerjaan proyek sebagai ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran. Selain itu sejumlah tenaga profesional direkrut untuk pendampingan Pelaksanaan program selain bentuk-bentuk intervensi lainnya. Meski berbagai upaya telah disiapkan, upaya penyelesaian permasalahan berkembangnya sikap intoleransi bahkan radikalisme dan terorisme di kalangan Gen Z tidaklah mudah serta memerlukan waktu yang panjang dan tindak lanjut yang konsisten.

Daftar Pustaka

Alqadarie Syarief I. (2000). *Laporan Akhir Hasil Penelitian Pertikaian antar Komunitas Madura Kalimantan Barat dengan Dayak 1996/97 dan antara Komunitas Madura*

- Sambas dengan Melayu Sambas Tahun 1998/1999 di Kalimantan Barat*, Kerjasama Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Jakarta-dengan Fisipol Untan-Pontianak, Tentang kerusuhan di Maluku dijelaskan oleh John Pieris, *Tragedi Maluku: Sebuah Krisis Peradaban*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Harahap, Suheri, 2018, *Konflik Etnis dan Agama di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/kegiatan-kegiatan-pendidikan-karakter-2>
- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-1728498/siapa-paling-rentan-jadi-korban-cyber-crime>
- <https://katadata.co.id/dinihariyanti/infografik/624152e15e3fe/potret-penggunaan-internet-di-indonesia>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56547431>
- https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers
- I Nyoman Pursika. 2009. *Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhineka Tunggal Ika"*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hal 15 – 20.
- Zuldin, Muhammad, *Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik*, Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. Temali: *Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
- Munandar Sulaeman, 2003, *Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya (Kajian Kerusuhan 1966 dan Pasca Kerusuhan 1997-2001)*, Disertasi Program Doktor Dalam Sosiologi Universitas Indonesia, 2003.

- Pelly, Usman, 1999. *Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*. Jurnal Antropologi Indonesia No. 58, 1999.
- Wirutomo, Paulus. 2008. *Menggagas Indonesia Masa Depan?*, Makalah yang dipresentasikan dalam Dies Natalis UI, 2012.



PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM PENINGKATAN KUALITAS UMAT

Dr. Syifa Fauzia

Majelis Taklim umumnya lahir dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagai lembaga pembelajaran non formal, majelis taklim lahir dan berkembang dengan kemampuannya sendiri. Tanpa banyak menggantungkan diri pada kemampuan pihak lain. Di Indonesia, majelis taklim banyak memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas pendidikan non formal di Indonesia, khususnya umat muslim (Faruq, 2020). Majelis taklim pun menjadi lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pendidikan agama hingga tumbuh menjamur di berbagai tempat dan diselenggarakan oleh berbagai kalangan. Lahirnya banyak majelis taklim menunjukkan betapa pentingnya dakwah dan pendidikan keagamaan di masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, majelis taklim bukan hanya tempat untuk menghabiskan waktu menjadi lebih bermanfaat, namun juga sebagai kebutuhan rohani dan pendalaman akidah bagi masyarakat muslim. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud sebagaimana dikutip oleh Hamdanah (2017), majelis taklim atau pengajian, memiliki peranan penting dalam menegakkan

amar makruf nahi mungkar di masyarakat, yaitu sebagai pilar-pilar utama tarbiyah Islamiyah.

Pada awal perkembangan dakwah Islam di Nusantara, pengajian memiliki karakteristik yang sederhana, baik menyangkut metode pembelajaran, materi yang dikerjakan, maupun jenis kegiatan. Pengajian pada mulanya dilakukan dan diajarkan oleh seorang alim yang berguru atau menuntut ilmu ke Makkah, Madinah dan kawasan timur tengah lainnya. Materi pengajiannya meliputi ilmu dasar agama dan pemahaman dasar tentang Islam, serta pembinaan akhlak yang berguna dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ismail (2018) melihat bahwa ada lima fungsi yang dimiliki oleh majelis taklim, yang harus dijalankan dengan baik. *Pertama*, berfungsi sebagai tempat pengembangan ilmu Islam dan melakukan pembelajaran yang berisikan tentang al-Qur'an dan as-Sunnah, juga nasihat para ulama. *Kedua*, majelis taklim menjadi tempat pengembangan SDM untuk mendorong lahirnya masyarakat yang paham ilmu dan ibadah yang dilakukan. *Ketiga*, tempat bertanya dan memahami lebih dalam tentang Islam, yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. *Keempat*, tempat mengembangkan dan mengamalkan budaya Islami di tengah maraknya budaya asing yang masuk dalam kehidupan di masyarakat. *Kelima*, tempat pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat Islam agar dapat menggerakkan ekonomi umat.

Seiring berjalannya waktu, majelis taklim kian menjamur di masyarakat. Di kisaran tahun 1950an, majelis taklim mulai banyak diisi oleh kaum ibu dan perempuan, yang berkeinginan agar menyediakan sarana dan wadah tempat belajar yang tadinya didominasi oleh kaum pria. Banyak ulama dan guru di masjid dan mushola menganggap bahwa akan sangat lebih baik dan bermanfaat bagi para kaum ibu ini dapat juga belajar dan duduk di majelis ilmu sehingga waktunya tidak terbuang sia-sia.

Hingga sekarang ini, majelis taklim pun diikuti berbagai komponen masyarakat, tua maupun muda, dan bahkan menjadi tempat perluasan peran perempuan di masyarakat. Disinilah, pengembangan majelis taklim menjadi lebih luas, dan terbuka, bukan hanya sebagai tempat belajar untuk diri pribadi, namun memberikan kebermanfaatan luas yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari program program kerja dan tujuan didirikannya Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di tahun 1981 oleh Prof.Dr. Hj. Tutty Alawiyah, yang hingga akhirnya menjadi organisasi independen berbasis majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia.

Latar Belakang BKMT dan Peningkatan kualitas pengurus, anggota dan masyarakat

Pada dekade 1970-an, majelis taklim mulai menjamur di masyarakat sebagai wadah bagi kaum perempuan mengenal Islam lebih dalam. Pada tahun 1971, Tutty Alawiyah yang pada kala itu dikenal sebagai ustazah di majelis-majelis taklim membentuk Persatuan Muballighat Ustazat (PMU) yang bertujuan sebagai wahana memperkuat eksistensi dan kesatuan para muballigh pada saat itu. Sepuluh tahun kemudian, teretus keinginan Tutty Alawiyah untuk mewadahi keseluruhan majelis taklim yang diajarnya bersama kawan-kawannya untuk digabungkan dalam suatu wadah. Kala itu Tutty merasa, akan ada banyak hal yang lebih bisa dilakukan bila majelis majelis taklim ini memiliki satu wadah bersama. Majelis-majelis taklim dirasa akan makin bermanfaat apabila ada payung yang menaungi.

Akhirnya pada tanggal 1 Januari 1981 didirikanlah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) atas kesepakatan 700 lebih majelis taklim yang datang kala itu.

Pendirian BKMT adalah sebuah jawaban atas kebutuhan terhadap adanya dakwah yang sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mendorong masyarakat Islam menuju kualitas khairu ummah. Dan tentunya, salah satu tujuan utama BKMT adalah untuk mendorong perempuan agar mau belajar, menuntut ilmu, mengembangkan potensinya, meningkatkan keberadaannya yang masih tertinggal, hingga memiliki kehidupan yang berkualitas, tidak hanya dalam urusan domestik, namun juga dalam sector-sektor publik dalam mendorong kemajuan bangsa. Disinilah BKMT berperan, tidak hanya menjadi organisasi yang bergerak dalam dakwah dan pendidikan saja, namun dapat meluaskan perannya mencakupi berbagai bidang.

Pada kurang lebih 10 tahun pendiriannya, BKMT menjadi organisasi yang diminati masyarakat terutama mereka yang berkecimpung di majelis taklim. Bahkan BKMT semakin berkembang di luar Pulau Jawa dan hingga saat ini, 32 tahun usianya, BKMT telah berdiri kokoh di 34 propinsi, 400 lebih kabupaten dan ribuan kecamatan di seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota diperkirakan hampir 1 juta orang. Keberadaan BKMT pun menjadi wadah peningkatan kualitas masyarakat lewat program-program unggulannya, antara lain, Bidang Dakwah, yaitu memberikan pendalaman keIslaman hingga ke pelosok pelosok, memberikan pendampingan terhadap mualaf, dan mencetak kader-kader mubalighat dan daiyah yang mumpuni dan berkualitas. Dalam Bidang Pendidikan, BKMT giat memberantas buta huruf terutama bacaan al-Quran, mengadakan berbagai workshop dan pelatihan peningkatan kapasitas agar para muslimah dapat mencurahkan kemampuan mereka agar lebih bermanfaat. Dalam bidang Ekonomi, BKMT bekerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun ekonomi umat, dengan mendirikan BKMT Mart, ada juga pembinaan UMKM dan memberikan peluang bagi anggota

BKMT mendapatkan modal kerja. Dalam Bidang sosial, BKMT membuktikan kepeduliannya terhadap tidak hanya saudara sebangsa setanah air yang tertimpa musibah, tetapi juga bencana internasional yang melanda umat manusia. Penistaan zionis Israel terhadap Palestina, kekejaman yang terjadi terhadap muslim Rohingya, kekeringan di Afrika, dan masih banyak lagi bantuan bencana yang diberikan. Dalam Bidang kesehatan, BKMT turut serta memberikan sosialisasi dan pencegahan berbagai penyakit, termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dirasakan dampaknya oleh kita semua. Dan juga tentunya dalam bidang Politik dan Hukum, BKMT telah menciptakan banyak kader-kader berkualitas menjadi pimpinan daerah, maupun anggota legislatif, dan menunjukkan kualitas kepemimpinannya di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa lewat BKMT, majelis taklim menjadi lebih produktif, adaptif, bermanfaat dan terbukti menjadi sarana peningkatan kualitas tidak hanya bagi anggotanya namun juga bagi umat.

Tantangan Muslimah dan peran BKMT

Era globalisasi, keterbukaan berpikir dan majunya perkembangan teknologi yang kita rasakan tentunya membawa harapan besar bagi kita umat Islam, namun juga kekhawatiran. Apabila kita tidak siap mengantisipasi, tentunya dampak negatif globalisasi menjadi kerusakan moral dan akhlak. Namun apabila kita dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh umat Islam dan bangsa, tentunya era globalisasi menjadi era penuh harapan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Melaksanakan peran yang baik pada era globalisasi maupun untuk menangkal dampak negatif yang dibawanya, kaum muslimin memerlukan kesiapan mental dan ketangguhan sosial budaya dan ekonomi. Dan yang paling penting, diperlukan pembinaan ketaqwaan dan keimanan serta keilmuan yang terpadu agar umat Islam dan khususnya muslimah menjadi satu kekuatan dasyat untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan berkualitas. Masa depan majelis taklim dan BKMT dalam meningkatkan peran dan manfaatnya, memerlukan peningkatan kesadaran berorganisasi, keikhlasan yang tinggi, mau bergerak bermanfaat dan tentunya kekompakan dan saling bergandengan tangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ali 'Imran Ayat 103 :

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Yang artinya :

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Dari sinilah majelis taklim dan BKMT sebagai lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat selalu berkiprah untuk kepentingan masyarakat dan menjadi sarana dakwah meningkatkan kualitas umat terutama di Indonesia yang akan selalu

memelihara peranan dan relevansinya sesuai dengan kebutuhan zaman agar kualitas masyarakat dari segi pendidikan dan keimanannya dapat meningkat dan memberikan kebermanfaatan yang luas.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sarbini. (2010), Internalisasi Nilai KeIslaman Melalui Majelis Taklim, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(16), 53–69. AD/ART, Pub. L. No. 06/TAP/Muktamar-Viii/BKMT/III/2016 (2016).
- Faruq, U. Al., (2020), *Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No.29 Tahun 2019)*, Al-Murabbi, 5(2), 41-59.
- Hamdanah., (2017), Motivasi Ibu-Ibu Mengikuti Pengajian di Badan Kontak majelis taklim (BKMT) Kota Palangka Raya, *Jurnal Transformatif*, 1 (2), 118.
- Henny Yusnita., (2018), Sejarah dan Gerakan Dakwah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 2(1), 22–32. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i1.883>
- Ismail, Ilyas. (ed). (2018). Prof. Tutty Alawiyah A.S., M.A., *The Inspiring Woman Penggagas dan Penggerak Keadilan Gender*, Jakarta: Pusat Studi Betawi UIA.
- Nugraha, F., (2020), Majlis Taklim dan Aktualisasi Visi Islam Transformatif, *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 42–60.



EFEKTIFITAS BIAYA PENYENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH)

Dr. Nursanita, SE., Ak., M.E., CSRA

Ibadah Haji

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peningkatan keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, dari kondisi tahun ke tahun masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai calon jamaah haji setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada berita pers yang diterbitkan Kemenag.go.id terdapat peningkatan kouta haji asal Indonesia sebesar 221.000 kouta yang semula hanya 100.051 kouta pada tahun 2022. Dimana hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Agama KMA No.189 Tahun 2023 Tentang Kouta Haji Indonesia Tahun 1444H/2023M. Peningkatan ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah dalam mewadahi dan memfasilitasi keinginan umat muslim di Indonesia dalam menjalankan ibadah haji. Sehingga masyarakat yang tertunda keberangkatannya pada tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 dapat diakomodir pada ibadah haji tahun 1444H/2023M (Kemenag.go.id, 2023).

Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan sejumlah dana. Dana yang dikeluarkan jamaah haji tersebut dikenal dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Pada awal

tahun 2023 ini seiring dengan peningkatan kouta jemaah haji Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia mengusulkan peningkatan BPIH untuk ibadah haji tahun 1444 H/ 2023 M sebesar Rp. 69,2 juta yang sebelumnya pada ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M hanya sebesar Rp. 39,9 juta. Kenaikan ini merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah dalam menyesuaikan biaya-biaya akomodasi yang meningkat baik itu biaya penginapan ataupun transportasi pesawat (Kemenag.go.id, 2023). Walaupun demikian, usulan kenaikan ibadah haji ini masih mendapatkan protes dari sejumlah pihak karena terkesan memberatkan masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji.

Efisiensi

Efisiensi menurut Horngren dalam Ayu *et al* (2022) menjelaskan yang dimaksud efisiensi adalah suatu perbandingan yang terjadi antara jumlah masukan atau suatu input yang digunakan dalam mencapai suatu tingkat keluaran tertentu atau output yang optimal. Hal ini berarti sesuatu aktifitas dikatakan efisien ketika apa yang dikorbankan telah memperoleh suatu hasil yang maksimal. Sehingga efisiensi selalu berhubungan dengan bahan baku, biaya, dan lain sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai input serta persediaan barang jadi, fasilitas, jasa, ataupun hal lainnya yang dapat dikategorikan sebagai output. Efisiensi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu efisiensi teknis (*technical efficiency*) dan efisiensi alokatif (*allocative efficiency*). Efisiensi teknis merupakan suatu cerminan dari kemampuan unit dalam memaksimalkan output yang diperoleh dengan input tertentu. Efisiensi alokatif merupakan suatu cerminan dari kemampuan sebuah unit dalam mengelola input yang digunakan dengan optimal pada tingkat harga yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi atau dikatakan efisien secara alokatif ketika organisasi tersebut mampu menggunakan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki sebagai input secara optimal dengan harga yang telah disesuaikan atau direncanakan sebelumnya. Pembahasan efisien biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berfokus pada efisiensi alokatif menganalisa pengeluaran biaya jamaah haji dengan membandingkannya dengan perencanaan BPIH. Penulis mengusulkan beberapa cara untuk mengefisienkan biaya yang akan ditanggung jamaah haji.

Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah sejumlah dana yang wajib dibayarkan oleh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji. Ibadah haji sebagai aktifitas keagamaan yang dilakukan hanya pada waktu dan tempat tertentu saja membuat ibadah ini menjadi suatu ibadah yang spesial. Di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mendefinisikan Ibadah haji sebagai rukum Islam kelima yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang telah memiliki kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah mampu secara fisik yaitu dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya. Selain itu, kemampuan lainnya yaitu secara finansial dalam arti telah membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan ibadah haji tersebut. Haji merupakan prosesi tahunan yang melibatkan umat Islam untuk datang ke Kota Makkah dan Madinah sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan akan perintah Allah SWT yang tercantum sebagai rukun Islam ke lima (Aziz *et al.*, 2022). Sarwat dalam Setyawan *et al* (2020) menjelaskan haji berasal dari kata *al hajj* yang berarti tujuan sehingga haji dapat didefinisikan

sebagai suatu bentuk perjalanan yang dilakukan oleh umat Islam ke kota Makkah untuk menjalankan segala bentuk manasik haji ditempat dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini ibadah haji terdapat beberapa kegiatan ibadah lainnya yang menjadi syarat sah atau sempurnanya haji.

BPIH terdiri dari dua komponen biaya di dalamnya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klasifikasi ini tidak sama dengan klasifikasi dalam ilmu akuntansi, namun lebih disematkan pada klasifikasi biaya yang terkait langsung dengan jamaah haji (biaya langsung) dan biaya yang tidak terkait langsung dengan jamaah haji. Dua komponen tersebut adalah sebagai berikut:

A. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Biaya langsung adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh calon jamaah haji. Dimana biaya ini menjadi setoran bagi jamaah haji untuk bisa mendapatkan kouta ibadah haji. Biaya langsung ini kemudian dialokasikan kepada beberapa post biaya di antaranya yaitu:

- a. Biaya penerbangan jamaah
 - 1) Transportasi pesawat keberangkatan
 - 2) Transportasi pesawat kepulangan
- b. Biaya operasional jamaah haji selama di Arab Saudi
 - 1) *Maslahah Ammah*
 - 2) Akomodasi
 - 3) Konsumsi jamaah haji
 - 4) *Naqobah*
 - 5) *Living cost* jamaah haji
 - 6) Pengadaan tambahan obat-obatan
- c. Biaya operasional jamaah haji selama di dalam negeri
 - 1) Konsumsi jamaah haji dan petugas di embarkasi
 - 2) Belanja barang
 - 3) Kegiatan penyelenggaraan haji
 - 4) *Airport tax*

Biaya Langsung Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jamaah nya:

Sumber: kemenag.go.id/, data diolah (2023)

Tabel 1. Proporsi Bipih dan Komponen Biaya langsung 2022 dengan 2019		
Komponen Biaya langsung per- Jamaah	2022	2019
Biaya Penerbangan	Rp.29.500.000	Rp.30.425.061
biaya hidup (<i>living cost</i>)	Rp.5.770.005	Rp.5.680.005
akomodasi jemaah di Makkah	Rp.2.692.669	Rp.15.602.038
akomodasi jemaah di Madinah	Rp.769.334	Rp. 4.357.878
Visa.	Rp.1.154.001	-
Bipih Rata-Rata (Setoran Jamaah)	Rp.39.886.009	Rp.35.581.396
Total Biaya langsung (riil)	Rp.98.570.000	Rp.56.064.982
% Bipih yang membiayai Biaya langsung	40%	63%
% Biaya Penerbangan terhadap Bipih	74%	86%
% Biaya Penerbangan terhadap Biaya langsung	30%	54%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa perubahan baik kenaikan maupun penurunan di setiap komponen dari proporsi Bipih dan komponen Biaya langsung terdiri dari biaya penerbangan mengalami penurunan ditahun 2022 sebesar Rp. 925.061 (3,14%), lalu biaya hidup mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar Rp. 90.000 (1,56%). Akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah mengalami penurunan yang amat tinggi yakni sebesar Rp. 12.909.369 dan Rp. 3.588.544, hal tersebut dikarenakan biaya dibebankan ke biaya tidak langsung yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022.

Presentase dalam biaya perjalanan rata-rata (Bipih) yang membiayai Biaya langsung mengalami penurunan yang

sebelumnya di tahun 2019 sebesar 63% turun menjadi 40%, sedangkan perolehan presentase biaya penerbangan terhadap biaya perjalanan rata-rata (Bipih) mengalami penurunan yang sebelumnya 86% menjadi 74%, sedangkan perolehan presentase biaya penerbangan terhadap biaya langsung mengalami penurunan yang sebelumnya 54% menjadi 30%. Hal ini dikarenakan biaya dibebankan ke biaya tidak langsung yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022.

1. Biaya Tidak Langsung (*Indirect Cost*)

Biaya tidak langsung adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari nilai manfaat atas dana umat yang telah dikembangkan dalam bentuk investasi. Biaya tidak langsung ini kemudian dialokasikan kepada beberapa post biaya di antaranya yaitu:

- a. Biaya penerbangan petugas
 - 1) Transportasi pesawat keberangkatan
 - 2) Transportasi pesawat kepulangan
- b. Biaya operasional petugas selama di Arab Saudi
 - 1) Insentif petugas haji
 - 2) Alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya
 - 3) Biaya perjalanan petugas di kota Jeddah, Makkah, dan Madinah
 - 4) Sewa kantor, wisma, dan pemeliharaan
 - 5) Konsumsi petugas haji
 - 6) Pemeliharaan kendaraan operasional
 - 7) Biaya penunjang operasional lainnya seperti pakaian petugas dll
- c. Biaya operasional petugas selama di dalam negeri
 - 1) Belanja operasional pusat
 - 2) Belanja operasional embarkasi
 - 3) Belanja operasional propinsi
 - 4) Biaya administrasi bank

Berikut ini merupakan penjabaran biaya tidak langsung:

Tabel 2.

Proporsi Rata-Rata Biaya Tidak Langsung pada BPIH per Jamaah

Sumber: kemenag.go.id/, data diolah (2023)

Keterangan:	2022	2019
Biaya Langsung:	Rp 39.886.009	Rp.35.581.390
Biaya Tidak Langsung: - Biaya protokol kesehatan - biaya bersumber dari nilai manfaat keuangan haji	Rp 808.618,80 Rp 41.053.216,24	Rp.49.148.982
Total BPIH	Rp. 81.747.844,04	Rp.69.160.000
% Biaya Langsung Terhadap Total BPIH	48.79%	51.45%
Biaya Tidak Langsung % Biaya Langsung Terhadap Total BPIH	51.21%	48.55%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa perubahan baik kenaikan Komponen Biaya tidak langsung terdiri dari bersumber dari nilai manfaat keuangan haji mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar Rp. 49.148.982 menjadi Rp. 41.053.216,24 namun ada penambahan biaya protokol kesehatan sebesar Rp. 808.618,80, lalu total biaya perjalanan ibadah haji mengalami kenaikan yang sebelumnya di tahun 2019 memperoleh sebesar Rp. 69.160.000 menjadi Rp. 81.747.844,04 di tahun 2022. Komponen ketiga dari BPIH adalah biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar dengan presentase 50% atau Rp. 41.053.216,24 per jemaah. Jadi total BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp. 81.747.844,04 per jemaah.

Selain permasalahan penetapan BPIH, terdapat juga ketidakjelasan batasan komponen biaya langsung dan biaya

tidak langsung dalam PMA No. 13 Tahun 2016 tentang Pembiayaan dan Penggunaan BPIH. Pasal 4 dan Pasal 5 pada PMA tersebut mengatur pembagian biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dipergunakan untuk dapat membiayai pelayanan yang bersifat langsung kepada jemaah, yaitu untuk penerbangan haji dari Indonesia ke Saudi Arabia Pergi dan Pulang (PP), sewa pemondokan di Makkah, sewa pemondokan di Madinah serta biaya hidup (*living cost*) di Saudi Arabia. Sedangkan biaya tidak langsung dipergunakan untuk membiayai operasional, pelayanan Jemaah di Indonesia dan Saudi Arabia yang bersifat tidak langsung serta dana cadangan.

Dalam tujuh tahun terakhir, biaya haji terus mengalami kenaikan. Ada beberapa komponen yang turut memengaruhi biaya haji. Seperti ongkos akomodasi, kurs rupiah terhadap dolar, penerbangan, layanan konsumsi serta layanan di Mina dan Arafah serta protokol kesehatan. Sebagai gambaran saja biaya riil yang ditanggung calon jemaah haji pada 2015 antara Rp. 30 juta – Rp. 38,2 juta dan saat ini mencapai Rp. 39.886.009.

Ada alasan lain kenapa jemaah haji Indonesia sampai harus tinggal di tanah suci sampai 42 hari. Padahal, prosesi haji sendiri sebenarnya hanya memakan waktu sekitar 1 minggu. Sisanya jemaah akan melakukan ibadah umrah, ziarah, atau Arbain di Masjid Nabawi, Madinah. Menurut Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), lamanya masa tinggal jemaah haji di tanah suci berpengaruh terhadap besaran ongkos haji.

Terkait akomodasi, pemerintah menyewa hotel lebih awal untuk jemaah haji reguler di luar peak season. Harga sewa hotelnya bisa lebih murah. Dari sisi transportasi sulitnya mendapatkan *slot time* penerbangan membuat jemaah haji reguler harus antri untuk pulang; namun saat ini dengan semakin luasnya bandara yang ada di Jeddah dan Madinah

ditambah adanya transportasi kereta cepat yang menghubungkan Jeddah Madinah dan Makkah maka mempersingkat lamanya jamaah haji di tanah suci bukanlah hal yang tidak mungkin. Ibadah haji hanya terjadi selama 5 hari yaitu wuquf di Arofah, Mina pada 9 Zulhijjah, mengambil batu Muzdalifah, 10 Zulhijjah melempar jumroh, memotong hewab qurban pada tanggal 11 sd 13 Zulhijjah (hari tasyrik). Ibadah akhir jamaah haji melakukan sa'i Masjidil Haram dan tawaf wada' di Makkah saat jamaah meninggalkan Makkah dan pulang ke tanah air masing-masing.

Menganalisis efisiensi Bipih tahun 2022 menunjukkan efisiensi walau pada total biaya secara persentasi tidak jauh berbeda. Kenaikan adalah wajar mengingat adanya faktor inflasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jika kita analisis secara lebih rinci seyogyanya biaya yang ditanggung jamaah haji hanyanyalah biaya langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 39.886.009. Mengurangi waktu berada di tanah suci sebanyak 50% dari waktu selama ini menjadi hanya 20 hari akan mengefisienkan biaya langsung jamaah Bipih.

Terkait biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan ritual jamaah haji jamaah, maka biaya protokol Kesehatan yang diperkirakan hanya 20% dari total biaya tidak langsung, seyogyanya dibebankan kepada APBN bukan ke jemaah. Di sisi lain efisiensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Pemerintah Arab Saudi sebagai pelayan tamu Allah swt di tanah suci. Saudi Arabia menyediakan pelayan Kesehatan di banyak RS di tanah suci secara gratis. Kementerian Kesehatan RI dapat mengirim banyak dokter Indonesia dengan catatan mereka menguasai bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagaimana disyaratkan Kerajaan Saudi Arabia. Ini akan memudahkan jamaah Indoensia yang sakit berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia yang menjadi kendala jamaah selama ini. Biaya tidak langsung ini seyogyanya di

tanggung negara melalui APBN mengingat mayoritas masyarakat Indonesia 85% adalah muslim. Kesadaran untuk merealisasikan hal ini menjadi tanggungjawab DPR RI yang dibiayai dengan uang pajak rakyat yang 85% mereka adalah muslim yang akan menunaikan jamaah haji ke tanah suci.

Meskipun sudah membagi komponen pembiayaan penyelenggaraan haji menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung, tetapi kemudian dalam Pasal 6 dan Pasal 7, regulasi tersebut mengaburkan kembali pembagian komponen tersebut dengan tetap membuka peluang dapat dibiayainya komponen biaya langsung ke dalam biaya tidak langsung dengan nama “subsidi/selisih penerbangan dan subsidi/selisih akomodasi”. Biaya tidak langsung tahun 2019 telah meleburkan penerbitan visa serta pensubsidian biaya penerbangan, akomodasi Makkah dan akomodasi Madinah. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya pembebanan biaya langsung ke biaya tidak langsung sehingga menjadikan beban subsidi untuk penyelenggaraan ibadah haji semakin besar dan berpotensi tidak dapat didanai dari nilai manfaat tahun berjalan.

Proses pelaporan Bipih sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 sebagai penanggungjawab pelaksana Penyelenggara Ibadah Haji akan menyampaikan pelaporan kepada DPR RI khususnya ke komisi 8. Seyogyanya laporan pertanggungjawaban ini diaudit sebelum diserahkan ke rakyat melalui komisi 8. Namun lambatnya dan lama pelaporan keuangan Bipih menyebabkan lamanya pengakuan akuntabilitas Bipih. Sementara proses penyewaan akomodasi penginapan di tanah suci untuk ibadah haji tahun depan, dilakukan pada saat bersamaan. Di sisi lain proses pengesahan anggaran Bipih untuk tahun depan belum disahkan. Akibatnya pembahasan akuntabilitas laporan penyelenggaraan ibadah haji tidak tuntas dan rekomendasi

tidak diberlakukan untuk tahun depan serta tidak berdampak terhadap ajuan laporan Bipih tahun depan.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis terhadap biaya langsung dapat dijabarkan yaitu terjadi kenaikan dengan presentase mencapai 10,79% atau senilai Rp. 4.303.613 dari biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2022 yang diakibatkan naiknya Komponen Biaya langsung per-jamaah yang ditetapkan dalam PMA 13/2016. Terdapat beberapa perubahan baik kenaikan maupun penurunan di setiap komponen dari Proporsi Bipih dan Komponen Biaya langsung terdiri dari biaya penerbangan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 3,14%, lalu biaya hidup mengalami kenaikan 1,56%. akomodasi jamaah di Makkah dan Madinah mengalami penurunan yang amat tinggi yakni sebesar Rp. 12.909.369. Dan Rp. 3.588.544. Presentase dalam biaya perjalanan rata-rata (Bipih) yang membiayai Biaya langsung mengalami penurunan menjadi 40% di tahun 2022 dan perolehan presentase biaya penerbangan terhadap biaya perjalanan rata-rata (Bipih) mengalami penurunan menjadi 74%, sedangkan perolehan presentase biaya penerbangan terhadap biaya langsung mengalami penurunan yang sebelumnya 54% menjadi 30%.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa perubahan baik kenaikan Komponen Biaya tidak langsung terdiri dari bersumber dari nilai manfaat keuangan haji mengalami penurunan ditahun 2019 sebesar Rp. 49.148.982 menjadi Rp. 41.053.216,24 namun ada penambahan biaya protokol kesehatan sebesar Rp. 808.618,80, lalu total biaya perjalanan ibadah haji mengalami kenaikan yang sebelumnya di tahun 2019 memperoleh sebesar Rp. 69.160.000 menjadi Rp. 81.747.844,04 di tahun 2022. Dapat disimpulkan telah terjadinya

efisiensi yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan biaya dibebankan kepada jamaah ke biaya tidak langsung, seperti protokol kesehatan dan biaya lainnya dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 sehingga menjadikan beban subsidi untuk penyelenggaraan ibadah haji semakin besar yang didanai dari nilai manfaat tahun berjalan atau bahkan wajar dibebankan ke APBN mengingat penduduk muslim 85% dari penduduk Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asaduzzaman, M., & Virtanen, P. (2016). *Governance Theories and Models*. In: Farazmand, A. (Eds) *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer, Cham. Diakses pada 13 Maret 2023. Tersedia di https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2612-1.
- Aziz, R.M., Fitriyani, T., Soeharjoto., Nugroho, L., & Parenreng, S.M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6 (1), 722-732. Diakses pada 5 Maret 2023. Tersedia di <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>.
- CNBC Indonesia. (2023). Perbandingan Biaya Haji RI dan Malaysia, Siapa Paling Mahal? Diakses pada 28 Februari 2023 dari [CNBCIndonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214071039-4-413525/perbandingan-biaya-haji-ri-dan-malaysia-siapa-paling-mahal). Tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214071039-4-413525/perbandingan-biaya-haji-ri-dan-malaysia-siapa-paling-mahal>.
- Dirwan, A. (2013). Analisis Tata Kelola (Manajemen) Pemerintah dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 4 (1), 1-15.

- Diakses pada 13 Maret 2023. Tersedia di <https://doi.org/10.35968/jh.v4i1.83>.
- Irawan, S.A. (2020). Pengukuran Efisiensi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *AKURASI: Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 2 (1), 43-56. Diakses pada 15 Maret 2023. Tersedia di <https://doi.org/10.33827/akurasi2020.vol2.iss1.art57>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Kemenag Terbitkan KMA Kouta Haji 1444H, Ini Sebaran dan Ketentuannya. Diakses pada 28 Februari 2023 dari [Kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id). Tersedia di <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-terbitkan-kma-kuota-haji-1444-h-ini-sebaran-dan-ketentuannya-oz24wm>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Menaker Kewajaran Biaya Haji 2023. Diakses pada 28 Februari 2023 dari [Kemenag.go.id](https://www.kemenag.go.id). Tersedia di <https://www.kemenag.go.id/opini/menakar-kewajaran-biaya-haji-2023-7p8v7l>.
- Kompas. (2022). Haji 2022: 1 Juta Jemaah Datangi Tanah Suci Makkah, Terbanyak Selama Pandemi Covid. Diakses pada 28 Februari 2023 dari [Kompas.com](https://www.kompas.com). Tersedia di <https://www.kompas.com/global/read/2022/07/04/200700970/haji-2022-1-juta-jemaah-datangi-tanah-suci-Makkah-terbanyak-selama?page=all>.
- Maryani. (2021). Esensi Ibadah dan Pengamalannya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Literasiologi*, 7 (1), 1-15. Diakses pada 7 Maret 2023. Tersedia di <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i1.273>.

- Nasution, N., & Faruqi, F. (2019). The Rough Way to Management Hajj Fund (BPKH) Implementing Governance of Hajj Fund. *Atlantis Press: International Conference on Accounting Research Advance in Economics, Business, and Management Research volume 73*. Diakses pada 15 Maret 2023. Tersedia di <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.33>.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Diakses pada 28 Februari 2023. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38717>.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Diakses pada 15 Maret 2023. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39044/uu-no-13-tahun-2008>.
- Pikiran Rakyat. (2023). IPHI Jabar Protes Ongkos Haji Rp69 Juta: Jangan Terlalu Tinggi, Tekan Seminimal Mungkin Agar Terjangkau. Diakses pada 28 Februari 2023 dari [Pikiran-Rakyat.com](https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016139424/iphijabarprotesongkoshajirp69juta-janganterlulutinggi-tekanseminimalmungkinagarterjangkau). Tersedia di <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016139424/iphijabarprotesongkoshajirp69juta-janganterlulutinggi-tekanseminimalmungkinagarterjangkau>.
- Rarasati, I. (2022). Analisis Empiris Potensi Resiko Investasi Dana Haji melalui Sukuk Dana Haji Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3), 2571-2581. Diakses pada 15 Maret 2023. Tersedia di <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5876>.
- Setyawan, A., Wibowo, H., & Kamal, M. (2020). Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment

- Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8 (1), 5-27. Diakses pada 5 Maret 2023. Tersedia di <https://doi.org/10.46899/jeps.v8i1.173>.
- Simbolon, N.N., & Imsar, I. (2021). Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 (3), 8929-8936. Diakses pada 8 Maret 2023. Tersedia di <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2401>.
- Winda, S., Indriastuti, D., Ferdinand, J., & Suprayogi. Optimalisasi Penetapan Embarkasi Haji Dalam Rangka Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6 (2), 225-244. Diakses pada 5 Maret 2023. Tersedia di <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/710>.



BIODIVERSITAS DALAM EKOSISTEM KEBANGSAAN DAN BUDAYA INDONESIA

Dr. Retno Lestari, M.Si.

Pendahuluan

Bismillahirrohmannirrohiim,

Kebudayaan yang saya pahami merupakan bentuk dari perilaku bersama yang membentuk suatu pola atas dasar konstruksi kognitif dan interaksi yang terjadi. Kebudayaan terjadi dalam proses waktu yang panjang dan di perjalanannya dapat mengalami perubahan karena adanya pemahaman yang dipelajari dalam proses bersosialisasi. Kebudayaan memiliki peran strategis bagi sebuah bangsa. Sebagai satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbagai macam budaya yang terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadi kekayaan Indonesia. Selain itu budaya juga menjadi alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam tulisan kali ini, saya menyampaikan buah fikiran tentang kebangsaan dan budaya dalam bingkai bidang yang menjadi *background* saya, yaitu Biologi.

Biodiversity is the variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat, a high level of which is usually considered to be important and desirable (Swingland, 2001).

Isi

Tulisan ini diawali dengan pengertian biodiversitas atau keanekaragaman hayati.

Biodiversity is the variety of plant and animal life in the world or in a particular habitat, a high level of which is usually considered to be important and desirable (Swingland, 2001).

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di Bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Kata keanekaragaman memang untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda, yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur ataupun jumlah. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan dan sifat-sifat lainnya (Naeem *et al.*, 2016).

Berikutnya adalah pengertian ekosistem.

An ecosystem is a geographic area where plants, animals, and other organisms, as well as weather and landscape, work together to form a bubble of life. Ecosystems contain biotic or living parts, as well as abiotic factors, or nonliving parts. Biotic factors include plants, animals, and other organisms (Blew, 1996).

Ekosistem adalah sebuah konsep kawasan, yang di dalamnya terdapat keberagaman, sekaligus interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup mulai yang bersel satu (uniseluler) sampai makhluk hidup bersel banyak (multiseluler) yang dapat dilihat langsung oleh kita (Tsujimoto *et al.*,

2018). Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembapan. Ini semua disebut faktor fisik. Selain faktor fisik, ada faktor kimia, seperti salinitas (kadar garam), tingkat keasaman, dan kandungan mineral (Klanderud *et al.*, 2015). Baik komponen biotik maupun komponen abiotik sangat beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik pun akan penuh dengan variasi pula (Liu *et al.*, 2021).

Indonesia memiliki wilayah luas yang terdiri atas sebagian besar berupa perairan dan sisanya adalah gugusan kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau sampai dengan 17.000 pulau dan garis pantai Indonesia sepanjang 95.181 km yang merupakan garis pantai terpanjang ke-dua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta km², yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Data terkini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 273.879.750 jiwa (BPS, 2023).

Untuk keanekaragaman flora, Indonesia memiliki lebih dari 8.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi (tumbuhan berpembuluh) yang sudah teridentifikasi. Indonesia juga diperkirakan memiliki 86.000 spesies fungi dari 1,5 juta–3 juta fungi dunia (Widyatmoko, 2019). Saat ini baru sekitar 120.000 spesies teridentifikasi. Tercatat pula 1.500 spesies algae, 595 spesies lumut, 2.197 spesies paku-pakuan. Sementara keberagaman fauna Indonesia tercatat 8.157 spesies vertebrata, termasuk sekitar 12% mamalia dunia ada di Indonesia (773 spesies), sekitar 1.666 burung, 1.900 jenis kupu-kupu, dan masih ada ribuan spesies serangga, dan lainnya. Spesies terbanyak terdapat di Kalimantan dan jenis spesies endemik tertinggi terdapat di Papua dan Sulawesi (Setiawan, 2022).

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan dipisahkan oleh perairan membuat karakteristik wilayah satu

dengan wilayah lainnya berbeda. Perbedaan karakteristik wilayah memengaruhi kebudayaan yang berkembang dalam setiap daerah sehingga menghasilkan beragam kebudayaan Indonesia. Indonesia tercatat memiliki 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi (Na'im & Syaputra, 2010).

Keberagaman Indonesia sejalan dengan Surah Al-Hujurat Ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*

Tantangan Kebangsaan dan Budaya Indonesia

Tantangan kebangsaan dan budaya Indonesia salah duanya adalah masalah sosial dan ekonomi. Terjadi kerawanan keretakan hubungan antar bangsa yang dapat menyebabkan perpecahan, yang selanjutnya berujung pada separatism sementara di ujung yang lain represi dan penindasan. Sementara ketidakberdayaan ekonomi, menyebabkan terjadinya banyak konflik sosial, berupa kejahatan, pengangguran, sampai pada generasi yang kurang gizi, kurang pendidikan, dan minim kesehatan.

"Reasons to conflicts cause to contradictions are form our inner choice of different values ..." (Radekop, 2015)

Alasan penyebab konflik berangkat dari pilihan personal pada nilai yang berbeda, nilai yang ditumbuhkan dari perbedaan agama, budaya, dasar pemikiran, kebiasaan, dan lainnya, sehingga perbedaan selalu ada karena merupakan menjadi buah dari keberagaman. Beragam orientasi sudut pandang, berlimpahnya opini yang berkembang dalam menilai masalah atau pencapaian bangsa, melahirkan narasi, kritik, apresiasi yang juga beraneka.

Dalam pendekatan ekosistem, di lingkungan manapun kita di muka bumi ini, maka kita akan menemukan makhluk hidup lain selain kita. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem.

Belajar dari ekosistem alami, yang mampu menciptakan harmoni dan keserasian dari perbedaan. Betapa harmonisnya ekosistem alami, baik yang ada di padang pasir ataupun di lautan, baik yang ada di pesisir ataupun yang ada di puncak gunung. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang berinteraksi dengan komponen abiotik yang berbeda di setiap wilayahnya. Masyarakat yang sama-sama tinggal di suatu provinsi, karena perbedaan tempat tinggal, seperti di pegunungan, rimba, pesisir, atau pulau, akan berevolusi sehingga memiliki budaya dan cara pandang yang berbeda agar tetap harmonis dengan wilayahnya. Ketika habitatnya

sama-sama di pesisir, hanya berbeda antara pesisir berlumpur, pesisir berpasir, dan pesisir berkarang, juga mendorong budaya yang berbeda. Mulai dari makanan yang dimakan, jenis perahu yang dikembangkan, dan seterusnya.

Banyak pelajaran yang dapat diambil dari ekosistem. Salah satunya adalah ketika terjadi ketidakseimbangan maka yang terjadi adalah penurunan kualitas ekosistem bahkan kepunahan. Berikutnya, yang kemudian terjadi adalah ekosistem akan melakukan *self-healing* atau perubahan walaupun dengan pengorbanan komunitas biotik atau abiotiknya. Dalam perjalanan masa, kita mempelajari perubahan ekosistem yang memusnahkan kelompok dinosaurus. Di masa sekarang, perubahan ekosistem juga menumbangkan banyak spesies sehingga menuju kepunahan.

Di tengah keresahan melebarnya kesenjangan sosial, bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh segelintir pihak, dan menguatnya oligarki politik maka Indonesia perlu belajar dari ekosistem alami, yang serasi dan harmonis. Pemerintah negara dan masyarakat wajib hadir dalam melindungi dan menserasikan komponen biotik (seluruh rakyat) dan komponen abiotik (tumpah darah Indonesia), serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (ekosistem). Di negeri yang kita cintai ini tidak semestinya berkembang Darwinisme "*the fittest*", siapa yang kuat dia yang menang dan menguasai. Keseimbangan dan keserasian adalah kunci ekosistem yang berkesinambungan dan menjadi lebih baik.

Gelombang masalah sosial Indonesia dapat diurai dengan pengembangan interaksi timbal balik yang arif, baik dari komponen masyarakat (biotik) dan kekayaan alam (abiotik). Ernest Renan filsuf Prancis di tahun 1882 menulis tentang *Que'est-ce qu'une nation* (apa itu bangsa?), "...bangsa

(*nation*) itu ialah suatu solidaritas besar, yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak, dan bersedia untuk berkorban lagi ... yakni persetujuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*)...". Menurut filsuf Prancis yang banyak mendalami hubungan etnis dengan lingkungannya dan sering menjadi rujukan para pendiri bangsa Indonesia seperti Soekarno, Mr, Soenarjo, dan Mr Mohammad Yamin, menyatakan bahwa "asas kebangsaan (*nasionalitas*) itu berbeda dengan asas ras" (*Renan*, terj. Soenario, 1994).

Indonesia sebagai negara-bangsa (*nation-state*) merupakan jalan tengah atau moderasi dari segala proses dan keberagaman. Sebagaimana komponen ekosistem berinteraksi secara sinergis mencari titik temu yang arif membentuk biosfer yang *sustainable*, harmonis, dan mensejahterakan segenap komponen ekosistem. Menurut Anthony Reid (2018), "Indonesia menjadi titik temu persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia dari berbagai golongan sebagai era baru, yang di era Nusantara berpecah dan menjadi entitas sendiri-sendiri yang tidak mengarah ke persatuan." Para elite bangsa perlu kembali menggali titik temu kemajemukan Indonesia sebagaimana pernah dihasilkan dari jiwa kenegarawanan para pendiri bangsa. Selanjutnya sebagaimana pelajaran dari ekosistem, yaitu setiap ekosistem saling berinteraksi dengan ekosistem lain, Indonesia secara simultan perlu mengajak warga bangsa untuk menjalin solidaritas dan kerjasama dengan bangsa lain di seluruh dunia mewujudkan kolaborasi antar bangsa, mendorong suasana kekeluargaan antar warga dunia, tanpa harus ada penindasan, penjajahan, penguasaan, dan adu domba.

*Persatuan itu bak ekosistem ..
bertebaran mengisi kerenggangan...*

*untuk terapatkan agar tidak berjauhan ...
Bak suara berpantul
mengayuh bersama nada berimbang ...
Menjernihkan pikiran
yang selalu ingin membuih berkelana buana ..
Menikmati harmoni berbagi...
bergantung .. berinteraksi ..*

Bioprospeksi

Keberagaman atau biodiversitas adalah aset dan potensi yang dapat digali dan tidak terbatas. Biodiversitas Indonesia yang sangat kaya sesungguhnya akan mampu menjawab permasalahan ekosistem kebangsaan, terutama dalam tantangan ekonomi dan perubahan budaya.

Pengalaman saya dengan keanekaragaman hayati juga dimulai ketika saya mengambil studi di Prancis. Ada sekian banyak studi yang menjadikan banyak *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) berasal dari satu penggal materi genetika *deoxyribonucleic acid* (DNA) saja yang dapat menjadikan tanaman kita lebih tahan kekeringan, lebih tahan penyakit, dan lebih produktif. Saat itu terbayang oleh saya, bagaimana jika bangsa kita yang memiliki begitu berlimpah potensi genetiknya mampu membuka rahasia *genome* segenap biodiversitas kita (trilyunan DNA)? Betapa percepatan eksponensial kita dalam hal kemajuan pangan, kesehatan, energi, dan lainnya.

Optimalisasi biodiversitas juga bisa dilihat dari produk parfum di Prancis yang terkenal di seantero dunia. Parfum mereka merupakan kombinasi *fragrant* yang berasal dari beragam tanaman, bagian hewan, beragam wangi tanah, dan lainnya. *Fragrant* yang berasal dari biodiversitas menjadi bagian kultur dan budaya tidak saja Perancis, tetapi juga dunia. Biodiversitas juga memberikan pengaruh pada perubahan

budaya. Biodiversitas kopi dunia mendorong budaya ngopi yang berkembang. Terbentuk budaya “ngopi” espresso di pagi hari, cappuccino di siang hari, latte di malam hari, dengan kombinasi kopi arabica, robusta, liberika, dari lima benua.

Pengalaman biodiversitas berikutnya adalah ketika dalam perjalanan waktu saya dan tim banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di beberapa titik wilayah. Dimulai dari ide pemanfaatan limbah gergaji kayu di Desa Banyubiru, Labuan, Banten, kami mendorong program Mikoponik, program budidaya salah satu jamur yang sudah populer dan sebenarnya banyak di alam yaitu jamur tiram putih. Hasilnya, kita dapat memproduksi makanan sehat yang bernilai tinggi dari limbah lokal yang awalnya merisaukan. Setelah digali, kandungan gizi dalam jamur tiram putih memiliki protein rata-rata 3,5–4% dari berat basah, berarti dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan asparagus dan kubis. Jika dihitung berat kering, kandungan proteinnya 19–35%, lebih tinggi dari beras yang hanya 7,3%, gandum 13,2%, dan susu sapi 25,2%. Jamur tiram putih juga mengandung lemak sebanyak 72%. Di dalam jamur tiram putih, terdapat asam lemak tidak jenuh sehingga aman dikonsumsi penderita kelebihan kolesterol (hiperkolesterol) maupun gangguan metabolisme lipid lainnya. Lalu, sekitar 28% pe asam lemak jenuh serta adanya semacam polisakarida kitin di dalamnya dapat menimbulkan rasa khas yang enak (Rahma & Purnomo, 2016).

Kandungan protein yang dimiliki jamur tiram putih dapat dijadikan sebagai sumber protein murah pengganti daging atau sebagai Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI). Jamur tiram putih mengandung beberapa senyawa aktif yang bersifat sebagai imunomodulator untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit (Dewi & Mukti, 2022). Bubur jamur sebagai MPASI bisa berfungsi untuk pencegahan

stunting termasuk anak bertubuh pendek dan cacat karena pertumbuhan yang tidak normal. Budidaya pemanfaatan limbah, turut mengubah budaya masyarakat yang sebelumnya tidak mempedulikan limbah, kini memberikan perhatian lebih terhadap potensi pemanfaatan limbah (budaya mengapresiasi limbah).

Dalam perjalanan program Mikoponik yang juga dikerjakan di beberapa wilayah yang berbeda, berkembang pula berbagai inovasi anak bangsa dalam proses budidayanya, seperti pemanfaatan *Internet of Thing* (IoT) untuk monitoring dan proses budidaya otomatis; pemanfaatan limbah lain untuk media, seperti limbah jagung, jerami, kelapa sawit, limbah industri (limbah kertas, kopi, tepung, dan lainnya); proses budidaya tertutup (kumbung) dan terbuka (*open field – mass production*), beragam teknologi sterilisasi (menggunakan panas dan *non-thermal*), dan lainnya. Sementara di proses hilirisasi terlahir inovasi proses pengolahan dan diversifikasi produk, di antaranya menjadi *nugget*, protein bar, tepung pengganti penyedap masakan, beragam *snacks*, dan kini sedang diujai untuk industri pakan ternak (unggas, sapi, ikan) yang kesulitan mendapatkan bahan baku berupa bahan protein tinggi karena mulai sulitnya swasembada jagung, kedelai, singkong, dan menurunnya luas lahan pertanian yang masif terkonversi menjadi perumahan dan industri. Mikoponik adalah program yang dapat menggunakan tempat di manapun dengan area yang ada, berbasis limbah dan potensi lokal yang ada.

Saat ini kami mengembangkan program Mikoponik dengan mendirikan Pandu Jamur Nusantara yang melakukan proses koleksi dan persiapan bibit, serta nantinya produksi untuk jamur-jamur potensial yang ada di pelosok nusantara dan mancanegara. Koleksi kami sekarang mewakili wilayah-wilayah Sumatera, Jawa, Lombok, dan terus berjalan untuk

mengoptimalkan potensi jamur nusantara. Kami berharap dan yakin, dengan kekayaan biodiversitas jamur nusantara, dapat membantu bangsa kita mengikis dan menjawab persoalan bangsa di bidang pangan, industri, energi, dan lainnya, sekaligus membuat peluang-peluang akselerasi pemberdayaan masyarakat.

Program pengabdian masyarakat yang lain yang kami lakukan adalah program-program pertanian, perikanan, peternakan, dengan memanfaatkan biodiversitas. Program-program tersebut kami rangkum dalam program *biodiversity farming*. Di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi misalnya, kami jadikan model pengembangan desa pesisir (berpasir dan berlumpur). Desa tersebut dibatasi oleh sungai Citarum di satu sisi dan laut Jawa di sisi lainnya. Ada bentang tambak sampai dengan 2.000 Ha dalam satu wilayah desa dan umumnya tidak optimal, tampak dari hunian mereka yang apa adanya dan level pendidikan yang terbatas. Dari pengamatan berikut, ternyata tambak mereka tidak optimal karena keterbatasan teknologi menghadapi polusi dari Citarum dan banjir dari laut. Program yang kemudian dikembangkan adalah mendorong masyarakat untuk melihat potensi biodiversitas dari wilayah mereka. Ternyata potensinya berlimpah, mulai dari potensi budidaya udang dan ikan bandeng, potensi hama budidaya yang dijadikan produk unggulan seperti ikan gabus, belut, kerang-kerangan (moluska), rumput laut (*macro-algae*, *sea-grass*), tanaman *mangrove*, limbah organik kapal-kapal nelayan, dan lainnya.

Kegiatan kami mulai dengan pengembangan Minametriik sebagai solusi teknologi tepat guna mengatasi limbah dan cemaran sungai ke tambak-tambak masyarakat. Hasilnya, yang dahulu masyarakat tidak berani membudidaya udang (vaname dan galah/windu) kemudian terbukti dengan teknologi, para petambak mampu panen tepat pada waktunya. Berikutnya,

dikembangkan pupuk tambak (putam) Minametri, hasilnya mereka dapat panen bandeng usia 3 bulan tanpa harus memberi pakan. Saat ini ada kurang lebih 300 Ha tambak mengikuti program, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan secara *significant* di Pantai Bahagia. Pendekatan *biodiversity farming*, mendorong kami juga membuat model-model budidaya kerang (*mollusca*), mulai dari kerang hijau, kerang dara, kerang bambu, *oyster*, dan pengembangan kerang-kerang lain. Potensi lain yang secara sinergis dikembangkan dalam satu ekosistem-habitat adalah pengembangan budidaya kepiting, belut, cacing *polychaeta*, ikan glodok (lumpur), rumput laut, *mangrove*, wisata, dan lainnya.

Secara umum kegiatan-kegiatan berbasis biodiversitas terus tumbuh. Inovasi yang kemudian lahir selain minametri yang kemudian berkembang menjadi **Minametri** S-1 (pupuk tambak), **Minametri** V-1 (pencegah dampak limbah), Minametri D-1 (obat), juga timbul inovasi *floating lounge*, rumah apung karena rumah masyarakat yang selalu terdampak banjir; **airbamboo**, pengganti bambu dari limbah plastik yang bisa dimanfaatkan sebagai keramba apung, bagang, dan dermaga; **sabun laut**, sentra pengolahan sabun yang dapat digunakan dengan air sadah tinggi; **arboretum mangrove javanica**, kebun botani *mangrove* untuk kawasan konservasi *mangrove*, burung-burung migran, dan lutung Jawa; sementara yang sedang dikembangkan adalah **NanoZon**, teknologi *nano-bubble* dan ozonasi untuk pengolahan air minum; Kawasan Wisata Bahagia; dan lainnya.

Di sektor pertanian, *biodiversity farming*, kami dorong dengan memanfaatkan potensi lokal untuk memproduksi pupuk dan biopestisida murah. Kami mengembangkan pupuk **Biometri**, solusi beragam jenis pupuk dan pestisida alami murah, yang dapat menghemat biaya tanam sampai dengan 50% sekaligus meningkatkan hasil panen sampai dengan 20–

40%. Kondisi tersebut dapat mendorong kemakmuran petani. Beberapa produk yang sudah dikembangkan adalah kopiterra (pupuk dari limbah kopi), mikoterra (pupuk dari limbah jamur), terratea (pupuk dari limbah teh), cocoterra (pupuk dari limbah sawit). Saat ini kami sedang memulai program stasiun pengisian pupuk cair (SPPC) di Sembalun kaki gunung Rinjani, Sumedang, dan Dieng.

Program *biodiversity farming* di ekosistem sawah, kita mendorong petani tidak saja berpikir untuk berasnya, tetapi juga pemanfaatan kawasannya (*oryza business ecosystem*). Selain melakukan efisiensi budidaya padi dengan pengembangan varietas padi yang cocok dengan budaya dan alam di lokasi, juga dikembangkan budidaya mulai dari mina-padi, belut, kerang-kerangan, pemanfaatan merang padi menjadi bagian pakan ternak dan budidaya jamur, pemanfaatan sekam menjadi asap cair, media jamur, sampai dengan partisi bangunan (*oryzablock*). Program *biodiversity* juga mendorong perubahan budaya yang positif, konstruktif, inovatif, dan peduli lingkungan.

Penutup

Secara umum, kita sebagai bangsa Indonesia layaknya bangga dan bersyukur dengan potensi biodiversitas yang melimpah di tanah air. *Biodiversity* dalam kearifan lokal adalah kunci untuk solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, solusi percepatan sains-teknologi bangsa, solusi menjadi bangsa yang besar dan mampu berdampak di dunia global. *Biodiversity* juga mendorong perubahan budaya konstruktif yang pada ujungnya mengakselerasi perubahan secara dramatis dan eksponensial.

Melalui perbedaan yang ada, marilah kita saling melengkapi dan menyatukan, menebar kebaikan dan tindak

nyata sesederhana apa pun yang dapat kita lakukan untuk negeri ini. Semoga dengan semangat memberikan kebaikan untuk sesama, kita dapat mewujudkan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan berdampak untuk umat. Meskipun kita berasal dari berbagai suku dan budaya yang berbeda maka akan semakin kuat bila saling menjaga. Bukan melihat kesenian reog dari Jawa atau masakan rendang dari Padang, tetapi melihat bahwa reog dan rendang adalah sama-sama milik Indonesia.

Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan selalu.. Semoga *sharing* ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengingat juga bagi diri saya pribadi.. Izinkan saya menutup dengan menuliskan puisi terjemahan yang telah dimodifikasi dari karya Douglas Malloch yang berjudul “Be the Best of Whatever You Are”.

Kerendahan Hati

*Kalau engkau tak mampu menjadi beringin
Yang tegak di puncak bukit
Jadilah belukar, tapi belukar yang baik,
Yang tumbuh di tepi danau*

*Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar,
Jadilah saja rumput, tetapi rumput yang
Memperkuat tanggul pinggiran jalan*

*Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya
Jadilah saja jalan kecil,
Tetapi jalan setapak yang
Membawa orang ke mata air*

*Tidaklah semua menjadi kapten
Tentu harus ada awak kapalnya ...*

*Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi
Rendahnya nilai dirimu
Jadilah saja dirimu ...
Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri.*

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Daftar Pustaka

- Blew, R.D. 1996. On the Definition of Ecosystem. *Bulletin of Ecological Society of America* 77(3). doi:10.2307/20168067
- BPS. 2023. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada 28 Agustus 2023, pk. 05.37 WIB
- Dewi, A.D.R. & Mukti, Y.P. 2022 Immunostimulant Potential of Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*) Nugget. *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 10(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jpa.2022.010.02.2>
- Klanderud, K., V. Vandvik V, & D. Goldberg. 2015. The Importance of Biotic vs. Abiotic Drivers of Lokal Plant Community Composition Along Regional Bioclimatic Gradients. *PLoS ONE* 10(6). doi:10.1371/journal.pone.0130205
- Lasabuda, R. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax* 1. ISSN: 2302-3589
- Liu, J., Y. Xu, Y. Shan, K.S. Burgess, X. Ge. 2021. Biotic and Abiotic Factors Determine Species Diversity-Productivity Relationships in Mountain Meadows.

- Journal of Plant Ecology* **14**(6). <https://doi.org/10.1093/jpe/rtab064>
- Naeem S., R. Chazdon, J.E. Duffy, C. Prager, & B. Worm. 2016. Biodiversity and Human Well-Being: an Essential Link for Sustainable Development. *Proc Biol Sci* **283**(1844). doi: 10.1098/ rspb.2016.2091.
- Na'im A. & H. Syaputra. 2010. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Badan Pusat statistik.
- Radekop, P. 2015. Inner Peace and Conflict Trans-formation. US: *CreateSpace Independent Publi-shing Platform*. ISBN 13: 9781514214879
- Rahma, A.R. & A.S. Purnomo. 2016. Pengaruh campuran ampas tebu dan sabut kelapa sebagai media pertumbuhan alterative terhadap kandungan jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Sains dan Seni ITS* **5**(2). DOI: 10.12962/ j23373520.v5i2.16450
- Setiawan, A. 2022. Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasi. *Indonesian Journal of Conservation* **11**(1). DOI 10.15294/ ijc.v11i1.34532
- Swingland, I.R. 2001. Biodiversity, Definition of. In *Encyclopedia of Biodiversity*. New York: *Academic Press*. ISBN 978-0-08-091782-5.
- Tsujimoto, M., Y. Kajikawa, J. Tomita, & Y. Matsumoto. 2018. A Review of The Ecosystem Concept – Towards Coherent Ecosystem Design. *Technological Forecasting and Social Change* **136**. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.032>.
- Widyatmoko, D. 2019. Strategi dan Inovasi Konservasi Tumbuhan Indonesia untuk Pemanfaatan secara Berkelanjutan. *Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek*. p-ISSN: 2527-533X.



PENGUATAN LITERASI DIGITAL WANITA LANSIA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM KEGIATAN DAKWAH, SOSIAL DAN SENI

Dr. Hanip Pujiati, S.Pd.

Pendahuluan

Kelompok umur lanjut usia atau lansia adalah kelompok umur di atas 60 tahun. Kelompok usia ini sering diasumsikan sebagai kelompok masyarakat yang telah mengalami penurunan kemampuan kognisi dan motoriknya sehingga tidak selincah kelompok usia di bawah mereka. Di samping itu, lansia juga cenderung memiliki ketergantungan terhadap kelompok usia di bawahnya, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun fisik. Namun tidak semua lansia memiliki kondisi dan karakter sebagaimana asumsi di atas. Banyak juga kaum lansia yang dapat menunjukkan bahwa usia lanjut bukanlah hambatan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, namun tetap terlibat dalam berbagai kegiatan kerja, pendidikan dan latihan, aktifitas sosial dan keagamaan, kesehatan dan kesejahteraan, serta tetap menjaga hubungan keluarga dan masyarakat luas. Setiap lansia memiliki keunikan masing-masing dan kemampuan serta minat yang berbeda. Oleh karena itu, setiap

lansia bisa mengidentifikasi kecenderungannya masing-masing dalam meningkatkan produktifitas dirinya atau pola asuh dan *treatment* yang diberikan oleh keluarga akan berbeda-beda (2).

Lansia dan teknologi digital adalah dua hal yang memiliki keterkaitan penting dalam masyarakat modern. Teknologi digital mencakup berbagai inovasi dan perkembangan dalam dunia digital, komputer, komunikasi, dan perangkat elektronik dapat dimanfaatkan oleh lansia, khususnya dalam perangkat medis. Teknologi dapat dipakai sebagai alat pemantau kesehatan, alat bantu pendengaran, alat bantu mobilitas yang memungkinkan mereka bisa hidup mandiri. Teknologi memungkinkan lansia dapat terhubung dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka meskipun secara fisik terpisah. Penggunaan media sosial, panggilan video, dan *platform* komunikasi lainnya dapat membantu mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan kesejahteraan lansia secara mental dan sosial (3).

Pengguna internet dari kelompok lansia di Indonesia cukup besar, meskipun tidak sebesar kelompok umur lainnya. Berdasarkan laporan BPS tahun 2019, disampaikan bahwa data pengguna internet berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa pemakai internet pada kelompok usia di bawah 15 tahun berjumlah 31,23 persen, usia 15-24 tahun sebanyak 83,58 persen, usia 25-64 tahun sebanyak 46,83 persen, dan usia 65 ke atas berjumlah 5,32 persen. Dari data ini, jumlah pengguna internet bagi kaum lansia lebih kecil dibanding dengan usia anak-anak, remaja dan dewasa. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pengguna di kelompok lain, sangat penting untuk meningkatkan literasi digital bagi kelompok lansia.

Berdasarkan data BPS yang diambil dari Data Susenas Maret 2022 diketahui bahwa sebanyak 10,48 persen penduduk adalah lansia dengan nilai rasio ketergantungan lansia sebesar

16,09. Artinya, setiap satu orang lansia didukung oleh sekitar 6 orang penduduk usia produktif (**umur 15-59 tahun**). **Jumlah lansia perempuan lebih banyak daripada laki-laki (51,81 persen berbanding 48,19 persen) dan lansia di perkotaan lebih banyak daripada perdesaan (56,05 persen berbanding 43,95 persen)**. Sebanyak 65,56 persen lansia tergolong lansia muda (60-69 tahun), 26,76 persen lansia madya (70-79 tahun), dan 7,69 persen lansia tua (80 tahun ke atas). Lansia muda dan lansia madya cenderung masuk dalam kelompok lansia produktif. Data tersebut menunjukkan jumlah lansia cukup signifikan. Mereka perlu memiliki literasi teknologi digital yang memadai agar mereka tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan membantu memperbaiki kualitas hidupnya.

Permasalahan lansia dalam penggunaan teknologi digital perlu mendapat perhatian khusus. Lansia adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak teknologi digital. Banyak lansia yang tertatih-tatih mengikuti perkembangan teknologi sehingga memunculkan kekhawatiran atau kecemasan bahwa mereka akan tertinggal, terisolasi, atau terabaikan. Oleh karena itu kesadaran tentang pentingnya mengetahui teknologi digital serta upaya peningkatan literasi digital melalui berbagai aplikasi menjadi penting agar dapat menstimulus otak dan kemampuan motorik agar terus berkembang dan aktif (4).

Beberapa hambatan yang membentuk karakteristik kelompok lansia dalam menggunakan teknologi digital, yaitu: 1) Hambatan kognisi, penurunan kemampuan kognitif untuk absorpsi dan memproses informasi. 2) Hambatan teknologi, rendahnya kemampuan beradaptasi dengan teknologi. 3) Hambatan fisik, keterbatasan mobilitas dan refleks karena penurunan fungsi otot, sensor inderawi, dan metabolisme. 4) Hambatan intra-personal, biasanya bermuara pada perasaan tidak percaya diri karena terbawa pada anggapan umum

bahwa lansia pasti gagap teknologi. 5) Hambatan fungsional, biasanya terkait dengan kondisi tubuh secara fisik yang sudah mulai mendapatkan banyak tantangan kesehatan. 6) Hambatan struktural, biasanya berhubungan dengan ketersediaan jaringan internet yang mempunyai karakter unik, baik secara teknis maupun pilihan-pilihan paket kuota internet yang tersedia (5)(6,7).

Tantangan utama yang dihadapi oleh lansia dalam hal literasi digital adalah keterbatasan pengetahuan teknologi, keterampilan, dan pengalaman dalam menggunakan perangkat digital seperti *smartphone*, komputer dan internet. Lansia juga mungkin lebih rentan terhadap resiko keamanan *online* seperti penipuan, pencurian identitas, tidak bisa menyaring berita hoaks, dll. Padahal, teknologi digital memberi peluang yang besar bagi penguatan kesehatan mental lansia serta pengembangan aktifitas dakwah dan sosial keagamaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang bagaimana peningkatan *literasi digital wanita lansia melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan dakwah, sosial, dan seni*

Isi

1. Kerangka Konsep

a. Definisi Lansia

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang disebut lanjut usia (selanjutnya ditulis lansia) saat umurnya mencapai 60 tahun ke atas (1). Dalam UU tersebut terdapat istilah Lansia Potensial, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan lansia yang masih tetap produktif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk masih dapat aktif bekerja, aktif memberikan kontribusi sosial, masih terjaga kesehatan fisik dan mental.

Sementara, Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain (8). Lanjut usia sehat berkualitas mengacu pada konsep *active ageing* WHO yaitu proses penuaan yang tetap sehat secara fisik, sosial, dan mental sehingga dapat tetap Sejahtera secara fisik, sosial, dan mental sehingga dapat tetap sejahter sepanjang hidup dan tetap berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sebagai anggota masyarakat (9,10).

b. *Literasi Digital dan Lansia*

Pada tahun 2018 *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Ruang lingkup pengenalan dasar literasi digital adalah: 1) Pengenalan perangkat digital seperti komputer, tablet, smartphone, cara menghidupkan, mematikan, dan mengoperasikannya. 2) Navigasi *online*, yakni kemampuan menjelajah internet dengan baik menggunakan mesin pencari, mengklik tautan dan pindah antara halaman web. 3) Keamanan online, pemahaman ancaman keamanan online, seperti: virus, malware, penipuan, bagaimana menghindari dan merespon ancaman. 4) Pengelolaan data pribadi, seperti: menjaga privasi, keamanan data pribadi saat menggunakan perangkat digital, tidak memberikan informasi pribadi ke pihak lain. 5) Menggunakan komunikasi digital, seperti: email, pesan teks, sms, Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram, dll. 6) Etika dalam berkomunikasi. 7) Penggunaan aplikasi, seperti: cara mengunduh, menginstal seperti aplikasi kesehatan dan perbankan. 8) Pencarian informasi yaitu kemampuan untuk mencari informasi akurat dan valid atau sumber informasi yang dapat dipercaya. 9) Konsep dasar digital seperti URL,

Hyperlink, browser, jaringan wifi. 10) Kreatifitas digital, yakni belajar menggunakan perangkat digital, seperti mengedit foto dan membuat video.

Untuk menjadikan lansia yang bahagia di era internet, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kehadiran teknologi diharapkan dapat mempermudah kehidupan manusia, termasuk kelompok usia lansia (5). Namun demikian, sebelum kelompok ini dapat menggunakan teknologi, maka mereka harus memiliki literasi teknologi, agar teknologi bukan menjadi petaka namun menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, masih banyak dijumpai *digital gap* di kelompok lansia karena adanya perkembangan lompatan teknologi yang begitu pesat yang belum pernah ada pada masa sebelumnya.

Peningkatan literasi digital di kalangan lansia memiliki banyak manfaat. *Pertama*, literasi digital dapat menghubungkan lansia dengan dunia di luar dirinya. *Kedua*, dapat mengakses layanan kesehatan online dan beberapa layanan digital lainnya. *Ketiga*, dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, budaya, ekonomi, dan sosial (6).

c. *Kaitan Teknologi Digital dengan Kesehatan Mental dan Sosial Lansia*

Kehadiran teknologi digital dapat menjadi sumber masalah namun juga bisa menjadi solusi bagi lansia yang mengalami gangguan kesehatan mental dan sosial. Kesehatan mental pada lansia yang sering terganggu berupa kecemasan dan depresi akibat perubahan sosial, isolasi, atau perasaan kehilangan (11). Dalam hal ini, lansia perlu dukungan sosial dan terapi yang tepat. Dalam beberapa kasus, lansia juga mengalami gangguan kognitif, seperti demensia, sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan.

Lansia juga mengalami penurunan kegiatan sosial dan interaksi sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka (12). Oleh karena itu, lansia harus tetap melakukan aktivitas sosial dengan disesuaikan pada kondisi masing-masing lansia, latihan senam otak dengan mengerjakan teka teki, membaca, atau mencoba hal-hal baru. Kadang-kadang kematian pasangan hidup akan membuat lansia merasa kesepian dan kehilangan dukungan emosional. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sangat penting penggunaan teknologi sebagai daya dukung lansia untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya.

Lansia telah mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang tentunya akan berakibat pada kesehatan mental dan sosial. Kesehatan mental dan sosial dapat terjaga melalui kegiatan sosial, olah raga, kegiatan kreatif, dan dukungan dari keluarga (13).

d. Peran Dakwah Lansia

Peran para aktifis dakwah yang masuk kategori lansia dalam dakwah Islam sangat penting dan berharga. Meskipun fisik mereka tidak lagi kuat, namun pengalaman hidup, kebijaksanaan, kedalaman ilmu, dan keteladanan mereka sangat menginspirasi para generasi berikutnya. Lansia dapat menjadi contoh nyata bagaimana mereka menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka dapat menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan ketakwaan melalui perilaku sehari-hari yang mengilhami generasi muda untuk mengikuti jejak mereka.

Lansia juga berperan sebagai guru dalam mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anggota keluarga dan masyarakat. Mereka mempunyai pengalaman dalam menyampaikan

dakwah di masyarakat. Lansia juga mengalami langsung persoalan dakwah di masyarakatnya, sehingga secara bijak dapat menjadi mediator apabila ada perselisihan. Lansia berperan aktif dalam komunitas kegiatan di masjid, mengajar ngaji, ceramah agama, dan mendukung kegiatan sosial kemanusiaan. Lansia membantu kesadaran sosial di masyarakat, khususnya dalam program sosial, gotong royong dan saling empati satu sama lain. Lansia banyak menghabiskan waktu untuk beribadah dan bertafakkur.

Di sisi lain, teknologi digital memiliki peran yang sangat penting bagi para aktifis dakwah Islam saat ini. Dalam konteks literasi digital, penting bagi aktifis dakwah memiliki literasi digital yaitu: dapat menjangkau audiens lebih luas melalui berbagai platform seperti media sosial, *podcast*, web, blog, dll. Komunikasi dakwah lebih efektif dan efisien karena bisa membuat konten materi dakwah yang menarik dan sesuai dengan target *audience*. Pemberdayaan individu dapat dilakukan lebih banyak metode sehingga semakin kreatif. Bagi lansia yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, literasi digital menjadi kompetensi dasar yang harus mereka miliki untuk menunjang tugas-tugas dakwah. Dengan memahami teknologi digital dan mampu mengaplikasikannya, para lansia pendakwah bisa melakukan berbagai kreasi cara dan metode dakwahnya.

2. Pembahasan

Sebagaimana telah disampaikan di bagian sebelumnya bahwa tulisan ini mencoba mengkaji permasalahan tentang bagaimana upaya peningkatan literasi digital pada lansia melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan dakwah , sosial, dan seni. Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dilakukan kajian yang mendalam yang

melibatkan lebih dari seratus perempuan lanjut usia. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data *interview* langsung dan pendampingan kegiatan. Pengumpulan data ini dilaksanakan pada Januari 2023 sampai Juli 2023 dengan melibatkan 100 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Responden adalah wanita lansia yang tergabung dalam organisasi Wanita Islam yang berasal dari 30 provinsi di Indonesia.

a. *Upaya Peningkatan Literasi Digital pada Lansia melalui Kegiatan Dakwah*

Salah satu program Wanita Islam yang banyak membimbing ibu-ibu lansia mengenal teknologi adalah program Bunda Wakaf, yaitu sebuah program yang menghimpun wakaf tunai dari masyarakat secara online. Peningkatan literasi digital dilakukan dengan penjelasan secara intensif, mulai dari aplikasi digital untuk berwakaf, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berwakaf, hingga melakukan praktek langsung berwakaf secara online. Tahap pengenalan dan penjelasan aplikasi digital ini dilakukan rutin setiap minggu oleh tim Bunda Wakaf Wanita Islam dengan dipandu oleh tim Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI).

Pada tahun pertama program ini, yakni tahun 2020 yang masih dalam masa pandemi Covid-19, proses edukasi dilakukan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dilakukan secara nasional dan ditindaklanjuti edukasi secara lokal pada masing-masing wilayah. Proses edukasi ini terus berjalan sampai hari ini dan akan terus dilakukan pada masa yang akan datang. Bimbingan peningkatan literasi digital ini dilakukan juga secara *offline* di masa pasca pandemi, sehingga ibu-ibu lansia bisa terus belajar. Hal ini dilakukan dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lain,

dari satu kepengurusan ke kepengurusan lain. Pencerahan ibu-ibu dan pendampingan ini dilakukan secara massif selama 3 tahun sejak tahun 2020 sampai sekarang. Salah satu hasil yang spektakuler dari ibu-ibu lansia Wanita Islam dan juga didampingi para ibu-ibu di usia yang lebih muda adalah menerima penghargaan dari lembaga MURI.

Pemecahan Rekor MURI PP Wanita Islam Jakarta, 29 April 2021



"Wakaf Uang serentak secara
Daring Pertama Menggunakan
QRIS"



Suatu capaian yang luar biasa yang dilakukan oleh ibu-ibu lansia yang belajar teknologi digital dari titik nol. Dalam sehari mampu melakukan wakaf serentak melalui aplikasi pembayaran QRIS sebanyak 5.900 wakif.

Model edukasi literasi ini digambarkan sebagai berikut:



Dampak dari kegiatan ini adalah dalam kurun waktu 3 tahun, ibu-ibu lansia telah familiar dengan aplikasi wakaf uang *cash* secara *online*, dan dalam program ini, ibu-ibu lansia tidak hanya bisa melakukan untuk diri sendiri namun mengajak dan mengajari ibu-ibu yang lain untuk berwakaf secara *online*. Bahkan ibu-ibu lansia bisa membantu ibu-ibu yang lain untuk menginput data atau menginput donasi wakaf dalam aplikasi.

Berdasarkan hasil observasi dan partisipasi terhadap ibu-ibu lansia yang melakukan program ini, maka capaian literasi digital yang sudah mereka kuasai adalah ibu-ibu lansia dapat secara sederhana mengenal perangkat digital seperti komputer, tablet, smartphone. Dalam hal ini mereka bisa menghidupkan, mematikan dan mengoperasikan media digital tersebut. Setelah belajar beberapa kali, ibu-ibu lansia dapat menggunakan navigasi *online* dengan membuka web, mencari alamat web

untuk melakukan wakaf, mengklik tautan yang diperlukan, dan pindah-pindah halaman web.

Ibu-ibu lansia juga mampu menjelajah internet dengan baik menggunakan mesin pencari, mengklik tautan dan pindah antara halaman web. Karena ibu-ibu juga harus bisa menggunakan *e-wallet*, maka ibu-ibu diberi pembekalan terkait dengan keamanan digital. Ibu-ibu juga diminta untuk memahami keamanan online dan pemahaman ancaman keamanan online seperti virus, *malware*, penipuan, serta bagaimana menghindari dan merespon ancaman. Pengelolaan data pribadi, seperti: menjaga privasi, keamanan data pribadi saat menggunakan perangkat digital, tidak memberikan informasi pribadi ke pihak lain..



(sumber: dokumen Bunda Wakaf Wanita Islam)

b. Upaya Peningkatan Literasi Digital pada Lansia melalui Kegiatan Sosial

Dalam upaya mengimplementasikan program sosial, ibu-ibu lansia menggunakan komunikasi digital, seperti: email, pesan teks, sms, Whatsapp, Facebook, Instagram, Telegram untuk merencanakan program dan menjalankan program. Ibu-ibu lansia dipahamkan bagaimana etika dalam berkomunikasi di media sosial. Saling mengingatkan apabila memposting informasi yang hoaks, saling mengingatkan untuk mengecek kebenaran informasi. Penggunaan aplikasi, seperti: cara

mengunduh, menginstal, dan menggunakan aplikasi kesehatan maupun perbankan.

Ibu-ibu lansia juga dibekali kemampuan melakukan pencarian informasi, yaitu kemampuan untuk mencari informasi akurat dan valid dari sumber informasi yang dapat dipercaya. Di dalam grup Whatsapp sering diingatkan kepada ibu-ibu agar menyaring kebenaran berita sebelum *sharing*. Salah satu bentuk hasil capaian literasi digital adalah ibu-ibu dapat membuat *twibbon* untuk memperingati hari besar, membuat infografis, *flyer* kegiatan, dan membuat *Google Form*. Meskipun tidak semua lansia mampu membuat *twibbon*, tapi mereka bisa mengupload fotonya di link *twibbon* yang mereka akses. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan teknologi digital, dipelajari dengan meminta bantuan orang yang lebih muda, dan kemudian praktek mengerjakannya. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran bahwa aktif dakwah lansia harus memiliki digital skill yang baik.

c. *Upaya Peningkatan Literasi Digital pada Lansia melalui Kegiatan Seni*

Upaya peningkata literasi digital pada ibu-ibu lansia Wanita Islam adalah dengan mengikuti lomba Qosidah, lomba membuat profil lembaga, lomba menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam. Ketiga lomba ini dilakukan secara digital, artinya peserta lomba mengirimkan hasil karyanya dalam bentuk video. Video penampilan Qosidah, Video penampilan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan video profil Wanita Islam.

Capaian edukasi literasi digital yang ibu-ibu lansia peroleh dari kegiatan lomba qosidah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam adalah mereka mengetahui teknik perekaman video, editing video dan

mengumpulkan video. Meskipun dalam prosesnya, lansia dibantu oleh para tenaga muda dalam melakukan rekaman, editing, dan upload video lomba, setidaknya mereka telah mengenal dan mengetahui bagaimana proses produksi sebuah video.

Pada lomba membuat profil Wanita Islam, ibu-ibu lansia bersama ibu-ibu yang lebih muda, membuat profil lembaga. Dalam konteks ini, mereka belajar banyak hal, dari mulai membuat tema, membuat *storyline*, membuat *raw materials*, Menyusun transkrip atau naskah, mengambil gambar atau video, mengedit hasil video dan mengupload video. Dalam program kegiatan ini capaian kemampuan digital yang diperoleh ibu-ibu lansia adalah mereka belajar, mengamati langsung, terlibat langsung, dan bahkan mengalami langsung pembuatan video, sebuah karya digital yang luar biasa. Berikut ini ditampilkan gambar tangkap layar dari video-video yang dihasilkan oleh ibu-ibu lansia bersama timnya.





(Sumber: dokumentasi Wanita Islam yang sudah di publish di you tube Wanita Islam)

Kesimpulan

Literasi digital wanita lansia untuk meningkatkan kesehatan mental dan sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui kegiatan dakwah, sosial, dan seni. Keterlibatan langsung ibu-ibu lansia dalam program kegiatan dakwah, sosial, dan seni sangat efektif dalam meningkatkan literasi digital. Pertama, dalam program dakwah digital yaitu program wakaf uang *cash* secara *online* telah memberikan banyak pengalaman langsung para ibu-ibu lansia dalam mengenal dan menggunakan teknologi digital. Kedua, Program kegiatan sosial juga memberikan pengalaman pengembangan literasi digital melalui berbagai aplikasi yang dipakai. Contohnya pemakaian *e-wallet* untuk penggalangan donasi dan distribusi donasi secara online. Terakhir, kegiatan seni merupakan kegiatan yang memberikan dampak positif, selain kesehatan mental karena mereka sangat bahagia dengan tampil bernyanyi, mereka juga mempelajari proses produksi video dan publikasi video. Suatu program yang sangat mensyaratkan kemampuan literasi digital.

Daftar Pustaka

- 1998 UURN 13 T, *Kesehatan Lanjut Usia*, Mensesneg, 1999;(September):1-2.
- Audria A, Wahyuni S, *Implementasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia di Kota Bekasi*, J Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2023;2(1):9-15.
- Kurniawan E, Restyandito, *Pemanfaatan Teknologi oleh Orang Lanjut Usia di Yogyakarta*, Seminar Nasional XII "Rekayasa Teknologi Indonesia dan Inf 2017 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta. 2017; (2008): 49-53.
- Laksmidewi P, Adnyana MO, Susilawathi NM, Witari NP, Yuliani D, Gondowardaja Y, *BANU 2016 Bali Neurology Update Neurology in Elderly Hope for Healthy and Successful Aging*, Udayana University Press, 2016;40-54.
- Priyani MJR, *Lansia yang bahagia di era internet*, Pros Temu Ilm Nas X Ikatan Psikol Perkemb Indones 1 [Internet]. 2017;299-306. Available from: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ippi/article/view/2344/1745>
- Global JK, *Literasi Digital Lansia Pada Aspek Digital Skill*, 2023;12(1).
- Ashari RG, *Memahami Hambatan dan Cara Lansia Mempelajari Media Sosial*, J Ilmu Komunikasi, 2018; 15(2): 155-70.
- Indonesia R, www.bphn.go.id, 1997;
- Dulhadi D., *Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia (Lansia)*, Al-Hikmah, 2017;11(2):133-48.
- Ewys C bebbby, Kiswanto K, Yunita J, Mitra M, Zaman K., *Factors Associated with Active Aging at Payung Sekaki Health Center Pekanbaru City*, J Kesehatan Komunitas, 2021; 7(2): 208-13.

- Johnson K, Son MYS, *Mental Health Issue Among The Elderly Population*, 2021;
- Reynolds CF, Jeste D V., Sachdev PS, Blazer DG, *Mental health care for older adults: recent advances and new directions in clinical practice and research*, *World Psychiatry*, 2022; 21(3): 336–63.
- Kartinah, *Masalah Psikososial Pada Lanjut Usia*, Kartinah *Agus Sudaryanto*, *Masalah Psikososial pada Lanjut Usia* [Internet]. 2008; 1: 93. Available from: <http://hdl.handle.net/11617/486>



PEREMPUAN DALAM LINTASAN SEJARAH SASTRA ARAB

Dr. R. Yani'ah Wardani, M.A.

Pendahuluan

Sejarah merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, sebab sejarah yang dapat mengetahui peristiwa masa lalu dan menjadikannya pelajaran hari ini. Begitu pun sastra yang tidak kalah penting dari sejarah.

Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, hingga perasaan dalam bentuk *imaginative*, cerminan kenyataan, atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa. Sastra dalam perspektif sosiologis dinilai sebagai salah satu bentuk kreasi yang menggambarkan tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ia muncul sebagai bentuk kritikan terhadap gejala sosial dan menjadi cermin dari suatu fenomena sosial dan budaya. Begitu pula kehidupan yang diangkat dalam karya sastra dapat mencakup hubungan antar masyarakat, antar individu atau peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang, berupa pengalaman pribadi maupun kisah orang lain. Karya sastra dapat berisi segudang cerita yang diangkat dari berbagai sudut pandang pengarang/penulis, baik itu laki-laki atau pun perempuan.

Perempuan merupakan hal yang tak pernah luput diperbincangkan, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, seni budaya sampai sastra. Perempuan menjadi tema-tema dari sebagian besar karya sastra yang ada di dunia. Begitu pun yang terjadi di dalam sastra Arab, tema perempuan memiliki pengaruh sebagai salah satu menu tema yang paling banyak dipilih dalam karya sastra terutama dalam bentuk puisi (*syi'ir*) dan prosa (*natsar*) baik dalam bentuk cerpen, roman dan novel. Karya sastra tersebut banyak mengangkat kisah-kisah yang diperankan oleh perempuan. Tema-tema tersebut diambil dalam karya sastra Arab, sering dilihat dari kejadian nyata seseorang dan cerita yang sesuai dengan alur pemikiran pengarang. Tema-tema itu antara lain *ghazal* (rayuan), *Ritsa* (ratapan), *Hija* (cacian), *madah* (pujian), *hammasah* (semangat), *fakhr* (berbangga), *washf* (deskripsi), dan sebagainya.

Perubahan zaman yang terjadi di Negara Arab, telah mendorong perempuan dalam ranah sastra. Perempuan tidak hanya menjadi sebagai pemeran dalam sebuah karya sastra, melainkan lebih memberikan pengaruh yang lebih besar dalam dunia sastra dengan pemikiran yang lebih dinamis terutama setelah datangnya Islam (masa awal kenabian), bahkan sejak masa *Mukhadhramain* (masa transisi antara masa Jahiliyah dan awal kemunculan Islam), masa klasik, kontemporer, sampai dengan masa modern di Mesir.

Terkait karakter sastra Arab, menurut Karl Bucher, seorang pakar sosiologi dalam bukunya *Arbeit und Rhythmus* menyatakan bahwa adanya proses alami dari sebuah sistem masyarakat Badui Arab ternyata mampu mendorong mereka untuk melahirkan lagu-lagu yang digunakan untuk menghibur jiwa dan mengusir sepi. Ungkapan tersebut sebagai argumentasi bahwa salah satu faktor syair-syair Arab dapat berkembang yakni akibat adanya proses alamiah dari

kehidupan golongan mereka sendiri yang pada mulanya belum tersentuh peradaban. Meskipun kemudian pernyataan tersebut disanggah oleh Th. Preuss yang meyakini bahwa hipotesis milik Karl Bucher tersebut tidak berhasil dibuktikan secara menyeluruh karena hanya mencakup beberapa fakta sosial saja. Preuss juga menambahkan bahwa munculnya nyanyian-nyanyian yang puitis dari penduduk Badui secara umum karena adanya pengolahan rasa yang melatarbelakanginya saat mereka menghadapi problematika dan kejamnya kehidupan. Akibatnya, menyebabkan mereka peka terhadap perasaan yang mereka alami, yang kemudian memberi pengaruh kepada ungkapan mereka dalam kehidupan sehari-hari, hingga puncaknya, ungkapan keseharian tersebut berkembang dan bergerak menjadi bait-bait syair yang puitis yang memiliki ritme tertentu.⁴

Tulisan ini ingin menganalisa karakter **“Perempuan dan sastra dalam lintasan sejarah sastra Arab”**, diawali sejak masa sastra Jahiliyah sampai masa modern.

Pembahasan

A. *Budaya perempuan di Negara Arab*

Budaya patriarki yang telah menyatu dalam individu masyarakat Arab merupakan salah satu dari sekian banyak faktor. Gazalba mengartikan kebudayaan sebagai cara berpikir dan merasa yang menyatakan guru dalam kehidupan bermasyarakat seseorang yang menentukan dan membentuk kesatuan sosial pada kurun waktu dan ruang tertentu.⁵ Kebudayaan adalah buah dari interaksi kehidupan

⁴ Aziz Anwar Fachrudin, *Pengantar Sejarah dan Madzhab Linguistik Arab*, (Sidoarjo: Lisan Arabi, 2017), h. 42

⁵ Sidi Gazalba, *“Kebudayaan Sebagai Ilmu”*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1973), h 72

kebersamaan manusia sebagai anggota suatu masyarakat yang selalu mengalami pergerakan dan perubahan-perubahan. Adat istiadat serta kebudayaan Bangsa Arab sangat berperan dalam proses memperjuangkan kesetaraan gender. Konsep gender masih menjadi persoalan yang terus menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat, akademisi, maupun pemerintahan dari dahulu sampai sekarang. Pada umumnya, gender dipahami sebagai makna yang mengacu pada atribut sosial dan kesempatan (akses) yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembagian sumber daya, kesempatan bekerja, tanggung jawab, keterlibatan di ranah politik, pembagian kekayaan serta pengambilan keputusan dalam sebuah ruang lingkup baik domestik maupun publik.⁶

Kehadiran sastra Arab dalam lokus budaya Arab tidak dapat terlepas dari berbagai jenis fenomena sosial yang tercipta di sekitarnya. Menyikapi hal tersebut Zainuddin Fananie menyebutkan bahwa hadirnya sastra ternyata sarat dengan pesan-pesan moral yang dapat dipahami sebagai suatu upaya dari sastrawan atau penyair untuk menyampaikan perasaan maupun keluh kesah serta diiringi dengan pesan-pesan komunikatif agar perasaan mengeluh tersebut dapat segera berakhir. Sesuatu yang terungkap melalui karya sastra biasanya disebutkan dalam wujud kiasan ataupun lambang sehingga cara tersampaikan secara halus.⁷

⁶ Annisa Malinda Natasya Hagk and Umi Najihah K Kholilah, "Perkembangan Kesetaraan Gender Di Negara-Negara Arab," *Kajian Bahasa, Sastra dan Budaya Arab* 2 (2018), h. 386

⁷ Zainuddin Fananie, *Telaah Sastra*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 44

B. Periodisasi Sastra Arab

Periode sastra Arab menurut Ahmad Al-Hashimi dalam “*Jawahir al-Adab*”⁸, antara lain: 1). Masa Jahiliyah: periode ini dimulai sekitar 150 tahun sebelum masehi dan berakhir sampai munculnya agama Islam. 2). Masa permulaan Islam (*shadrul Islam*), yakni dimulai sejak datangnya Islam dan berakhir seiring jatuhnya Daulah Umayyah yaitu pada tahun 132 H. 3). Masa Abbasiyah yang dimulai sejak berdirinya daulah Abbasiyah dan berakhir saat runtuhnya kota Baghdad di tangan Mongolia pada tahun 656 H. 4). Masa pemerintahan Turki yang dimulai saat runtuhnya kota Baghdad hingga timbulnya kebangkitan bangsa Arab di abad modern sekitar pada tahun 1220 H. 5). Masa Modern yang permulaannya ditandai oleh lahirnya rasa nasionalisme bangsa Arab di abad modern hingga sekarang.

Tulisan ini melihat peran dan karakter sastrawati Arab dilihat dari sudut *fikrah* (gagasan) dari masa ke masa sebagaimana terlintas dalam sejarah melalui periodisasi masing-masing yakni pada masa *jahiliyah*, masa klasik (awal Islam dan *Daulah Abbasiyah*), masa kontemporer, dan masa modern. Berikut ini penyair perempuan yang muncul dari setiap periodisasi tersebut:

1. Penyair Perempuan Arab pada masa jahiliyah

Sebelum Islam datang di tanah Arab, bangsa tersebut merupakan salah satu bangsa yang tertinggal karena faktor kebiasaan masyarakatnya yang dinilai cukup buruk seperti sering terjadinya perang saudara, membunuh bayi perempuan yang lahir karena menganggapnya sebuah aib dan membawa

⁸ Ahmad Al-Hashimi, “*Jawahir al-Adab*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h 242

kesialan. Hadirnya Islam di negeri Arab membawa pengaruh besar terkhusus bagi peradaban dan kebudayaan Arab. Atas didikan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, lambat laun dengan proses yang cukup panjang tradisi buruk bangsa Arab mulai berubah menjadi lebih baik. Bahkan karena Rasulullah dianggap sukses dalam merubah adat penduduk Arab, salah satu tokoh orientalis, Michael H. Hard Wildana, memposisikan Rasulullah sebagai sosok yang paling berpengaruh di dunia pada urutan teratas.⁹

Masa jahiliyah ialah 150 tahun sebelum datangnya Islam. Pada masa tersebut bahasa Arab pada titik kematangan dan masa itu menjadi tahun kelahiran puisi jahili dengan menggunakan bahasa Arab tersebut.¹⁰ Pengertian kata *jahiliyah* pada periode tersebut bukan kata *al-jahl* lawan dari *al-ilm*, melainkan berasal dari kata *al-jahl* yang bermakna kasar, angkuh, marah, dan lawan dari *al-Islam* berarti pasrah, tunduk, patuh, serta taat kepada Allah.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan sastra Arab pada periode *Jahiliyah*, antara lain adanya pasar sastra (*al-aswaq*) dan hari-hari orang Arab (*ayyam al-'Arab*). Pasar-pasar di wilayah Arab dialokasikan sebagai pekan sastra dan budaya yang banyak dihadiri oleh para penyair Arab. Selanjutnya, *ayyam al-'Arab* yakni salah satu gejala fenomena sosial menjelang kemunculan Islam di jazirah Arab yakni perayaan di hari-hari tertentu. Fenomena ini menjadi media yang efektif bagi perkembangan tema-tema puisi Arab.

⁹ Asriyah Asriyah, "Perkembangan Sejarah Sastra Arab," Jurnal Rihlah V, no. 2 (2016): h. 9

¹⁰ Wildana Wargadinata dan Laily Fitriani, "Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam", h. 76

Salah satu penyair perempuan terkenal pada masa Jahiliyah adalah **al Khansa** yang mempunyai sifat emosional, sosok penyabar, dan ekspresif.

Al-Khansa merupakan penyair Arab perempuan yang dihormati oleh kalangan penyair Arab lainnya. Bahkan, *al-Nabighah al-Dzubani*, salah satu penyair *Jahiliyah* dari Bani Dubyan, pernah memuji kemahiran al-Khansa dalam berpuisi dengan mengatakan: “*Demi Allah, andaikata Abu Bashir (al-A’sya) tidak membacakan puisinya kepadaku terlebih dulu, akan kukatakan bahwa kaulah (al-Khansa) penyair paling hebat dari golongan jin dan manusia.*”¹¹

Berikut petikan bait syair yang membuktikan bahwa ia sosok perempuan yang **emosional**

وَإِنِّي وَالْبُكَاءُ مِنْ بَعْدِ صَخْرٍ كَسَالِكَةٍ سَوَى قَصْدِ الطَّرِيقِ

“*Sungguh Aku menangis setelah kematian Shokr
Seperti pengembara tanpa tujuan*”

Berikut petikan bait syairnya yang menunjukkan **penyabar**, yaitu ketika ditinggal wafat oleh kedua saudara lakinya:

وَلَكِنِّي وَجَدْتُ الصَّبْرَ خَيْرَ مِنَ النِّعْلَيْنِ وَالرَّأْسِ الْحَلِيقِ

“*Tetapi aku menemukan kesabaran lebih baik Dari pada dua sandal dan kepala yang mendongak (sombong)*”

Berikut bait syairnya yang menunjukkan **ekspresif**:

وَإِذَا فِينَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَدْمَاءَ كَالْجَمَلِ الْفَنِيْقِ

“*Jika Mu’awiyah bin ‘Amr berada di sisi kami, diantara darah-darah seperti unta jantan yang mulia*”

¹¹ Imam Ibn Qutaibah, *al-Syi’ir wa al-Sya’ara*, Juz 1, tt), h. 344

Dengan demikian, dapat disimpulkan meskipun al-Khansa gemar menuliskan puisi-puisi ratapan (*ratsa'*), tetapi juga ia adalah sosok perempuan yang sabar dan bisa mengetahui solusi dari musibah yang terus menimpa dirinya. Al-Khansa juga merupakan sosok penyair yang cerdas dan mampu mengekspresikan perasaannya.

2. *Penyair Perempuan Arab pada masa Islam*

Agama Islam tidak langsung menerima atau menolak syair *Jahiliyah* secara langsung, tetapi Islam menerima syair yang sepaham dengan ajaran dan nilai-nilai yang sesuai dengan Islam sendiri. Selain itu, Islam menolak syair yang di dalamnya tersirat seruan kepada kebatilan, hawa nafsu, serta kebiasaan kebiasaan buruk di masa jahiliyah.¹²

Pada periode Islam, Pernyataan Ibn Khaldun sebagaimana dinukil oleh Syauqi Dhaif, menyebutkan bahwa khasanah sastra Arab terkhusus di bidang syair sempat mengalami kemandekan pada masa awal kedatangan Islam. Hal tersebut karena banyaknya umat Islam yang berfokus kepada pergi perang dan menyebarkan agama Islam. Tetapi pernyataan tersebut disanggah oleh Syauqi Dhaif bahwa pada masa awal kedatangan Islam justru melahirkan jenis-jenis syair baru dan berbeda dari masa sebelumnya yakni masa jahiliyah. Seperti saat Rasulullah masih hidup, banyak syair-syair pujian yang ditujukan kepada Rosul, seperti munculnya para penyair *mukhadramain*; Ka'ab bin Zuheir pengarang syair Burdah pada masa Rasul, Zaid bin Tsabit dll.

Perempuan kerap kali dihubungkan dengan emosi yang sulit ditafsirkan. Adapun penyair perempuan pada masa Rasul

¹² Achmad Syaifuji and Bambang Irawan, “*Pergeseran Konteks Syair Arab.....*” h.160

Muhammad, mereka menggunakan hasil karya ciptaannya sebagai media untuk mengungkapkan perasaan maupun segala sesuatu yang tersimpan di lubuk hatinya, seperti munculnya Penyair perempuan Al Khantsa (penyair perempuan masa *mukhadhramain*, yakni penyair yang hidup pada dua masa ; Jahiliyah dan Islam) , Ia sosok penyair *Ritsa'* (Ratapan), karena ia meratapi dua orang anaknya yang gugur di medan perang (Mu'awiyah dan Shokhr) wafat syahid dalam membela agama Islam.. Keseluruhan sifat yang mendasari jiwa perempuan dipandang sebagai landasan utama saat membentuk kepribadian perempuan dalam lingkungannya. Disebutkan bahwa apapun yang dimiliki dan terletak pada diri seorang perempuan merupakan suara hati, perasaan, naluri, impian, serta wawasan disampaikan perempuan melalui tulisan.¹³

Begitu pun Penyair perempuan pada masa **Khilafah Abbasiyah**, yaitu masa kejayaan dan masa keemasan Islam, semua ilmu berkembang, penerjemahan besar-besaran dilakukan termasuk bidang falsafat Rumawi dan yunani hingga Persia. Masa kejayaan ini terjadi pada masa Harun al Rasyid dan putranya al-Makmun.

Dalam bidang sastra, para penyair tumbuh subur laksana jamur tumbuh di musim hujan dan mereka sejahtera dan terjamin kehidupannya, terlebih para penyair *madah* (pujian) di istana yang khusus dipelihara oleh para kholifah, seperti almutanabbi penyair khusus istana yang tugasnya menciptakan bait syair pujiannya untuk para raja/kholifah .Dalam genre prosa (natsar) muncul cerita antara "*Seribu satu malam*" dan "*Kalilah wa Dimnah*" karya Ibnu Muqaffa, dll. Penyair perempuan muncul antara lain **Ulayya binti al-Mahdi dan**

¹³ Nur Syifaa dan Che Abdullah Atikah, "Woman Character in Bidadari from Gynocritics Perspective: Psychology and Culture Research," *Jurnal Wacana Sarjana* 2, no. 4 (2018): 1–10, h. 4

Walladah binti al-Mustakhfi., yaitu dua orang penyair perempuan yang mempunyai sifat **mengalah, sensitif, dan setia**. Ia juga merupakan sosok perempuan yang rela mengalah meskipun dari keturunan khalifah. Bahkan ia menyindir khalifah Harun ar-Rasyid yang menentanginya mencintai seorang budak laki-laki, dan menurutnya jatuh cinta bukanlah sebuah aib, dengan siapa dan dari golongan mana pun:

يا رب ما هذا من العيب القلب مشتاق إلى رب
إلا البكا يا عالم الغيب قد تيمت قلبي فلم أستطع

*Hatiku rindu kepada tulang rusuk, ya Tuhan apakah ini
termasuk aib?*

*Aku telah menahan tangis hati ini, tetapi aku tidak mampu,
wahai maha mengetahui seluruh yang tidak terlihat*

Walladah, nampak dalam puisinya sekalipun dalam kondisi patah hati, tetapi ia masih dapat mengingat tuhan yang telah menganugerahkan nikmat dengan berlimpah selama hidup di bumi ini. Untuk membuktikan bahwa ia adalah sosok yang sensitif dalam mengekspresikan perasaannya, dapat dilihat melalui syair:

سقى الله أرضاً قد غدت لك بكلّ سكوب هاطل الويل مغدق

*Tuhan telah menyirami tanah yang menjadi rumah bagimu,
dengan setiap tuangan, mengalir dengan melimpah*

Walladah adalah seorang perempuan yang berpendidikan lahir dari keluarga kaya raya, dan dia adalah anak tunggal. Dia menyaksikan fitnah al-Andalus, periode penuh kekerasan dan ketidak stabilan yang mengarah pada runtuhnya Khilafah Cordoba dan berpecah menjadi beberapa negara bagian yang lebih kecil. Ayahnya naik tahta di tahun-tahun penuh gejolak kemudian digulingkan dan dibunuh. Ia

meninggalkan Walladah anak tunggalnya seorang diri dan menjadi perempuan yang kaya raya. Dengan latar belakang tersebut, menjadi salah satu faktor pembentuk Walladah menjadi pribadi yang sensitif dalam merangkai kata pada puisi-puisinya. Seperti:

أبيت على جمرٍ من الشوق

وقد كنت أوقات التزور في الشتاء

Dan sungguh aku telah berkunjung di musim dingin,

Aku terlelap di atas bara api kerinduan

Kedua puisi tersebut menyiratkan bahwa Ulayya dan Walladah merupakan perempuan yang setia terhadap pasangannya. Bahkan Walladah tidak pernah menikah dan memilih untuk memiliki banyak hubungan cinta. Satu-satunya hubungan yang paling terkenal dan terkenang adalah subjek dari hampir semua puisinya saat masih hidup yakni hubungannya dengan penyair Ibn Zaydun. Meskipun bukan hubungan yang damai, dan harus berakhir dengan tiba-tiba ketika Walladah memergokinya berhubungan seks dengan gadis budaknya. Hal-hal meningkat dengan cepat di antara mereka sampai Ibn Zaydun diasingkan dari Cordoba. Keduanya akhirnya berdamai tetapi tidak pernah melanjutkan hubungan mereka.¹⁴

Bait yang menunjukkan bahwa Ulayya merupakan sosok yang setia:

وأنت في راحة طوباك طوباك

لكِنَّ حُبَّكَ أبلاني وعذبني

Tapi cintamu telah membuatku lelah dan menyiksaku

Dan kamu beristirahat dengan tenang, berbahagialah!, berbahagialah!

¹⁴ Walladah bint al-Mustakfi - Emily Kittell-Queller (weebly.com)

Ulayya binti al-Mahdi bukanlah satu-satunya model artistik dalam kehidupan para khalifah Abbasiyah, tetapi dia menjadi satu-satunya perempuan yang mampu menyatakan cintanya kepada siapa pun yang dia inginkan tanpa harus takut dihukum oleh penguasa..¹⁵

ما زلتُ ما دخلتُ القصر في كرب أهدى بذرك صبا لست أنساك
لاتحسيني وإن حجابُ قصركم سدوا الحجاب وحالوا دون رؤيك

*Aku belum memasuki istana dalam kesedihan
Halusinasiku dengan mengingatmu tentang masa muda yang tidak
akan melupakanmu
Jangan berbuat baik padaku meski tabir menghalangimu
Mereka menutup hijab (penghalang) dan membatasinya tanpa
melihatmu*

Dengan melihat pemilihan bahasa yang digunakan Walladah, tersirat bahwa ia adalah seorang perempuan yang cerdas dan sarat akan ilmu pengetahuan. Walladah mendirikan sekolah bagi perempuan untuk belajar puisi, dan sering memberi para perempuan sehingga orang borjuis dan ber kemampuan untuk mengangkat diri mereka menjadi bangsawan. Pemilihan kata dan makna yang tersirat dalam puisinya dapat membuktikan bahwa ia adalah sosok perempuan yang cerdas pada masanya, sebagaimana dalam bait berikut:

سقى الله أرضا قد غدت لك منزلاً بكلّ سكوب هاطل الويل مغدق

*Allah telah menyirami tanah yang menjadi rumah bagimu, dengan
setiap ruangan, mengalir dengan melimpah*

¹⁵ سيدات في القصر العباسي.. غلّة بنت المهدي - جريدة الغد (alghad.com)

3. *Sastrawan Perempuan pada zaman modern*

Sekitar pada akhir abad ke-18, saat bangsa Arab berada di bawah pemerintahan Usmaniyah, bangsa Eropa telah melihat bahwa Arab berada dalam keadaan yang kurang baik bahkan cenderung lemah. Sehingga bangsa Eropa kembali melakukan ekspansi ke Timur tengah, tetapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kedatangan Eropa dengan dalih memperluas roda perdagangan sekaligus menyebarkan ilmu pengetahuan. Ternyata maksud dan tujuan Eropa justru diterima oleh Muhammad Ali seorang gubernur yang diangkat oleh sultan Usmani. Gubernur tersebut menyambut baik datangnya kebudayaan Barat berikut dengan berbagai ilmu pengetahuannya. Ali tidak lagi memprioritaskan pemerintahan dan pembangunan yang menyebabkan perkembangan ilmu sastra sangat lemah dan mengalami mati suri. Dua abad setelahnya, barulah lahir karya sastra Arab yang baru karena penyair Arab menyesuaikan situasi dan kondisi zaman yang sudah bergerak dan kian modern. Para penyair mengklaim dirinya berusaha melepas belenggu dari ciri khas puisi Arab klasik meskipun tetap memiliki keterikatan. Salah satu perbedaan "syair Arab modern" dibanding masa sebelumnya yakni lebih mengedepankan isi kandungan daripada bentuknya, serta bahasanya yang lebih mudah dipahami karena sesuai dengan keadaan¹⁶

Bahitsa al-Badiyyah, seorang penyair perempuan pada masa modern, ia mempunyai sifat percaya diri, kritis, dan bijaksana. Bahitsa adalah salah satu penyair perempuan dari golongan feminis di Mesir. Gerakan feminis di Mesir mulai berkembang sejak abad ke 20, yang diklasifikasikan menjadi tiga fase, antara lain; periode pertama gerakan feminisme di Mesir terjadi pada tahun 1909 dalam bidang pendidikan.

¹⁶ Asriyah Asriyah, "Perkembangan Sejarah Sastra Arab".... h. 97

Periode kedua, mulai perkembangan gerakan feminisme terjadi tahun 1919-1922. Di fase ini pulai mulai muncul adanya gerakan feminisme ke permukaan. Pada peristiwa ini perempuan turut andil berjuang bersama masyarakat Mesir. Namun kenyataannya, saat Mesir berhasil merebut kemerdekaan pada tahun 1922, perempuan tetap kembali mendapat posisi warga negara kelas dua. Meskipun pada tahun 1923, Mesir menerapkan kebijakan terkait keseimbangan serta kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya, perempuan masih belum mendapat hak memilih dan hanya diberikan kepada laki-laki saja.¹⁷ Perlakuan diskriminasi dan penindasan terhadap golongan perempuan dinilai telah mencuri hak-hak kaum perempuan. Kelompok feminis ini menuntut adanya kesetaraan gender dan hak asasi manusia di pelbagai aspek kehidupan. Salah satu strategi yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita feminis Mesir adalah dengan mendirikan organisasi golongannya dengan nama *The Egyptian Feminist Union* (EFU).¹⁸ Jika dilihat dari sejarah feminis di atas serta dengan merujuk bahwa Bahitsa lahir pada tahun 1886 dan wafat 1918, maka penulis meyakini Bahitsa adalah salah satu dari anggota kelompok feminis periode kedua. Hal tersebut selaras dengan ia yang aktif menuliskan esai-esai terkait isu-isu perempuan menandakan bahwa pada masa hidupnya, feminis Mesir sudah mulai muncul ke permukaan.

¹⁷ Reza Bakhtiar Ramadhan, *Fenomena Hijab Baru di Mesir: Transformasi Gerakan Feminisme Mesir pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak*, (Tesis, Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A), Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, 2018), h. 3

¹⁸ Reza Bakhtiar Ramadhan, *Fenomena Hijab Baru di Mesir: Transformasi Gerakan Feminisme Mesir pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak*, h. 4

Jika kamu tidak mengetahui antara Keduanya, maka tanyakan kepadaku

Bait tersebut menandakan bahwa ia sosok perempuan yang percaya diri dan berpendidikan, serta tidak malu untuk mengakui kepintarannya melalui syair-syair, terlihat pada kalimat فأسألي (maka tanyakan kepadaku).

Dalam puisi tersebut menyiratkan bahwa Bahitsa merupakan perempuan modern yang kritis terhadap situasi sosial. Sebagai seorang perempuan, ia tidak serta merta menerima apapun kondisi sosial ataupun peraturan dari pemerintah. Padahal hal tersebut tidak jarang hanya menyudutkan satu golongan dan berpihak kepada golongan lainnya. Sebagai perempuan yang berpendidikan dan mengenyam bangku sekolah, menumbuhkan jiwa kritik Bahitsa sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kaum perempuan. Dapat dilihat, ia berani menulis esai mengenai isu-isu perempuan, bahkan menyuarakan aspirasinya sebagai perempuan dengan tanpa menghasut dan tetap bijaksana. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam puisi ini terkait kritiknya terhadap membuka cadar atau menampakkan wajah. Ia memberitahu kepada golongan khususnya mengenai hukum bercadar terlebih dahulu, lalu baru memberikan pilihan untuk memilih pendapat imam mana yang cocok maka ikutilah tanpa mempersulit ruang gerak perempuan, dapat dilihat melalui bait berikut

Adapun sufur (cadar), maka hukumilah dalam syariat tanpa mempersulit

Sebagai salah satu anggota feminis, bait ini bertujuan sebagai bentuk ia mengkritisi kebijakan pemerintah yang

mewajibkan perempuan mengenakan cadar saat keluar rumah. Padahal Bahitsa meyakini bahwa aturan tersebut sebenarnya untuk membatasi gerakan dan keterlibatan golongan perempuan di ruang publik. Oleh sebab itu, ia menyindir melalui bait:

ليس النقاب هو الحجاب	ب فقصري أو طولي
<i>Niqab bukanlah hijab</i>	<i>Maka pendekkanlah</i>
	<i>ataupun panjangkan</i>
فإذا جهلت الفرق بين	هما فدومك فاسألي
<i>Jika kamu tidak</i>	<i>Keduanya,</i>
<i>mengetahui antara</i>	<i>maka tanyakan kepadaku</i>

Tetapi ia dengan cerdas menyampaikan aspirasinya melalui tulisan dengan memanfaatkan profesinya sebagai penyair yang terkenal. Hal tersebut membuktikan bahwa ia merupakan perempuan cerdas dengan beragam siasat agar pemikirannya dapat tersampaikan, terlihat melalui bait berikut:

من بعد أقوال الأئم *** ة لا مجال لمقولي

“Dari sebagian argument para imam, Tidak ada ruang untuk ucapanku”

لا أبتغي غير الفضى *** له للنساء فدملي

“Saya tidak berharap selain keutamaan, Perempuan, maka percantiklah”

Sastrawati Mesir lainnya yang sangat dikenal masyarakat dunia adalah Nawal el Sadawi, seorang feminis dari Mesir, lahir di Mesir 27 Oktober 1931, dan meninggal 21 Maret 2021 di Kairo. Ia adalah seorang penulis feminis, aktivis, dokter, dan psikiater Mesir. Ia menulis banyak buku tentang perempuan dalam Islam, dokter kesehatan masyarakat Mesir, psikiater, penulis, dan sastrawati. Ia mendekonstruksi budaya patriarki

Mesir melalui sastra terutama dalam novel-novel kontroversialnya. Menurutnya, feminis adalah universal dan melawan semua yang dimiliki perempuan, termasuk kesetaraan gender yang didengungkan oleh Barat. Ia juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Karena itu, sangat merugikan wanita saat itu. Nawal el-Saadawi seolah menyampaikan keinginannya untuk menyelamatkan wanita dari keterpurukan melalui karakter yang ia ciptakan di setiap karya. Karya-Karya Nawal el-Sadawi yang berisi tentang kesetaraan gender dan Emansipasi Perempuan Karya tentang Kesetaraan gender antara lain; *The Hidden Face of Eve, Woman and Sex* dan sebagainya . Karya-karya sastranya tentang emansipasi antara lain: "Woman at Point Zero" (Perempuan di Titik Nol, "Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Surga", dan sebagainya.

Sebagai seorang sastrawati yang kritis terhadap berbagai permasalahan perempuan, Nawal menulis 27 judul buku, selama dua puluh lima tahun, baik fiksi maupun non fiksi yang semuanya bertemakan perempuan, khususnya perempuan Arab dan status mereka di mata hukum perundang-undangan.

Karya-karyanya antara lain:

1. *Muzakkirat Tabiba (Memoirs of women doctor)*, merupakan novel pertama yang diterbitkan pada tahun 1960. Novel ini bercerita tentang pengalaman pribadi seorang dokter perempuan.
2. *Ghaib (searching)*, novel yang diterbitkan tahun 1968, bercerita tentang pencarian jati diri seorang perempuan yang ingin mencapai cita-cita di bidang kimia analisis.
3. *An nisaa wa al Jins (Women and sex)* novel non fiksi diterbitkan di Beirut Libanon, pada tahun 1972, berbicara tentang perempuan dan seksualitas serta tema lain yang sensitif menyangkut politik dan keagamaan.

4. *Mawt ar Rajul al Wahid 'ala al Ardh*, diterbitkan pada tahun 1974.
5. *Women and Neurosis in Egypt*, sebuah buku hasil penelitian yang diterbitkan tahun 1976.
6. *Imra'a inda Nuqtat as Sifr* (Women at point zero) diterbitkan 1979.
7. *Al Wajh al 'Aary lil mar'aal 'Arabiya* (*The Hidden Face of Eve*), diterbitkan pada tahun 1977, memuat tentang topic-topik yang berkenaan dengan perempuan Arab, misalnya tentang prostitusi, hubungan seksual, perkawinan dan perceraian serta Islam fundamentalis.
8. *Ughniya al athfaal ad Daairiyya* (*The Circling song*), merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 1978.
9. *Mawt Ma'ali al Wazir sabiqan* (*Death of an Ex Minister*) berupa novel yang diterbitkan tahun 1979.
10. *Kanat hiaya al adh'af* (*She has no place in Paradise*), berupa kumpulan cerita pendek, diterbitkan pada tahun 1979.
11. *Imroatani fi Imra'a* (*Two Women in one*), berupa cerpen yang dipublikasikan pada tahun 1983.
12. *Suqut al Imam* (*The Fall of Imam*), berupa cerpen yang diterbitkan pada tahun 1987, bercerita tentang kekuatan seorang imam yang tidak memiliki dosa karena kedekatannya dengan Tuhan.
13. *Muzakkirat fi Sijn an Nisa* (*Memoirs from the Women*), berupa buku yang dipublikasikan setelah ia keluar dari penjara (1983), yang intinya dia melanjutkan serangannya untuk menekan pemerintah Mesir yang korupt.
14. *Qanat wa Iblis* (*The Innocence of the Devil*) berupa novel yang diluncurkannya tahun 1992¹⁹. Cerpen ini cerita tentang hubungan yang rumit dan dingin antara Tuhan

¹⁹ Lihat Nawal al Saadawi, *Searching*, (London: Zed Books), 1991. Nawal El Saadawi, *he Hidden Face of Eve* (Boston: Zed Press) 1980, h 2-3

dan setan, merupakan refleksi dari kebaikan dan kejahatan.

Pada akhir tahun delapan puluhan (1980), Nawal dipenjarakan dibawah rezim Anwar Sadat, dengan tuduhan kriminal melawan pemerintah. Setelah keluar penjara (1982), karir Nawal lebih difokuskan pada perjuangan kehidupan sosial perempuan Mesir dan kebebasan berfikir.

4. *Sastrawan perempuan pada masa kontemporer*

Perkembangan sastra arab pada masa kontemporer di Mesir dilatarbelakangi dua faktor utama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah adanya ketidakpuasan dan keprihatinan sebagian masyarakat Arab atas situasi dan kondisi Arab pada saat itu. Sedangkan faktor eksternal yakni adanya pengaruh akibat interaksi bangsa Arab dengan kebudayaan Barat. Kedua faktor tersebut saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya.²⁰

Syair Arab kontemporer mengikuti perkembangan bahasa Arab yang mengiringi perkembangan zaman.²¹ Sastra Arab Kontemporer merupakan reaksi dan gejala responsif terhadap perubahan sosial serta pemikiran yang menekankan pada inklusivitas struktur, idealitas dan refleksi konten, maupun performansi.²²

Gaya bahasa maskulin perempuan adalah gaya bahasa perempuan yang ditampilkan dianggap karena hasil

²⁰ Taufiq A Dardiri, "Perkembangan Puisi Arab Modern," *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 2 (2011).

²¹ Abd Aziz dan Yuan Martina Dinata, *Bahasa Arab Modern dan Kontemporer; Kontinuitas dan Perubahan*, Mumtaz: Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman 3.3 (2029), h. 155

²² Luhuringbudi, *Identitas Sastra Arab Kontemporer dan Perubahan Ekonomi*, Alfaz: Arab Literatures for Academic Zealots, (2018), h. 4

mengadopsi bahasa laki-laki yang cenderung berorientasi kepada status yang ia sandang, berjuang pada sebuah kompetisi agar dapat memenangkan kompetisi dalam sebuah percakapan. Alasan tersebut berlandas kepada ungkapan Tannen terkait bahasa laki-laki yang menyebutkan bahwa laki-laki memandang status dalam sebuah percakapan, tetapi hal tersebut merupakan bagian penting yang menjadikan laki-laki tidak takut dan lebih berani saat beradu argumen dan dapat mempertahankan pendapatnya secara tegas.²³

Adanya gaya bahasa gender maskulin versus feminim ternyata hampir mendominasi bahasa Arab, hal tersebutlah yang melahirkan adanya konsep segregasi relasi gender. Maskulin dan feminin diposisikan pada dua tempat yang berbeda dan harus dipisahkan. Akibat dari pemisahan ini adalah munculnya dikotomi yang memberi kebebasan kepada bahasa maskulin, selain itu, menyebabkan perempuan menjadi ketergantungan kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan substansial seperti sosial, budaya, ekonomi, religi, politik dan lainnya. Sistem gender dalam bahasa Arab terdapat hampir di semua tingkatan. Distingui gender dengan rinci dan ketat antara perbedaan feminin dan maskulin yang diwakili oleh gaya bahasa baik feminim atau maskulin merupakan bukti nyata adanya budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat Arab. Dapat dilihat melalui penamaan sebuah suku atau kabilah di Arab pasti menggunakan garis keturunan dari pihak laki-laki.²⁴

²³ Deborah Tannen, *Communication Matters 1: He Said/She Said*, (tt, 2003), h. 25-48

²⁴ Sangra Juliano P, "Komunikasi Dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminim," *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 5, no. 1 (2015): 19-30, <https://repository.unikom.ac.id/30705/1/sangra-juliano-p.pdf>, h. 278

Gaya bahasa maskulin tidak hanya disiratkan perempuan dalam makna pada bahasa yang ia gunakan, melainkan sampai kepada penggunaan bahasa yang jelas, langsung untuk mengungkapkan pendapatnya, serta penggunaan kalimat-kalimat yang keras pada pembicaraan atau tulisannya untuk dapat membuktikan bahwa perempuan tersebut merupakan sosok yang berani dalam berpendapat. Gaya bahasa maskulin bukan diartikan sebagai sesuatu yang negatif, melainkan bagaimana penyair perempuan melantunkan syairnya dengan bahasa yang tegas dan jelas sebagai upaya menyampaikan apa yang ia maksud, serta bagaimana ia berpendapat tentang suatu sebagaimana laki-laki yang maskulin. Karena saat pria menginginkan sesuatu, maka mereka akan memintanya secara langsung. Selain itu, laki-laki akan merasa bahwa mereka memiliki status lebih sehingga tidak segan menggunakan bahasa keras secara langsung.²⁵ Pada puisi Nazik al-Malaikah bait yang menunjukkan gaya bahasa maskulin adalah:

بتراشق الصبيان بالأحجار في
عُرْض الطريق
الماء الملوّث في الأزقة بمسارب

*Serta anak-anak saling melempar batu di pinggir jalan
Dengan meminum air kotor*

Puisi tersebut menggunakan gaya bahasa maskulin, karena Nazik al-Malaikah dengan berani menggambarkan bagaimana keadaan dan hiruk pikuk Baghdad pada masanya. Melalui bait الماء الملوّث في الأزقة، بمسارب (Dengan meminum air kotor),

²⁵ Sangra Juliano P, “Komunikasi Dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminin,” , h. 277

menggambarkan masih banyak masyarakat Baghdad menempati kelas ekonomi menengah ke bawah.

Sastrawati masa Kontemporer (Nazik al-Malaikah) merepukan penyair Arab perempuan yang cerdas, kritis, emosional, dan ekspresif. Dia juga berani melakukan aturan yang bersebrangan dengan aturan syair klasik, seperti diharuskannya berdasarkan ilmu 'arudh dan Qafiyah. Namun dia tidak menindahkan aturan itu.

Puisi karya Nazik al-Malaika banyak mencerminkan dunia yang dipenuhi dengan keputusan dan keputusan melengkapi perasaan kesepian. Potongan bait yang menunjukkan bahwa Nazik al-Malaikah memiliki rasa emosional yang tinggi yakni pada bait berikut:

ترعشه الذِكرُ نبأً تعرَّ في الدروب فلم يجد مأوى صдах
فأوى إلى النسيان في بعض الحُفار
والليل أسلم نفسه دون اهتمام

*Seolah-olah mengabarkan berita akan ada kesulitan di jalan-jalan,
tidak dapat menemukan tempat berlindung kesulitan
maka dia bernaung dalam kelupaan di sebagian kuburan
Malam menyelamatkan tanpa perhatian*

Demikian, tulisan sederhana ini, selintas melihat bagaimana Perempuan dan sastra yang selalu menarik dikaji. Harapan kedepan masih banyak lagi karya-karya sastra tentang bagaimana keterlibatan perempuan, karena perempuan adalah sang empu “seni keindahan dunia” yang melahirkan berjuta generasi dan berjuta potensi yang dapat digali darinya, bahkan lebih jauh dari itu semua.

Kesimpulan

Sastra dan Perempuan dalam lintasan Sejarah dunia Arab tak pernah lekang kering dibahas, mereka memiliki karakteristik masing-masing dalam menulis karya sastranya, terutama dari aspek bahasa, gaya bahasa, dan budaya juga karakter.

Kesimpulan dari tulisan ini, bahwa penulisan oleh perempuan dan bahasa perempuan oleh penyair perempuan masa jahiliyah, Islam, modern, dan kontemporer terbagi menjadi dua macam, yaitu bahasa feminin dan bahasa maskulin. bahasa feminin merupakan bahasa yang sering digunakan oleh perempuan yang cenderung berorientasi pada terjalannya suatu hubungan serta memperhitungkan penerimaan orang lain. Sedangkan bahasa maskulin adalah bahasa yang digunakan laki-laki, biasanya banyak menunjukkan sisi independen, atau bisa disebut fokus pada pembuktian pemikiran individu seorang laki-laki.

Penyair perempuan pada masa jahiliyah, al-Khansa berkarakter emosional, penyabar, dan ekspresif. Penyair perempuan masa Islam, Ulayya binti al-Mahdi dan Walladah binti al-Mustakfi mendeskripsikan penyair Arab berupa sosok berkarakter emosional, sensitif, setia, dan ekspresif. Bahitsa al-Badiyyah, melalui puisinya berjudul *Tukhotibu al-Mar'ah al-Mishriyyah* ternyata merepresentasikan bahwa ia sebagai perempuan modern yang berpendidikan memiliki sifat percaya diri, kritis, dan bijaksana. Terakhir, Nazik al-Malaikah sebagai penyair kontemporer dideskripsikan sebagai sosok yang kritis dan emosional. Ternyata meskipun dari masa terkini, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki rasa emosional yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui puisi Nazik al-Malaikah yang berjudul *Martsiatun Imro'atun la Qiimatu lahaa* bahwa ia gemar menulis puisi-puisi elegi untuk

mengekspresikan perasaannya. penulisan perempuan dan budaya perempuan dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya penyair perempuan adalah gemar menulis puisi-puisi ratapan khusus pada masa jahiliyah dan Islam, baik ratapan pada keluarga, maupun kepada kekasihnya. Sedangkan pada masa modern, perempuan sudah berani menyuarkan golongannya. Hingga pada masa kontemporer, ia sudah menunjukkan wujud kepeduliannya kepada lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam menuangkan ide dan perasaan seorang penyair perempuan Arab dari perjalanan sejarahnya dari masa ke masa.

Daftar Pustaka

- Aziz Anwar Fachrudin, *Pengantar Sejarah dan Madzhab Linguistik Arab*, (Sidoarjo: Lisan Arabi, 2017)
- M.A Semi, *Metode Penelitian Sastra*, (Bandung: CV Angkasa, 2012),
- Setya Yunawa Sudikan, "Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra," *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya* 2, no. 1 (2015)
- Sidi Gazalba, *"Kebudayaan Sebagai Ilmu"*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1973)
- Annisa Malinda Natasya Hagk and Umi Najihah K Kholilah, "Perkembangan Kesetaraan Gender Di Negara-Negara Arab," *Kajian Bahasa, Sastra dan Budaya Arab* 2 (2018)
- Zainuddin Fananie, *Telaah Sastra*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001)
- Ahmad Al-Hashimi, *"Jawahir al-Adab"*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

- Asriyah Asriyah, "Perkembangan Sejarah Sastra Arab," *Jurnal Rihlah* V, no. 2 (2016)
- Wildana Wargadinata dan Laily Fitriani, "Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam"
- Imam Ibn Qutaibah, *al-Syi'ir wa al-Sya'ara*, Juz 1, tt)
- Achmad Syaifuji and Bambang Irawan, "Pergeseran Konteks Syair Arab
- Nur Syifaa dan Che Abdullah Atikah, "Woman Character in Bidadari from Gynocritics Perspective: Psychology and Culture Research," *Jurnal Wacana Sarjana* 2, no. 4 (2018)
- Walladah bint al-Mustakfi - Emily Kittell-Queller (weebly.com)
- سيدات في القصر العباسي... غلّية بنت المهدي - جريدة الغد (alghad.com)
- Taufiq A Dardiri, "Perkembangan Puisi Arab Modern," *Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra* 10, no. 2 (2011).
- Abd Aziz dan Yuan Martina Dinata, *Bahasa Arab Modern dan Kontemporer; Kontinuitas dan Perubahan*, Mumtaz: Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman 3.3 (2029)
- Luhuringbudi, *Identitas Sastra Arab Kontemporer dan Perubahan Ekonomi*, Alfaz: Arab Literatures for Academic Zealots, (2018)
- Deborah Tannen, *Communication Matters 1: He Said/She Said*, (2003)
- Sangra Juliano P, "Komunikasi Dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminim," *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 5, no. 1 (2015): 19-30, <https://repository.unikom.ac.id/30705/1/sangra-juliano>
- Sangra Juliano P, "Komunikasi Dan Gender: Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminin,"

Asriyah Asriyah, "Perkembangan Sejarah Sastra Arab"

Reza Bakhtiar Ramadhan, *Fenomena Hijab Baru di Mesir: Transformasi Gerakan Feminisme Mesir pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak*, (Tesis, Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A), Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, 2018)



BAB IV

PEREMPUAN DAN POLITIK





KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM POLITIK: *STUDI KASUS PEMERINTAHAN RATU-RATU ACEH ABAD KE-17*

Dr. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si.

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan permasalahan yang selalu aktual untuk dibicarakan. Suksepsi kepemimpinan salah satu agenda politik yang paling penting dalam perpolitikan sebuah Negara. Di Dunia Islam wacana kepemimpinan merupakan isu yang sudah diperbincangkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebelum jasad beliau dikebumikan. Peristiwa ini penuh dengan muatan politis, begitu pula pergantian kepemimpinan nasional menjadi ajang berbagai kepentingan politik yang dapat dilalui secara aman dan damai, tapi sering juga penuh konflik dan pertumpahan darah. Pertarungan politik lebih menarik bila muncul kandidat perempuan, fenomena ini terlihat hampir diseluruh dunia, baik di Negara maju maupun berkembang, Negara Islam maupun non Islam. Kontroversi suksesi terhadap perempuan di bidang politik selalu menimbulkan perdebatan yang tak pernah usai karena perbedaan konsep idealitas dan realita historis. Kontroversial karena ada pesan agama yang tekstual oleh sebagian ulama dianggap tidak membolehkannya.

Selama berabad-abad perempuan dikategorikan sebagai *the second class of people* (masyarakat kelas dua). Dominasi kaum laki-laki di berbagai sektor kehidupan menyebabkan penilaian ini lahir. Menurut Engineer, secara historis telah terjadi dominasi dalam

masyarakat di sepanjang zaman. Perempuan lebih rendah dari laki-laki, muncul doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan seperti laki-laki, perempuan dibatasi wilayahnya di dapur dan rumah, dianggap tidak mampu mengambil keputusan di luar wilayahnya, maka perempuan tidak memiliki kecakapan atau tidak layak menjadi pemimpin.¹ Kepemimpinan hanya cocok untuk laki-laki, karena perempuan dibatasi hanya disekitar “Empat persegi” milik ayah atau suaminya, oleh karena itu, kepemimpinan hanya cocok untuk kaum laki-laki. Inilah gambaran tragis sejarah kehidupan perempuan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak politik. Namun demikian realitas historis mengungkap data-data, dimana beberapa perempuan pernah menjadi penguasa, melalui lembaran-lembaran sejarah dapat diketahui deretan perempuan yang tercatat sebagai sebagai ratu.

Di Nusantara, salah satu wilayah Islam yang menyimpan eksistensi perempuan di dunia politik adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Empat perempuan pernah berkuasa secara berturut-turut di kerajaan tersebut abad ke 17. Kerajaan Aceh terletak diujung sebelah utara pulau Sumatera atau yang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar, yang dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk. Kawasan ini juga dikenal dengan sebutan Aceh Lhee Sago (Aceh Tiga Segi), dan Aceh Inti (Aceh Proper)² atau Aceh sebenarnya, karena daerah inilah yang menjadi Kerajaan Aceh, pusat ibukota kerajaan, yakni bernama Bandar Aceh atau secara lengkap Bandar Aceh Dar As-Salam.³

Ratu-Ratu yang Berkuasa di Kerajaan Aceh Darussalam

Kekuasaan perempuan di kerajaan Aceh berlangsung selama 60 tahun (1641-1699), walaupun kekuasaan ratu penuh nuansa polemik,

¹ Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, (yogyakarta: Bentang Budaya, 1994), h. 55

² T Ibrahim Alfian 1972, “Emas, Kafir dan Maut” dalam Nusantara edisi Juli no 2, Kuala Lumpur, Hal 22.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1997, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Jakarta, Balai Pustaka , hal 60

namun keberadaan mereka adalah para pemimpin yang menganggunkan dari semua contoh pemerintahan perempuan di kepulauan. Nusantara, suatu tempat yang mempunyai tempat yang sangat penting dalam sejarah. Profesor etnologi Universitas Leiden Belanda, P.J. Veth. Sebagaimana dikutip Rusi Sufi pada tahun 1870 membuat tulisan tentang Pemerintahan Wanita di Kepulauan Nusantara. Kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh empat perempuan (ratu atau sulatnah) secara berturut-turut. Mereka adalah Sultanah Tahul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678 M), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688 M), Sultanah Kamlatuddin Syah (1688-1699 M).

1. Sultanah Tahul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M)

Safiatuddin seorang putri yang cerdas, gemar membuat sajak dan mengarang, sehingga dia sangat populer di bidang kesusastraan. Sejak usia tujuh tahun sudah mendapatkan pendidikan yang baik bersama Iskandar Tsani dari Ulama Hamzah Fansuri dan Nuruddin Arraniri, dia juga mempunyai sifat keperwiraan karena terpengaruh saudaranya Maharaja Lela Abdul Rahim, seorang arteleri.⁴ Kemakmuran yang dicapai Aceh, dijelaskan dalam kutipan Bustanul Salatin, Al-Raniri, digambarkan⁵:

“.....Banda Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Safiatuddin terlalu makmur dan makanapun terlalu murah dan segala manusia dalam kesentausaan dan mengikut sabdanya. Dan dialah yang adil dalam barang hukumnya dan tawakal pada segala barang pekerjaannya dan sabar pada segala barang halnya, lagi mengerasi segala yang durhaka. Dan dialah Haibat pada segala kelakuannya dan bijaksana pada segala perkataannya, dan lagi halim perangnya dan pengasih akan segala rakyatnya dan lagi syafaatnya akan

⁴ A. Hasymy, 59 tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). H. 87

⁵ Al-Raniri, Bustanul, h. 59

segala fakir dan miskin. Dan dialah yang mengasihi dan menghormati akan segala ulama dan anak cucu Rasulullah SAW yang datang ke Banda Aceh Darussalam, serta karuniannya dengan sempurnanya. Dan dialah Raja yang tinggi hematnya dan amat murahny.....

Pada masa Safiatuddin, Ilmu pengetahuan berkembang di Kerajaan Aceh. Ulama besar Nuruddin Ar-Raniri dan Abdurrauf Al-Sinkili banyak mengarang kitab atas permintaan ratu, bidang militer memang kurang berhasil, karena tidak mendapat perhatian yang besar dari ratu, karena sebenarnya bidang militer sudah mengalami kemunduran sejak Aceh mengalami kekalahan dari Portugis untuk merebut Malaka pada masa Iskandar Muda tahun 1629. Dengan demikian kemunduran ini bukan terjadi semenjak dipegang ratu tapi sebelum Iskandar Muda wafat. Mungkin hal ini menjadi salah satu sebab para ratu tidak diperhitungkan karena tidak memperluas daerahnya. Ilyas Sutan Pamenan menggambarkan Safiatuddin yang cakap dan bijaksana, dengan ungkapan⁶:

“Rakyat Aceh yang mula-mula dengan perasaan sangsi melihat Sri Ratu Tajul Alam sebagai Sultan dan melakukan semata-mata karena tidak kaum kerabat almarhum Sultan Iskandar Tsani ataupun almarhum Sultan Iskandar Muda yang laki-laki yang dapat mereka pilih, merasa sekarang bahwa pilihan itu tidak begitu salah. Perjuangan baginda untuk mempertahankan nasib rakyatnya cukup ulung dan membangkitkan persaan hormat dan takjub pada penduduk Aceh ..”

Safiatuddin berkuasa selama 35 tahun dan meninggal pada hari Rabu, 3 Sya’ban 1086H, bertepatan dengan 25 Oktober 1675M.

2. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678 M)

Naqiatuddin tidak lama mengendalikan pemerintahan di Kerajaan Aceh. Ia berkuasa hanya 2 tahun 3 bulan 27 hari. Ia wafat

⁶ Ilyas Sutan Pamenan, Rencong, h. 74

pada hari Minggu, 29 Dzu al-qa'dat 1088 H atau tanggl 23 Januari 1678 M.⁷ Latar belakang penobatan Naqiatuddin berdasarkan kesepakatan para elite kerajaan. Rekomendasi ini sebagai solusi konflik perebutan tahta di antara mereka. Berdasarkan hal tersebut dapat diprediksi bahwa periode ini tidak mungkin terjadi penolakan terhadap kepemimpinan perempuan.⁸ Setelah penobatannya Naqiatuddin membentuk federasi Aceh Tiga Sagi, yaitu menjadikan daerah asal kerajaan Aceh atau Aceh inti kepada tiga federasi.

Pembentukan federasi ini terjadi setelah peristiwa kebakaran besar di Istana dan Masjid. Pembakaran ini dilakukan kelompok oposisi yang semakin meningkat dan mereka melakukan sabotase. Pada masa kekuasaannya Naqiatuddin menyempurnakan Adat Meukuta Alam atau undang-undang dasar Kerajaan Aceh yang dibuat pada masa Sultan Iskandar Muda dan menyesuaikannya dengan situasi. Mengubah warna bendera kerajaan Aceh dengan dasarnya berwarna putih dan pedang warna merah. Sebelumnya dasarnya merah pedang berwarna putih, nama pedang tetap: Alam Zul Faqar/ Alam Tjap Peudeung⁹. Naqiatuddin juga mengeluarkan mata uang sendiri yang terbuat dari emas.

3. *Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688 M)*

Ratu Zakiatuddin memerintah kerajaan Aceh relatif lama kurang lebih selama 10 tahun. Zakiatuddin adalah seorang negarawan dan bijaksana, lancar berbahasa Arab, Parsi, Belanda, India dan Spanyol. Pada masa itu datang utusan Inggris bermaksud membuat kantor dagang yang diperkuat bentengnya sendiri. Namun ratu hanya menyetujui pendirian kantor tanpa banteng. Masa Zakiatuddin juga tidak lepas dari pihak oposisi yang ingin menjatuhkan pemimpin perempuan, kaum politik terus memperalat kaumWujudiyah untuk menentang raja perempuan, mereka mengirim protes ke syarif dan mufti Makkah. Abdurrauf tetap sebagai penasehat dan kaum

⁷ T. Iskandar ,Bustan.... Hal 73"74

⁸ Al"Yasa Abubakar,Syeikh Abdurrauf....hal 10

⁹ M. Yunus Jamil,Silsilah.... H. 47

wujudiyah ditindak dengan tegas. Zakiatuddin meninggal dunia pada hari ahad, 8 Zulhijjah 1098H/ 3 oktober 1688 M.¹⁰

4. Sultanah Kamlatuddin Syah (1688-1699 M)

Ketiga pemimpin sagi menetapkan Kamalatuddin sebagai ahli waris kerajaan . Ketetapan ini tidak diterima oleh elite kerajaan lain, mereka menginginkan laki-laki sebagai pemimpin.¹¹ Konflik pada masa Kamaltuddin lebih dahsyat dibandingkan Safiatuddin dan ratu-ratu sebelumnya, seorang penjelajah asing yang singgah di Aceh tahun 1688 William Dampier, merinci peta konflik tersebut *“While I was on my voyage to Tonquin, the old queen died, and there was another queen chosen in her room, but all Oronkeys not for that election: many of them for choosing a King. Four of the Oronkeys who lived more remote from the court, took up arms to opposethe new queen dan thr rest of the Oronkeys, and brought 5 or 6000 me against the city. This Army was on the east side of the river, and had all the country on the side, and so much of the city also, as in on that side the river, under their power, but the queen’s palace and themain port of the city, which stands in yhe west side, held out stoutly. The queens party, to oppose them, kept a small guard of shouldier just at the landing-place. The Shahbandar of Achin had a tent set up there, he being the chief manager ofher affairs, and for the more security, he had 2 or 3 small brass guns of minion bore planted by tent all the day with their muzzle against the river.”*¹²

Pemerintahan Para Ratu di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Serta Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

A. Bidang Politik

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada abad ke 16, kerajaan Aceh merupakan ahli waris dari Kerajaan Islam Perlak (225-692

¹⁰ M.Yunus Jamil, Silsilah...,h. 47[”]48

¹¹ Ibid ;A hasymy,59 Tahun....h. 211

¹² Luthfi Auni, The Decline of The IslamicEmpire of Aceh (1641”1669),Jakarta : Departemen Agama R.I, hal 88.

H/840-1292 M), Kerajaan Islam Samudra Pasai (433-831 H/ 1042-1428) dan Kerajaan Islam Lamuri/ Kerajaan Darussalam (601-916 H/ 1205-1511) yang diproklamirkan pada 916 H/1511 M. Administrasi pemerintahannya disusun dan dibenahi secara bertahap sesuai dengan perkembangan politik zamannya. Periode yang paling menonjol pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, peraturan-peraturan dikeluarkan Kanun Al-Asyi atau Undang-undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut juga Kanun/ Adat Meukata Alam.¹³ Uraian dibawah ini menggambarkan organisasi Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Ratu, sebagai berikut:

1. Bentuk dan Dasar Negara

Bentuk negara menurut Adat Meukata Alam adalah Kerajaan dan dasar Negara adalah Islam. Dengan ringkas dijelaskan :

- a. Negara berbentuk kerajaan, kepala Negara bergelar Sultan dan diangkat turun-temurun. Dalam keadaan tidak ada yang memenuhi syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.
- b. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam, dengan ibukota Negara Banda Aceh Darussalam.
- c. Kepala Negara bergelar Sulthan Imam Adil, yang dibantu oleh sekretaris Negara bergelar Rama Setia Kerukan Katibul Muluk.
- d. Orang kedua dalam kerajaan, yaitu qadli Malikul Adl dengan empat orang pembantunya bergelar Mufti.
- e. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahannya, kanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar Wazir (Perdana Menteri dan Menteri-menteri).

2. Negara Hukum

Adapun bentuk hukum yang diterapkan dalam Kerajaan Aceh Darussalam :

¹³ Uraian tentang peraturan ini lihat: Tuanku Abdul Jalil Adat meukata Alam . Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)

- a. Kekuasaan Hukum (Yudikatif) yang dipegang oleh Qadli Malikul Adil.
- b. Kekuasaan Adat (Eksekutif) yang dipegang oleh Sulthan Malikul Adil.
- c. Kekuasaan Kanun (Legislatif) yang dipegang oleh Majelis Hakim Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat).
- d. Kekuasaan Reusam (Hukum Darurat) yang dipegang oleh penguasa tunggal, yaitu Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu Negara dalam keadaan perang.

Adapun jenis-jenis hukum yang termaktub dalam Kanun Mekuta Alam, sebagai berikut:¹⁴

- a. Hukum Syar'i, Adat Syar'i, Reusam Syar'i dan Kanun Syar'i (yaitu Hukum dasar atau Undang-Undang pokok yang mengatur keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentraman: sumbernya al-Quran, al-Hadis, Ijma Ulama dan Qias).
- b. Hukum Aridli, Adat Aridli, Reusam Aridli, dan Kanun Aridli. (yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik Sultan maupun para Wazir/ Menteri, untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan).
- c. Hukum Dharuri, Adat Dharuri, Reusam Dharuri, dan Kanun Dharuri. (Yaitu Undang-undang atau peraturan-peraturan darurat yang langsung dibuat atau dijalankan oleh Sultan sebagai penguasa tertinggi angkatan perang, untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan ketentaraan, bila kerajaan dalam keadaan perang).
- d. Hukum Nafsi, adat Nafsi, Reusam Nafsi dan Kanun (Yaitu peraturan-peraturan istimewa yang khusus dibuat oleh Sultan untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketentaraan).

¹⁴ Lihat MUI Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Daerah Aceh, 50 tahun...., h.25

- e. Hukum ‘Urfi, Adat Urfi, Reusam Urfi dan Kanun’Urfi (yaitu pertauran-peraturan yang dibuat oleh para penguasa daerah untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan ketentaraan).

3. *Struktur Pemerintahan*

Susunan pemerintahan wilayah kerajaan Aceh dibagi atas: Gampong, mukim, nanggroe, dan kerajaan. Bentuk teritorial terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah Gampong atau Kampung. Sebuah gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Yang mengepalai Gampong disebut geucik dan wakilnya disebut Waki. Selain Waki pada sebuah Gampong terdapat pula pembantu- pembantu geucik yang disebut Teungku Meunasah dan Ureung Tuha. Mereka termasuk orang-orang tua yang berpengalaman.¹⁵ Struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan hingga pertengahan abad ke 17. Perubahan terjadi pada masa pemerintahan ratu ke dua, Sultanah Naqiatuddin (1675-1678). Struktur pemerintahan yang mengalami perubahan hanya di daerah inti kerajaan. Wilayah Aceh Besar dibagi menjadi tiga federasi, bentuk federasi ini dinamakan Sagoe dan kepalanya dinamakan Panglima Sagoe.¹⁶ Berdasarkan jumlah sagi itu dinamakan Sagi XXII mukim, Sagi XXV mukim, dan Sagi XXVI mukim.

4. *Pemerintah Pusat*

Kepala pemerintah di tingkat pusat adalah Sultan. Oleh orang Aceh biasa dipanggil “Raja” atau “Poteu” (*our Master*). Dan turunannya memakai gelar “Tuanku”. Kekuasaannya selain wilayah kerajaan Aceh, juga memiliki daerah yang langsung dibawah kendalinya. Daerah ini disebut daerah bebas daerah bibeueh (daerah bebas). Daerah ini diistemewakan karena letaknya strategis dekat benteng atau istana. Sering karena penduduknya orang asing, militer,

¹⁵ K.F.H Van Langen, Susunan pemerintahan Aceh semasa Kesultanan, Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan informasi Aceh, 1986, h. 24"25

¹⁶ Muhammad Said, Aceh.....hal 403-407

dan lain-lain.¹⁷ Menurut naskah Kanun Meukuta Alam, Sultan dalam menjalankan tugas dibantu oleh lembaga lembaga antara lain:

1. Balai Laksamana, markas perang yang dikepalai oleh Laksamana
2. Balai Fardah, mengatur keuangan kerajaan seperti pemungutan bea cukai dan mengeluarkan mata uang.

Kedua lembaga ini pelaksana pemerintahan (eksekutif), ada lembaga lain tempat bermusyawarah, yang disebut “Balai Musyawarah” (lembaga legislatif), terdiri dari tiga bagian:

1. Balairungsari, yaitu terdiri dari empat Ulebalang besar di Aceh
2. Balai Gadeng terdiri dari 22 ulama besar di Aceh.
3. Balai Majelis Mahkamah Rakyat, dewan terdiri dari 73 orang anggota yang berasal dari 72 buah mukim.

Dalam anggota Majelis Mahkamah Rakyat yang jumlahnya 73 orang, ternyata 26 orang adalah perempuan atau sekitar 40 % dari seluruhnya. Hal ini membuktikan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam kaum perempuan telah mempunyai peranan yang besar, mempunyai kedudukan yang baik, sesuai dengan ajaran Islam yang dianut Kerajaan.

B. Bidang Ekonomi

Kerajaan Aceh letaknya sangat strategis di sebelah barat terbentang Lautan Hindia, di sebelah utara dan timur terbentang Selat Malaka, sehingga Aceh merupakan pintu gerbang perdagangan dan jalur lalu lintas internasional. Kondisi perekonomian Aceh pada masa pemerintahan ratu sangat stabil, walaupun sempat terjadi kerusushan, baik masalah internal, seperti rongrongan terhadap kepemimpinan para ratu, ataupun eksternal, seperti upaya Belanda merebut pengaruh daerah taklukan agar dapat memonopoli perdagangan. Namun kehidupan perekonomian mampu mensejahterakan rakyatnya, karena Aceh dikenal sebagai jalur niaga dunia, penghubung utama dua pusat

¹⁷ Ibid.

kebudayaan di Asia, Cina dan India. Kebijaksanaan para ratu juga membuat Aceh semakin makmur, seperti kebijaksanaan Safiatuddin yang disebut Lombard, yaitu memungut cukai atau pajak pada setiap pedagang asing yang melakukan perdagangan dalam wilayah kekuasaan Aceh dan daerah taklukannya, yaitu 5% dari barang yang diperdagangkan.

Selain itu setiap pedagang asing harus mendapatkan lisensi untuk dapat berdagang di daerah yang dikuasai Aceh, seperti pantai barat Sumatera dan Semenanjung Melayu. Lisensi harus diambil di ibukota kerajaan dan terdapat biaya yang harus dibayar pedagang asing. Masing-masing ratu mengeluarkan mata uangnya sendiri, Safiatuddin membuat derham dan menuliskan namanya pada sisi mata uang tersebut dengan nama Safiatuddin Syah, pada sisi lain tertera gelarnya Paduka Sri Sultan Tajul Alam. Jumlah mata uang yang dikeluarkan Safiatuddin sangat banyak dibanding penguasa sebelum dan sesudahnya. Ukuran mata uang emas berdiameter 13 atau kadar emasnya 17-19,2 karat, beratnya 0,58 gram. Begitu pula ratu sesudahnya mengukir namanya masing-masing pada mata uang emas tersebut.

C. *Bidang Sosial Budaya*

Sultanah Safiatuddin dikenal sebagai ratu yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Hal tersebut terlihat dari pengembangan budaya yang dilakukan pada masa pemerintahannya. Menurut de Graff, ketika upacara pemakaman jenazah Sultan Iskandar Tsani, tidak kurang dari 260 gajah tunggangan dikeluarkan dan diturunkan pada saat pawai, semua baju menggunakan beludru, gadingnya dibalut emas, juga diturunkan beberap ekor badak dan kuda Parsi, dihiasi dengan baju terbuat dari emas dan perak, ribuan perempuan turut dalam pawai. Keranda jenazah terbuat dari emas ditutup dengan beludru emas.¹⁸ Dalam memperbaiki status sosial kaum perempuan, Safiatuddin menetapkan peraturan untuk menyediakan rumah bagi anak perempuan. Upaya ini dilakukan karena Safiatuddin melihat

¹⁸ M. Said, Aceh.....h.190

kenyataan menyedihkan kaum perempuan yang berkeluarga, setelah kawin dibawa ke rumah suami, bila terjadi perceraian, dia diusir dan kembali ke rumah orang tuanya.

Safiatuddin mengajukan rancangan undang-undang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, sebagai berikut :

1. Tiap-tiap orang tua haruslah menyediakan sebuah rumah (menurut kadarnya) kepada anaknya yang perempuan kalau dia telah dipersuamikan, rumah itu diserahkan menjadi milik anak.
2. Kecuali rumah, juga harus diberi sepetak sawah, sebidang kebun dan seutas emas.
3. Suami harus tinggal bersama istri di rumah istrinya.
4. Suami harus membawa sepetak sawah kepada isterinya dan menjadi hak milik isteri dan sekedar pakaian emas.
5. Selama mereka masih hidup rukun damai, maka segala harta itu (rumah, sawah, kebun yang berasal dari kedua pihak) menjadi milik bersama
6. Harta kekayaan yang didapati selama dalam masa perkawinan, adalah menjadi milik bersama.
7. Apabila terjadi perceraian, maka suami harus pergi dari rumah isterinya, dan harta-harta pembawaannya (sawah, kebun dan sekedar perhiasan emas) waktu mula-mula kawin, harus menjadi milik isteri, selama harta didapatinya selama dalam masa perkawinan dibagi dua.
8. Selama masa iddah setelah perceraian, segala nafkah hidup isteri menjadi tanggung jawab bekas suaminya.¹⁹

Berkaitan dengan administrasi negara, Safiatuddin juga menetapkan kebijaksanaan bahwa perempuan boleh bekerja seperti pria di lembaga-lembaga negara. Bahkan ia mereposisi jumlah perempuan di parlemen (Balai Mahkamah Rakyat). Pada masa Safiatuddin perempuan lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

¹⁹ Hasymy, 59 Thun.....hal 127-128

D. Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Bandar Aceh selain dikenal sebagai pusat perdagangan juga pusat ilmu pengetahuan, karena di ibukota kerajaan ini terdapat perguruan tinggi yang bernama Jami'at Bait al-Rahman, sampai masa Safiatuddin masih tetap eksis. Safiatuddin juga memerintahkan agar semua pusat pendidikan dibuka untuk kaum laki-laki dan perempuan, tanpa perbedaan. Safiatuddin melihat bahwa dengan jalan pendidikan kaum perempuan dapat ditingkatkan kedudukan dan martabatnya dalam segala kehidupannya. Perempuan diwajibkan belajar di segala bidang bahkan ketentaraan Divisi Keumala Cahaya, misalnya dibentuk oleh ayahnya sebagai divisi pengawal istana dan prajurit-prajurit hanya terdiri dari kaum perempuan, dilanjutkan dan disempurnakan oleh Safiatuddin. Begitu pula armada Inong Bale (wanita janda) yang dibentuk masa Sultan Saidil Mukammil yang telah mengangkat Malahayati sebagai panglima pertama. Pada masa itu dikembangkan lagi tidak hanya janda tapi semua perempuan diperbolehkan.

E. Bidang Agama

Dasar Negara Kerajaan Aceh adalah Islam, yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kerajaan. Ulama menjadi pelestari lambang dan simbol-simbol eksistensi Islam dimana-mana. Mereka yang membumikan syariat Islam. Di Aceh kelas keagamaan menunjukkan peran yang sangat luar biasa. Pelaksanaan pemerintah meskipun berpedoman pada adat, tidak dibenarkan bertentangan dengan hukum.. Di Aceh dikenal pepatah sangat populer "*Hukom ngon adat hanjeut cre, lagee zat ngon sipheut*" (Hukum atau syariat dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti zat dengan sifatnya).²⁰ Kehidupan keagamaan pada masa itu dapat diketahui melalui kegiatan rutin di gampong-gampong, mereka memusatkan berbagai macam kegiatan di meunasah-meunasah. Ulama tingkat gampong diberi tugas melayani masyarakat dalam membayar

²⁰ Zakaria Ahmad, Sekitar..... hal 103

zakat fitrah dan zakat harta yang dilakukan setiap tahun dan mendistribusikan kepada orang yang berhak.

Pada masa pemerintahan ratu, masyarakat Aceh dalam menjalankan keagamaannya berafiliasi kepada beberapa Mazhab. Hal itu diatur dalam undang-undang kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Adat Meukuta Alam. Namun yang mendominasi sampai hari ini adalah Mazhab Syafi'i. Faham keagamaan yang bersifat fiqh, pernah menjadi masalah pada masa pemerintahan ratu, khususnya menjelang penobatan Safiatuddin sebagai ratu pertama. Kepemimpinan Safiatuddin dianggap tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam. Konflik yang dilatarbelakangi faham keagamaan ini menyebabkan kekacauan di pusat pemerintahan dan tidak sedikit ulama yang wafat. Selain Fiqh, juga berkembang faham tasawuf, di antaranya faham Wujudiah yang di dunia Islam dikembangkan oleh Ibn al-Arabi al-Jili, di Aceh dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Sedangkan Faham lain adalah Syuhudiah dipopulerkan oleh al-Gazali, faham ini dikembangkan oleh Nurudin ar-Raniri. Polemik tasawuf tampak reda setelah kemunculan Abdurrauf al-Singkel yang mengkompromikan kedua faham tersebut dalam menyikapi dari polemik yang pernah terjadi sehingga tidak satu golonganpun merasa dimenangkan atau dikalahkan.

Faktor-Faktor Kenaikan dan Kejatuhan Ratu di Aceh

1. *Faktor Politik*

Pada masa kepemimpinan Iskandar Tsani, telah terjadi usaha-usaha kegagalan pengangkatannya karena bukan putra Mahkota dan bukan putra Aceh, namun dengan bantuan Safiatuddin, istri sekaligus putri bangsawan berbagai usaha dan tantangan tersebut dapat diredam, Safiatuddin terjun ke politik praktis karena suaminya menghadapi beberapa permasalahan dengan kaum Wujudiah, sehingga terkadang Safiatuddin harus berhadapan dengan rival-rival suaminya kaum bangsawan Aceh. Said Mudahhar dalam tulisannya memberikan sebuah rumusan yang menurutnya merupakan hasil kesepakatan para peserta musyawarah. Kesepakatan terangkum dalam sebuah rumusan: “ *Dalam Islam, perihal kehidupan sosial bukanlah perintah dari*

pribadi seseorang yang wajib dipatuhi, kecuali bersumber pada syariat."²¹ Bila rumusan ini dapat dijadikan pegangan, dapat disimpulkan bahwa siapa saja boleh menjadi pemimpin asal tidak melanggar syariat. Berhubung tidak seorangpun dari sebgaiian pembesar kerajaan yang menginginkan kekuasaan memiliki hubungan langsung dalam artian anak dari Iskandar Tsani dan Iskandar Muda, maka atas dasar rumusan tersebut ditetapkan Safiatuddin sebagai pewaris tahta dan melanjutkan kepemimpinan kerajaan Aceh.²²

Konfrontasi pihak oposisi (orang kaya dan ulama) yang mendukung kepemimpinan perempuan menjadi ratu terus menerus terjadi, pada masa ratu kedua Naqiatuddin, pada saat itu terjadi pembakaran istana dan Masjid Baiturrahman. Sebagaimana yang dinyatakan Ilyas Sutan Pamenan: "*Pada masa pemerintahan Baginda terjadi Sabotase (pembakaran Masjid Baiturrahman dan pembakaran keraton Daruddunia, istana Sultan dan Balai Mahkamah Rakyat*".²³ Tidak ada gambaran yang jelas apakah kelompok oposisi ini penganut Wujudiyah murni atau terdiri dari para ulama dan elit politik yang haus kekuasaan dan memakai bendera Wujudiyah atau bisa gabungan keduanya. Pada waktu penobatan ratu keempat Kamalatuddin, kelompok orang Kaya/ kelompok elite politik dan para ulama yang tidak mendukung kepemimpinan ratu berusaha menggagalkan penobatan dengan mengirimkan pasukan ke ibukota dipimpin oleh empat Uleebalang memasuki ibukota berhadapan dengan rakyat yang masih menginginkan ratu perempuan.

2. Faktor Sosiologis

Masuknya Islam ke Aceh, dan dijadikan Islam sebagai dasar negara di Kerajaan Aceh Darussalam. mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Mereka mengikuti ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang harus ditaati sungguh-sungguh. Pengaruh Islam yang dominan ternyata menjadi salah satu faktor tampilnya perempuan Aceh dalam berbagai aktivitas,

²¹ Said Mudahhar, Bila Pala Mulai Bebuah, h. 226

²² A Hasymy, 59 Tahun... hal 49

²³ Ilyas Sutan Pamenan, Rencong Aceh di Tangan Perempuan....hal 47

terutama di bidang politik. Peluang menduduki posisi penting bagi perempuan Aceh dimulai ketika Sultan Alaudin Syah (1589-1604), mengangkat seorang admiral perempuan yaitu laksamana Keumalahayati sebagai pemimpin armada laut. Hal ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa kepada perempuan.²⁴ Keterlibatan perempuan dalam Kerajaan Aceh dalam berbagai aktifitasnya sudah dimulai sebelum kehadiran empat orang ratu di Kerajaan Aceh Darussalam.

Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan ratu, berbagai usaha dilakukan termasuk menebarkan gossip dikalangan kehidupan ratu dan keluarganya, hal ini tidak hanya dilakukan kalangan istana yang tidak menghendaki pemimpin perempuan, tetapi juga orang Belanda. Pada masa Safiatuddin muncul isu bahwa ia akan menikah dengan Belanda. Desas-desus itu muncul ketika Safiatuddin memberikan hadiah pada wakil VOC yaitu Bort dan memperbolehkan mendirikan kantor dagang di Padang, Bort dikenal ramah dan bijaksana, dia juga diangkat sebagai Orang Kaya Kumandur Raja, diisukkan ratu akan menikah dengan Bort.²⁵ Pada masa Kamalatuddin, muncul fitnah bahwa ia mendapat bantuan dari seorang syahbandar yang ingin menikahkan putranya yang menjadi pengawal pasukan istana dengan ratu. Kelanjutan cerita ini memang sulit dicari, karena Pamenan berpendapat hal ini hanya “fitnah” sedangkan pernyataan de Roy sebagaimana dikutip Djajadiningrat sebaliknya bahwa perkawinan antara keduanya menjadi kenyataan.²⁶ *Benar tidaknya isu yang beredar langsung maupun tidak langsung menggerogoti kepercayaan dan ikatan emosional ratu dengan rakyatnya, hal ini merupakan salah satu taktik dan siasat kotor yang melemahkan kedudukan ratu, yang pada akhirnya menjatuhkan ratu dari tahta kerajaan Aceh.*

²⁴ Rusdi Sufi, Laksamana Keumalahayati, dalam Wanita Utama Nusantara dalam lintasa sejarah, oleh ismail sofyandkk, Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994), h.30”31

²⁵ A. Hasymy, 59 tahun.....hal 176-177

²⁶ Djajadiningrat, Kesultanan.....hal 60

3. *Faktor Teologis*

Al –Quran dan al-Hadits menjadi rujukan hukum pertama dan utama di kerajaan tersebut. Begitu pula ketika Safiatuddin akan dinobatkan menjadi ratu, perdebatan muncul tentang hukum kepala negara perempuan dalam Islam. Sebagian ulama menyatakan kebolehan dan sebagian lain tidak memperbolehkan. Berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan polemik kepemimpinan perempuan di Aceh terjadi hanya pada dua periode kepemimpinan ratu, pada awal pemerintahan Safiatuddin dan masa Kamalatuddin pada akhir pemerintahannya. Meredamnya aksi penentangan terhadap kepemimpinan perempuan salah satu faktor penting adalah peranan Qadli Malikul Adil Abdurrauf Singkel, dia menjadi ulama pendukung pengangkatan perempuan setelah Safiatuddin. Abdurrauf seorang ulama yang penuh toleransi, sikapnya yang arif dan bijaksana dan penuh tasamuh, maka pertentangan kelompok wujudiyah dengan para ratu dapat dikendalikan, dia menyertai perjalanan empat orang ratu di kerajaan Aceh. al-Singkili yang santun dan terbuka tidak hanya dikenal di kepulauan Melayu-Indonesia berkat karya-karyanya yang besar, tetapi dikenal di dunia Islam, misalnya Makkah, Mesir, Turki dan Timur tengah, beliau juga dikenal dengan sebutan Syiah Kuala. Demikianlah faktor agama menjadi salah satu sebab perempuan di Aceh dapat menjadi pemimpin selama 59 tahun, karena peran ulama yang mendampingi empat ratu tersebut.

Setelah kurang lebih setengah abad lamanya tidak melakukan aksi, pada masa akhir pemerintahan Kamalatuddin, para ulama bangkit kembali melakukan penentangan terhadap kepemimpinan perempuan. Hal ini dilakukan setelah wafatnya penyangga kuat pemerintahan ratu, Abdurrauf Singkel. Aksi para ulama pada masa itu didukung oleh beberapa komponen kerajaan, seperti kelompok orang Kaya, anggota Majelis Musyawarah Rakyat yang paling penting didukung pengganti Abdurauf Singkel, putra Syarif Makkah yang diangkat sebagai Qadli Malik al-Adil. Kelompok ini menawarkan taktik solusi konflik agar persoalan legalitas kedudukan perempuan sebagai raja sebaiknya diserahkan kepada raja dan ulama Makkah, sebagaimana diungkapkan P.J Veth: *“Akan tetapi, golongan alim ulama tidaklah tinggal diam mereka memperkuat posisi dengan*

*sepucuk surat dari seorang Qadli Malikul Adil di Makkah, yang memuat pemberitahuan kepada kepala-kepala dan rakyat Aceh bahwa penempatan seorang perempuan pada kekuasaan tertinggi bertentangan dengan syariat Islam. Strategi ini berhasil. Akhirnya Kamlatuddin Syah diturunkan dari tahta dan pemerintahan diserahkan kepada Badrullah Syarif Hasyim Jamaluddin. Sesudahnya kendali pemerintahan Aceh tidak pernah lagi berada dalam tangan seorang perempuan”.*²⁷ Demikianlah faktor agama menjadi faktor dominan pada kejatuhan ratu di Kerajaan Aceh.

Abdurrauf Singkel dan Kepmimpinan Perempuan di Aceh

Abdurrauf adalah ulama Aceh yang pernah menjabat sebagai Qadli Malik al-Adil selama empat periode Ratu di Aceh (1661-1693). Pada masa Safiatuddin separuh dari masa pemerintahannya, sedangkan Kamalatuddin hanya pada awal pemerintahannya. Ketika Abdurrauf menjadi Qadli pemerintahan ratu tidak diwarnai polemik kepemimpinan perempuan, karena pandangan-pandangan Abdurrauf yang bijak dan santun maka polemik tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan hambanya baik laki-laki maupun perempuan. Demikian Allah tidak akan menunda siksaan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan laki-laki maupun perempuan.²⁸ Abdurrauf juga tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu antar laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, agar mampu melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban yang telah dibebankan oleh Islam kepada keduanya bersama-sama.

Beberapa peran politik Abdurrauf yang ada relevansinya dengan bidang keagamaan, karena beliau lambang agama selama pemerintahan ratu di Aceh:

²⁷ Rusdi Sufi ‘Ratu Nurul Alam, Inayat Syah.....hal 75

²⁸ Abdurrauf ibn ‘Ali al"Fansuri al"Jawi, Tarjuman al"Mustafid. Eirut : Dar al Ma’arif. Hal 77

1. *Melegitimasi Kepemimpinan Para Ratu*

Secara defacto Abdurrauf tidak mempermasalahkan jabatan kepala negara dipegang oleh perempuan karena berdasarkan sejarah sosial masyarakat Aceh, terutama sejarah sosial kaum perempuannya, perempuan Aceh memang layak itu.²⁹ Di samping itu, dalam menjalankan pemerintahan, para ratu didampingi oleh laki-laki melalui berbagai lembaga. Abdurrauf memperbolehkan perempuan Aceh menjadi penguasa karena alasan kondisional. Artinya karena kondisi kerajaan, baik ditinjau dari segi politik maupun sejarah sosial masyarakatnya, perempuan-perempuan Aceh diperbolehkan menjadi penguasa. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziat, bahwa manusia berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan adat dan niat. Faktor sosial merupakan salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian dalam menghasilkan suatu kebijakan atau produk hukum. Dan sikap Abdurrauf terhadap kepemimpinan para perempuan di Aceh mencerminkan bahwa dia ulama yang memiliki pemahaman moderat dan akomodatif.

2. *Rekonsiliasi Tasawuf*

Rekonsiliasi yang dilakukan Abdurrauf terhadap perbedaan Tasawuf, mempunyai arti yang sangat besar dalam menstabilkan kerajaan dari berbagai permasalahan. Abdurrauf telah mengambil beberapa kebijakan dalam menyelesaikan konflik antara pihak Nur al-Din al-Raniri dengan para pengikut paham wujudiah. Ia tidak menyalahkan ajaran dan paham wujudiah yang disampaikan Hamzah Fansuri dan Syamsudin Sumatrani. Ia hanya mengkritik cara menyampaikan ajaran tersebut. Menurut Abdurrauf menyampaikan ajaran tasawuf kepada orang yang tidak mampu mencerna merupakan tindakan yang tidak betul.³⁰

²⁹ Uraian tentang wanita Aceh dalam perspektif sejarah, lihat hal 114-116

³⁰ Oman Fathurahman, Tanbih al"Masyi: Menyoal Wahdat al"Wujud.Bandung : Mizan. Hal 55

Penutup

Kontroversi tentang kepemimpinan perempuan terus bergulir hingga saat ini, hal ini terjadi karena adanya pandangan yang berbeda terhadap masalah perempuan dari sudut agama dan budaya. Pandangan yang pro dan kontra tidak dapat dihindarkan. Kepemimpinan yang bermakna kekuasaan dan politik yang bermakna kekerasan, lebih dikenal menjadi “Dunia laki-laki”, bukan “dunia perempuan”. Secara fisik dan non fisik laki-laki lebih cocok karena memiliki sejumlah sifat maskulin, seperti: keras, tegas, jelas dan lugas. Sedangkan kaum perempuan dilengkapi dengan label feminin; seperti halus, lembut, penurut dan sebagainya. Sehingga budaya kepemimpinan dianggap lebih pantas untuk kaum laki-laki. Fenomena tidak adanya putera mahkota, merupakan faktor utama yang membuka jalan bagi empat ratu di Aceh menduduki posisi pemimpin negara. Bila kita membuka lembaran sejarah maka terjadi juga di negara monarki, tidak adanya putera mahkota menjadi alasan pokok menduduki posisi tersebut. Alasan yang hampir sama dialami beberapa pemimpin perempuan di negara republik, karena mereka istri atau anak dari pimpinan tertinggi di negara tersebut, fenomena itu terjadi sampai hari ini. Kepemimpinan politik perempuan dalam Islam merupakan khilafiyah yang tidak tegas dinyatakan dalam al-Quran maupun Hadits. Hal ini menyebabkan peluang perdebatan muncul dan berkepanjangan. Akhirnya boleh atau tidaknya tergantung arah angin politik yang terjadi pada saat itu. Disamping itu mitos dunia politik “dunia pria” masih mengakar dalam masyarakat. Sehingga perempuan yang ingin terjun ke dunia politik harus berjuang keras melebihi kaum laki-laki, dan perempuan harus berani merebut kesempatan tersebut. Walaupun kita melihat deretan perempuan dalam sejarah maupun pada masa sekarang ini kepemimpinan mereka merupakan hasil dialektika antara agama dan budaya, selain faktor-faktor kemampuan yang mereka miliki dan mampu merebut kesempatan dalam situasi dan kondisi saat itu.



KONSTITUSI UUD NEGARA RI TAHUN 1945 DAN PARTAI POLITIK

Prof. Dr. Dra. Valina Singka Subekti, M.Si.

Pendahuluan

Partai politik merupakan elemen penting dalam demokrasi. Max Weber menyebut partai politik sebagai 'the children of democracy'³¹, dan E.E Schattschneider³² menempatkan partai politik sebagai faktor penting bagi beroperasinya sistem demokrasi. Tanpa partai politik, sistem demokrasi perwakilan yang saat ini dipraktekkan oleh hampir semua negara di dunia tidak akan dapat bekerja. Tulisan ini menguraikan secara singkat kaitan konstitusi UUD Negara RI 1945 dan keberadaan partai politik di Indonesia.

Fungsi partai politik

Partai politik elemen penting demokrasi, dan menjadi syarat hadirnya sebuah negara dengan sistem demokrasi perwakilan. Partai politik dibentuk sebagai sarana warga negara untuk turut serta dalam pengelolaan negara.

³¹ Peter Mair. *The West European Party System*. Oxford University Press, 1990.

³² EE Schanschneider. *Party Government*. New York: Farrar and Reinehart, 1942

Oleh karena itu partai politik mempunyai beberapa fungsi sentral, seperti fungsi komunikasi politik, fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, fungsi manajemen konflik dan fungsi pendidikan politik.³³ Dengan fungsinya tersebut partai politik hadir untuk memperjuangkan aspirasi anggota, konstituen, dan masyarakat agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera. Partai politik menampung, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses perumusan kebijakan publik.

Dalam undang-undang partai politik dikatakan, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Pada konteks pembangunan politik, partai politik mempunyai fungsi penting sebagai alat perekat dan persatuan bangsa. Partai Politik dipandang sebagai lembaga politik yang efektif untuk memperkuat integrasi bangsa. Perannya semakin penting dan strategis dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Melalui fungsi komunikasi politik, partai politik menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya, dan melalui fungsi manajemen konflik dan pendidikan politik partai politik dapat melokalisir potensi konflik dalam masyarakat dan membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Salah satu ciri yang melekat pada partai politik adalah tekadnya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Sigmand Neuman dan Carl

³³ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Gramedia, 2008

Friederich mengatakan, partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan. Partai politik melalui sistem rekrutmen dan kaderisasi mempunyai tugas mencetak kader-kader terbaik bangsa yang memahami visi, misi nilai, dan ideologi kebangsaan Indonesia. Partai politik kemudian menempatkan mereka (kader partai) di lembaga perwakilan (DPR, DPRD) dan lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif) serta lembaga-lembaga negara lainnya.

Dengan cara demikian partai politik melalui kadernya yang duduk di parlemen dan pemerintahan bekerja memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggota dan konstituennya supaya dapat memiliki kehidupan yang baik. Melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting, anggota lembaga perwakilan memperjuangkan pembentukan regulasi undang-undang yang aspiratif.

Pemilu menjadi pintu masuk membentuk parlemen dan pemerintahan yang sesuai kehendak rakyat. Dukungan suara rakyat dalam pemilu diakumulasikan menjadi suara dan kemudian dikonversikan dalam bentuk kursi. Seperti dikatakan Samuel P. Huntington bahwa daya tahan partai politik dalam rangkaian kontestasi elektoral menjadi salah satu indikator penting stabilitas partai. Pada konteks ini, menjadi penting menghasilkan pemilu yang jujur dan demokratis, pemilu yang bersih dan tidak manipulatif sehingga mereka yang terpilih mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya.

Pada konteks politik-historis Indonesia, partai-partai politik sudah tumbuh sejak masa kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional dan alat perjuangan melawan kolonialisme untuk kemerdekaan Indonesia. Partai politik kemudian membentuk sistem kepartaian yang lebih stabil dari segi jumlah maupun ideologi setelah pemilu 1955, dan terus mengalami perkembangan dinamis dari segi jumlah maupun

ideologi pada masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masa orde baru dan masa reformasi demokratisasi 20 tahun belakangan ini.

Apakah UUD Negara RI Tahun 1945 Mengatur Partai Politik?

Seringkali muncul pertanyaan bagaimana konstitusi mengatur mengenai partai politik? Apakah UUD 1945 mengatur mengenai partai politik?

UUD 1945 sebelum diamandemen tidak mengatur secara khusus partai politik. Namun demikian, gerakan reformasi dan demokratisasi di Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 menghendaki terbentuknya sistem politik yang lebih demokratis. Lembaga-lembaga politik seperti partai politik, pemilu dan parlemen dituntut untuk bekerja secara lebih baik. Demikian pula dengan lembaga eksekutif dituntut untuk mampu menciptakan pemerintahan yang bersih yang tidak korup.

Selain menuntut amandemen UUD 1945 dan pengunduran diri Soeharto, gerakan reformasi mahasiswa juga menghendaki ditiadakannya dwifungsi ABRI, penguatan otonomi daerah, dan pemberantasan KKN. Amandemen UUD 1945 ini kemudian menjadi pintu masuk untuk menata kembali distribusi kekuasaan cabang-cabang kekuasaan dengan pendekatan konsep *separation of powers* dan sistem *checks and balances*.

Pimpinan MPR RI kemudian merespon dengan membentuk Panitia Adhoc III di Badan pekerja MPR pada saat dilangsungkan Sidang Umum MPR tahun 1999. Pada saat itu MPR secara politik masih ditempatkan dalam posisi lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi negara MPR mempunyai kewenangan penting antara lain, menetapkan dan mengubah UUD, menyusun GBHN dan memilih presiden dan

wakil presiden serta menerima pertanggungjawaban presiden. Presiden sebagai mandataris MPR bertanggung jawab pada MPR, dan MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden seperti pernah ditunjukkan pada kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2002.

Keanggotaan Panitia Adhoc III yang berjumlah 40 orang mencerminkan kekuatan fraksi-fraksi partai politik dan juga fraksi Utusan Golongan. Utusan daerah pada waktu itu bergabung ke dalam fraksi-fraksi partai politik. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat tahap sebagai sebuah rangkaian yang tidak terputus selama tahun 1999-2002, dan menghasilkan empat tahap Perubahan, yaitu Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat UUD 1945.³⁴

Pasca Perubahan Pertama UUD 1945, berlanjut dengan proses perubahan UUD 1945 tahap kedua. Badan Pekerja MPR membentuk Panitia Adhoc I yang mempunyai tugas melanjutkan pembahasan perubahan UUD 1945. Beberapa isu yang dibahas dalam persidangan di Panitia Adhoc III dilanjutkan pembahasannya di Panitia Adhoc I. Antara lain isu mengenai sistem pemilihan presiden, susunan, kedudukan serta kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintahan daerah, mengenai warga negara, pertahanan dan keamanan negara, serta mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Pandangan mengenai perlunya partai politik diatur dalam konstitusi mulai muncul di Panitia Adhoc I Badan Pekerja MPR pasca Perubahan Kedua UUD 1945. Pada saat itu tahun 2000, Fraksi Utusan Golongan mengusulkan pentingnya sebuah Bab dalam konstitusi yang mengatur mengenai partai

³⁴ Lihat Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Grafindo, 2008

politik.³⁵ Tujuannya supaya partai politik secara konstitusional dilindungi kehadirannya dalam konstitusi dan untuk memastikan partai politik menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Usulan Fraksi Utusan Golongan itu berjudul ‘Partai Politik dan Pemilihan Umum’. Fraksi Utusan Golongan berpendapat partai politik dan pemilihan umum adalah lembaga sentral dalam sebuah sistem demokrasi. Partai politik menjadi ciri sebuah sistem demokrasi perwakilan, sementara pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik menjadi pintu masuk membentuk lembaga perwakilan dan lembaga eksekutif. Fraksi Utusan Golongan berpandangan, partai politik yang mengalami pelemahan selama masa orde baru perlu direvitalisasi sebagai lembaga penyangga utama kedaulatan rakyat.

Namun usulan tersebut tidak memperoleh dukungan dari partai-partai politik. Nampaknya partai-partai politik kurang berminat dirinya diatur secara ketat dalam konstitusi. Mereka berpendapat pengaturannya cukup dalam sebuah regulasi undang-undang sehingga menjadi lebih mudah apabila diperlukan penyesuaian baru. Usulan ini tidak selesai dibahas dalam masa proses Perubahan Kedua UUD 1945, dan kemudian dilanjutkan dalam masa pembahasan Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001.

Sehingga setelah melalui proses pembahasan mendalam kemudian menghasilkan kompromi politik fraksi-fraksi, dan menjadi kesepakatan Panitia Adhoc I. Usulan dari Fraksi Utusan Golongan itu disetujui sebagian oleh fraksi-fraksi di

³⁵ Risalah Rapat Panitia Adhoc Badan Pekerja MPR RI dalam Proses Perubahan UUD 1945. Risalah ini diterbitkan oleh Sekretariat Jendral MPR RI, tahun 2010.

PAH I, yaitu terbatas pada pengaturan mengenai pemilihan umum saja. Hasilnya menjadi sebuah Bab baru dan tertulis sebagai Bab VII B tentang 'Pemilihan Umum' pada Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun 2001.

Meskipun tidak diatur secara khusus dalam sebuah Bab dan atau pasal-pasal dalam UUD 1945, partai politik diberikan tempat yang penting dan strategis oleh konstitusi kita. Hampir semua jabatan publik seperti anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pengisiannya diusulkan oleh partai politik. Ketentuan mengenai hal ini kemudian diatur dalam UU mengenai Pemilu, UU mengenai partai politik. Bahkan dalam UU Pilkada, pencalonan kepala daerah juga diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, meskipun belakangan dimungkinkan adanya calon perseorangan.

Dalam UUD 1945 hasil Perubahan, terdapat enam kali penyebutan frasa 'partai politik' yang tertuang dalam empat ketentuan yang berbeda. Pertama, pada pasal 6A ayat (2) UUD 1945 terkait dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 6A ayat (2) lengkapnya berbunyi: "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Kedua, pada Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 terkait dengan persoalan jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

Ketiga, pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, bunyinya sbb: “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR adalah partai politik”.

Keempat, ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berkaitan dengan pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan kelembagaan partai politik yang lebih rinci kemudian diatur dalam UU mengenai Partai Politik. Dalam UU tersebut antara lain, mengatur bahwa partai politik mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945; partai politik juga harus menjaga dan memelihara keutuhan NKRI; dan partai politik ikut serta dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat; serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana dengan tujuan khusus sebuah partai politik? Partai politik mempunyai tujuan khusus yaitu: meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat; memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jelaslah bahwa meskipun partai politik tidak diatur khusus dalam Bab atau Pasal-Pasal, tetapi konstitusi menempatkan partai politik pada peran-peran strategis dan sangat menentukan keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui sebuah RUU yang usulannya datang dari DPR maupun pemerintah, pembuatannya dilakukan oleh

DPR bersama dengan Pemerintah. DPR diisi oleh kader-kader partai politik, dan pemerintah juga sebagian diisi oleh orang-orang dari partai politik. Semakin jelas betapa strategisnya peran partai politik dalam kepolitikan Indonesia.

Problema Partai Politik di Indonesia

Namun menjadi ironi, justru pada masa reformasi demokrasi kepercayaan masyarakat kepada partai politik semakin menurun. Partai politik dipandang oleh masyarakat hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja. Partai politik dinilai lebih sebagai kendaraan politik elite untuk meraih kekuasaan politik melalui pemilu, dan kemudian melupakan aspirasi pemilihnya pada masa pasca pemilu. Masyarakat melihat tidak terdapat konektivitas antara masa sebelum dan sesudah pemilihan umum. Justru konektivitas masa setelah pemilu adalah masa penting bagi partai politik yang telah mendudukkan kadernya di lembaga parlemen untuk membuat serangkaian kebijakan sesuai dengan janji yang disampaikan pada masa kampanye pemilu. Namun yang berlangsung adalah sebaliknya, partai politik tidak menjadi semakin dekat dengan harapan dan aspirasi masyarakat.

Partai politik di Indonesia semakin jauh dari harapan masyarakat oleh karena antara lain, partai politik semakin didominasi kalangan oligarki³⁶ dan menguatnya virus politik kartel.³⁷ Partai semakin elitis dan disfungsi. Dominasi oligarki dan politik kartel dalam lembaga perwakilan dan

³⁶ Jeffrey A. Winters, “*Oligarchy and Democracy in Indonesia*”, dalam Michelle Ford dan Thomas B. Pepinsky (eds) *Indonesia Special Issue: Wealth, Power and Contemporary Indonesia Politics*, Number 96, October 2013, Cornell University Press, hal. 6

³⁷ Lihat Dodi Ambardi. *Mengungkap Politik kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

pemerintahan menyebabkan proses perumusan kebijakan publik semakin tertutup dan minim partisipasi masyarakat. Mulai dari penyusunan naskah akademik sebuah RUU sampai dengan pembahasan di DPR seringkali tidak transparan dan kurang menyertakan partisipasi publik. Akibatnya beberapa produk UU yang dihasilkan DPR bersama pemerintah tidak aspiratif dan lebih menguntungkan elite (oligarki). Sebagai contoh, revisi UU KPK, UU Omnibus Law, UU Minerba dan bahkan RUU IKN yang pembahasannya hanya 3 minggu saja. Demikian pula RUU Kesehatan yang menyita perhatian masyarakat kesehatan baru saja disahkan oleh DPR bersama pemerintah tanpa mempertimbangkan masukan dari kalangan organisasi profesi kesehatan, LSM dan masyarakat peduli kesehatan.

Dominasi oligarki dan menguatnya virus politik kartel apabila terus berlangsung akan mempertajam konflik kepentingan dan faksionalisasi internal partai. Keadaan ini tentunya dapat melemahkan partai dan semakin memundurkan kualitas demokrasi Indonesia (*democracy regression*).³⁸

Upaya Penguatan Partai Politik

Dengan menempatkan 6 frasa ‘partai politik’ dalam konstitusi dengan berbagai peran strategisnya maka konstitusi sebenarnya telah memperkuat kedudukan partai politik. Pada saat itu eforia reformasi memunculkan semacam harapan tinggi terhadap partai politik untuk dapat benar-benar berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Namun demikian, disain konstitusional mengenai sistem pemilu legislatif, yaitu sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka yang diberlakukan selama pemilu era reformasi telah memberi

³⁸ Mengenai regresi demokrasi lihat tulisan Warbuton (ed). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*. ISEAS Publishing, 2020.

kontribusi pada menguatnya pragmatisme partai politik, dan berdampak pula pada hadirnya kader partai yang semakin pragmatis, serta banyak terlibat dalam politik uang dan politik transaksional.

Selain itu perlu dicatat pula beberapa persoalan besar menghadang partai politik Indonesia saat ini yaitu tentang persoalan ideologi partai yang melemah, sistem rekrutmen dan kaderisasi, persoalan pendanaan partai politik serta budaya politik transaksional. Kita mesti mencari solusi terhadap empat persoalan besar itu supaya partai politik dapat hadir semakin kuat, aspiratif dan semakin sehat. Masa depan Indonesia, antara lain, bergantung pada partai politik yang modern, kuat, sehat dan kredibel.

Daftar Pustaka

- Kuskridho Ambardi. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia, 2009
- Larry Diamond and Richard Gunther (ed). *Political Parties and Democracy*. The John Hopkins University Press, 2001
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Marcus Meitzner. *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. East-West Center, Hawaii, 2005
- Peter Mair (ed). *The West European Party System*. Oxford University Press, 1990
- EE Schansneider. *Party Government*. New York: Farrar and Reinehart, 1942

- Ulla Fiona. *The Institutionalisation of Political Parties in Post Authoritarian Indonesia: From the Grass-Roots Up*. Amsterdam University Press, 2013.
- Richard Katz dan William Crotty. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications, 2006)
- Robert Dhal. *On Democracy*. Yale: Yale University Press, 1998
- Valina Singka Subekti. *Menyusun Konstitusi Transisi:Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945 di MPR RI*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008
- Valina Singka Subekti. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik kekuasaan Elite*. Jakarta: yayasan Obor, 2014
- Valina Singka Subekti. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Obor, 2015
- Warbuton, T.P.E (ed). *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression*. ISEAS Publishing, 2020.



KUALITAS DEMOKRASI: Peran Kunci Perempuan dalam Pengawasan Politik

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.

Pendahuluan

Pemilu adalah sarana utama untuk memastikan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.³⁹ Akan tetapi, berbagai tantangan yang berkaitan dengan pemilu masih menghadang, termasuk isu-isu terkait integritas dan transparansi proses pemilu, serta peran perempuan dalam politik.⁴⁰ Terdapat kebutuhan untuk terus meningkatkan pemilu agar berjalan secara langsung, umum, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁴¹ Sementara itu, peran perempuan dalam politik tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan, meskipun ada kesadaran akan pentingnya kontribusi mereka.⁴² Perlu adanya upaya lebih

³⁹ Tatang Sudrajat, "Netralitas Pns Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 12, no. 3 (2015): 351–70.

⁴⁰ Agus Riswanto, *Melawan Oligarki 2020* (Nas Media Pustaka, 2020).

⁴¹ Loura Hardjaloka and Varida Megawati Simarmata, "E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) e-Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 579–604.

⁴² Angelia E Manembu, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2017); Dessy Artina,

lanjut untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu, pencalonan politik, dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik.

Dalam peran pengawasan pemilu, perempuan dapat berkontribusi untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil. Mereka dapat terlibat dalam pengawasan pemilu, pemantauan pemungutan suara, dan menjaga agar proses pemilu bebas dari pelanggaran.⁴³ Selain itu, perempuan juga dapat aktif sebagai pemimpin politik, legislator, atau pejabat pemerintah. Partisipasi perempuan dalam politik adalah elemen penting dalam mewujudkan representasi yang adil dan merata dalam pembuatan keputusan politik.⁴⁴ Pentingnya perempuan dalam pemilu dan politik tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi juga berlaku secara global. Kesetaraan gender dalam politik adalah aspek penting dari demokrasi yang sehat, yang memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Pengawasan menjadi sangat penting untuk tercapainya negara yang berdaulat, yang di dalamnya ada sikap keadilan dan kejujuran. Jangan sampai pemilu yang dijadikan sebagai wadah “kedaulatan rakyat” menjadi tempat bagi orang-orang yang akan memanfaatkan pemilu ini untuk kepentingan

“Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 123–41.

⁴³ M Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam* (Elex Media Komputindo, 2020); Yakobus Rochard Murafer, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jaya Pura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura,” *Jurnal Politik & Pemerintahan* 2, no. 2 (2018).

⁴⁴ Anis Azdiha, “Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2015 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017).

individu maupun kepentingan kelompok, oleh karena itu harus pengawasan harus ada.⁴⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang peran perempuan dalam pengawasan pemilu dan proses politik, dengan penekanan khusus pada pentingnya kontribusi mereka di kota Manado. Ini mencakup analisis partisipasi perempuan di Kota Manado dalam kegiatan pengawasan pemilu, seperti pengamatan pemungutan suara, pemantauan proses pemilu, dan upaya-upaya konkret yang dilakukan perempuan di Kota Manado untuk mempertahankan integritas pemilu. Tujuannya adalah untuk merinci kontribusi perempuan di Kota Manado dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil, serta untuk mengidentifikasi potensi peran perempuan yang lebih besar dalam pengawasan pemilu dan politik secara keseluruhan di konteks lokal. Penelitian ini juga akan membahas pentingnya kesetaraan gender dalam politik, dengan menyoroti bagaimana partisipasi aktif perempuan di Kota Manado dapat menghasilkan pemilu yang lebih demokratis, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat di kota ini, dan dengan demikian memperkuat kedaulatan rakyat dalam masyarakat Manado.

Partisipatif Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Pengawasan adalah pilar utama dalam menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses demokratis, terutama dalam konteks pemilu.⁴⁶ Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan standar demokratis yang tinggi, mengikuti prinsip-prinsip keadilan, serta memberikan

⁴⁵ Darmawan Harefa and Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan* (Pm Publisher, 2020).

⁴⁶ Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 412–93.

ruang yang adil bagi semua peserta politik. Dalam konteks Pemilu Legislatif 2019, pengawasan menjadi sangat penting karena pemilu ini merupakan fondasi utama bagi sistem demokratis di suatu negara.⁴⁷ Pengawasan membantu mengidentifikasi setiap potensi hambatan atau penyimpangan yang dapat mengganggu proses pemilu. Pengawasan juga berfungsi sebagai alat pengukur kemajuan dan kualitas pemilu, serta memberikan dasar bagi perbaikan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.⁴⁸ Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi pengawasan yang efektif dalam Pemilu Legislatif 2019 adalah langkah yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di negara ini.

Partisipatif Perempuan dalam Pengawasan Pemilu memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Contoh konkret menunjukkan bagaimana perempuan terlibat secara aktif dalam memastikan pemilu berjalan sesuai dengan standar demokratis. Di berbagai tingkat, perempuan menjadi agen perubahan dengan berperan sebagai pengawas pemilu yang mengawasi proses pemungutan suara dan melaporkan pelanggaran, sebagai pendidik pemilih yang memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemilu, dan sebagai aktivis yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selain itu, organisasi perempuan juga memainkan peran penting dalam mendukung partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dan dalam

⁴⁷ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.

⁴⁸ Jaka Abdillah, "Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan Dan Bangkinang Kota)" (Universitas Islam Riau, 2021).

mempromosikan isu-isu kesetaraan gender. Melalui partisipasi mereka yang aktif dan terinformasi, perempuan membantu memastikan bahwa pemilu mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat dan menjaga integritas proses pemilihan umum, yang merupakan fondasi utama bagi sistem demokratis yang sehat.

Pentingnya pengawasan dalam Pemilu Legislatif 2019 tidak dapat dipandang enteng. Pengawasan memiliki kedudukan yang krusial dalam memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan aturan.⁴⁹ Salah satu fungsi utama pengawasan adalah mengidentifikasi hambatan dan masalah yang mungkin muncul selama pemilu, seperti ketidaksesuaian data pemilih atau potensi pelanggaran aturan kampanye.⁵⁰ Dengan pemantauan yang cermat, pengawasan juga memungkinkan kita untuk mengukur perkembangan pemilu, seperti tingkat partisipasi pemilih atau kehadiran di tempat pemungutan suara.⁵¹ Selain itu, pengawasan memainkan peran penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan atau kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu. Ini membantu memastikan bahwa pemilu mencerminkan kehendak rakyat dengan baik dan mengakui tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Selain itu, temuan pengawasan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pemilu dan sistem demokratis secara

⁴⁹ Abhan-Evi Novida Ginting Manik-Fahriza et al., “Perihal Para Penyelenggara Pemilu,” *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 2019.

⁵⁰ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, vol. 1 (UMMPress, 2006).

⁵¹ Murafer, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jaya Pura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura.”

keseluruhan.⁵² Oleh karena itu, pengawasan adalah elemen yang sangat penting dalam menjaga proses pemilu yang demokratis, akuntabel, dan bermartabat.

Tantangan Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam pengawasan pemilu adalah refleksi dari ketidaksetaraan gender yang masih berlangsung dalam berbagai lapisan masyarakat. Walaupun ada kemajuan dalam mengakui peran perempuan dalam proses politik, tetap saja ada berbagai faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dengan tingkat yang sama dengan pria.⁵³ Salah satu tantangan utama adalah stereotip gender yang masih berakar kuat dalam budaya dan norma sosial.⁵⁴ Perempuan sering kali dianggap kurang kompeten atau kurang mampu dalam urusan politik, dan ini menghasilkan penilaian yang merendahkan terhadap kemampuan mereka untuk memainkan peran penting sebagai pengawas pemilu.⁵⁵ Stereotip ini juga dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap peran mereka dalam politik, membuat banyak perempuan merasa ragu untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

⁵² Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019.”

⁵³ Muhammad Fahmi, “Sikap Politik Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76-86 Tentang Ketenagakerjaan” (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017); Murafer, “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jaya Pura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura.”

⁵⁴ Antik Bintari, “Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2021): 13–22.

⁵⁵ Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*.

Selain itu, ketidaksetaraan akses menjadi hambatan nyata dalam upaya perempuan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Akses terbatas ke pendidikan politik, pelatihan teknis, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi pengawas pemilu yang kompeten adalah masalah yang serius. Terkadang, perempuan mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang nyata dalam kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Ancaman dan intimidasi adalah masalah serius yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam pengawasan pemilu.⁵⁶ Mereka sering kali menjadi target ancaman, tekanan, atau bahkan tindakan kekerasan fisik atau verbal. Ancaman ini sering datang dari berbagai pihak yang tidak ingin pengawasan yang ketat atau transparansi dalam proses pemilu. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa terintimidasi atau takut untuk berbicara terbuka tentang pelanggaran atau ketidakadilan yang mereka saksikan selama pemilu.

Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak perempuan memiliki tanggung jawab keluarga dan rumah tangga yang membatasi waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk pengawasan pemilu.⁵⁷ Terlibat dalam pengawasan pemilu sering kali memerlukan komitmen waktu yang substansial dan kadang-kadang memerlukan perjalanan jauh ke lokasi pemungutan suara atau kampanye politik. Hal ini dapat menjadi hambatan nyata bagi perempuan yang juga harus mengurus rumah tangga dan keluarga.

⁵⁶ Bintari, “Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu.”

⁵⁷ Adinda Tenriangke Muchtar et al., “Indonesia Report 2014,” n.d.

Kurangnya representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengawasan pemilu juga adalah masalah yang perlu diatasi. Terkadang, lembaga-lembaga ini memiliki kurangnya perwakilan perempuan, yang menciptakan lingkungan yang kurang inklusif dan mungkin tidak memahami atau mempertimbangkan isu-isu yang memengaruhi perempuan secara khusus.⁵⁸ Kurangnya perwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengawasan pemilu juga dapat menciptakan kesan bahwa perempuan tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses tersebut.⁵⁹

Selain itu, kesulitan dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengawasan pemilu dapat menjadi kendala serius. Informasi yang kurang transparan atau sulit diakses dapat menghambat kemampuan perempuan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana pemilu berlangsung dan mengidentifikasi pelanggaran atau ketidakadilan. Dalam banyak kasus, akses terhadap informasi yang relevan dapat menjadi perbedaan antara pengawasan yang efektif dan tidak efektif. Terakhir, beberapa perempuan mungkin mengalami tanggung jawab ganda. Mereka harus mengurus pekerjaan domestik dan tanggung jawab politik secara bersamaan. Tanggung jawab ini bisa sangat menantang dan melelahkan, dan dapat menghambat partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Kurangnya eksistensi perempuan dalam pengawasan pemilu adalah masalah serius yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor yang mungkin berperan dalam kurangnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu adalah ketiadaan kuota atau regulasi yang mengamanatkan

⁵⁸ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2009).

⁵⁹ Eni Purwati, "Pendidikan Kewargaan Berbasis Masyarakat" (SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu.⁶⁰ Dalam konteks ini, UU No. 15 Tahun 2011 atau peraturan serupa yang mungkin berlaku di negara tertentu memang bisa menjadi faktor yang membatasi keterlibatan perempuan dalam peran pengawasan pemilu. Pentingnya kuota atau regulasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan gender yang sering terjadi dalam arena politik. Kuota tersebut dapat memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berperan dalam pengawasan pemilu, mengingat kontribusi dan perspektif yang berbeda yang dapat mereka bawa.

Selain itu, perlu dipahami bahwa kuota bukanlah satu-satunya solusi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu sangat menonjol. Dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, pandangan tradisional tentang peran gender masih memengaruhi sejauh mana perempuan dapat terlibat dalam proses politik. Budaya patriarki yang masih kuat dan norma-norma sosial yang membatasi perempuan dalam ruang politik sering menjadi hambatan yang signifikan.⁶¹ Tidak hanya itu, kendala ekonomi, seperti kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk terlibat dalam politik, juga menjadi faktor penghambat yang sering kali terabaikan. Untuk itu

⁶⁰ Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.”

⁶¹ Azdiha, “Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2015 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”;

Pamungkas, *Perihal Pemilu*; Abdullah, “Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan Dan Bangkinang Kota).”

penting untuk melihat masalah ini secara holistik. Pemberian pelatihan, advokasi gender, perubahan budaya, dukungan sosial, serta kebijakan yang inklusif, semuanya berperan penting dalam memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dalam pengawasan pemilu dan politik secara keseluruhan.⁶² Pendekatan yang komprehensif ini membuat kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis, yang mewakili seluruh warganya tanpa memandang jenis kelamin.

Kita menghadapi sebuah isu yang kompleks, yakni kurangnya eksistensi perempuan dalam pengawasan pemilu dan partisipasi politik. Salah satu langkah positif yang telah diambil adalah penggunaan kuota atau regulasi yang mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu. Kuota ini bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan gender yang sering terjadi dalam dunia politik. Meskipun kuota ini memiliki peran yang penting, kita harus menyadari bahwa ini hanyalah salah satu bagian dari solusi yang lebih besar.

Selain regulasi dan kuota, perlu diingat bahwa masih ada pandangan tradisional tentang peran gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Budaya patriarki dan norma sosial yang kuat memegang peranan penting dalam menghambat partisipasi perempuan.

Mengatasi tantangan-tantangan ini harus diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Ini mencakup memberikan pelatihan khusus untuk perempuan, mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan politik dan pelatihan teknis, serta memberikan dukungan untuk perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi.⁶³ Selain itu, promosi

⁶² Pamungkas, *Perihal Pemilu*; Muchtar et al., "Indonesia Report 2014."

⁶³ Manik-Fahriza et al., "Perihal Para Penyelenggara Pemilu."

kesetaraan gender dalam seluruh spektrum politik dan masyarakat adalah hal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dan politik secara keseluruhan.⁶⁴ Dengan mengatasi tantangan ini, kita dapat memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu, yang pada gilirannya akan meningkatkan integritas dan transparansi dalam proses pemilu dan demokrasi secara keseluruhan.

Partisipasi Pengawasan Politik Perempuan Kota Manado

Partisipasi politik perempuan di Kota Manado, seperti di banyak tempat di Indonesia, telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Partisipasi politik perempuan adalah kontribusi perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan, termasuk dalam pemilihan umum, pengambilan keputusan politik, dan berbagai aspek kehidupan politik lainnya.

Partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu adalah aspek krusial dari demokrasi yang sehat. Ini melibatkan peran perempuan dalam mengawasi, memantau, dan menilai proses pemilihan umum, serta memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar demokratis yang tinggi. Partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan memberikan bukti konkret bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan sistem politik yang demokratis.⁶⁵

⁶⁴ Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis."

⁶⁵ Pamungkas, *Perihal Pemilu*; Manik-Fahriza et al., "Perihal Para Penyelenggara Pemilu."

Salah satu aspek paling signifikan dari partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu adalah pengenalan perspektif yang beragam dalam proses tersebut. Perempuan sering memiliki pengalaman dan wawasan yang berbeda dalam menilai kebijakan politik dan dampaknya pada masyarakat.⁶⁶ Mereka cenderung lebih peka terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam pengawasan pemilu, perspektif ini sangat berharga karena memastikan bahwa isu-isu penting ini tidak terlupakan dalam perdebatan politik. Perempuan juga membawa kecerdasan emosional yang tinggi dalam konteks pengawasan pemilu.⁶⁷ Mereka memiliki kemampuan untuk meredakan konflik, mengkomunikasikan dengan efektif, dan mempromosikan dialog yang konstruktif. Dalam situasi-situasi tegang atau konfrontasi, kemampuan perempuan untuk menjaga ketenangan dan berpikir rasional dapat menjadi aset berharga dalam memastikan pemilu yang damai dan adil.

Partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu melampaui sekadar menjadi pemantau atau pengawas di tempat pemungutan suara. Mereka dapat terlibat dalam berbagai peran, termasuk pengawasan media, pengawasan kampanye politik, dan pemantauan proses pemungutan suara. Dengan cakupan yang lebih komprehensif, pengawasan pemilu menjadi lebih efektif dalam mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran atau ketidakadilan. Selain manfaat langsung dalam proses pengawasan pemilu, partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu juga memiliki dampak yang lebih luas. Mereka bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda perempuan untuk terlibat dalam politik dan

⁶⁶ Jajang Kurnia, "Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan," 2011.

⁶⁷ Moch Nurhasim, *Distorsi Dan Problematik Pemilu Serentak 2019* (Airlangga University Press, 2020).

pengawasan ke depannya. Dengan melihat perempuan yang aktif dalam pengawasan pemilu, generasi muda dapat terdorong untuk merasa bahwa mereka juga memiliki peran yang penting dalam membentuk masa depan politik negara mereka. Pada tingkat yang lebih besar, partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu membantu mendorong integritas pemilu secara keseluruhan. Mereka berkontribusi pada mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, seperti intimidasi pemilih, penipuan, atau praktik politik yang tidak etis. Hal ini memainkan peran kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat pada proses pemilu dan keputusan politik yang dihasilkan.

Partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dapat diaktifkan apabila melakukan langkah-langkah penting meliputi pelatihan, pendidikan politik, dan pembentukan jaringan yang mendukung perempuan dalam peran ini. Upaya ini harus didukung oleh komitmen pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara ke kesempatan politik dan bahwa suara dan perspektif mereka dihargai dalam proses demokratis. Dengan menjaga partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dan politik secara keseluruhan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

Perempuan memiliki hak istimewa untuk mengukir jejak dalam kancah politik. Hak untuk memberikan suara kepada calon yang dianggap layak merupakan kewenangan yang diberikan secara adil, sejajar dengan pria. Tak hanya itu, perempuan juga memiliki kesempatan emas untuk mewujudkan ambisi politik dengan mencalonkan diri sebagai calon dalam pemilihan. Keterlibatan ini merupakan tonggak penting yang memungkinkan perempuan di Kota Manado untuk turut serta secara aktif dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat. Meski

demikian, perlunya diakui bahwa tingkat partisipasi politik perempuan masih bervariasi di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kota Manado. Faktor budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial menjadi elemen penentu yang memengaruhi kesempatan perempuan untuk ikut serta dalam kancah politik. Namun, semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan telah mendorong perubahan positif menuju inklusi yang lebih besar, di mana suara perempuan semakin didengar dan hak-hak mereka semakin dihormati dalam arena politik yang dinamis.

Padahal jika melihat eksistensi dari perempuan, sudah jelas sangat memberikan kemajuan bagi negara. Misalnya, hasil Pemilu 1999 mencatat bahwa Megawati Soekarnoputri yang seorang perempuan sebagai pemimpin yang paling populer dan sebagai pemimpin di partai PDI-P, mendapat suara terbesar dalam Pemilu. Walaupun begitu, pada tahun ini pencapaian perempuan pada tahun itu sangat minim hanya mencapai angka 9%, sehingga ketika Megawati menjadi Presiden, banyak harapan yang ditumpuhkan kepadanya.⁶⁸ Eksistensi perempuan dalam pembangunan nasional, salah satunya dalam bidang politik sebenarnya sudah diperkuat dengan adanya Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, dimana adanya upaya keadilan kepada perempuan, baik dari segi aspirasi, kebutuhan dan permasalahan-permasalahan perempuan dibidang kehidupan dan pembangunan.

Penguatan ini seharusnya menjadi wadah bagi perempuan untuk berekspresi, salah satunya pengawasan

⁶⁸ Lihat pada Nurmala Afrianti Sahi, Studi Partisipatif Perempuan Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Ilmu administrative (JIA)*, Vol. 8 (1), 2012, 1-8, h. 1

terhadap pelaksanaan Pemilu.⁶⁹ Sekarang ini, di Indonesia hakikat perempuan dan laki-laki itu adalah sama, jadi seharusnya perempuan bisa menunjukkan eksistensinya dalam memberi pengawasan dalam pemilu. Partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu adalah cermin dari kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender.⁷⁰ Sebagai warga negara yang sama-sama memiliki hak politik, perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam memastikan proses pemilu yang adil, bersih, dan transparan. Selain itu, melibatkan perempuan dalam pengawasan pemilu juga dapat menghilangkan stereotip dan norma budaya yang membatasi peran mereka dalam politik.

Kota Manado, dengan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki selisih yang tidak berbeda jauh, mencerminkan keragaman dan kesetaraan gender dalam komposisi penduduknya. Pada tahun 2016, angka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dan peran perempuan dalam masyarakat kota ini memiliki dasar yang kuat. Majunya teknologi dan kemajuan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTek) telah memberikan dampak besar pada dinamika peran perempuan. Perubahan ini mencakup berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Dalam era digital ini, perempuan di Kota Manado memiliki akses yang lebih besar ke informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam politik, memajukan karir mereka, dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat. Perubahan ini menciptakan peluang baru bagi perempuan untuk

⁶⁹ Sudrajat, “Netralitas Pns Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015”; Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019.”

⁷⁰ Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*.

membentuk masa depan mereka sendiri dan mengambil peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Namun, penting untuk diingat bahwa peran perempuan dalam masyarakat tidak selalu berubah dengan cepat dan sering kali terkendala oleh norma sosial dan budaya yang mungkin masih membatasi aspirasi mereka. Oleh karena itu, dukungan terus-menerus untuk pemahaman kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap diperlukan agar peran mereka dapat berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Dengan begitu, Kota Manado dapat terus menjadi contoh inklusi gender yang sukses dan berkembang dalam era digital ini.

Peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Manado adalah bukti nyata perkembangan positif dalam dinamika politik di wilayah tersebut. Tradisionalnya, politik seringkali didominasi oleh laki-laki, tetapi sekarang ini perempuan dengan tekad dan komitmennya juga aktif terlibat dalam berbagai aspek politik. Contoh dari dominasi perempuan dalam kelompok aktifis mahasiswa seperti KAMII, HMI, dan PMII adalah indikasi kuat bahwa perempuan muda di Kota Manado telah memilih untuk mengambil peran proaktif dalam membentuk opini publik dan berkontribusi pada perubahan sosial. Selain itu, kehadiran perempuan seperti Yessy Momongan, Lanny Anggrainy Ointu, dan Greity Tuturoong dalam lembaga-lembaga penting seperti KPU dan Bawaslu di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dan keinginan untuk berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan politik.

Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Keterlibatan mereka membantu

memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Ini adalah tanda positif bagi Kota Manado, yang menunjukkan semangat inklusi gender dan perkembangan yang menggembirakan dalam memajukan nilai-nilai demokrasi. Semoga partisipasi politik perempuan terus tumbuh dan berkontribusi positif terhadap masa depan yang lebih baik bagi semua warga Kota Manado.

Partisipasi politik yang semakin aktif dari perempuan di Kota Manado adalah cermin dari perubahan positif dalam dinamika sosial dan politik wilayah ini. Munculnya perempuan dalam kelompok aktifis mahasiswa serta kehadiran mereka di lembaga-lembaga penting seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencerminkan semakin kuatnya dorongan perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi gender dan peningkatan kapabilitas perempuan dalam berkontribusi dalam politik. Hal ini juga menggambarkan semakin pentingnya peluang yang sama dalam politik untuk semua warga, tanpa memandang gender. Partisipasi perempuan bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang berinovasi dalam pengambilan keputusan, membawa perspektif yang beragam, dan menciptakan proses politik yang lebih inklusif dan adil. Meskipun tantangan tetap ada, perkembangan ini adalah langkah positif menuju masyarakat yang lebih demokratis dan setara di Kota Manado.

Keterlibatan perempuan dalam politik, baik melalui aktivisme mahasiswa maupun peran dalam lembaga-lembaga pengawasan seperti KPU dan Bawaslu, memiliki dampak positif yang signifikan dalam konteks Kota Manado. Ini berarti perempuan tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga menjadi pengawas aktif dan pengambil keputusan politik. Peran perempuan dalam berbagai kelompok mahasiswa

menghadirkan perspektif yang khas dalam perdebatan politik, yang berkontribusi pada keberagaman pandangan dan solusi atas berbagai isu. Selain itu, keberadaan perempuan dalam lembaga-lembaga pengawasan penting seperti KPU dan Bawaslu dapat meningkatkan integritas dan transparansi proses pemilu, yang merupakan fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Namun, untuk menjaga momentum positif ini, ada tantangan yang harus diatasi, seperti perluasan kesempatan politik yang lebih adil, penghilangan stereotip gender, dan pendudukan yang berkelanjutan untuk perempuan yang terlibat dalam politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan bukan hanya tanggung jawab perempuan sendiri, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi dalam politik. Dengan menjaga peran aktif perempuan dalam politik dan terus memperjuangkan hak-hak mereka, Kota Manado dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih besar dan sistem politik yang lebih demokratis.

Partisipasi politik perempuan di Kota Manado memiliki kaitan erat dengan peran organisasi sosial dan keagamaan seperti Majelis Ta'lim dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia Sulut (PWKI Sulut). Majelis Ta'lim, sebagai forum pendidikan keagamaan, memberikan perempuan kesempatan untuk mendalami nilai-nilai moral, etika, dan kewarganegaraan yang penting dalam konteks politik. Diskusi di dalam Majelis Ta'lim juga memungkinkan perempuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi masyarakat mereka, membantu mereka menjadi warga negara yang lebih sadar.

Sementara itu, PWKI Sulut adalah wadah di mana perempuan Kristen dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Organisasi ini memberikan pelatihan, dukungan, dan jaringan yang memungkinkan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik. PWKI Sulut juga menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kepemimpinan mereka dalam lingkup politik.

Kaitan ini mencerminkan pentingnya organisasi organisasi sosial dan keagamaan dalam memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Manado memadukan nilai-nilai agama dan sosial dengan peran politik mereka, memperkuat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik. Keberadaan Majelis Ta'lim dan PWKI Sulut menggambarkan semakin meluasnya kesadaran akan pentingnya partisipasi perempuan dalam masyarakat dan politik, serta upaya untuk mendorong perempuan agar lebih aktif dalam peran politik mereka.

Bawaslu memainkan peran penting dalam menjaga integritas pemilu dan mengawasi pelaksanaannya. Dengan keterlibatan perempuan dalam Bawaslu, pengawasan pemilu menjadi lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu yang memengaruhi perempuan sebagai pemilih dan calon. Ini menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih akuntabel dan beragam.

Kerjasama antara organisasi keagamaan dan sosial seperti Majelis Ta'lim dan PWKI Sulut dengan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga integritas pemilu dan memperkuat peran perempuan dalam politik. Hal ini adalah contoh konkret dari

bagaimana berbagai pihak dapat bekerja sama untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mendukung integritas demokrasi dalam konteks pemilihan umum di Kota Manado.

Ada baiknya BAWASLU yang ada di Kota Manado sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi Pemilu yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini, bisa merangkul organisasi yang melibatkan perempuan, apakah itu, Majelis ta'lim dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia Sulut (PWKI Sulut) serta beberapa organisasi lainnya pun harus dirangkul, karena perempuan juga memiliki eksistensi dalam membangun negara ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin dan perempuan juga bisa memberikan harapan kemajuan bagi negara yang kita cintai ini.

Kesimpulan

Peran perempuan dalam pengawasan politik memiliki urgensi yang tak terbantahkan. Dengan melibatkan perempuan dalam proses pengawasan politik, kita mendapatkan perspektif yang beragam, peningkatan akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yang lebih efektif. Lebih dari itu, keterlibatan perempuan dalam pengawasan politik adalah bentuk pemberdayaan yang kuat, memungkinkan mereka untuk merumuskan dan memengaruhi kebijakan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam, peran perempuan dalam pengawasan politik bukan hanya tentang kesetaraan gender, tetapi juga tentang kualitas dan keberlanjutan pengambilan keputusan politik. Dengan menghargai, mendukung, dan mempromosikan peran perempuan dalam pengawasan politik, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Jaka. “Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Gunung Sahilan Dan Bangkinang Kota).” Universitas Islam Riau, 2021.
- Afifuddin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Artina, Dessy. “Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 123–41.
- Azdiha, Anis. “Wajah Politik Perempuan: Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2015 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (2017).
- Bintari, Antik. “Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2021): 13–22.
- Fahmi, Muhammad. “Sikap Politik Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76-86 Tentang Ketenagakerjaan.” Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hardjaloka, Loura, and Varida Megawati Simarmata. “E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyong-song) e-Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 579–604.
- Harefa, Darmawan, and Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan*. Pm Publisher, 2020.
- Kurnia, Jajang. “Peran Pimpinan Pusat Aisyiyah Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan,” 2011.
- Manembu, Angelia E. “Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).”

- Politico: Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 1 (2017).
- Manik-Fahriza, Abhan-Evi Novida Ginting, Harlitus Berniawan Telaumbanua, Ida Budhiati-Nur Elya Anggraini-Nur, Hidayat Sardini-Roy Salam, and Sri Wahyu Ananingsih-Yulianto-Wasikin Marzuki. “Perihal Para Penyelenggara Pemilu.” *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 2019.
- Marzuki, Suparman. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang De-mokratis.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 412–93.
- Muchtar, Adinda Tenriangke, Akbar Nikmatullah Dachlan, Annas Syaroni, Arfianto Purbolak-sono, Asrul Ibrahim Nur, Lola Amelia, and Santi Rosita Devi. “Indonesia Report 2014,” n.d.
- Murafer, Yakobus Rochard. “Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jaya Pura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura.” *Jurnal Politik & Pemerintahan* 2, no. 2 (2018).
- Nurhasim, Moch. *Distorsi Dan Problematik Pemilu Serentak 2019*. Airlangga University Press, 2020.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2009.
- Purwati, Eni. “Pendidikan Kewargaan Berbasis Masyarakat.” SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Vol. 1. UMMPress, 2006.
- Riswanto, Agus. *Melawan Oligarki 2020*. Nas Media Pustaka, 2020.
- Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.
- Sudrajat, Tatang. “Netralitas Pns Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 12, no. 3 (2015): 351–70.



KEUMALAHAYATI, SAFIA DAN PERJUMPAAN MALAM ITU DENGAN KARTINI

Dr. Helvy Tiana Rosa, S.S., M.Hum.

KEUMALAHAYATI

Aku perempuan badai
tubuhku adalah senjata
laut merah biru
yang memburumu

Aku perempuan badai
tentara terbaik Mahad Baitul Maqdis,
komandan utama pasukan istana
suamiku mati, anak-anakku terbunuh,
tapi air mataku cuma sunyi

Maka seratus kapal lepas dari rahimku
berlayar membawa seribu janda
seribu gadis pemberani.
jiwa-jiwa merah sagaku bertarung
ditempat paling karib itu; samudra

Aku perempuan badai
Gerard de Roy, James Lancaster kusiasati
di meja perundingan
Alfonso de Castro dan pasukannya
kuperangi hingga terbirit
Cornelis de Houtman kuhunus sendiri
di atas kapalnya
Aku yang membangun benteng Inong Balee,
seratus meter dari permukaan laut,
lubang-lubang meriam dengan moncong siaga
ke pintu teluk
Akulah yang melepas Dharmawangsa
dari penjara hingga berjaya
menjelma Sultan Iskandar Muda
yang paling raja di Darussalam

Aku perempuan badai sahabat laut
meski sejarah napasku lara,
aku tak sudi menangis
di hadapan manusia

Aku perempuan badai
tubuhku adalah senjata
laut merah biru yang memburumu
sampai jauh, sampai haru

SAFIA

Aku bukan ratu, aku raja
yang berpolitik lewat geliat sajak
dan cerita para sahaya
kepedulian yang tak pernah selesai

karena cinta mereka tak terhingga
tiga puluh lima tahun aku memerintah
padahal para petinggi mengira
aku tak akan pernah setara pria
dan Darussalam Jaya tak akan niscaya

Akulah sultan yang dipanggil Sultanah
Safia yang tak kenal selesa masa
setia menyelusuri tiap jejak
memungut tiap perih
yang ditinggalkan rakyat
di beranda hari
Aku berjalan tanpa pengawal
ke tiap lembah
sebagai perempuan biasa

kubuka pintu-pintu peradaban
kutitahkan Nurrudin ar-Raniri, Abdul Rauf Singkel,
para ulama, untuk menulis cahaya
kukirim para tokoh muda sekolah
hingga Makkah Madinah
Ilmu di pikiran di sanubari ditulis
jadi kitab jadi nadi umat
perpustakaan negeri adalah firdaus
bagi kanak-kanak hingga para tetua

Pada masaku diumumkan 40 Qanun
undang-undang kerajaan tentang keberadaan
dan jumlah perempuan di parlemen
sedang pasukan khusus wanita kami
salah satu yang tercakup di dunia
Penuh izzah kami tetapkan aturan berniaga
dengan Inggris, Portugis, Belanda dan lainnya
Pada masa itu, tak satu pun dari rakyatku
yang sudi mendapat zakat
sebab harta, ilmu dan cinta
berlimpah ruah di lumbung kami
Maka zakat dan sedekah kami
sampai hingga Makkah
dibawa ulama mereka Yusuf Al Qadri

Aku Safiatuddin Syah Tajul Alam
Putri Sultan Iskandar Muda
mereka memanggilkmu kemurnian iman,
mahkota dunia

ku bukan ratu, aku raja
yang berpolitik lewat geliat sajak
dan cerita para sahaya
kepedulian yang tak pernah selesai
mengalir sampai kepala dan hati
ke denyut-denyut zamanmu.

PERJUMPAAN MALAM ITU DENGAN KARTINI

Ibu

Fotomu telah berulang kali dicetak untuk dipajang di pigura
zaman negeri ini
Sejak Snouck Hugronje, Abendanon dan Estelle dari negeri
merah putih biru
berilusi tentang gelap yang jadi terang, kami digiring percaya
hingga ujung-ujung kebayamu

Maka setiap tiba pada hari itu, kami diingatkan
untuk berdiri tinggi di atas tebing hidup
atas nama emansipasi
dan segala bentuk perjuangan sebagai gadis,
istri, ibu, sebagai manusia
Meski kadang kami tak mampu mengeja makna
bahkan kerap
membolak baliknya semau kami,
kami katakan itu mimpimu
dan kami rayakan atas namamu, ibu
Sebab selalu habis gelap terbitlah terang

Malam merayap sampai ke ubun-ubun hari
bulan pucat mengantar bayanganmu di beranda
Angin beringsut perlahan, sepi suara serangga
Seperti perih yang terlempar kembali ke abad lalu,
tiba-tiba kudengar lirih tangismu
di antara alunan gending yang gigil
Lalu sejumlah tanya mencabik,
bergema menyelusup ke sumsum masa

Kau bilang ada tangan-tangan yang mencipta
sosokmu sebagai ibu kami
dan itu bukan tangan pertiwi

Malam itu dalam gelap bibirmu mengucapkan nama-nama.
Angin menuntun tangan putihmu
menulis para puan pemahat matari sejati
yang tak pernah bisa sungguh-sungguh
disembunyikan musim
:Safiatuddin Syah Tajul Alam, Keumalahayati,
Cut Nyak Dhien,
Rohana Kudus, Christina Martha Tiahahu, Rasuna Said, Siti
Aisyah We Tenriolle
dan ribuan perempuan lain.
: "Mereka yang paling sejarah!" katamu.
"Tidakkah kalian bisa menyaksi?"

Lalu kau hampiri aku yang termangu,
pias dan menggigil.
Dengan tangan gemetar kau serahkan penamu padaku.
"Tuliskan ribuan nama lain!" isakmu.
Aku ingin mengucapkan sesuatu
atas hormatku padamu, Ibu,
tapi suaraku hilang dihisap malam.

Dan pena itu meliuk sendiri di udara,
menuliskan lagi nama-nama
di atas pulau-pulau negeri, menjelma kembang api
dan lempengan cahaya paling kemilau:
para puan pemahat matari,
yang tak pernah bisa sungguh-sungguh
disembunyikan musim
:Safiatuddin Syah Tajul Alam, Keumalahayati,

Cut Nyak Dhien, Rohana Kudus,
Christina Martha Tiahahu, Rasuna Said,
Siti Aisyah We Tenriolle dan ribuan perempuan lain.

Lalu sayup kudengar lagi suaramu
dibawa angin sampai jauh
: aku adalah hanya, tercipta dari surat-surat lara
yang paling entah
aku lahir dari sejarah yang dikebiri

Malam itu aku tersedak,
bahkan tak bisa mengucapkan resah
yang berlarian melintasi tingkap jendela
Kupeluk fotomu sambil terus menulis tak terhingga nama
yang kutanam kembali di nadi
dan belantara benak zaman
:Ibu!



BIODATA PENULIS



Dr. ROMLAH ABUBAKAR ASKAR, M.A., dilahirka di Jakarta, 10 Februari 1966. Pendidikan formal dan informalnya ia tempuh di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami. S1 Kuliyah Banat dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar Kairo, S2 Tafsir dan Hadith Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Internasional

Islamabad Pakistan dan S3 Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadith Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Saat ini aktivitas hariannya ialah sebagai Dosen di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Beliau aktif juga sebagai penceramah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Masjid Imanuddin dan beberapa Majelis Taklim.



Prof. Dr. NURHAYATI DJAMAS, M.A., M.Si., adalah seorang aktivis perempuan, birokrat dan akademisi. Lahir di Padang, Sumatera Barat, menjalani pendidikan di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung , kemudian melanjutkan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1979), Setelah

itu menyelesaikan pendidikan di Cornell University Ithaca, New York, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of

Arts (MA) pada Program Asian Studies (1991), Nurhayati Djamas kemudian juga mengikuti pendidikan pada program Pascasarjana (S2) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2012), setelah menyelesaikan Program Doktor (S3) Kajian Islam bidang Pendidikan Islam pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2005). Nurhayati Djamas sejak muda aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, dimulai dari aktif di HMI dan KOHATI dan aktif sebagai pengurus sejak di tingkat cabang sampai di Pengurus Besar. Pernah menjabat sebagai Sekjen BMOIWI, beberapa periode sebagai salah seorang Ketua BP4 Pusat, aktif di MPP ICMI sejak tahun 2014 sampai sekarang serta aktif jajaran kepengurusan Majelis Nasioal Kahm, pendiri Forum Alumni Kohati pada 12 Desember 1998 dan menjabat sebagai Presidium Forhati Nasional selama 2 Periode dan masih aktif sampai sekarang sebagai Ketua Dewan Pakar Forhati Nasional. Dalam karier sebagai birokrat di lingkungan Kementerian Agama, berbagai posisi dan jabatan tinggi pernah diembannya, yaitu: Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Hubungan Antar Umat Beragama (2006–2013). Sebagai akademisi Nurhayati Djamas pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta/UAI (2008–2009), Dekan fakultas Psikologi UAI 2002–2011, Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Integrasi Nilai-Nilai Islam Lintas Disiplin Ilmu, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), dan sebagai Dosen Senior Fakultas Psikologi dan Pendidikan UAI sampai sekarang. Pada 17 Desember 2013, Nurhayati Djamas dikukuhkan sebagai Profesor Riset Bidang Agama dan Kemasyarakatan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).



Prof. Dr. AMANY LUBIS, LC., M.A. adalah Ketua Umum Majelis Ilmuwan Muslimah yang dikenal dengan Majelis Alimat Indonesia (MAI) untuk dua periode, yakni 2014-2018 dan 2019-2023. Ia juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (2020-2025) dan menjadi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2019-2023). Dia mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Al-Azhar Kairo dan magister serta doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bidang minat utama adalah sejarah dan peradaban Islam, studi Timur Tengah, pemikiran politik Islam. Di luar negeri Dia sebagai pembimbing dan penguji tesis dan disertasi, Anggota Senat Akademik pada Muhammad bin Zayed University for Humanities, Abu Dhabi, Anggota Badan Penasihat Abu Dhabi Peace Forum di Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Karya tulisnya pun banyak di jurnal ilmiah dan buku. Di antara buku terakhirnya adalah Perempuan Bicara dari Dakwah hingga Sosial-Politik (2022) dan Perempuan dan Islam di Indonesia (2022). Artikel di jurnal online “The Strategy of Defence Diplomacy in Achieving National Interests and Maintaining the Sovereignty of the Republic of Indonesia”, 2022.



Hj. Dr. dr. ULLA NUCHRAWATY, M.M., dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan 03 Juni 1954. Ia menyelesaikan S-1 pada tahun 1982 di Fak. Kedokteran Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Sedangkan S-2 diselesaikan tahun 1998 di Magister Management Universitas Indonesia Esa Unggul - Jakarta, DKI Jakarta. Gelar doktor S-3 tahun 2006 pada Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar (UNM) - Makassar, Sulawesi

Selatan. Pernah mengikuti Kursus Singkat Angkatan Lemhannas - RI KSA IX Tahun 2001. Saat ini menjadi Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR-RI, Komisaris TASNIM Group - Jakarta, Komisaris Utama PT. Ganesha Dwipayaya Bhakti - Jakarta dan Direktur Institut Perdamaian Indonesia (IPI). Selain itu, ia juga aktif sebagai Ketua Alisah Khadijah ICMI DKI Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI), dan Anggota Pengurus Majelis Alimat Indonesia (MAI).



Prof. ZAITUNAH SUBHAN, Dilahirkan di Gresik pada 10 Oktober 1950. Saat ini menjadi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jejak pendidikannya dimulai di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (1970), Sarjana Lengkap Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama IAIN Surabaya (1974), Dirasat Ulya (setingkat Magister) Kuliyatul Banaat Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar Kairo (1977), dan Pascasarjana (S3) Program Studi Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1998). Selain itu pernah mengikuti SPIMNAS (Sekolah Pimpinan Nasional) Tingkat I Angkatan I, (DIKLATPIM: Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX) Tahun 2001, PEN (Pengembangan Ekskutf Nasional) Angkatan III (2003), LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) KSA XII (2004), dan DIPLOMA (Wall Street Institute School of English), 2014. Di luar negeri, pernah melakukan lawatan ilmiah di Maroko 2014, London UK 2015, Tokyo Japan 2016, Abu Dhabi Uni Emirat Arab 2017, Teheran Republik Islam Iran 2018, Abu Dhabi Uni Emirat Arab 2019 dan lain sebagainya. Berbagai penghargaan pernah diraihinya, antara lain Women UIN Syarif Hidayatullah Award 2015, Glarification Of Qur'anic Active

Ladies (President Republik Islam Iran) 2016, Satya Lencana Presiden RI 10-20-30 tahun, SPIMNAS Bid.Kepemimpinan 2001, dan Perempuan Indonesia 2004 (Menteri PP). Sedangkan pengalaman di organisasinya antara lain Dewan Pakar Muslimat NU (2016-2021), Dewan Pembina Hidmat MNU (2017-2022), Dewan Penasehat MAI (Majelis Alimat Indonesia): 2019-2023, Tim Ahli BP4 RI: 2019-2024, dan Staf Ahli Menteri KPPA RI 2000-2010.



Dr. IDA ROSYIDAH, M.A., adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dia menamatkan studi S3nya di Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia. Dia memiliki minat yang tinggi pada isu-isu Gender dalam Islam dan isu-isu radikalisme. Ida Rosyidah sering terlibat dalam penelitian di antaranya bersama TIM PPIM yang hasilnya sudah dituliskan dalam bentuk buku antara lain yaitu Homeschooling Menakar Ketahanan dan Kerentanan (2020), Hijrah: Tren Keberagaman Kaum Milenial di Indonesia (2021), Pesantren dan Pandemi Bertahan di Tengah Kerentanan (2022). Selain itu, riset tentang Praktik Keagamaan dan Potensi Intoleransi di Wilayah Perbatasan Negara (2017) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama (Balitbang Kemenag) RI dan penelitian “The Ministry of Religious Affairs/MORA Gender Inclusion Strategy: A Position Paper,” disponsori oleh Learning Assistance Program for Islamic School (LAPIS) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM, 2009). Rosyidah juga berpartisipasi aktif dalam penelitian longitudinal yang diselenggarakan oleh The Australian Demographic Social Research Institute, Australian Nasional University (ADSRI-ANU) dengan Topik The 13 The Greater Jakarta: Transition to Adulthood Study (2013 dan 2018) dan

penelitian Integrating Gender and Reproductive Health Issues in the Indonesian National School Curricula: Challenges for Moslem Societies” (2008). Beberapa karyanya yang telah dipublikasikan di jurnal antara lain Pesantren during the Pandemic: Resilience and Vulnerability (Studia Islamica, 2022), Reproduction Of Unregistered Marriages: Religious Power And Resources Limitations (Al-Qalam, 2022) dan Habitus and Cultural Reproduction of Female Circumcision in Muslim Community of Sumenep (Society, 2022).



Prof. Dr. EUIS AMALIA, M.Ag., adalah Guru Besar bidang Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan S1 sampai S3 diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (P2EKS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelumnya adalah Ketua Program Studi Doktor (S3) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (periode 2019-2023). Pernah diamanahi sebagai Wakil Dekan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum (periode 2014-2015) dan (Periode 2015-2019) dan Ketua Program Studi Muamalat S1 (Ekonomi Islam) pada periode 2006-2010 dan periode 2010-2014. Untuk memperkuat kompetensi di bidang Ekonomi Islam sejumlah pendidikan dan pelatihan formal dan sertifikasi telah diikutinya antara lain: mengikuti training Islamic Capital Market (Teheran), Microfinance Syariah, Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah level 1 dan 2, Sertifikasi Manajemen Risiko Madya dan Profesional (CRP), dan memiliki Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah. Ia juga merupakan penggiat ekonomi dan keuangan syariah yaitu sebagai Pengawas Syariah di PT MBK Ventura, PT Jamkrida DKI, PT BPRS Mustindo dan konsultan

syariah PT Amarta Fintek. Di organisasi profesi dan keilmuan ia aktif di berbagai organisasi antara lain: sebagai Ketua Bidang Pendidikan DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), anggota Dewan Pakar DPP MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), Anggota Dewan Pakar Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), anggota Dewan Pakar KAHMI Nasional, Ketua Bidang Ekonomi DPP MAAI (Majelis Alimat Indonesia), Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), Anggota Dewan Pleno DSN (Dewan Syariah Nasional-MUI) dan saat ini juga sebagai Wakil Direktur Direktorat Ekosistem dan Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Propinsi Banten (Periode 2023-2025). Kiprah dan aktifitasnya di bidang Ekonomi Syariah ini semakin memperkuat visinya untuk membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia. Women of the Year Majalah Forum tahun 2021, dan menulis buku-buku tentang SPEI dan lain-lain.



Dr. FEMMY NURUL AKBAR, SPPD-KGEH., dr.

Femmy Nurul Akbar, SpPD-KGEH adalah seorang dosen, peneliti, dan Kepala Bagian Penyakit Dalam di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada periode 2018-2023 menjabat sebagai Ketua Program Studi

Pendidikan Profesi dokter di FK UIN Jakarta. Dokter spesialis Penyakit Dalam dengan subspesialisasi di bidang Gastroenterologi dan Hepatologi (Kelainan Saluran Cerna dan Hati) ini berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Lulus pada Pendidikan Dokter (1998), Spesialis Penyakit Dalam (2006) dan Konsultan Gastroentero-Hepatologi (2009) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Saat ini sedang menjalani pendidikan S3 Ilmu Kedokteran di FKUI.

Selain itu juga aktif di organisasi (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Jakarta, dan Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI), Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia (PGI), Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (PEGI) Jakarta serta anggota bidang kesehatan Majelis Alimat Indonesia.



Prof. Dr. Ir. AIDA VITAYALA S. HUBEIS, adalah Guru Besar Dept SKPM FEMA IPB University. Pernah mendapatkan Penghargaan sebagai World Top 100 Indonesia Scientist & University 2022. Mata Kuliah yang diajar adalah Komunikasi Gender, HRM-MSDM: Desain Organisasi, Etika Bisnis, Falsafah Sains.

Sedangkan Aktivitas Organisasi antara lain Salah satu Pendiri ICMI & Dewan Kehormatan (now), Pendiri: DPKIPB, FORKAPI, APKMJI; PAPPI, Dewan Pakar di; KPPI, MPI, Penasehat Pusat studi di IPB (P2SDM, CARES, PKGA). Dan Dewan Penasehat/ Pengawas; PP WSI, MAI.



IRID RACHMAN AGOES, PH.D., Adalah dosen di Intercultural Relations at Universitas Indonesia (Faculty of School of Strategic and Global Studies, SKSG UI). Pengalaman pendidikannya adalah gelar Ph. D dari College of Arts and Sciences, State University of New York at Buffalo AS, MA dari College of Arts and Sciences State University

of New York at Buffalo AS, dan S1 dari Faculty of Letters, Universitas Indonesia. Ia adalah Executive Chair of Agoes & Agoes Management and Intercultural Consultants, Consulting officials and consultants from governments, international organizations and business corporations from Africa, Asia,

Australia, Canada, Central and South America, New Zealand, USA and Western Europe, dan Working and consulting in Australia, Canada, China, Western Europe, India, Indonesia, Japan, USA, New Zealand and Vietnam. Sebelumnya pernah aktif di AFS Intercultural Programs New York USA, Country Orientation Programme Coordinator CIDA Hull/Ottawa Canada dan The Institute of International Education (IIE) New York NY USA.



Dr. SYIFA FAUZIA, dilahirkan di Jakarta 14 mei 1984. Ia pernah mengenyam pendidikan Bachelor in Film and TV Curtin University Perth Western Australia, Master degree di Public Communication and public relations Westminster University, London, Inggris (Chevening Scholarship), Doktoral di Universitas Negeri Jakarta Ilmu

Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengalaman organisasinya antara lain sebagai Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Direktur Kerjasama dan Representasi Universitas Islam Assyafiiyah, Owner Luberger, Kepala keuangan dan pendidikan Pesantren Khusus Yatim Assyafiiyah, Aktifis Sosial dan Dakwah, serta aktif menjadi Speaker, Host, MC, moderator and freelance presenter. Selain itu juga aktif di Badan Kontak Majelis Taklim, International Muslim Women Union, Hijabers Community, dan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM). Beberapa penghargaan yang pernah diraih antara lain Chevening Scholarship recipients for Master Degree in United Kingdom Courtesy of Foreign Commonwealth Officer, Inspiring Woman Scarf Media bidang Pendidikan, dan Dompot Dhuafa Award (Kategori Dakwah) untuk Hijabers Community



Dr. NURSANITA NASUTION, S.E., AK., M.E., CSRA., lahir di Medan 60 tahun silam, menghabiskan masa kecil di kompleks Caltex / Chevron, Duri, Riau. Melanjutkan sekolah ke SMA Don Bosko Padang, Sumbar. Semasa SMA meraih juara 1 siswa teladan SMA swasta di kota Padang dan meraih Scholastic Award dari PT CPI. Melanjutkan studi ke FEUI pada tahun 1980 program S1 dan S2 bidang manajemen keuangan pada tahun 1989. Melanjutkan program S3 ke UNJ meraih doktor Teknologi Pendidikan pada tahun 2006 dan mendapat gelar doktor ilmu Akuntansi di Univ Brawijaya Malang pada tahun 2018. Mengabdikan di bidang pendidikan sebagai dosen sejak 1986 sd sekarang di berbagai Perguruan Tinggi, STIE Indonesia, STEI SEBI, FEB Univ Pancasila, UIN Jakarta, MTP Univ. Asyafiiyah. Nursanita aktif dalam berbagai organisasi sejak mahasiswa, Kohati PB-HMI, PK, KPPI, KSSI, IMWU, MAI. Menjadi anggota DPR RI pada tahun 2004 di komisi 11. Kembali ke kampus 2010 sd sekarang dan menjadi reviewer beberapa jurnal kampus, Akademika, JEMI, Jakis.



Dr. RETNO LESTARI, M.Si., adalah dosen Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), UI sejak tahun 1999. Beliau lahir di Pontianak pada tahun 1970. Beliau meraih gelar Sarjana Sains di Biologi FMIPA UI pada tahun 1995 dan menyelesaikan program Master di Program Pasca Sarjana ITB pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2016 meraih gelar Doktor (Double-Degree) IPB, Bogor dan SupAgro Montpellier, Prancis. Beliau aktif melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah.



Dr. HANIP PUJIATI, adalah seorang akademisi dan tokoh perempuan yang memiliki peran penting dalam bidang pendidikan dan organisasi di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 4 Mei 1972 di Jepara. Pendidikan formalnya dimulai dengan meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris dari IKIP Semarang pada tahun 1998. Setelah itu, ia melanjutkan studi untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2000, dan kemudian meraih gelar Doktor Pendidikan Bahasa dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2006. Dr. Hanip Pujiati telah mengukir karier yang cemerlang di dunia akademis. Ia telah menjadi dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2001. Sebelumnya, ia juga memiliki pengalaman mengajar di Bina Sarana Informatika Jakarta dari tahun 1999 hingga 2006, serta di Universitas Pakuan Bogor dari tahun 2007 hingga 2015.

Pengalaman mengajar di berbagai institusi ini membantu mengembangkan kemampuan akademisnya serta memberikan wawasan yang luas dalam dunia pendidikan. Selain berfokus pada pendidikan, Dr. Hanip Pujiati juga aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki peran yang signifikan di dalamnya. Ia merupakan anggota Divisi Dakwah Majelis Alimat Indonesia (MAI) sejak tahun 2018 hingga saat ini, menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan agama dan nilai-nilai Islam. Selain itu, ia juga telah mengemban tanggung jawab sebagai Sekretaris Jenderal PP Wanita Islam dalam periode 2016-2021 dan 2021-sekarang, menggambarkan keterlibatannya dalam memajukan peran perempuan dalam konteks agama. Dia juga aktif sebagai pelatih (trainer) khususnya Pelatihan guru-guru (Teacher Profesional development) di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Lembaga Asing yaitu Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Dia

juga aktif sebagai pelatih untuk pemuda baik di dalam maupun di luar negeri. Dia telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai bidang.



Dr. Dra. MARLINDA IRWANTI POERNOMO, S.E., M.Si., adalah Rektor Universitas Sahid Jakarta 2023-2027, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Sahid 2020 - sekarang dan menjadi anggota DPR RI 2014-2019. Putri pertama dari Profesor Bambang Poernomo SH, ini adalah lulusan S1 Universitas Gadjah Mada (Fisipol) dan

Universitas Islam Indonesia (Ekonomi Manajemen), melanjutkan S2 di Universitas Indonesia serta S3 di UIN Jakarta, Dakwah dan Komunikasi Islam. Marlinda juga mengikuti pendidikan Lemhannas PPSA 18, dan beberapa pendidikan Broadcasting di Australian serta kehumasan di Murdoch University Singapore. Beberapa organisasi dipimpin oleh Marlinda, seperti Ketua Umum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Ketua Umum Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, dan menjadi salah satu Ketua di Kongres Wanita Indonesia / KOWANI serta pengurus Internasional Council of Women/ ICW yang berpusat di Paris. Dan Ketua bidang Komunikasi di Majelis Alimat Indonesia/ MAI. Marlinda pernah menjadi ketua PPK, ketua Dekranas Aceh. Beberapa buku sudah ditulis seperti Komunikasi Politik, Buku Teori Komunikasi Organisasi. Manajemen Humas, Metode Penelitian Kualitatif, serta beberapa jurnal ilmiah.



Prof. Dr. Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI, M.Si., Valina Singka Subekti adalah Guru Besar Ilmu Politik FISIP-Universitas Indonesia dan Dosen Tetap Departemen Ilmu Politik FISIP-UI sejak tahun 1987 hingga saat ini. Pernah sebagai Direktur Laboratorium Ilmu Politik FISIP-UI, Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Politik, dan Ketua

Departemen Ilmu Politik.

Valina menjabat Anggota MPR RI 1999-2001, Anggota KPU RI 2001-2007, Anggota Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu 2012-2017, dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI 2014-2019. Juga Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI tahun 2009, dan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI tahun 2014. Selain akademisi, Valina adalah aktivis sejak mahasiswa di organisasi kemahasiswaan Kampus dan Kohati-HMI, wartawan harian Pikiran Rakyat Bandung Perwakilan Jakarta 1982-1987. Pada waktu SMA, terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS (American Field Service) ke Lexington, Massachusetts, 1977-1978. Saat ini aktif sebagai anggota dan pengurus, antara lain, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), American Political Science Association (APSA), Forum Konstitusi, Dewan Eksekutif Kemitraan, Forhati Nasional, BMIWI, MAAI, dan Ketua Umum Wanita Syarikat Islam. Juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Guru Besar FISIP UI dan Anggota Dewan Guru Besar UI. Aktif menulis dan meneliti, narasumber seminar dan workshop terkait demokrasi seperti: persoalan partai politik, pemilu dan parlemen, HAM, serta perempuan dan Politik.



Prof. Dr. Hj. SRI MULYATI, M.A., adalah akademisi dan aktivis sejak muda. Ketika dirinya menjadi mahasiswa, Sri Mulyati cukup aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sri Mulyati pernah mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama dua periode, yakni masa khidmat 1989-2000. Sementara khidmatnya pada ilmu ia curahkan melalui aktivitasnya sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1984. Setelah menyelesaikan studi di jurusan Perbandingan Agama, Sri Mulyati melanjutkan ke program magister dan doktoralnya di Universitas McGill, Kanada. Ia juga menyelesaikan posdoktoralnya di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 2004. Jabatan terakhirnya di PP Muslimat NU adalah sebagai Ketua I. Pada Rabu, 23 Desember 2020, Nyai Hj. Sri Mulyati secara resmi diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu tasawuf di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai A'wan Syuriyah PBNU dalam periode 2015-2021.



Dr. WAHIDAH R. BULAN, M.Si., adalah dosen UPN Veteran Jakarta. Beberapa tulisannya tersebar di berbagai Jurnal, antara lain Transformasi Pernikahan Tidak Tercatat di Perbatasan, Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan?, Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Nunukan: Antara Mengatasi Keterbatasan dan Menjaga Kemaslahatan, Project Citizen, Sebuah Upaya Menjadikan Pengajaran PPKn di Kota Depok Menjadi Lebih Efektif dan Atraktif, The Relation Between Multi Actors and Local Reform in Solo City During Joko Widodo's Leadership Era (2005-2012), Implementation of the Law on Village and Democratization Effort in the Villages,

Transformation of Undocumented Marriages in the Frontier Territory, from Generation One to Generation Three, Local Reform in Solo City on Jokowi's Era (2005-2012): Action Reform of Agent to Face Structural Challenge in Case of Arrangement Street Vencor and Resettlement Banks of the Bengawan Solo.



Dr. R. YANI'AH WARDANI, M.A., lahir di Bandung 20 Oktober 1960. Hidup di lingkungan Pesantren, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) pada Pondok Pesantren “Daarul Hikam” Bandung Selatan, Jawa Barat. Penulis mengabdikan diri di almamater UIN Jakarta sejak tahun 1999 sampai sekarang di tingkat S1, S2, dan S3, pada mata kuliah Bahasa dan sastra Arab serta linguistic Arab, antara lain an nushush al Adabiyah (teks sastra), Dirasah Syi'riyah (Kajian Syair Arab), Dirasah Natsriyah (Kajian puisi Arab), Dirasah Mashrahiyah (Kajian Drama Arab), Ilmu Balaghah (Stailistika Arab), Teori Sastra Banding, Theories and methods of Arabic literature, Ilmu Balghah (ilmu Bayan dan Badi'), Ilmu al Uslub, Stailistika dll. Penulis juga alumni LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan dan Bahasa Arab, tamat thn 1982. Penulis juga terlibat penelitian nasional dan internasional, antara lain di Kyoto University (Jepang), Islamabad University (Pakistan), dan lain-lain. Disamping aktif mengajar di UIN Jakarta, penulis juga aktivis organisasi masyarakat Islam Perempuan “PP Muslimat NU (2000 sampai sekarang), menduduki Ketua di Bidang Hubungan Luar Negeri & Litbang dan di Bidang Pendidikan (sampai sekarang). Selain itu penulis juga aktif di MAI (Majlis Ilmuwan Indonesia) dan di Majlis Ulama di Bidang Dakwah. Aktifitas yang sudah lama dilakukan juga memegang peranan di Pesantren Daarul Hikam Bandung sebagai Dewan Kyai, wakil ketua Yayasan dan Ketua

Majlis Taklim center Pesantren Kecamatan Banjaran Bandung Selatan.



Prof. Dr. KUSTINI, M. Si. adalah Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Prof Dr. Kustini, M. Si. adalah Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Agama dan Kepercayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya adalah peneliti pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dan bergabung ke BRIN sejak 29 Maret 2022. Selain aktif meneliti dan menulis, juga aktif menjadi pengurus di beberapa organisasi sosial keagamaan antara lain: Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga PP Dewan Masjid Indonesia, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Wanita GUPPI, Anggota Bidang Dakwah pada Majelis Alimat Indonesia. Mengikuti Leadership for Senior Multi-faith Women Leaders Short Term Award bulan September di Deakin University Melbourne Australia tahun 2018. Penulis dapat dihubungi melalui email kustinikosasih20@gmail.com.



Hj. SRI HARTI, S.Ag., M.M., Selama periode 2006-2011, Sri Harti menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Islam. Kemudian, dari 2021 hingga 2026, menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pimpinan Pusat Wanita Islam. Sri Harti berdedikasi tinggi dalam memimpin dan berkontribusi untuk kemajuan organisasi Wanita Islam. Meski kini telah berusia 72 tahun, ia terus bersemangat untuk menemani perjuangan Wanita Islam.



Prof. Dr. ROSDALINA BUKIDO, M.Hum., Kelahiran Palu, 24 Maret 1978 adalah aktivis perempuan di Sulawesi Utara. Namanya dikenal sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama. Ia dipercayakan sebagai ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Sulut. Selain aktif di organisasi ia juga sebagai akademisi di IAIN Manado. Saat ini beliau memegang amanah sebagai Dekan Fakultas Syariah.



Dr. HELVY TIANA ROSA, S.S., M.Hum., adalah penulis 80 buku sastra dalam beragam genre. Ia dikenal luas sebagai sastrawan, pencipta lagu, serta produser film dan musik. Sehari-hari ia merupakan Dosen tetap Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Bersama 20 Tokoh Indonesia lainnya, namanya masuk dalam daftar *The World's 500 Most Influential Muslims, 2023*.

